



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 (RKPD)

**Pengembangan Kompetensi SDM,
Pemanfaatan Teknologi dan Infrastruktur Wilayah
yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 263 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD dilaksanakan dan dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD digunakan pula sebagai instrumen evaluasi dan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, RKPD ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Berdasarkan arti penting RKPD tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun RKPD tahun 2020 yang merupakan pelaksanaan tahun kedua pembangunan jangka menengah daerah periode 2019-2023 dengan secara terstruktur. Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diamanatkan bahwa penyusunan RKPD harus mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah pelaksanaan dari tahapan kelima RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2025.

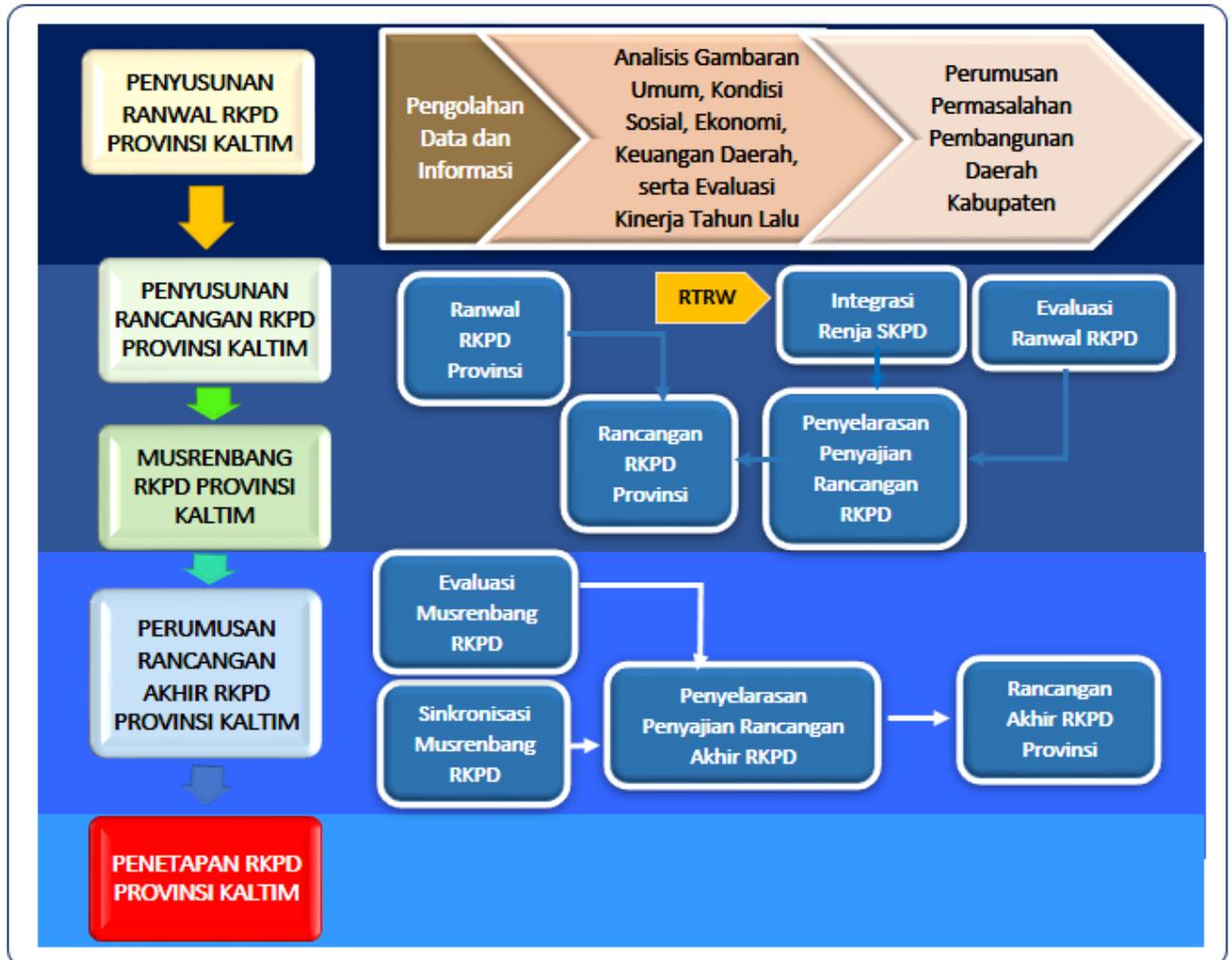
Adapun penyusunan RKPD 2020 dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
3. Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur; dan
6. Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

Tahapan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 tersebut secara runut tergambar pada bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); serta
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

B. Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 518).
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

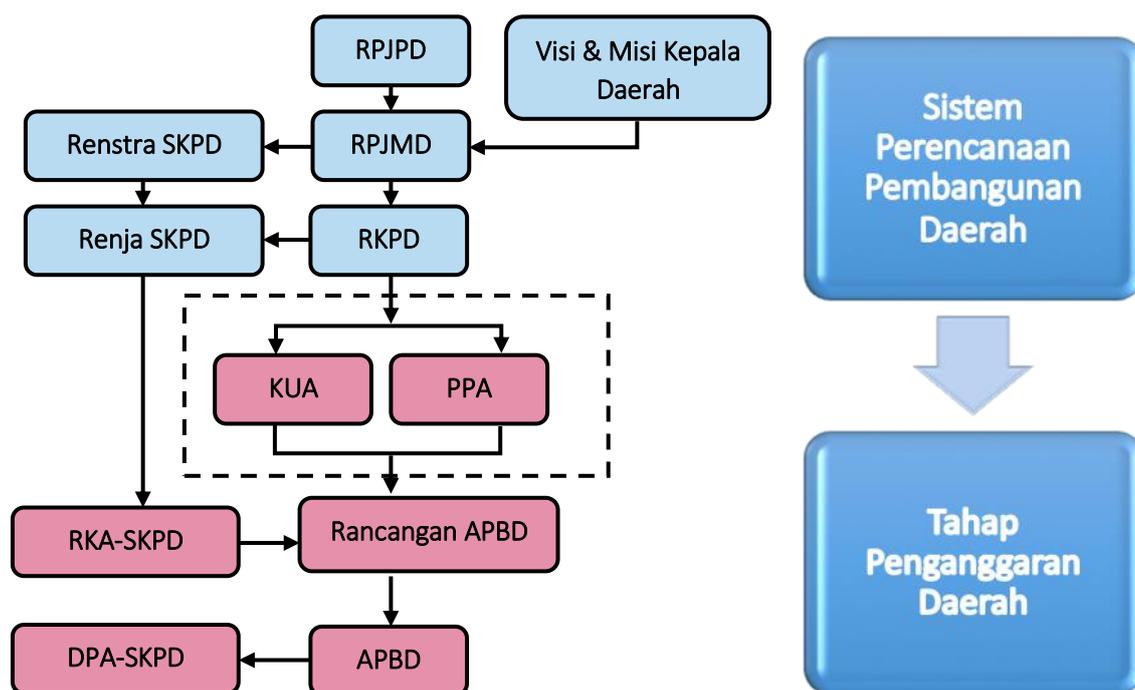
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1); dan

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran terutama RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



Dari gambar 1.2. tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional;

2. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan; serta
3. Merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya dan dokumen lainnya seperti RTRW.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2020. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, yaitu:

- a. Mensinkronisasi dan mensinergikan program pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020;

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah selama ini.

BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi yang nantinya akan menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan rencana kerja yang berisi tentang program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun perencanaan pembangunan (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mengemukakan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII. Penutup

Mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai potensi serta keanekaragaman sumber daya alam, baik terbarukan maupun tak terbarukan, yang dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Kekayaan sumber daya alam yang terkenal adalah sumber daya mineral berupa tambang batubara dan minyak bumi (SDA tak terbarukan). Sedangkan SDA terbarukan yang dapat memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi hijau seperti kelapa sawit, karet, padi, perikanan, peternakan dan pariwisata. Dari sisi letak geografis, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama Kawasan Timur karena letaknya yang cukup strategis di perbatasan Kawasan Tengah dan Kawasan Timur Indonesia.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Disamping itu juga perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, sebagai langkah awal dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019, terlebih dahulu pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah; evaluasi kinerja tahun lalu; dan permasalahan serta isu strategis pembangunan daerah.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

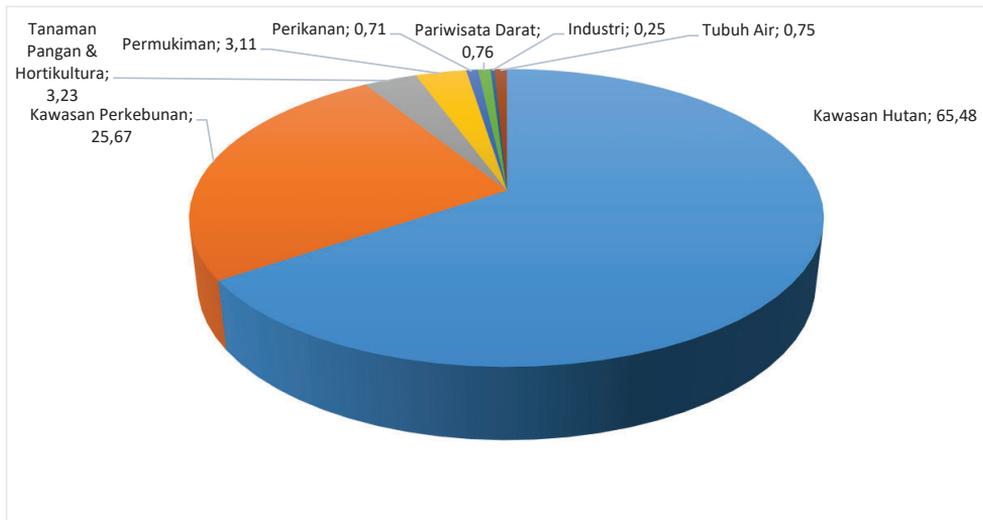
Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 33' Lintang Utara (LU) dan 2° 25' Lintang Selatan (LS), 113° 44' Bujur Timur (BT) dan 119° 00' Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 16.732.065,18 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi

Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.734.692 ha. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2035



Sumber: Perda No. 1 tahun 2016 Tentang Rencana RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2035

Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, sebagian besar luas sumber daya lahan (wilayah daratan) Kalimantan Timur berstatus sebagai Kawasan Hutan dengan luasan mencapai 8.339.155 Ha (65,48%), yang terdiri dari Kawasan Lindung seluas 2.283.360 Ha dan Kawasan Budidaya Hutan seluas 6.055.793 Ha. Sedangkan sisanya seluas 4.395.537 Ha (34,52%), berstatus sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbagi untuk kawasan perkebunan seluas 3.269.560 Ha (25,67%), kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebesar 412.095 Ha (3,23%), kawasan permukiman seluas 396.266 Ha (3,11%), kawasan perikanan seluas 91.547 Ha (0,71%), kawasan pariwisata darat seluas 97.423 Ha (0,76%), kawasan industri seluas 32.887 Ha (0,25%), dan tubuh air seluas 95.758 Ha (0,75%).

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, terluas adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) sebesar

2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25% seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya luas wilayah pada kemiringan diatas 40% (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15% sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai).

Kemudian, dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)*	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1. Paser	1.109.696	10	144
2. Kutai Barat	1.370.992	16	194
3. Mahakam Ulu	1.944.941	5	50
4. Kutai Kartanegara	2.598.808	18	237
5. Kutai Timur	3.105.171	18	141
6. Berau	2.173.519	13	110
7. Penajam Paser Utara	292.373	4	54
8. Balikpapan	51.225	6	34
9. Samarinda	71.653	10	59
10. Bontang	16.314	3	15
Kalimantan Timur	12.734.692	103	1.038

Sumber: Luas Wilayah berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Jumlah kecamatan, desa dan kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2017.

Keterangan: *) Luas wilayah dihitung berdasarkan batas wilayah administratif yang sebagian masih bersifat indikatif

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori sedang. (Ditambahkan kaitannya dengan sektor pertanian dan bencana banjir). Tabel 2.2 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

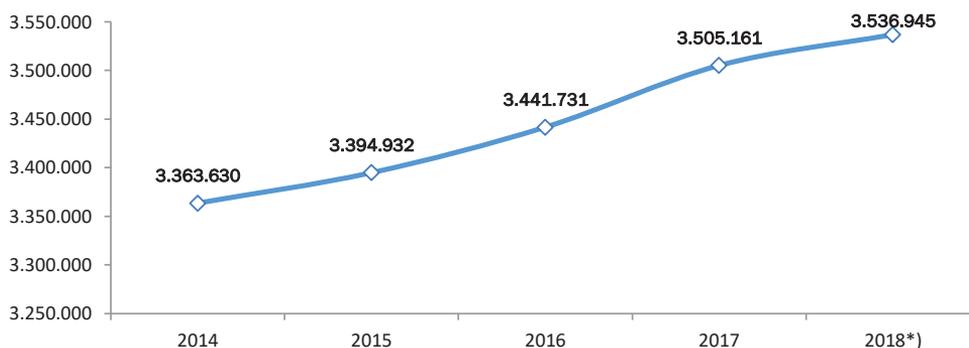
Tabel 2.2
Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balkpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (°C)			
	- Minimum	24,2	24,7	23,3
	- Maksimum	32,9	30,9	32,6
2	Kelembaban (%)	81,0	87,0	87,0
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.012,0	1.010,8	1.012,0
4	Kecepatan Angin (Knot)	4,00	4,00	4,00
5	Curah Hujan (mm)	1.901,5	2.794,2	2.260,0
6	Penyinaran Matahari (%)	43	44	45

Sumber: BMKG Wilayah Kaltim

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2014 sebesar 3.363.630 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.536.945 jiwa pada tahun 2018.

Gambar 2.2
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018



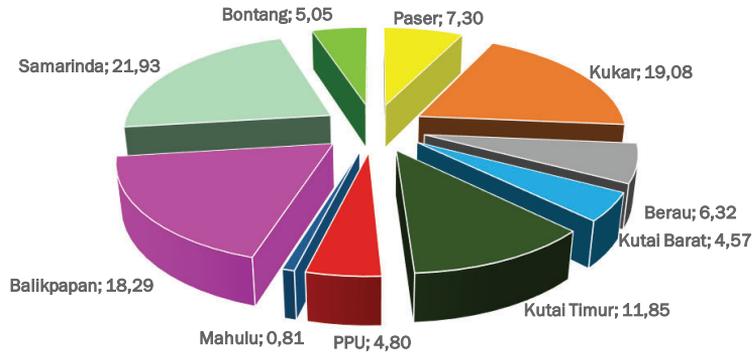
*) Semester I Tahun 2018

Sumber : Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,96 persen. Tidak dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang distribusinya kurang dari lima persen terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara (4,79%), Kabupaten Kutai Barat (4,57%), dan yang paling sedikit jumlah

penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,80%).

Gambar 2.3
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018



Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 mencapai 27,89 jiwa per Km² artinya dalam setiap satu Km² terdapat 27-28 penduduk, dimana menurut Kota Balikpapan sebagai kota yang berpenduduk paling padat, yaitu 1.268,53 jiwa per Km². Penduduk Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh laki-laki dimana sex ratio mencapai 108,3. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 108 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Fenomena ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.3
Luas Wilayah, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

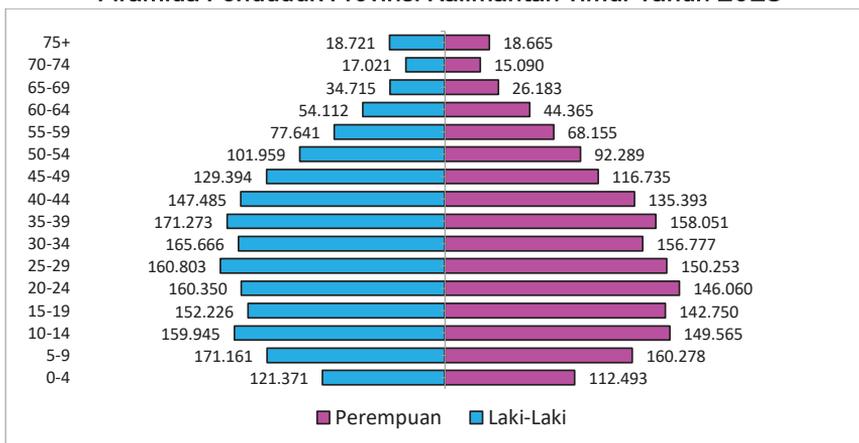
No	Kab/Kota	Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (per Km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk (2017-2018) (%)
		Laki-laki	Perempuan	Total			
1	Paser	134.931	124.486	259.417	108,4	23,38	1,47
2	Kutai Barat	85.092	77.108	162.200	110,4	11,83	1,38
3	Kutai Kartanegara	352.226	325.529	677.755	108,2	26,08	0,44
4	Kutai Timur	227.978	192.782	420.760	118,3	13,55	0,51
5	Berau	119.858	104.796	224.654	114,4	10,34	1,27
6	Penajam Paser Utara	88.506	81.969	170.475	108	58,31	1,47
7	Mahakam Ulu	15.267	13.566	28.883	112,5	1,48	7,03
8	Balikpapan	332.765	317.041	649.806	105	1.268,53	2,62

No	Kab/Kota	Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (per Km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk (2017-2018) (%)
		Laki-laki	Perempuan	Total			
9	Samarinda	397.278	381.605	778.883	104,1	1.087,02	1,20
10	Bontang	93.290	86.118	179.408	108,3	1.099,72	1,64
Kalimantan Timur		1.847.191	1.705.000	3.552.191	108,3	27,89	1,34

Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur. Data sex ratio, kepadatan penduduk, dan laju pertumbuhan penduduk data diolah

Dilihat dari struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun), sebagaimana tampak pada gambar 2.4. Piramida penduduk Provinsi Kalimantan Timur ini mengindikasikan rendahnya tingkat ketergantungan penduduk non produktif (penduduk usia 0-14 tahun dan 65+). Berdasarkan komposisi penduduknya maka piramida penduduk Kalimantan Timur terdefinisi sebagai bentuk piramida penduduk muda atau ekspansif. Pada Piramida Penduduk Ekspansif, suatu wilayah digambarkan memiliki angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah sehingga mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Pada tahun 2018 jumlah penduduk usia non produktif di Kalimantan Timur mengalami penurunan dari sejumlah 1,04 juta jiwa menjadi sebesar 1 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk produktifnya mengalami kenaikan dari sebesar 2,46 juta jiwa menjadi sebesar 2,53 juta jiwa. Bila dilihat dari jenis kelamin, usia produktif di Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh laki-laki sebesar 1,32 juta jiwa bila dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan usia produktif hanya sebesar 1,21 juta jiwa. Dimana keduanya mengalami kenaikan jumlah di tahun 2018.

Gambar 2.4
Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018



Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

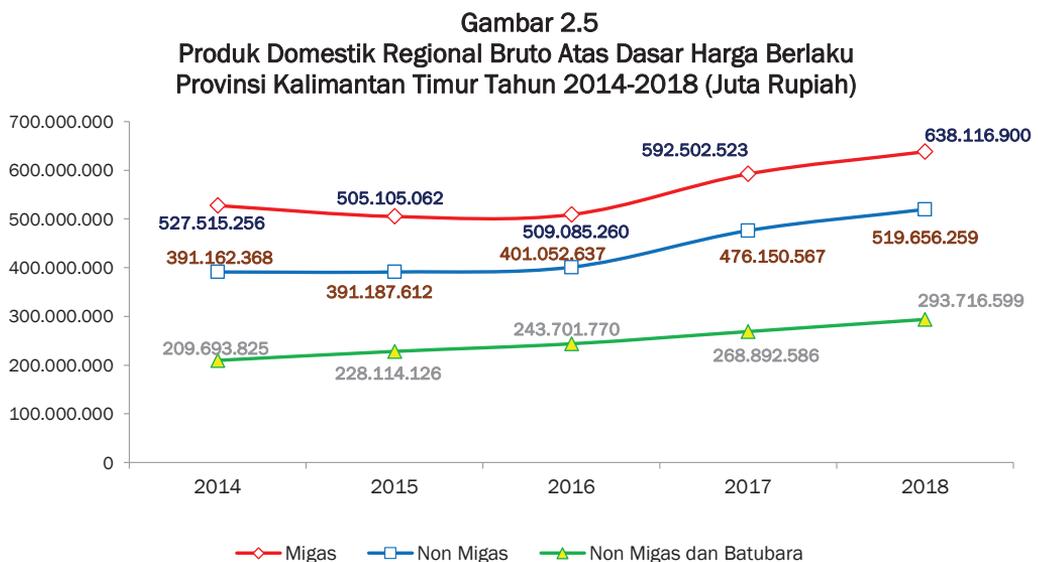
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan besaran output atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau yang dihasilkan akibat berbagai aktivitas ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

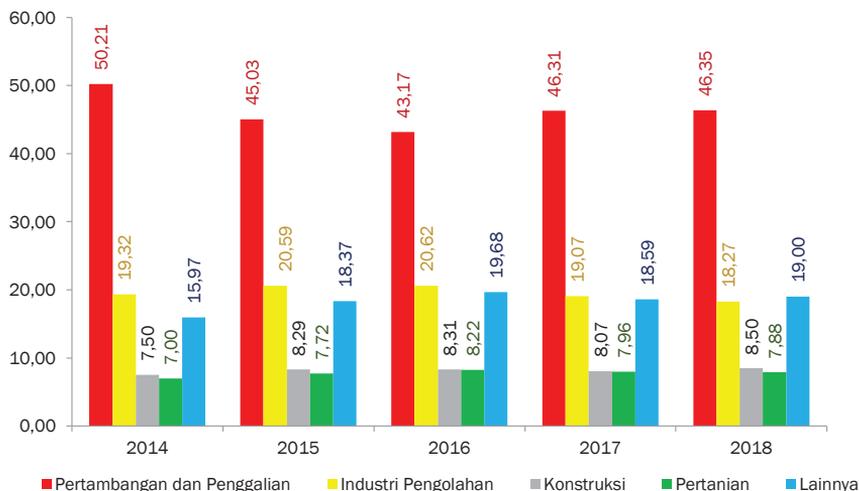


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2019

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian Kalimantan Timur masih dikendalikan oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten menyumbang di atas 40 persen dari total PDRB Kaltim. Besarnya dominasi pertambangan dan penggalian coba disusul oleh lapangan usaha lain

seperti Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 19,57 persen.

Gambar 2.6
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2019

Menyadari bahwa Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan, maka transformasi ekonomi menjadi penting untuk segera diupayakan. Lapangan Usaha yang coba di dorong diantaranya Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas). Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kaltim secara rata-rata dari tahun 2014-2018 sebesar 7,76 persen. Capaian ini tentunya masih sangat kecil. Maka diperlukan dorongan positif untuk melakukan perubahan besar yang diarahkan pada inovasi pengembangan komoditas. Dimana sektor yang dominan menggerakkan lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terutama pada sub perkebunan tahunan, sektor perikanan, dan sektor kehutanan dan penebangan kayu.

Sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan nilai PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun meskipun sempat turun di tahun 2015 namun dapat kembali meningkat ditahun selanjutnya. Komoditas perkebunan tahunan yang dimiliki Provinsi Kaltim diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan lada. Potensi ini perlu mendapatkan perhatian besar untuk memperkuat struktur ekonomi Kaltim di luar migas dan batubara.

Komoditas dalam sektor perikanan dan sektor kehutanan dan penebangan kayu juga berpotensi dalam mendongkrak geliat ekonomi di lapangan usaha pertanian, namun untuk

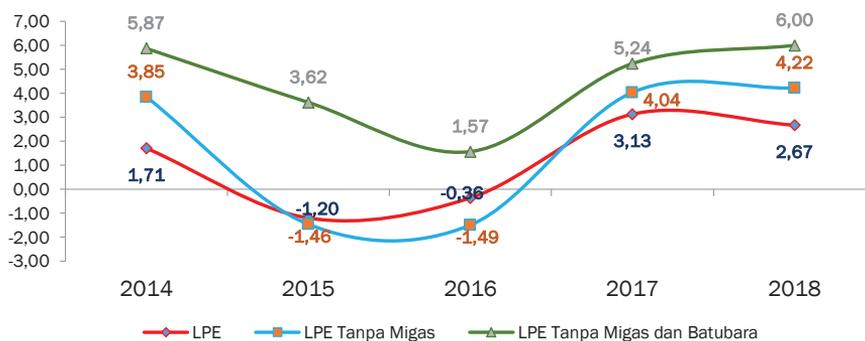
melihat komoditas apa yang perlu dikembangkan dibutuhkan supporting data yang lengkap, akurat dan valid.

Perlu diketahui bahwa share Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih sangat kecil, pada tahun 2018 kontribusinya hanya sebesar 5,59 persen.

Mengingat bahwa pembentukan perekonomian daerah masih didominasi oleh kelompok pertambangan dan penggalian yang mencapai 46,35 persen. Artinya, perekonomian Kaltim sangat bergantung pada sumber daya alam tak terbarui. Jika tidak dibarengi dengan pengelolaan perekonomian secara berkelanjutan, hal ini akan menimbulkan gejala perekonomian di kemudian hari karena tingkat ketergantungan lapangan usaha lainnya juga cukup tinggi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Hal ini mengharuskan kondisi lapangan usaha pertambangan dan batubara harus stabil untuk dapat menjadi batu loncatan bagi pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Konstruksi, dan Perdagangan.

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam selama lima tahun terakhir. Tentunya penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2015, saat perekonomian global dihantam oleh terpukulnya harga mineral dan batubara ke level terendahnya yang berimbas pada perekonomian Kaltim yang sangat bergantung pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kaltim terkoreksi hingga negatif 1,20 persen. Demikian pula pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang turun hingga negatif 1,46 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara tetap tumbuh positif sebesar 3,62 persen, namun melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,87 persen.

Gambar 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2019

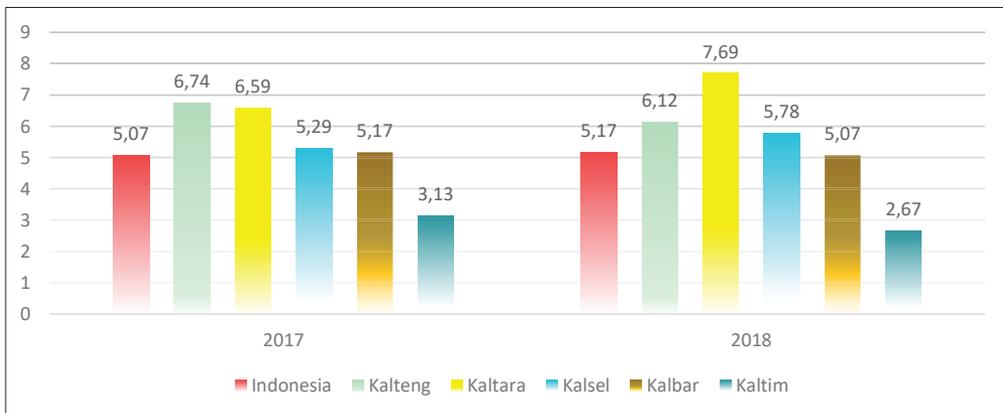
Meskipun harga migas dan batubara pada tahun 2016 mulai membaik, kinerja perekonomian Kalimantan Timur masih belum pulih, meski demikian kontraksi mengecil menjadi sebesar negatif 0,36 persen pada tahun 2016, Namun pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara melambat hanya sebesar 1,57 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi non migas semakin turun menjadi sebesar negatif 1,49 persen. Selanjutnya pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang sempat meningkat tajam di tahun 2017 harus mengalami perlambatan menjadi sebesar 2,67 persen, namun sebaliknya pertumbuhan ekonomi non migas terus melaju menjadi sebesar 4,22 persen, begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara menjadi sebesar 6 persen. Dari gambaran ini terlihat bahwa transformasi ekonomi di Kaltim mulai berjalan, meskipun tidak secepat yang diharapkan. Hal ini perlu mendapat apresiasi dan dukungan agar perekonomian Kaltim lebih stabil dan memiliki ketahanan terutama dalam menghadapi perubahan harga minerba yang sangat dipengaruhi oleh permintaan global.

Capaian laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2018 telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada dokumen Perubahan RPJMD Kalimantan Timur tahun 2013-2018. Dimana target pemerintah provinsi untuk capaian laju pertumbuhan ekonomi berkisar antara $0,5 \pm 1$ persen. Hal ini terutama di dorong oleh masih terjaganya stabilitas harga minerba yang menjadi komoditas utama ekspor (perdagangan luar negeri) Kalimantan Timur.

Memiliki nilai dan share PDRB terbesar di regional Kalimantan, tidak menjamin Kalimantan Timur memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi pula. Justru laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur adalah yang terendah dibandingkan provinsi lainnya. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi tertinggi di Regional Kalimantan dicapai oleh Kalimantan Tengah

sebesar 6,74 persen, disusul Kalimantan Utara sebesar 6,59 persen, Kalimantan Selatan sebesar 5,29 persen, Kalimantan Barat 5,17 persen, dan Kalimantan Timur di urutan terakhir sebesar 3,13 persen. Demikian pula pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur masih berada di urutan terbawah pada Regional Kalimantan. Sementara Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya menjadi yang tertinggi yakni sebesar 7,69 persen. Disusul Kalimantan Tengah sebesar 6,12 persen, Kalimantan Selatan sebesar 5,78 persen, Kalimantan Barat sebesar 5,07 persen. Sementara Kalimantan Timur tertinggal dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,67 persen.

Gambar 2.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan Tahun 2017-2018 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Secara nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur juga di bawah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,07 persen di tahun 2017 dan 5,17 persen di tahun 2018. Bahkan jika dilihat tren di tahun 2018, secara nasional laju pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat 0,10 poin. Sementara Kalimantan Timur laju pertumbuhan ekonominya melambat 0,46 poin.

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi seharusnya menyejahterakan bangsa. Namun, sayangnya hal itu tidak sepenuhnya terjadi untuk kasus Kalimantan Timur dan Indonesia sebab pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dan Indonesia yang positif dinikmati lebih banyak oleh kelompok menengah dan atas. Apabila dikaitkan dengan besarnya *share* Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian di Kalimantan Timur dengan penyerapan tenaga kerjanya, besaran nilai ekonomi yang diciptakan hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat yang bekerja

pada sektor tersebut. Artinya laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas masih belum terealisasi.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,78	4,55	0,46	5,70	6,27
B	Pertambangan dan Penggalian	(0,40)	(4,89)	(3,52)	1,21	1,11
C	Industri Pengolahan	0,45	2,66	5,46	3,47	0,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,24	30,43	8,32	6,78	9,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,55	2,56	6,57	9,05	3,67
F	Konstruksi	6,33	(0,94)	(3,41)	9,89	7,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,13	1,42	2,74	6,53	7,44
H	Transportasi dan Pergudangan	7,26	2,76	3,05	7,08	6,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,65	7,74	6,79	9,17	9,14
J	Informasi dan Komunikasi	8,45	7,66	7,45	8,73	5,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,41	2,05	1,83	(0,61)	4,37
L	<i>Real Estate</i>	8,29	3,59	(0,83)	3,35	4,83
M,N	Jasa Perusahaan	8,29	(3,75)	(4,25)	3,54	4,96
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,29	3,64	(3,25)	(0,23)	2,70
P	Jasa Pendidikan	12,23	9,88	7,33	7,64	7,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,03	10,53	9,31	7,16	8,05
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,38	8,81	9,65	7,98	9,02
Laju Pertumbuhan Ekonomi		1,71	(1,20)	(0,36)	3,13	2,67

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2019

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jika dilihat menurut Lapangan Usaha cukup berfluktuatif. Pada Lapangan Usaha utama, pertumbuhan Pertambangan dan Penggalian selama tahun 2014-2016 mengalami pertumbuhan negatif, bahkan pada tahun 2015 pertumbuhannya turun hingga negatif 4,89 persen akibat anjloknya harga komoditas migas dan batubara yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kaltim. Namun pada tahun 2017 pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami perbaikan menjadi sebesar 1,21 persen seiring dengan mulai membaiknya harga komoditas minerba di pasar internasional. Namun pada tahun 2018 pertumbuhannya kembali melambat menjadi sebesar 1,11 persen.

Sementara itu, Lapangan Usaha yang cenderung menurun pertumbuhannya pada tahun 2014-2018 ditunjukkan oleh Lapangan Usaha Konstruksi, Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi dan Lapangan Usaha Jasa. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat ditunjukkan oleh Lapangan Usaha Pertanian, Lapangan Usaha Perdagangan, dan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum.

Tabel 2.5
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2014-2018

No	Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	80.180.287	86.786.224	91.893.346	97.284.575,47	103.435.770
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.090.681	2.460.192	2.439.025	2.629.573,96	2.973.200
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	23.523.174	25.949.715	24.038.344	20.862.788,97	23.195.230
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	139.830.348	145.766.484	144.794.384	155.808.229,59	173.413.130
5	Perubahan Inventori	12.344.421	5.771.866	1.922.887	1.757.926,22	1.610.950
6	Ekspor Luar Negeri	350.299.172	256.979.357	197.483.435	240.954.920,95	254.778.030
7	Impor Luar Negeri	119.093.437	88.717.186	65.089.941	69.188.554,16	76.397.600
8	Net Ekspor Antar Daerah	38.340.611	70.108.410	111.603.781	142.393.061,94	158.108.190
PDRB		527.515.256	505.105.062	509.085.260	592.502.522,93	638.116.900

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari sisi pengeluaran pada tahun 2014-2018 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Namun dalam perjalanan lima tahun tersebut, terjadi fluktuasi. Terutama pada tahun 2015 nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur turun menjadi Rp 505,11 triliun. Pada tahun tersebut harga migas dan batubara yang menjadi komoditas utama ekspor Kalimantan Timur anjlok sehingga berdampak pada turunnya nilai PDRB Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dari turunnya nilai PDRB Kalimantan Timur pada Komponen Ekspor Luar Negeri, dari sebesar Rp 350,30 milyar pada tahun 2014 menjadi hanya sebesar Rp 256,98 milyar pada tahun 2015. Demikian pula nilai PDRB pada Komponen Impor Luar Negeri turun dari sebesar Rp 119,09 milyar pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp 88,72 milyar pada tahun 2015. Sementara itu, pada tahun 2015 nilai PDRB pada beberapa komponen pengeluaran mengalami peningkatan seperti pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Komponen Pengeluaran LNPRT, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Komponen Net Ekspor Antar Daerah.

Pada tahun 2018, PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan harga migas dan batubara menjadi sebesar Rp 638,12 triliun, dimana sebagian besar komponen pengeluaran mengalami peningkatan kecuali pada Komponen Perubahan Inventori mengalami penurunan. Komponen Net Ekspor Antar Daerah Kaltim dalam lima tahun terakhir secara konsisten menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar Rp 26,96 triliun setiap tahunnya. Hal ini baik dalam rangka penguatan struktur ekonomi Kaltim agar tidak terlalu bergantung pada aktivitas

perdagangan luar negeri terutama dalam menjaga stabilitas perekonomian Kaltim ketika kinerja ekonomi global menurun.

Tabel 2.6
Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

No	Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15,20	17,18	12,79	16,42	16,21
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,40	0,49	21,92	0,44	0,47
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,46	5,14	26,00	3,52	3,63
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,51	28,86	12,79	26,30	27,18
5	Perubahan Inventori	2,34	1,14	21,92	0,30	0,25
6	Net Ekspor Luar Negeri	43,83	33,32	26,00	28,99	27,49
7	Net Ekspor Antar Daerah	7,27	13,88	21,92	24,03	24,78
Total		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014-2018 masih didominasi oleh Komponen Net Ekspor Luar Negeri (Ekspor luar negeri dikurang impor luar negeri), disusul Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Komponen Net Ekspor Antar Daerah, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Jika dilihat pada tabel tersebut, kontribusi Komponen Net Ekspor Luar Negeri pada tahun 2012-2016 terus menurun. Sementara kontribusi Komponen Net Ekspor Antar Daerah terus meningkat dalam kurun waktu yang sama.

PDRB Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan luar negeri yang tercermin dari besarnya kontribusi Komponen Net Ekspor Luar Negeri, dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebesar 92,10 persen adalah ekspor bahan bakar mineral (seperti batubara, minyak bumi dan gas alam). Maka, ketika harga komoditas global sedang berada dalam tren negatif PDRB Kalimantan Timur juga terkena dampaknya seperti yang terjadi pada tahun 2015. Selain itu, pada saat yang sama kuantitas produksi migas dan minerba juga, tergantung pada permintaan pasar. Ketika permintaan pasar sedikit, penerimaan Kalimantan Timur jadi tidak maksimal.

Sementara itu, kontribusi Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga cenderung menurun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan

non makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk pula disini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga. Namun, nilai PDRB pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga meningkat tanpa dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas ekonomi Kalimantan Timur. Sehingga perilaku konsumsi Rumah Tangga dipandang cukup tinggi di tengah situasi ekonomi yang sedang turun.

Perkembangan investasi fisik di Kalimantan Timur dapat diamati dari kontribusi Komponen Pembentuk Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kalimantan Timur. Secara garis besar, kontribusinya semakin meningkat, penurunan kontribusi hanya terjadi di tahun 2016. Adapun kontribusi komponen lainnya masih berada di bawah 5 persen.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

No	Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,63	1,46	0,84	2,54	2,81
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,90	8,30	-4,04	4,89	9,41
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,17	-4,93	-13,44	-15,28	8,21
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,70	-1,47	-6,91	3,01	7,54
5	Perubahan Inventori	29,35	-35,89	-65,19	-15,85	-15,13
6	Ekspor Luar Negeri	-7,71	-16,07	-9,88	2,55	-3,71
7	Impor Luar Negeri	0,63	3,49	-12,70	2,51	9,39
8	Net Ekspor Antar Daerah	1238,31	222,87	34,82	7,57	16,15
PDRB		1,71	-1,20	-0,36	3,13	2,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2016 berkontraksi sebesar negatif 0,36 persen, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan kontraksi pada tahun 2015 sebesar negatif 1,20 %. Tidak dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur berfluktuasi mengikuti tren harga migas dan batubara dipasar global, yang dalam hal ini terlihat pada pertumbuhan Komponen Net Ekspor Luar Negeri yang tumbuh negatif terutama pada tahun 2015.

Perbaikan harga komoditas migas dan batubara di tahun 2016 membawa perbaikan pada komponen ekspor luar negeri, namun justru komponen lainnya melambat dan tumbuh negatif. Meski demikian, pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur secara keseluruhan lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya walaupun masih negatif.

Pada tahun 2018, PDRB Provinsi Kalimantan Timur masih menunjukkan tren positif sebesar 2,67 persen. Menurut pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Komponen Net Ekspor Antar Daerah sebesar 16,15 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRN sebesar 9,41 persen. Komponen Net Ekspor Antar Daerah selalu mencetak nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi dari sisi pengeluaran. Pertumbuhannya juga terjaga di angka positif meskipun ekonomi Kaltim secara keseluruhan sempat terkoreksi negatif di tahun 2015 dan 2016. Tentunya hal ini baik untuk stabilitas perekonomian Kaltim terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap neraca perdagangan luar negeri (Net Ekspor Luar Negeri).

Tabel 2.8
Nilai PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

No	KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016	2017
1	Paser	36.916.267	39.250.901	38.249.407	37.191.462	43.879.541
2	Kutai Barat	21.956.103	21.442.756	21.316.264	21.989.397	25.609.904
3	Kutai Kartanegara	161.634.301	156.723.064	127.897.432	127.831.314	148.336.960
4	Kutai Timur	98.411.527	95.030.362	93.498.672	94.921.969	117.816.986
5	Berau	28.044.279	29.366.863	30.069.865	30.788.945	35.776.099
6	Penajam Paser Utara	6.981.002	7.589.459	7.423.760	7.557.111	8.450.147
7	Mahakam Ulu	1.573.480	1.778.452	1.948.281	2.105.999	2.336.401
8	Balikpapan	64.292.573	71.622.701	74.273.354	79.650.206	86.732.396
9	Samarinda	44.824.302	48.273.715	50.802.369	52.266.340	57.946.612
10	Bontang	56.278.079	59.055.313	58.502.703	53.935.808	58.787.632

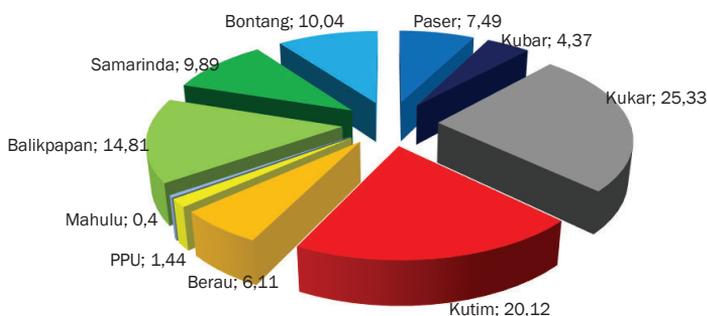
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2013-2017 menunjukkan grafik kenaikan adalah Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda. Sementara itu, nilai PDRB beberapa kabupaten/kota mengalami penurunan terutama pada tahun 2015 yaitu Kota Bontang, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang.

Meskipun pertumbuhan ekonomi beberapa daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2016 mulai membaik, namun masih ada beberapa kabupaten/kota yang nilai PDRB nya menurun antara lain Kota Bontang, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya menunjukkan peningkatan PDRB yakni Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Barat. Sementara itu, pada tahun 2017 kenaikan PDRB terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

Berdasarkan distribusi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017, maka terlihat bahwa kontribusi Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota lainnya yang mencapai 25,33 persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai Timur 20,12 persen, dan Kota Balikpapan sebesar 15,67persen. Selebihnya Kabupaten/Kota lainnya berkontribusi pada PDRB Kalimantan Timur dibawah 14,81 persen. Besarnya peranan ini berasal dari kekayaan SDA khususnya hasil pertambangan minyak dan gas bumi serta batubara.

Gambar 2.9
Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Selanjutnya, Kabupaten Kutai Timur menempati peringkat kedua dengan peranan sebesar 20,12 persen yang dominannya disumbang oleh kinerja pertambangan batubara. Berikutnya Kota Balikpapan yang menempati urutan ketiga dengan peranan sebesar 14,81 persen, sebagai pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak.

Berdasarkan peranan kabupaten/kota menurut lima lapangan usaha utama di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 sebagai berikut:

1. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Pada tahun 2017, kabupaten/Kota yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total nilai tambah Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Kalimantan Timur adalah Kabupaten Kutai Kartanegara (35,69 persen), Kabupaten Kutai Timur (35,33 persen), dan Kabupaten Paser (11,82 persen). Secara umum, peranan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sempat mengalami penurunan terhadap total perekonomian Kalimantan Timur, akibat semakin menurunnya produksi migas dari sumur yang sudah tua serta belum ada penambahan eksploitasi sumur-sumur baru. Selain itu, harga komoditas migas dan batubara yang fluktuatif dan tidak menentu memberikan dampak terhadap semakin melemahnya kinerja lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dalam perekonomian Kalimantan Timur. Namun

peranannya merangkak naik dengan membaiknya harga komoditas mineral dan batu bara pada tahun 2017, meski mengalami sedikit penurunan di tahun 2018.

2. Industri Pengolahan

Secara spasial, kontribusi industri pengolahan di Kalimantan Timur pada tahun 2017 didukung oleh dua kota yaitu Kota Bontang sebesar 44,48 persen, yang mengandalkan industri LNG dan industri pupuk kimia, serta Kota Balikpapan, sebagai pusat industri kilang minyak bumi, dengan besaran peranan mencapai 36,60 persen. Sementara itu, kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan di kabupaten/kota lainnya masih relatif kecil, yaitu berada dibawah 6 persen. Namun jika diamati perkembangannya, terlihat bahwa kontribusi industri di beberapa kabupaten/kota menunjukkan tren meningkat, seperti di kabupaten Kutai Kertanegara, yang mengalami peningkatan kontribusi dari 4,94 persen menjadi 5,53 persen, seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas industri CPO.

3. Konstruksi

Pada tahun 2017, lapangan usaha Konstruksi menyumbang sebesar 8,07 persen terhadap total perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Secara kewilayahan, kontribusi lapangan usaha ini masih didominasi lapangan usaha yang ada di wilayah kota serta wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif banyak. Yang tertinggi adalah Konstruksi yang ada di Kota Balikpapan, memberikan kontribusisebesar 28,17 persen terhadap total nilai tambah Kontruksi Kalimantan Timur. Kemudian diikuti oleh usaha Kontruksi di Kota Samarinda, yang berkontribusi sebesar 25,01 persen, dan Kutai Kertanegara sebesar 23,33 persen. Sedangkan peranan konstruksi di kabupaten/kota lainnya masih relatif kecil atau dibawah tujuh persen.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2017, lapangan usaha Kontruksi menunjukkan pertumbuhan positif. Kondisi ini didorong oleh mulai membaiknya kinerja ekonomi Kalimantan Timur. Pada tahun 2017, laju pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi yang paling tinggi terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 7,91 persen, Kota Samarinda sebesar 7,85 persen dan Kota Bontang sebesar 6,84 persen. Sedangkan laju pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi yang negatif terjadi di Kabupaten Kutai Timur (-4,20%) dan Kabupaten Berau (-3,18%)

4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pada tahun 2017, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi sebesar 7,96 persen terhadap PDRB Kalimantan Timur. Tiga daerah penyumbang terbesar terhadap pembentukan total PDRB lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan adalah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 40,95 persen, Kabupaten Kutai Timur sebesar 19,47 persen, dan Kabupaten Paser sebesar 10,48 persen. Subkategori tanaman perkebunan menjadi penyumbang terbesar terhadap lapangan usaha Pertanian, dengan produk utama berupa kelapa sawit dan produk tersebut cukup dominan di ketiga kabupaten tersebut. Kondisi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan lapangan usaha pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit untuk mulai merubah struktur perekonomian dari yang didukung SDA tak terbarukan menjadi SDA terbarukan.

5. Perdagangan

Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor umumnya identik dengan pusat perdagangan dan niaga yang cenderung terpusat di wilayah perkotaan. Pola umum persebaran usaha tersebut juga terlihat di Kalimantan Timur, dimana lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terkonsentrasi di kota Samarinda dengan distribusi sebesar 28,94 persen terhadap total nilai tambah perdagangan di Kalimantan Timur. Peranan lapangan usaha Perdagangan di Kota Balikpapan juga cukup tinggi dalam menyumbang nilai tambah Perdagangan se-Kalimantan Timur, yaitu mencapai 24,20 persen. Lapangan Usaha Perdagangan di Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan peranan sebesar 17,11 persen terhadap total nilai tambah perdagangan di Kalimantan Timur.

Tabel 2.9
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral Kabupaten/Kota
Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)
Paser	Pertambangan	73,26	Pertanian	11,20	Industri	4,92
Kubar	Pertambangan	50,27	Pertanian	14,61	Konstruksi	11,09
Kukar	Pertambangan	65,43	Pertanian	12,95	Konstruksi	7,50
Kutim	Pertambangan	81,54	Pertanian	7,75	Industri	3,04
Berau	Pertambangan	62,46	Pertanian	11,01	Transportasi	5,62
Penajam PU	Pertambangan	30,56	Pertanian	20,75	Industri	17,08
Mahulu	Pertanian	76,76	Pertambangan	7,56	Konstruksi	5,48
Balikpapan	Industri	46,82	Konstruksi	15,48	Transportasi	12,51
Samarinda	Konstruksi	20,57	Perdagangan	15,42	Pertambangan	14,11
Bontang	Industri	83,95	Konstruksi	4,91	Perdagangan	2,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Pada tahun 2017, terdapat 6 (enam) kabupaten yang menjadikan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor ekonomi andalan. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian sangat

medominasi perekonomian Kutai Timur. Besaran yang diberikan sangat signifikan, hingga mencapai 81,54 persen, dan kegiatan tersebut ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara.

Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 73,26 persen. Sama halnya dengan wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh kegiatan pertambangan batubara. Wilayah lainnya yang juga memiliki kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan peranan yang cukup besar mencapai 65,43 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan pertambangan lainnya.

Tabel 2.10
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)
Paser	Net Ekspor	65,45	PMTB	18,42	K. Ruta	12,51
Kubar	Net Ekspor	40,36	PMTB	35,62	K. Ruta	15,64
Kukar	Net Ekspor	55,19	PMTB	30,77	K. Ruta	11,07
Kutim	Net Ekspor	75,71	PMTB	15,99	K. Ruta	6,08
Berau	Net Ekspor	64,21	PMTB	19,67	K. Ruta	12,09
Penajam PU	K. Ruta	39,96	PMTB	31,82	Net Ekspor	17,35
Mahulu	Net Ekspor	38,73	PMTB	25,64	K. Ruta	22,41
Balikpapan	PMTB	41,54	Net Ekspor	28,00	K. Ruta	26,75
Samarinda	K. Ruta	46,68	PMTB	39,64	K. Pemerintah	11,54
Bontang	Net Ekspor	78,26	PMTB	10,93	K. Ruta	8,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Berdasarkan kelompok pengeluaran pada PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, tujuh kabupaten/kota didominasi oleh Komponen Net Ekspor antara lain Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Bontang. Dua kabupaten/kota lainnya didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga adalah Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Kota Balikpapan didominasi oleh komponen pengeluaran PMTB.

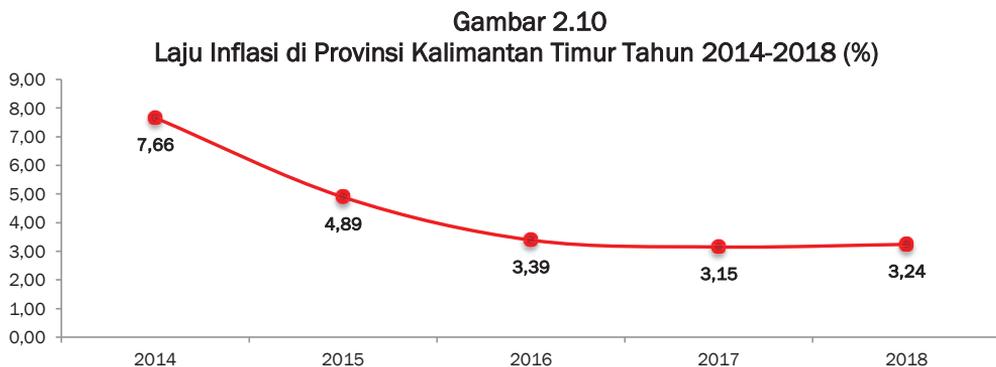
A. Laju Inflasi

Inflasi, dalam ilmu ekonomi, merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus menerus (*continue*). Inflasi merupakan proses dari suatu peristiwa dan bukan tergantung tinggi rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi). Dalam aplikasinya, inflasi

dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Inflasi, terkait dengan mekanisme pasar, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Laju inflasi yang cukup fluktuatif dan tergolong tinggi dalam kegiatan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari tahun ke tahun dimana paling tinggi terjadi pada tahun 2014 (7,66%) dan paling rendah di tahun 2017 (3,15%). Rendahnya laju inflasi pada tahun terakhir ini dipicu oleh beberapa faktor yang menyebabkan kelesuan perekonomian daerah, yaitu: terhambatnya distribusi berbagai komoditas barang dan jasa; kelangkaan beberapa komoditas, baik karena aksi spekulasi/penimbunan barang maupun keterbatasan produksi komoditas tersebut; hingga kebijakan perekonomian nasional yang berdampak pada perekonomian regional.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Pada tahun 2018, inflasi Kalimantan Timur naik tipis menjadi sebesar 3,24 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada Kelompok Transportasi dan Komunikasi sebesar 4,28 persen, disusul Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga sebesar 3,97 persen, Kelompok Bahan Makanan Sebesar 3,31 persen, serta Kelompok Kesehatan sebesar 3,24 persen. Sedangkan inflasi kelompok pengeluaran lainnya berkisar antara 2,64 – 2,78 persen.

Laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur dibentuk oleh dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan (angka yang dihasilkan masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Utara). Berikut inflasi di setiap kota IHK di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Tabel 2.11
Laju Inflasi Menurut Kota IHK Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2014-2018 (persen)

Tahun	Samarinda	Balikpapan	Kalimantan Timur	Nasional
2014	6,74	7,43	7,66	8,36
2015	4,24	6,26	4,89	3,35
2016	2,83	4,13	3,39	3,02
2017	3,69	2,45	3,15	3,61
2018	3,32	3,13	3,24	3,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Kota Samarinda pada tahun 2018 mengalami inflasi lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,32 persen, dan juga lebih tinggi dibandingkan inflasi Kota Balikpapan sebesar 3,13 persen. Menariknya, jika dirinci berdasarkan komoditas barangnya maka Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur sama – sama mengalami deflasi pada sub komoditas ikan segar dan sayur-sayuran.

B. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan juga merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah. Oleh karena itu, tugas utama pemerintah terkait kemiskinan adalah berusaha meminimalisir dan memberdayakan masyarakat sehingga memiliki daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Indikator yang sangat nyata dalam melihat kemiskinan di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan, yang menyatakan persentase penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk di wilayah tersebut.

Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejak tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur sebanyak 324.800 orang (11,04%), tahun 2008 turun menjadi 286.440 orang (9,51%), pada tahun 2009 berjumlah 239.220 (7,73%) dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2018 menjadi 218.900 jiwa (6,03%) meskipun dari sisi jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi akan tetapi dari sisi persentase terus mengalami penurunan.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Selama Maret 2015 – Maret 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 21,32 persen, yaitu dari Rp 473.710,- per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp. 574.704,- per kapita per

bulan pada Maret 2018. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Tabel 2.12
Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur

Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2015	336.356	137.353	473.710	212,89	6,23
Maret 2016	363.918	147.287	511.205	212,92	6,11
Maret 2017	389.152	158.943	548.094	220,17	6,19
Maret 2018	405.108	169.596	574.704	218.900	6,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Komoditi makanan yang mempunyai andil terbesar dalam pembentuk garis kemiskinan makanan di Kalimantan Timur pada bulan Maret 2018 antara daerah perkotaan dan perdesaan terdapat kemiripan pola. Dari enam komoditi penyumbang garis kemiskinan makanan terbesar di pedesaan dan di perkotaan, tiga komoditi terbesarnya terdapat persamaan. Tiga jenis komoditi terbesar yang sama yaitu beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. Berikut adalah jenis komoditi penyusun garis kemiskinan makanan untuk daerah perkotaan secara berturut-turut adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan dan gula pasir. Sedangkan di daerah perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, daging ayam ras. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel Persentase komoditi makanan terhadap garis kemiskinan makanan menurut daerah.

Tabel 2.13
Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan Menurut Daerah Tahun 2018

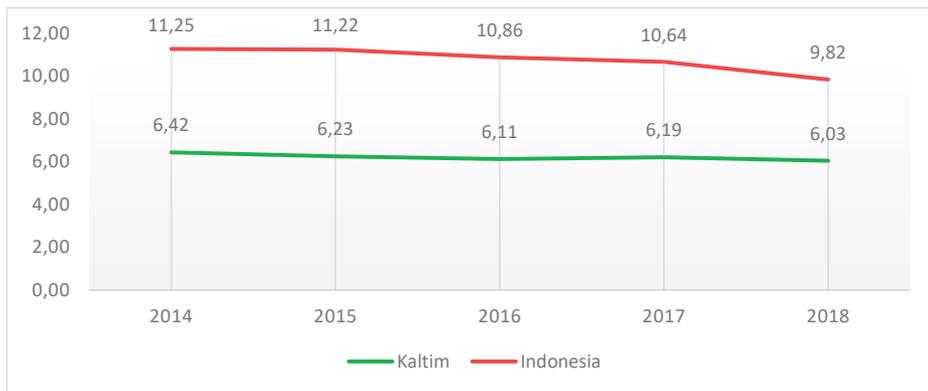
No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Beras	25,26	Beras	26,87
2	Rokok Kretek Filter	16,11	Rokok Kretek Filter	16,94
3	Telur ayam ras	6,59	Telur ayam ras	5,64
4	Daging ayam ras	5,96	Mie Instan	4,28
5	Mie Instan	4,46	Gula Pasir	4,27
6	Gula Pasir	3,34	Daging Ayam Ras	4,20
7	Tongkol/Tuna/Cakalang	3,04	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,73
8	Kue basah	2,54	Kue Basah	2,63
9	Tempe	2,49	Bawang merah	2,44
10	Tahu	2,26	Tempe	2,43
11	Bawang Merah	2,23	Tahu	2,30
12	Kopi Bubuk & Kopi Instan (Sachet)	2,01	Bandeng	2,08
13	Susu Bubuk	2,00	Cabe Rawit	2,02

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
14	Susu Kental Manis	1,96	Roti	1,98
15	Roti	1,66	Susu Kental Manis	1,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Tingkat kemiskinan Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir (2014-2018) hanya mengalami kenaikan pada tahun 2017. Selebihnya tingkat kemiskinan Kaltim cenderung menurun secara perlahan dari sebesar 6,42 persen menjadi sebesar 6,03 persen pada tahun 2018. Capaian ini masih berada di bawahnya tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 9,82 persen. Namun demikian, penanggulangan kemiskinan masih memiliki utang karena capaian tingkat kemiskinan Kaltim masih berada sedikit di atas target daerah yang telah ditetapkan yakni sebesar 6 persen. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, setidaknya oenurunan tingkat kemiskinan dapat dilakukan sesuai atau lebih baik dari target yang ditetapkan.

Gambar 2.11
Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, pada tahun 2018 tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 11,62 persen, Kabupaten Kutai Timur sebesar 9,22 persen, Kabupaten Kutai Barat sebesar 9,15 persen dan Kabupaten Paser sebesar 9,03 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah tercatat di Kota Balikpapan hanya sebesar 2,64 persen.

Pada tahun 2018 kenaikan tingkat kemiskinan terjadi di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Sedangkan kabupaten/kota lainnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan, dimana penurunan tertinggi terjadi di Kota Bontang dan Kabupaten Paser.

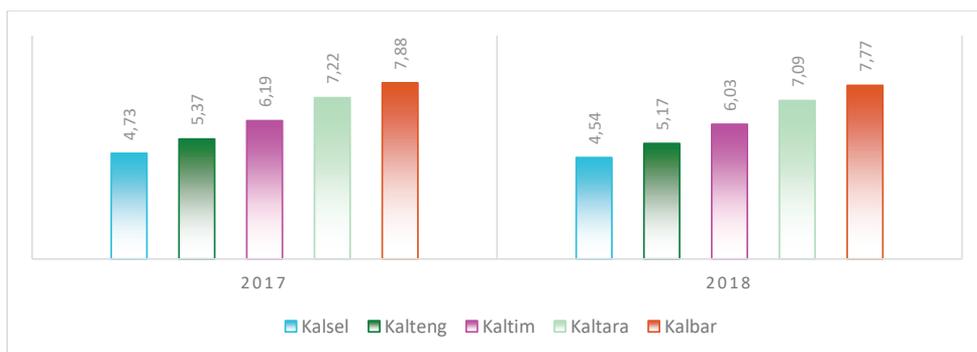
Tabel 2.14
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (persen)

No	Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
1	Paser	7,87	8,76	8,68	9,28	9,03
2	Kutai Barat	7,53	8,33	8,65	8,72	9,15
3	Kutai Kartanegara	7,43	7,99	7,63	7,57	7,41
4	Kutai Timur	9,1	9,31	9,16	9,29	9,22
5	Berau	4,76	5,33	5,37	5,41	5,04
6	Penajam Paser Utara	7,56	7,92	7,49	7,63	7,40
7	Balikpapan	2,46	2,91	2,81	2,82	2,64
8	Samarinda	4,56	4,82	4,72	4,77	4,59
9	Bontang	5,1	5,06	5,18	5,16	4,67
10	Mahakam Ulu		10,50	10,65	11,29	11,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga di Regional Kalimantan, setelah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Tingkat kemiskinan terendah dicatat oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, pada tahun 2018 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di seluruh provinsi pada Regional Kalimantan, dimana penurunan terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 0,20 poin, sementara Kalimantan Timur menurunkan tingkat kemiskinannya sebanyak 0,16 poin.

Gambar 2.12
Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan



Sumber : BPS

Berdasarkan grafik di bawah, dijelaskan bahwa secara absolut, jumlah penduduk miskin selama lima tahun terakhir (2014-2018) mengalami penurunan sebesar 34.700 jiwa. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur sebanyak 218.900 jiwa setelah tahun sebelumnya sempat mengalami kenaikan menjadi sebesar 220.170 jiwa. Dimana jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan.

Gambar 2.13
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (Jiwa)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 56.560 jiwa, Kota Samarinda sebanyak 39.230 jiwa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 33.020 jiwa. Disisi lain, yang perlu menjadi perhatian adalah share PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur merupakan dua terbesar terhadap total PDRB Kalimantan Timur namun ternyata terdapat jumlah penduduk miskin yang terbesar di daerah tersebut. Besarnya nilai PDRB daerahnya belum mampu memberikan dampak baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (jiwa)

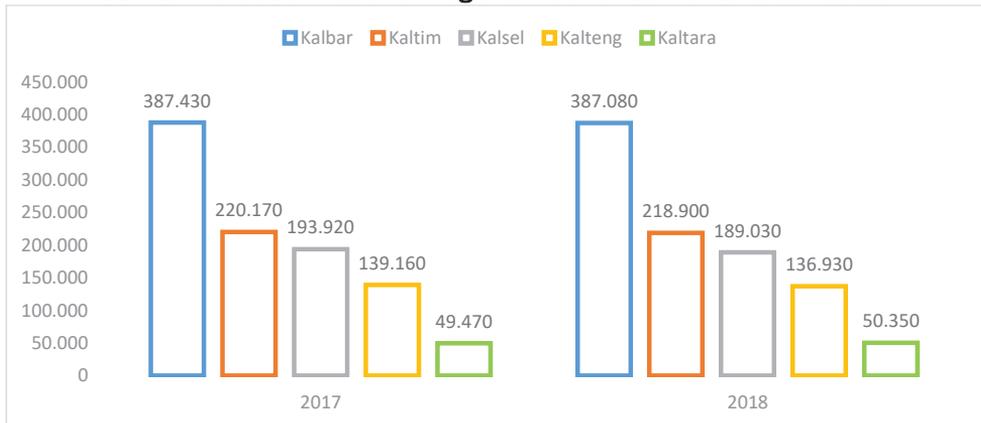
No	Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
1	Paser	20.340	22.820	23.170	25.300	25.140
2	Kutai Barat	12.920	11.120	12.650	12.800	13.490
3	Kutai Kartanegara	52.530	56.990	55.820	56.570	56.560
4	Kutai Timur	28.300	29.570	30.170	31.950	33.020
5	Berau	9.770	11.210	11.470	11.860	11.330
6	Penajam Paser Utara	11.580	12.170	11.660	12.000	11.760
7	Balikpapan	15.020	17.890	17.550	17.860	17.010
8	Samarinda	36.650	32.250	38.950	40.010	39.230
9	Bontang	8.210	8.020	8.600	8.750	8.100
10	Mahakam Ulu	-	2.830	2.880	3.070	3.250

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, secara absolut jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2018 adalah yang terbesar kedua setelah Kalimantan Barat yang memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 387.080 jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin terbanyak di regional ini terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan

Tengah masing-masing turun sebanyak 4.890 jiwa dan 2.230. Sementara jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2018 hanya berkurang sebanyak 1.270 jiwa.

Gambar 2.14
Jumlah Penduduk Miskin di Regional Kalimantan Tahun 2017-2018

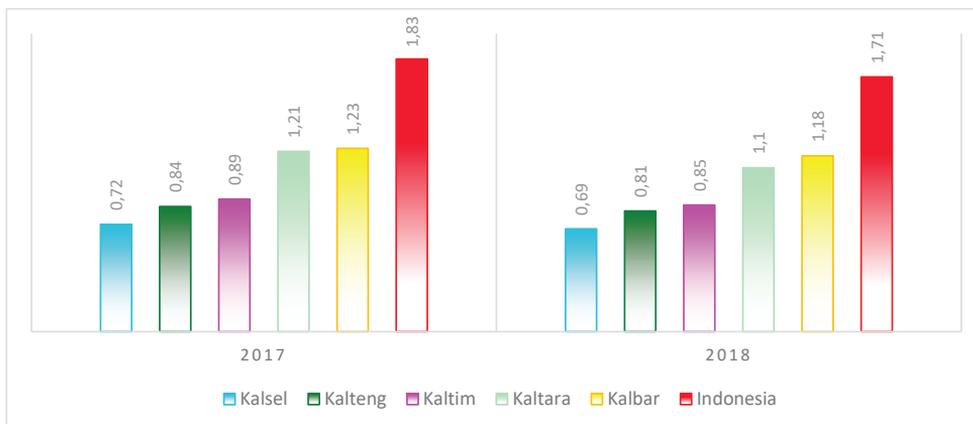


Sumber : BPS

Untuk mengetahui rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan diukur menggunakan indeks kedalaman kemiskinan (P1). Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 telah berhasil menurunkan indeks kedalaman kemiskinannya dari sebesar 0,89 menjadi 0,85 terjadi penurunan 0,04 poin. Demikian pula dengan seluruh provinsi di Regional Kalimantan pada tahun 2018 mampu memperpendek kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana penurunan terbesar dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Utara. Sementara Indonesia mampu memangkas indeks kedalaman kemiskinannya sebanyak 0,12 poin, dari sebesar 1,83 menjadi 1,71.

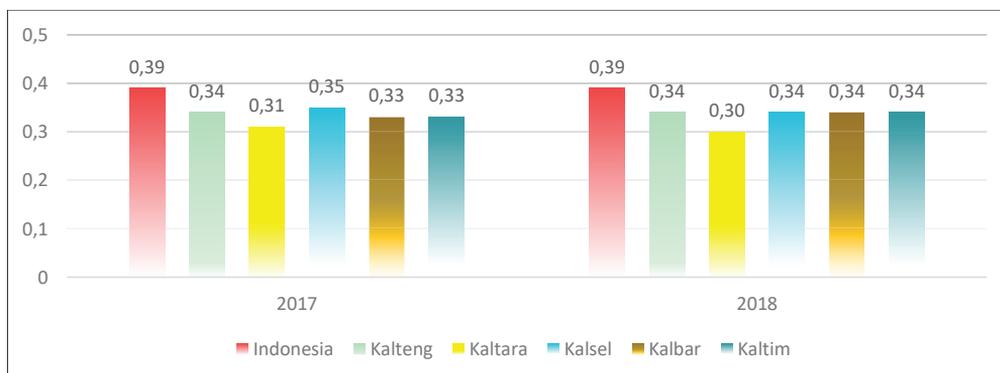
Pada regional Kalimantan, indeks kedalaman kemiskinan tertinggi tahun 2018 terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara masing-masing sebesar 1,18 dan 1,10. Namun capaian kedua provinsi ini masih di bawah indeks kedalaman kemiskinan Indonesia yang tercatat sebesar 1,71. Tentunya dalam menanggulangi kemiskinan di suatu daerah perlu untuk melihat sejauh apa kesenjangan yang tercipta antara garis kemiskinan dengan pengeluaran masing-masing penduduk miskin agar pemerintah tahu program dan kebijakan yang dilakukan untuk menarik penduduk miskin keluar dari garis kemiskinan.

Gambar 2.15
Indeks Kedalaman Kemiskinan Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2017-2018



Indeks Gini Kalimantan Timur yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat pada tahun 2018 menunjukkan bertambahnya angka ketimpangan menjadi 0,34. Sebelumnya indeks gini Kalimantan Timur sebesar 0,33. Dengan demikian capaian indeks gini Kalimantan Timur masih berada 0,02 poin di atas target RPJMD Kalimantan Timur sebesar 0,32. Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2018 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,30 (turun jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 0,31). Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,34. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,39 pada tahun 2017 dan 2018.

Gambar 2.16
Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2017-2018



Sumber : BPS

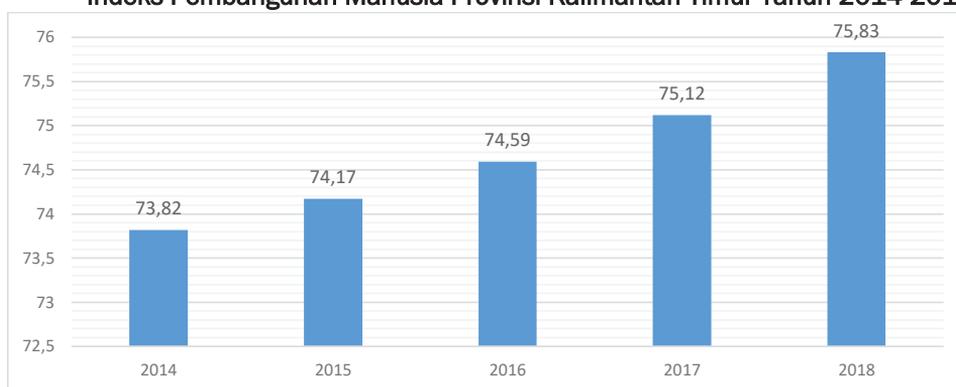
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga seni budaya dan olahraga. Namun, dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami kemajuan selama periode 2013 hingga 2017. IPM Provinsi Kalimantan Timur meningkat dari 73,21 pada tahun 2013 menjadi 75,12 pada tahun 2017. Selama periode 2013 hingga 2017 IPM Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan positif, namun status pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur masih belum mengalami lompatan status. Walaupun pembangunan manusia di tahun 2017 berhasil mengalami percepatan, jika diamati sepanjang periode 2011-2015, terdapat kecenderungan perlambatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur. Hingga saat ini, pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur masih berstatus “tinggi” menduduki peringkat ke 3 (tiga) nasional. Dengan demikian capaian IPM Kalimantan Timur tahun 2018 telah melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD sebesar 75,70. Hasil capaian ini tentunya di dukung oleh peningkatan pada empat komponen pembentuk IPM di Kalimantan Timur.

Gambar 2.17
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, wilayah dengan IPM tinggi diduduki oleh wilayah perkotaan dengan IPM tertinggi adalah di Kota Samarinda yang mencapai 79,93, diikuti oleh Kota Bontang dengan IPM 79,86, dan Kota Balikpapan ditempat ketiga 79,81. Dibandingkan dengan wilayah kota, wilayah kabupaten memiliki kesenjangan IPM yang cukup jauh dengan wilayah kota dimana IPM tertinggi adalah Kabupaten Berau dengan IPM sebesar 74,01 dan terendah adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan IPM sebesar 66,67.

Tabel 2.16
Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

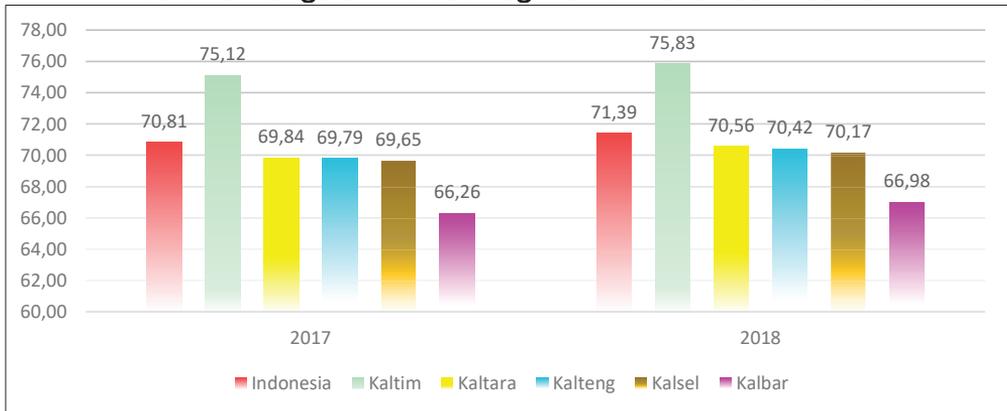
No	Kab/Kota	UHH	EYS	MYS	Pengeluaran per kapita (Rp ribu)	IPM
1	Paser	72,28	12,99	8,22	10.605	71,61
2	Kutai Barat	72,57	12,88	8,07	9.849	70,69
3	Kutai Kartanegara	71,93	13,57	8,84	10.959	73,15
4	Kutai Timur	72,76	12,65	9,08	10.614	72,56
5	Berau	71,68	13,30	8,98	12.207	74,01
6	Penajam Paser Utara	71,05	12,54	8,03	11.492	71,13
7	Mahakam Ulu	71,56	12,48	7,69	7.653	66,67
8	Balikpapan	74,18	14,12	10,65	14.557	79,81
9	Samarinda	73,93	14,66	10,46	14.466	79,93
10	Bontang	73,94	12,89	10,72	16.698	79,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 merupakan IPM tertinggi di Regional Kalimantan dengan interval yang cukup jauh, dimana berkisar antara 66,98 – 70,56. Namun untuk laju pertumbuhan IPM tertinggi di Regional Kalimantan dicatat oleh Kalimantan Barat sebesar 1,09 persen dan Kalimantan Utara sebesar 1,03 persen. Sementara laju pertumbuhan

IPM Kalimantan Timur tumbuh 0,95 persen, lebih cepat dibandingkan pertumbuhan IPM nasional sebesar 0,82 persen.

Gambar 2.18
Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Indonesia



Sumber : BPS

Hal yang penting untuk dimaknai dalam pencapaian IPM Kalimantan Timur yang tinggi bukanlah ranking secara nasional atau regional. Laju pertumbuhan IPM menjadi hal yang paling utama untuk diulas karena hal ini terkait perkembangan dimensi pembangunan manusia yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Dari Regional Kalimantan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, laju pertumbuhan IPM Kalimantan Timur adalah yang paling rendah dengan rata-rata pertumbuhan 0,71 persen per tahun. Bahkan dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan IPM nasional, Kalimantan Timur masih kalah cepat.

Dengan memperhatikan tingkat kecepatan pertumbuhan yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi lainnya, maka terdapat kemungkinan bahwa capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur dapat dikejar oleh provinsi lainnya. Di satu sisi, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat konvergensi pembangunan manusia di wilayah Kalimantan. Namun di sisi lain, jika tidak didorong, maka capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur dapat tertinggal. Oleh karena itu, pembangunan yang terus menerus pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus terus dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur.

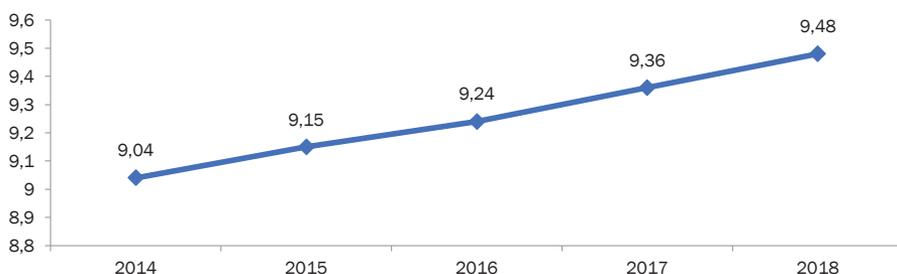
B. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang pendidikan:

1) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun terakhir 2017 mencapai 9,36 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I). Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur di tahun 2018 belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 12 tahun. Terdapat selisih 2,52 tahun untuk mencapai target tersebut. Sementara selama lima tahun terakhir Rata-rata Lama Sekolah di Kalimantan Timur hanya mampu bertambah 0,12 tahun setiap tahun nya. Pemenuhan akses pendidikan menjadi hal yang perlu untuk ditingkatkan agar mampu mendorong pembentukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

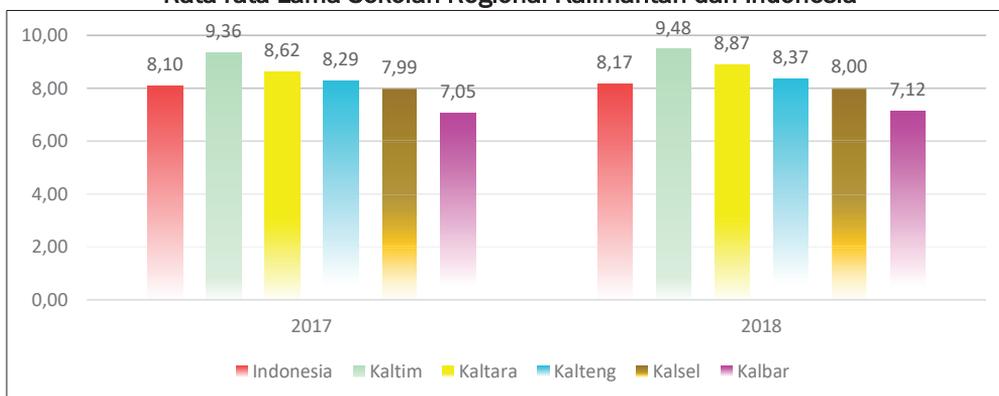
Gambar 2.19
Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Meski demikian, capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur adalah yang tertinggi di Regional Kalimantan serta lebih tinggi dari Nasional. Sehingga jika di lihat laju pertumbuhannya, Kalimantan Timur hanya kalah dari Kalimantan Utara, tapi kecepatannya tersebut masih di bawah laju pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah nasional.

Gambar 2.20
Rata-rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia



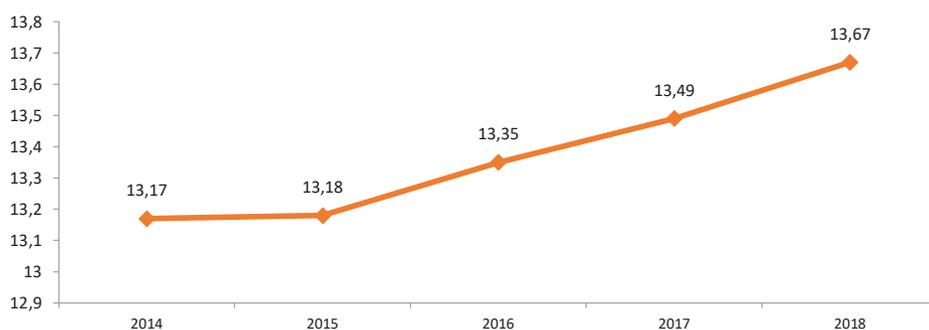
Sumber : BPS

2) Harapan Lama Sekolah

Di tahun 2018, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 13,49 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Perguruan Tinggi Semester 3. Hal ini sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 14 tahun. Terdapat selisih sebanyak 0,33 tahun. Dimana laju pertumbuhan rata-rata komponen ini selama lima tahun terakhir sebesar 1,25 persen, salah satu yang terendah di Regional Kalimantan setelah Kalimantan Utara.

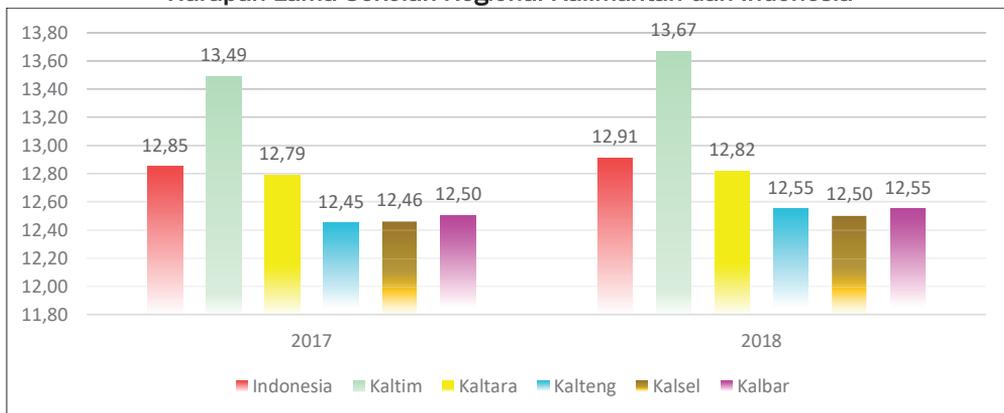
Gambar 2.21
Harapan Usia Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur selalu menjadi yang tertinggi di Regional Kalimantan. Namun trend laju pertumbuhan komponen ini (2014-2018) cenderung mengalami perlambatan. Berbeda dengan Provinsi lainnya di Regional Kalimantan yang meski berfluktuasi, namun cenderung meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Gambar 2.22
Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia



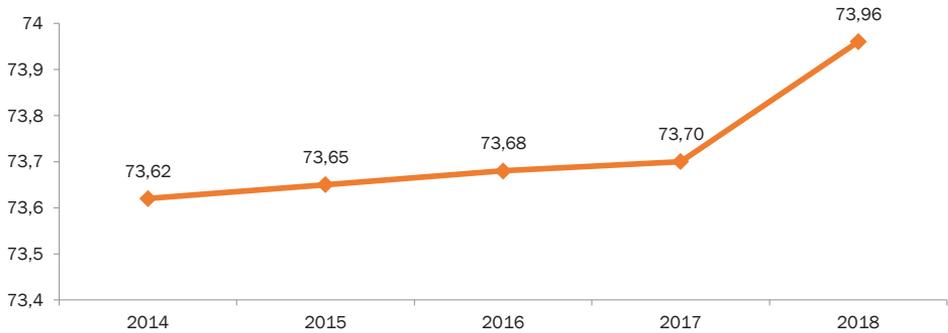
Sumber : BPS

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur juga lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Indonesia. Namun sayangnya, rata-rata laju pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia selama lima tahun terakhir lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kalimantan Timur.

C. Kesehatan

Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian maupun pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator kinerja pembangunan di bidang kesehatan diwakili oleh Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun.

Gambar 2.23
Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (Tahun)

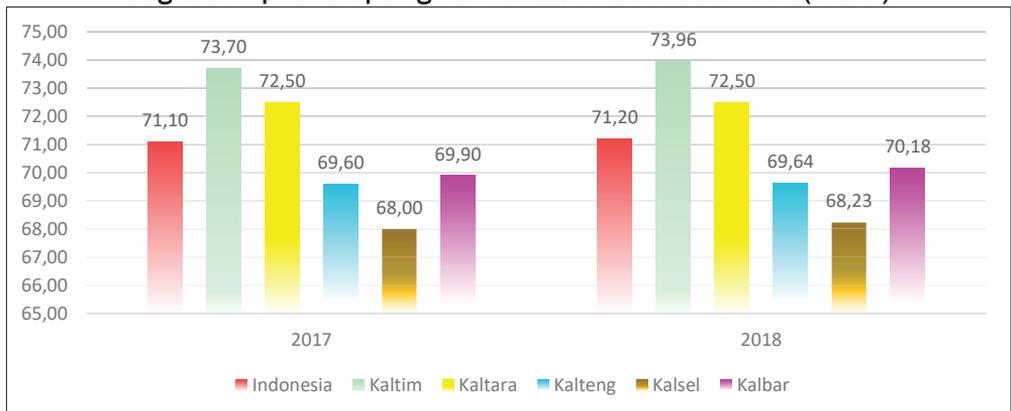


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Di Provinsi Kalimantan Timur, Angka Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2017 mencapai 73,70 tahun dan meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 73,96 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2018 akan memiliki harapan hidup hingga usia 73-74 tahun. Sehingga, angka ini bisa dikatakan memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 74 tahun.

Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Angka Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi dengan laju pertumbuhan 0,26 persen per tahun. Berbeda dengan beberapa komponen IPM lainnya, pada komponen Angka Harapan Hidup Kalimantan Timur adalah yang tercepat. Capaian ini juga berada di atas capaian nasional sebesar 71,20 tahun.

Gambar 2.24
Angka Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia (Tahun)

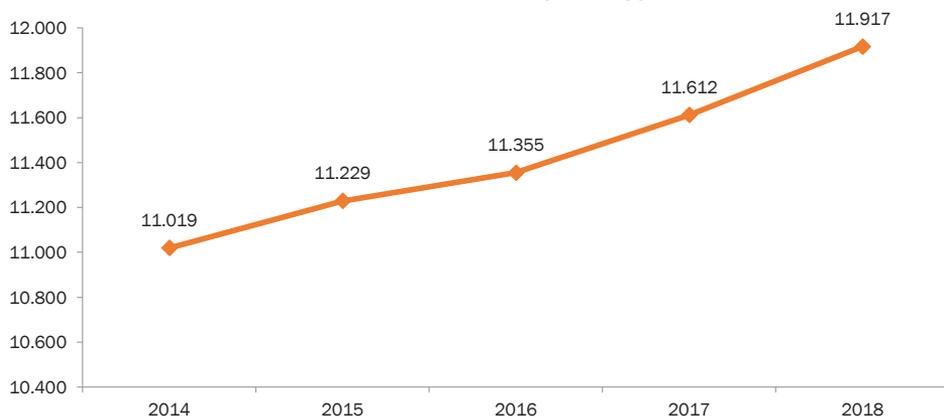


Sumber : BPS

D. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pada tahun 2018, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan masyarakat Kalimantan Timur mencapai 11,92 juta rupiah per tahun, atau bertambah 305 ribu rupiah dibandingkan tahun 2017. Maka, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan tersebut selama periode lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 1,65 persen per tahun. Disamping itu, capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan pada Dokumen RPJMD Kalimantan Timur sebesar 11,80 juta rupiah per tahun.

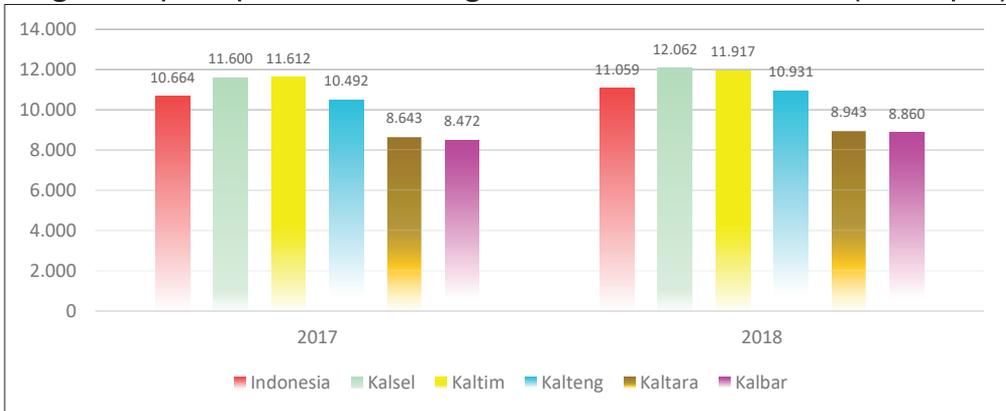
Gambar 2.25
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2014-2018 (Ribu Rp)



Sumber : BPS

Pada komponen standar hidup layak di Regional Kalimantan tahun 2018, untuk pertama kalinya Kalimantan Timur kehilangan tempatnya di posisi pertama. Pengeluaran per Kapita Kalimantan Selatan mampu menyalip capaian Kalimantan Timur dengan perolehan sebesar 12,06 juta rupiah per tahun. Meski berada di atas capaian nasional, Kalimantan Timur belum mampu menambah laju pertumbuhan komponen ini, karena menjadi yang terendah di bandingkan empat provinsi lainnya di Kalimantan. Bahkan, laju pertumbuhan pengeluaran per kapita milik Indonesia lebih baik daripada Kalimantan Timur.

Gambar 2.26
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Regional Kalimantan dan Indonesia (Ribu Rupiah)



Sumber : BPS

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pendidikan adalah dengan menganalisis Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya.

Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tingginya persentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan merupakan target mutlak yang harus dicapai oleh pemerintah. APS Provinsi Kalimantan Timur di setiap jenjang usia sekolah terus mengalami *trend* kenaikan yang mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan semakin meningkat.

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

Angka Partisipasi Sekolah					
Usia Sekolah	2014	2015	2016	2017	2018
7-12	97,60	99,63	99,54	99,67	99,76
13-15	89,00	97,92	98,18	98,79	98,89
16-18	74,24	80,68	80,81	81,32	81,55
Angka Partisipasi Kasar					
Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
SD	111,04	112,61	113,76	108,07	108,02
SLTP	91,49	97,90	97,78	91,46	92,57
SLTA	85,54	90,31	87,93	99,51	96,08

Angka Partisipasi Murni					
Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
SD	96,70	97,00	97,13	97,43	98,68
SLTP	78,73	79,06	79,20	79,58	80,52
SLTA	67,03	67,78	67,92	68,23	64,08

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2018

1) Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah

Rasio Murid-Guru ini menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 2.18
Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.653	358.727	20.424	17,56	217,02
Swasta	203	53.896	2.910	18,52	265,50
MI	122	23.122	1.419	16,29	189,52
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	426	126.158	7.424	16,99	296,15
Swasta	186	30.208	1.938	15,59	162,41
MTs	151	26.888	1.941	13,85	178,07
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	135	61.404	3.511	17,49	454,84
Swasta	75	10.880	746	14,58	145,07
MA	61	9.111	787	11,58	149,36
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	86	43.297	2.905	14,90	503,45
Swasta	130	27.649	1.783	15,51	212,68

Keterangan : *) Data tahun 2016

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan Kanwil Kemenag Wilayah Kaltim

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 9 perguruan tinggi dan 45 akademi, baik negeri maupun swasta, sebagai bagian dari sarana pendidikan masyarakat untuk mengenyam pendidikan lebih baik. Pada tahun 2014, jumlah mahasiswa yang terdaftar di berbagai akademi dan perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 95.642 mahasiswa.

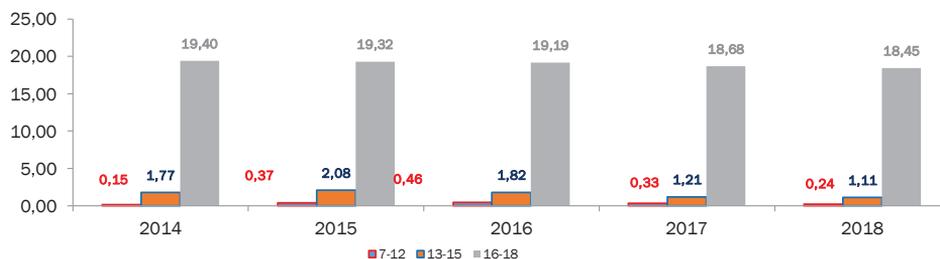
Tabel 2.19
Indikator Perguruan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Kategori	Jumlah PT/Akademi	Jumlah Fakultas/Jurusan	Jumlah Mahasiswa
Perguruan Tinggi			
Negeri	2	22	41.690
Swasta	7	11	24.882
Akademi			
Negeri	5	24	6.117
Swasta	40	0	22.953
Jumlah	54	57	95.642

Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur 2017

Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur semakin lama semakin menurun meskipun pada jenjang pendidikan menengah ke atas (SMA) masih cukup tinggi. Pada tahun 2018, angka putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar berhasil mencapai 0,24 persen, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) mencapai 1,11 persen, sedangkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah ke atas (SMA) mencapai 18,45 persen.

Gambar 2.27
Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi prasyarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan akan memiliki *multiplier effect* pada program-program pembangunan kedepannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah melihat bagaimana perkembangan kesehatan masyarakat, baik dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, maupun tingkat kesehatan penduduk. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melakukan peningkatan berbagai pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan berkualitas. Berbagai upaya peningkatan tersebut antara lain dilakukannya penyempurnaan pada beberapa program pembangunan kesehatan masyarakat, seperti peningkatan kesadaran akan kesehatan ibu dan bayi, kesadaran untuk menggunakan fasilitas kesehatan resmi, hingga terkait pola hidup sehat di masyarakat. Berikut fasilitas dan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.20
Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

No.	Fasilitas Kesehatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rumah Sakit	48	48	45	46	47	47
2	Tempat Tidur RS	4.538	4.538	4.745	4.873	6.154	n/a
3	Rumah Sakit Swasta	14	16	20	16	16	16
4	Dokter Umum	794	1.007	908	1.113	1.035	1.114
5	Dokter Gigi	262	290	294	335	323	320
6	Dokter Spesialis	276	569	354	347	583	678
7	Tenaga Medis RS	471	1.341	1.195	1.189	1.186	n/a
8	Perawat RS	1.627	3.791	3.027	6.893	7.178	6.662
9	RS Bersalin	13	14	18	10	10	10
10	Puskesmas	172	186	180	180	180	186
11	Pustu	568	576	661	689	669	714
12	Dokter Puskesmas	513	396	607	607	714	n/a
13	Pedagang Besar Farmasi	41	44	46	44	45	47
14	Apotek	371	398	435	561	524	524
15	Persentase Persalinan dengan Tenaga Medis	79,48	90,86	88,76	91,26	90,12	92,29

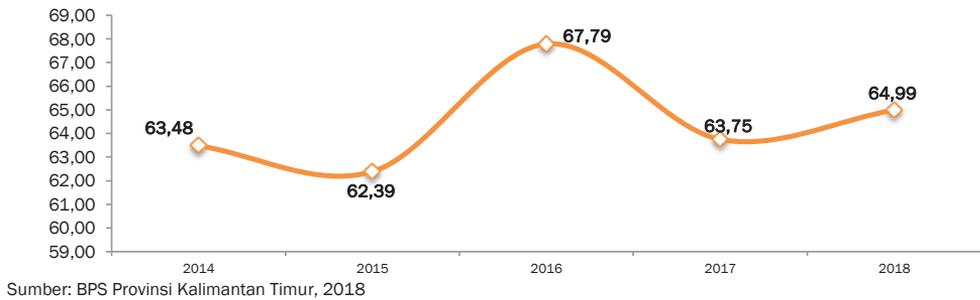
Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

C. Ketenagakerjaan

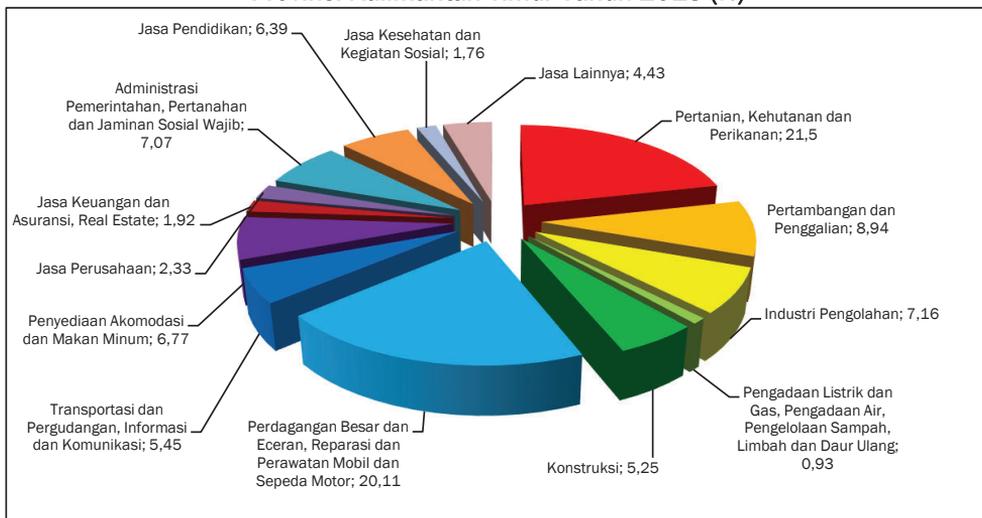
Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kemampuan kehidupan masyarakat sekaligus mengindikasikan daya saing sumber daya manusia suatu wilayah. Di Provinsi Kalimantan Timur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 67,79 persen pada tahun 2016 menjadi 64,99 persen pada tahun 2018. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan ini juga bisa disebabkan oleh penimbangnya, yaitu jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja.

Namun secara perlahan tingkat partisipasi angkatan kerja mulai meningkat di tahun 2018, sebelumnya pada tahun 2017 TPAK Kalimantan Timur sebesar 63,75 persen, mengalami peningkatan sebesar 1,24 persen di tahun 2018.

Gambar 2.28
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018



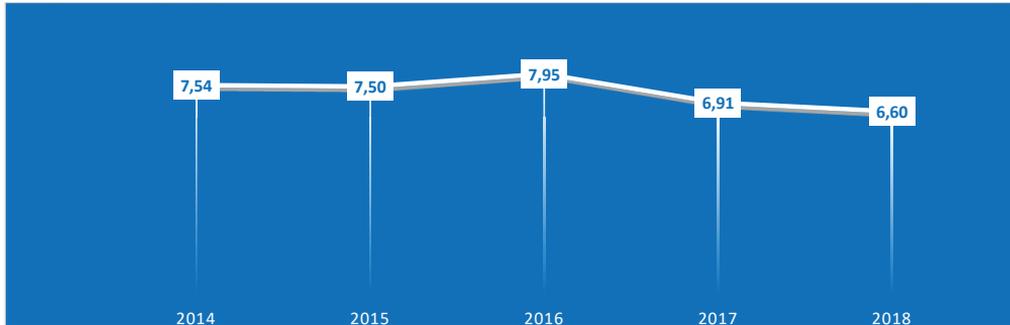
Gambar 2.29
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 (%)



Pada tahun 2018, penduduk bekerja di Kalimantan Timur memiliki pekerjaan yang terbagi dalam 14 (empat belas) sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada di atas. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 21,50 persen diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan

perawatan mobil dan sepeda motor mencapai 20,11 persen, dan yang paling sedikit bekerja di sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengeloan sampah, limbah dan daur ulang mencapai 0,93 persen.

Gambar 2.30
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun di setiap tahunnya. Pada tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,60 persen dimana angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 6,91 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, kebijakan pemerintah terkait angkatan kerja memberi dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur sehingga keberlanjutan program prioritas yang memberdayakan masyarakat harus terus dioptimalkan.

Tabel 2.21
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (persen)

No	Kab/Kota	2013	2014	2015	2017
1	Paser	9,25	6,69	9,06	5,54
2	Kutai Barat	8,03	6,84	11,7	5,87
3	Kutai Kartanegara	7,37	7,65	10,22	5,72
4	Kutai Timur	6,09	5,65	5,14	4,61
5	Berau	5,85	10,05	5,72	6,45
6	Penajam Paser Utara	7,97	7,52	7,28	4,75
7	Balikpapan	7,95	7,56	5,95	10,39
8	Samarinda	8,57	7,56	5,61	6,19
9	Bontang	11,19	9,38	12,07	12,44
10	Mahakam Ulu	-	-	4,75	9,05

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

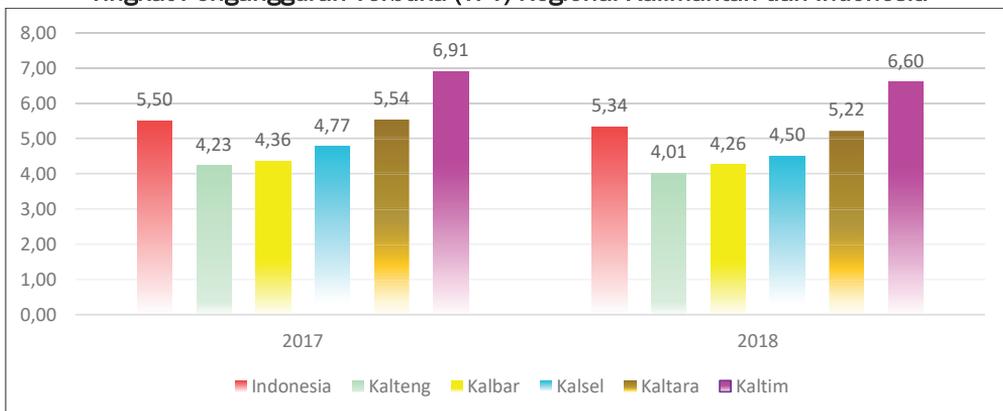
Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2017 terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Kalimantan Timur paling tinggi terdapat di Kota Bontang sebesar 12,44 persen, Kota Balikpapan sebesar 10,39 persen, dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 9,05

persen. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka paling rendah di Kabupaten Kutai Timur sebesar 4,61 persen.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Timur tahun 2018 sebesar 6,60 persen telah melampaui target yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yakni sebesar 7 persen. Namun realisasi tersebut masih lebih tinggi dari TPT Indonesia sebesar 5,34 persen. Disamping itu, pada Regional Kalimantan TPT Kalimantan Timur adalah yang tertinggi, disusul oleh Kalimantan Utara sebesar 5,22 persen, Kalimantan Selatan sebesar 4,50 persen, Kalimantan Barat sebesar 4,26 persen, dan Kalimantan Tengah 4,01 persen.

Adapun penurunan TPT terbesar pada tahun 2018 di Regional Kalimantan dicatat oleh Provinsi Kalimantan Utara yang mampu menurunkan TPT sebanyak 0,32 persen dan Kalimantan Timur turun sebanyak 0,31 persen. Sementara Indonesia mampu menurunkan TPT nya sebanyak 0,16 persen.

Gambar 2.31
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Regional Kalimantan dan Indonesia



Sumber : BPS

D. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

1) Pelayanan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: SIDATA Kalimantan Timur

Pada tahun 2017, Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 80,56 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (75,00). Meskipun begitu, secara series indeks ini mengalami kenaikan dalam jangka waktu empat tahun terakhir. Kenaikan ini bukan tanpa alasan mengingat berbagai program dan kegiatan terkait peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, perlu dirumuskan kembali berbagai program dan kegiatan baru terkait pemerataan pelayanan masyarakat agar setiap wilayah di Kalimantan Timur dapat merasakan hasil dari capaian pembangunan di berbagai bidang.

2) Pengelolaan Keuangan Daerah dan Integritas Kinerja Daerah

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2014 dan mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015 dan 2016. Sempat terjadinya penurunan status opini BPK ini menjadi “pekerjaan rumah” bagi pengelolaan keuangan daerah agar meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap setiap penggunaan keuangan daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

1) Pertanian Tanaman Pangan

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan

Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Produksi padi pada tahun 2018 mengalami kenaikan, baik itu secara luas panen maupun total produksi padi. Pada tahun 2018, total produksi padi mencapai 383.958 ton dengan luas panen 102.069 ha dan produktivitasnya 3,76 ton/ha.

Tabel 2.22
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2014	100.262	426.567	4,26
2015	99.209	408.782	4,12
2016	80.343	305.337	3,80
2017	94.393	356.680	3,78
2018	102.069	383.958	3,76

**) Angka Ramalan II, Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov Kaltim, 2018*

2) Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Komoditas perkebunan yang cukup mendominasi dan menarik banyak investasi luar daerah adalah perkebunan kelapa sawit yang hingga saat ini luas tanamnya mencapai 1,19 juta ha dan memiliki produksi mencapai 13,16 juta ton. Selain itu, komoditas karet juga cukup memberikan sumbangsih dalam perekonomian daerah dengan produksi karet yang cukup tinggi mencapai 63,5 ribu ton pada tahun 2017. Berikut produktivitas komoditas perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.23
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

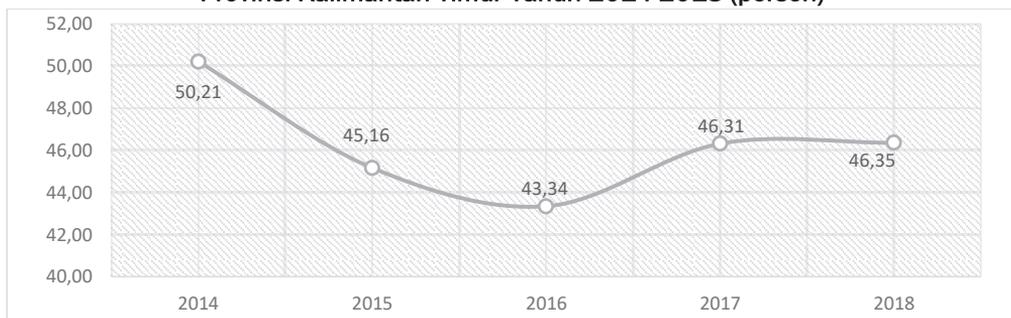
No.	Tahun	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Rata-rata produktivitas Nasional
1.	Karet	115.160	63.510	1,28	1,18
2.	Kelapa	22.289	13.647	0,80	1,1
3.	Kopi	2.725	325	0,26	0,72
4.	Lada	9.012	6.057	0,99	0,81
5.	Kakao	7.778	2.435	0,50	0,8
6.	Kelapa Sawit	1.192.342	13.164.310	16,67	3,55

Sumber: Sidata Kaltim; Dinas Perkebunan, 2017

B. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan di setiap tahunnya hingga tahun 2016 kontribusi menurun hingga mencapai 43,34 persen. Nilai PDRB pada pertambangan batubara mengalami penurunan dari tahun sebelumnya meskipun produksi batubara meningkat. Kelesuan ini bisa jadi karena gejolak perekonomian global sehingga berdampak pada nilai ekspor produk pertambangan dan penggalian. Kemudian, nilai PDRB pada minyak dan gas menurun karena produksi pertambangan migas juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2018, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian kembali menunjukkan peningkatan mencapai 46,35 persen. Setelah sebelumnya (2017) sempat menurun dengan kontribusi sebesar 46,31 persen.

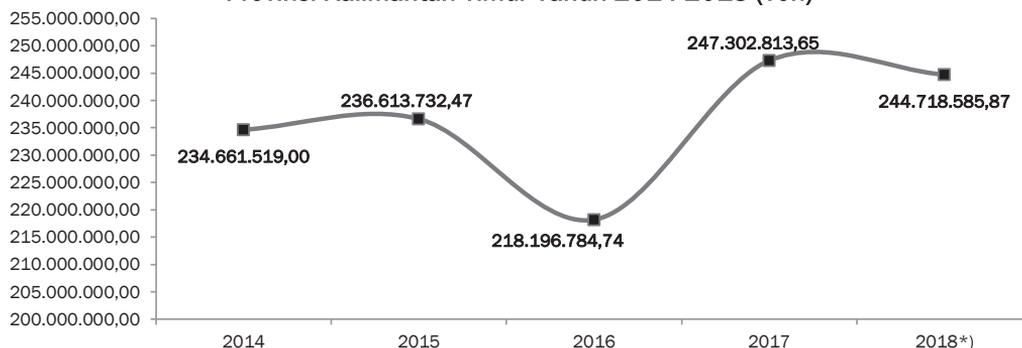
Gambar 2.32
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Produksi pertambangan batubara di Kalimantan timur sangat berfluktuatif. Sempat meningkatkan jumlah produksinya di tahun 2017 menjadi sebesar 247,30 juta ton, produksi batubara Kalimantan Timur sedikit turun di tahun 2018 menjadi sebesar 244,72 juta ton.

Gambar 2.33
Produksi Pertambangan Batubara
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (Ton)



Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber: Sidata Kaltim; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2018

Jika dilihat produksi pertambangan unggulan lainnya di Kalimantan Timur, terjadi tren penurunan produksi terutama minyak bumi dan gas bumi yang setiap tahun berkurang. Sedangkan produksi batubara masih fluktuatif.

Tabel 2.24
Produksi Pertambangan Unggulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

Tahun	Batubara (Ton)	Minyak Bumi (Ribu Barrel)	Gas Bumi (Ribu MMBTU)
2014	234.661.519,00	35.207,46	605.579,00
2015	236.613.732,47	36.605,80	609.744,52
2016	218.196.784,74	34.323,80	568.588,80
2017	247.302.813,65	29.754.180	449.579.200
2018*)	244.718.585,87	6.201.930	75.515.260

Ket: *) Angka Sementara; Sumber : Sidata Kaltim; Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, 2018

C. Jumlah Investor Berskala Nasional dan Internasional (PMDN/PMA)

Kenaikan jumlah investor merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian.

Tabel 2.25
Jumlah Proyek PMDN/PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

Tahun	PMDN	PMA	Total
2014	48	54	102
2015	124	36	160
2016	317	43	360

Tahun	PMDN	PMA	Total
2017	625	62	392
2018	309	275	584

Sumber: DPMPSTSP Kalimantan Timur, 2018

Dilihat dari jumlah investornya, secara total terdapat peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah investor di Kalimantan Timur sebanyak 584, lebih banyak jika dibandingkan jumlah investor pada tahun 2017 yang hanya sebanyak 392 investor. Kenaikan jumlah investor terutama terjadi pada investor Penanaman Modal Asing, dari sebesar 62 investor di tahun 2017 menjadi sebesar 275 investor di tahun 2018.

D. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Dan Internasional (PMDN/PMA)

Realisasi investasi baik dalam negeri maupun investor asing mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Hasil analisis nilai PMDN/PMA di Provinsi Kalimantan Timur dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.26
Jumlah Investasi PMDN dan PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Juta Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$ 000)
2014	60	12.983.049,70	297	2.145.665,10
2015	143	9.611.313,10	420	2.381.442,30
2016	243	6.885.124,60	471	1.181.859,20
2017	357	10.980.216,40	566	1.285.215,20
2018	309	25.941.960,00	275	587.500,00

Sumber: DPMPSTSP Kalimantan Timur, 2018

Secara total nilai investasi Kalimantan Timur mengalami kenaikan. Terutama didorong oleh peningkatan nilai realisasi investasi di atas 100 persen pada Penanaman Modal Dalam Negeri dari sebesar Rp 10,98 triliun di tahun 2017 menjadi sebesar Rp 25,94 triliun di tahun 2018. Sebaliknya, terjadi penurunan investasi pada PMA di Kalimantan Timur, dari sebesar 1,29 miliar USD menjadi sebesar 587 juta USD.

E. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi, baik PMDN maupun PMA, di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

PMDN						
No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	9.505	24.825	29.023	9.236	12.935
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	60	143	243	357	309
3	Rasio daya serap tenaga kerja	158,42	173,6	119,44	25,87	41,86
PMA						
No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	27.055	66.230	22.204	15.508	12.500
2	Jumlah proyek seluruh PMA	297	420	471	566	275
3	Rasio daya serap tenaga kerja	91,09	157,69	47,14	27,40	45,45

Sumber: DPMPSTP Kalimantan Timur, 2018

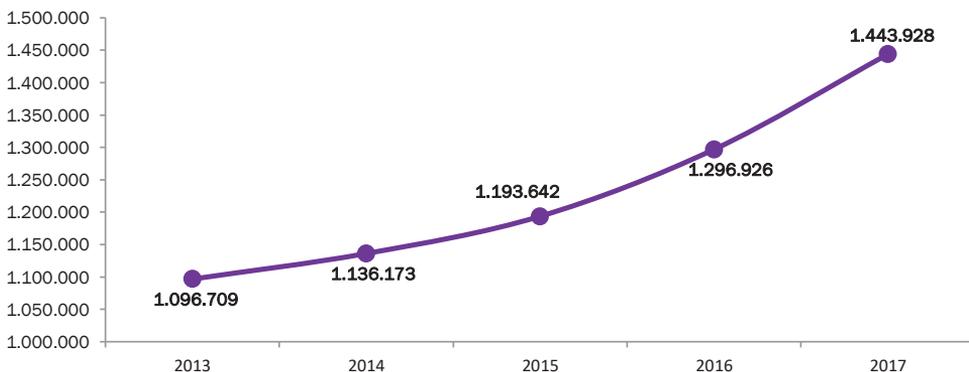
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama kurun waktu beberapa tahun, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik dimana pada tahun 2017 mencapai Rp. 1.443.928,- per bulan.

Gambar 2.34
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

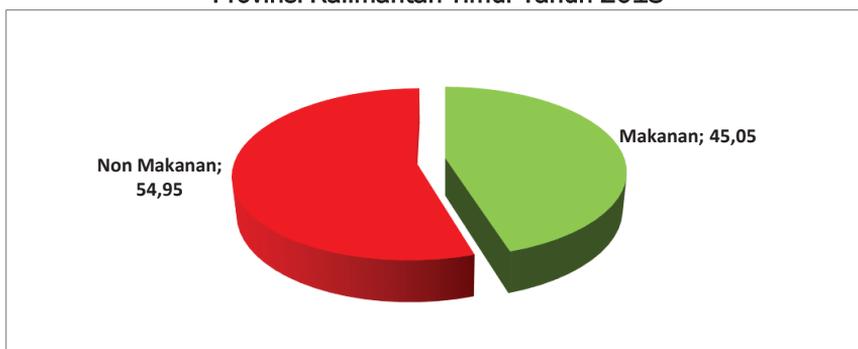
Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

Tabel 2.28
Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	588.003	627.372	644.291	709.006	780.443	857.449
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	1.096.709	1.136.173	1.193.642	1.296.926	1.443.928	1.560.354
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	53,62	55,22	53,98	54,67	54,05	54,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Gambar 2.35
Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2019

C. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di wilayah pedesaan. Selain itu, NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Semakin tinggi NTP-nya maka semakin kuat kemampuan/daya beli petani.

Pada periode tahun 2014-2017, NTP Provinsi Kalimantan Timur selalu berada di bawah nilai 100 yang berarti bahwa petani mengalami defisit/penurunan daya beli karena kenaikan penerimaan hasil produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga input biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumahtangganya.

Tabel 2.29
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (2012=100)

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	111,58	117,00	120,03	121,96	123,77
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	111,66	118,66	122,30	125,53	128,75
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	99,93	98,61	98,14	97,16	96,14

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Jika dilihat Nilai Tukar Petani berdasarkan subsektornya maka NTP tertinggi adalah NTP pada subsektor Peternakan yang mencapai 112,22 pada tahun 2018 meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya 103,88. Sedangkan NTP terendah berada pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat yang hanya mencapai 80,68 dimana angka ini menurun dari tahun sebelumnya 96,29.

Tabel 2.30
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Subsektor Tahun 2017-2018 (2012=100)

No	Uraian	NTP		% Perubahan
		2017	2018	
NTP Gabungan		97,15	96,14	-1,04
1.	Tanaman Pangan	95,18	94,57	-0,64
2.	Hortikultura	92,45	93,11	0,71
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	96,29	88,42	-8,17
4.	Peternakan	103,88	109,16	5,08
5.	Perikanan	101,37	103,32	1,92

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Luas Wilayah Produktif

Pengembangan luas wilayah produktif harus terus mendapat kawalan dari instansi terkait mengingat produktifitas pertanian, perkebunan, maupun pemukiman merupakan lahan yang bersentuhan langsung ke masyarakat Kalimantan Timur. Gambaran tentang luas wilayah produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.31
Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman)
terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
1.	Berau	370.716	536.320	62,12
2.	Kutai Barat + Mahakam Ulu	515.012	862.681	59,70
3.	Kutai Kertanegara	420.324	936.710	44,87
4.	Kutai Timur	472.421	942.679	50,11
5.	Penajam Paser Utara	113.402	145.011	78,20
6.	Paser	301.226	445.964	67,54
7.	Balikpapan	22.538	34.069	66,15
8.	Bontang	5.643	10.002	56,42
9.	Samarinda	13.320	68.888	19,34
Jumlah		2.234.602	3.982.325	56,11

Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2013

B. Infrastruktur Pembangunan

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan yang meliputi: pembangunan jalan, jembatan, transportasi darat dan SDP, transportasi laut, transportasi udara, air baku dan air bersih, jaringan irigasi, serta perumahan dan permukiman.

Gambaran umum penyediaan infrastruktur Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana Jaringan Jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2018 mencapai 52,85 %. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 470,13 km, kondisi sedang mencapai 2,96 Km, kondisi rusak ringan mencapai 293,76 Km, dan kondisi rusak berat mencapai 128,24 Km. Sedangkan jaringan jalan nasional sepanjang 1.710,90 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2018 mencapai 92,24 %. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 547,30 Km, kondisi sedang 1.023,70 Km, kondisi rusak ringan mencapai 121,00 Km, dan kondisi rusak berat mencapai 11,10 Km.

Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada salah satu permasalahan yaitu rasio panjang jalan terhadap luas wilayah mencapai 149,19 km per 1.000 km² (terdapat jalan sepanjang 149,19 km di dalam wilayah seluas 1000 km²) masih di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km². Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Penyebaran penduduk yang tidak merata masih dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berbukit dan bergunung;
- 2) Permasalahan penyediaan lahan pembangunan yang belum sesuai dengan kebutuhan.

- 3) Keterbatasan alokasi pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
- 4) Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
- 5) Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal.
- 6) Pengendalian batas maksimal muatan barang yang sesuai kelas jalan belum optimal;
- 7) Pembangunan jalan belum sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai jalan arteri dan kolektor

Tabel 2.32
Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

NO	STATUS	PANJANG (KM)	ASPAL	KERIKIL	TANAH	RIGID
1	Nasional	1.710,90	1.710,90	-	-	-
2	Provinsi	895,09	608,47	94,57	43,42	148,60

Sumber : Data tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur

Tabel 2.33
Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

NO	STATUS	PANJANG (KM)	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Nasional	1.710,90	547,30	1.023,70	121,00	11,10
2	Provinsi	895,09	470,13	2,96	293,76	128,24

Sumber : Data tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur

Terkait penyelenggaraan layanan transportasi dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah di level provinsi berkaitan dengan urusan perhubungan lebih ditekankan pada pelayanan perhubungan darat, laut, sungai, danau dan angkutan penyeberangan. Di Kalimantan Timur terdapat 6 bandar udara yang terdiri dari 1 bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I dan 5 bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI. Secara khusus perkembangan bandara APT. Pranoto, saat ini telah beroperasi dengan jumlah 7 (tujuh) maskapai dengan rute penerbangan yaitu Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Berau, Melak, Tanjung Selor, dan Dajah Dawai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 bahwa pendekatan multi-dimensi dalam perumusan kebijakan pelabuhan nasional sebagaimana amanat undang-undang diharapkan mampu mendukung dan menggerakkan dinamika

pembangunan, meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa, membantu menciptakan konektivitas dan pola distribusi nasional yang handal (reliable) dan dinamis serta berkontribusi dan menurunkan biaya logistik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan hirarki pelabuhan, di Kalimantan Timur telah ditetapkan 13 pelabuhan laut yang terdiri 1 (satu) Pelabuhan Utama, 9 (Sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 3 (Tiga) Pelabuhan Regional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.34
Rencana Induk Pelabuhan Nasional Di Kalimantan Timur
Berdasarkan KP 432 Tahun 2017

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							
	Kabupaten/Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				Keterangan
				2017	2022	2027	2037	
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur								
304	Balikpapan	1	Balikpapan	PU	PU	PU	PU	*
305	Berau	2	Mataritip	PR	PR	PR	PR	
306	Berau	3	Tanjung Redeb	PR	PP	PP	PP	*
307	Bontang	4	Lhok Tuan	PP	PP	PP	PP	*/TK
308	Bontang	5	Tanjung Laut	PP	PP	PP	PP	*/TK
309	Kutai Kertanegara	6	Kuala Samboja / Sebulu	PP	PP	PP	PP	*/TK
310	Kutai Kertanegara	7	Tanjung Santan	PP	PP	PP	PP	*/TK
311	Kutai Timur	8	Maloy	PP	PP	PP	PP	
312	Kutai Timur	9	Sangatta	PP	PP	PP	PP	*/TL/TK
313	Kutai Timur	10	Sangkulirang	PR	PR	PR	PR	*
314	Paser	11	Tana Paser / Pondong	PP	PP	PP	PP	*/TK
315	Penajam Pasir Utara	12	Penajam Paser	PP	PP	PP	PP	
316	Samarinda	13	Samarinda	PP	PP	PP	PP	*

Sumber : Lampiran KP 432 Tahun 2017

*Keterangan : PU (Pelabuhan Utama); PP (Pelabuhan Pengumpul); PR (Pelabuhan Regional)

Untuk pelayanan angkutan penyeberangan telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan yang terdapat di Kalimantan Timur yaitu 2 (dua) Pelabuhan Kelas I yang terdiri dari Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Penajam, 1 (satu) Pelabuhan Kelas II yaitu Pelabuhan Tenggarong, dan 4 (empat) Pelabuhan Kelas IV yang terdiri dari Pelabuhan Desa Sakka, Sungai Meriam, Handil I dan Gunung Tabur.

Sedangkan untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang. Namun kondisi kedua terminal tersebut memerlukan peningkatan pelayanan fasilitas.

Luasan kawasan permukiman kumuh yang berada di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Bupati/Walikota sebesar 1.412,99 ha. Komponen-komponen permukiman layak huni yang belum terpenuhi diantaranya adalah akses terhadap perumahan, sanitasi, jalan lingkungan dan PSU permukiman lainnya. Rendahnya akses masyarakat terhadap permukiman layak huni disebabkan oleh kurang optimalnya upaya penataan permukiman. Pada tahun 2018, sudah tertangani 353,27 ha dari luas kawasan kumuh yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan masih tersisa seluas 673,42 ha.

Tabel 2.35
Lokasi Kawasan Pemukiman Kumuh Provinsi
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

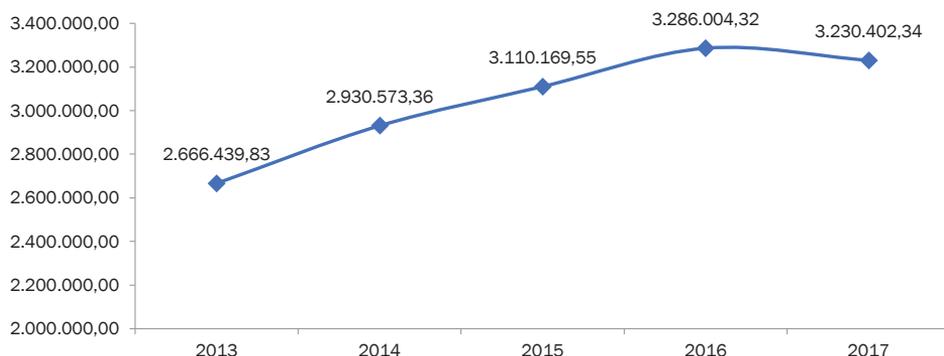
No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh
1	Balikpapan	224,86	153,5
2	Samarinda	133,33	63,68
3	Kutai Timur	75,93	-
4	Bontang	73,56	47,43
5	Kutai Kartanegara	172,67	11,68
6	Berau	184,30	66,3
7	Penajam Paser Utara	49,07	-
8	Paser	10,68	10,68
9	Kutai Barat	488,59	-
TOTAL		1.412,99	353,27

Sumber: SK Kumuh Kab/Kota 2018

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan dalam akses perumahan adalah kondisi rumah yang dihuni. Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang belum memenuhi standar minimal dilihat dari kualitas jenis atap, lantai dan dinding rumah. Hingga tahun 2017 tercatat bahwa rumah tidak layak huni mencapai 51.722 unit (berdasarkan verifikasi pemda). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tinggal dalam kondisi rumah yang tidak layak. Ketidaklayakan rumah tersebut baik dari segi kualitas fisik rumah maupun kualitas fasilitas rumah.

Dari segi kelistrikan, infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik di setiap tahunnya hingga mencapai 3.326.195 MWh pada tahun 2015. Pengguna listrik ini sebagian besar dirasakan oleh rumah tangga yang pada tahun 2015 berjumlah 713.891 rumah tangga dengan kapasitas listrik yang digunakan mencapai 1.682.001,81 MWh.

Gambar 2.36
Produksi Tenaga Listrik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (MWh)



Sumber: PT. PLN Wilayah Kaltimra

Tabel 2.36
Pelanggan Listrik Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	606.548	676.291	727.328	774.995	832.528
2.	Banyaknya tenaga listrik rumah tangga yang terjual (MWh)	1.462.629.178	1.625.175.234	1.707.503.633	1.801.719.937	1.748.943.749

Sumber: PT. PLN Wilayah Kaltimra

Kinerja pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu mendapat perhatian, terutama masih rendahnya luas lahan pertanian yang beririgasi teknis. Hingga tahun 2018, sawah yang mendapat layanan irigasi diperkirakan baru mencapai 14% atau sekitar 13.618 Ha. Lahan tersebut tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Kaltim yang mencakup kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara khusus pada Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi layanan jaringan irigasi telah mencapai 6.820 Ha.

Tabel 2.37
Luas Lahan Pertanian Yang Beririgasi Teknis di Kalimantan Timur

No	KABUPATEN/KOTA	Sawah Irigasi (Ha)	Sawah Tadah Hujan (Ha)	Total Luas Sawah (Ha)
1	Paser	0	12.702	12.702
2	Kutai Barat	608	8.111	8.719
3	Kutai Kartanegara	6.701	29.921	35.992
4	Kutai Timur	2.881	6.874	9.775
5	Berau	2.831	7.654	10.485
6	Penajam Paser Utara	933	11.272	12.205

No	KABUPATEN/KOTA	Sawah Irigasi (Ha)	Sawah Tadah Hujan (Ha)	Total Luas Sawah (Ha)
7	Mahakam Ulu	0	480	480
8	Balikpapan	0	250	250
9	Samarinda	294,5	3.453,5	3.748
10	Bontang	0	74	74
TOTAL		13.618 (14,4%)	80.791,5 (85,57%)	94.410 (100%)

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, & Holtikultura Kaltim 2019

Bendungan-bendungan yang sudah terbangun belum sepenuhnya terhubung jaringan irigasi ke lahan pertanian, karena jaraknya yang sangat jauh dari lahan pertanian, dan bahkan banyak bendungan yang tidak berfungsi karena adanya alih fungsi lahan pertanian sekitarnya menjadi perkebunan sawit dan pertambangan. Persoalan lain yang menyebabkan belum optimalnya cakupan irigasi adalah rendahnya kualitas air baku untuk irigasi karena tingkat keasaman air yang tinggi dan adanya pencemaran limbah tambang batu bara. Peningkatan jaringan irigasi disertai dengan peningkatan ketersediaan air baku yang berkualitas pada bendungan atau waduk sangat dibutuhkan untuk peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan. Selain sebagai sumber air irigasi, bendungan juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan, sumber air minum dan pengendali banjir.

Permasalahan banjir di Kalimantan Timur terjadi secara simultan, karena kondisi geografis DAS yang luas, daerah paparan banjir, pembukaan lahan dan penebangan hutan di daerah hulu sungai, permasalahan drainase kota dan pengaruh pasang surut laut. Hampir semua kota di Kalimantan Timur mengalami permasalahan banjir. Tingginya kejadian banjir mayoritas terjadi pada wilayah perkotaan, yaitu Samarinda, Balikpapan dan Bontang.

Tabel 2.38
Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	DAS	Perkiraan Luas Genangan (Ha)
1	Kota Balikpapan	Sungai Ampal	130
		Klandasan	50
		Sepinggian	50
2	Kota Samarinda	Karangmumus	100
		Karangasam Besar	100
		Karangasam Kecil	30
		Loa Bakung	20
		Loa Lah	15
		Rapak Dalam	30
		Keledang	5
		Sempaja	20
		Bengkuring	15
		Palaran	30
3	Kota Bontang	Bontang	120

No.	Kabupaten/Kota	DAS	Perkiraan Luas Genangan (Ha)
		Guntung	20
4	Kabupaten Paser	Longkali/Telakai	1000
		Kandiilo	200
5	Kabupaten Berau	Segah	200
		Bayur	5
6	Kabupaten Kutai Kartanegara	Sungai Mahakam	100
		Medeka	200
7	Kabupaten Kutai Timur	Sungai Sanggata	500
		Sungai Bengalon	100
8	Kabupaten Kutai Barat	Sungai Mahakam	500
9	Kabupaten Mahulu	Sungai Mahakam	500
10	Kabupaten Penajam P.U.	Tunan	20

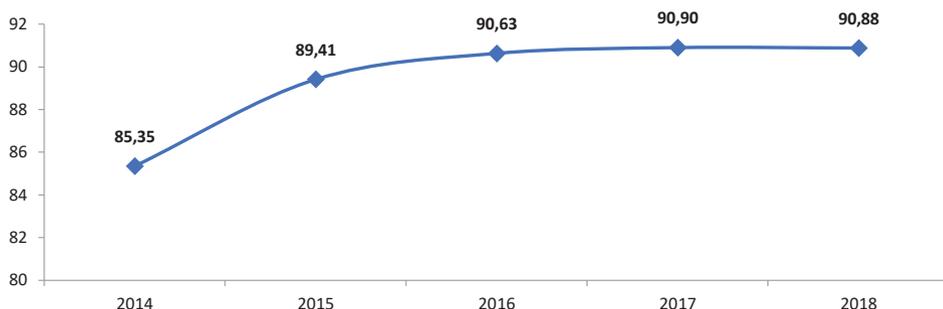
Sumber: Dinas PUPR Prov.Kaltim

Infrastruktur pengendali banjir yang telah terbangun masih belum mampu mengatasi banjir, dan masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam membantu mengurangi risiko banjir. Berbagai macam persoalan dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh rumitnya pembebasan lahan untuk pengembangan sistem pengendali luapan air sungai. Selain persoalan tersebut, banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum maksimal.

Terkait dengan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, salah satu upaya yang terus dilakukan adalah ditingkatkannya pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dengan penurunan risiko banjir. Kegiatan ini lebih kepada ditingkatkannya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Selain irigasi pertanian, permasalahan sumber daya air lainnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah belum optimalnya akses air bersih terutama untuk air minum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses penyediaan layanan air bersih perpipaan yang memadai. Pelayanan air bersih perpipaan belum sepenuhnya menjangkau wilayah Kalimantan Timur khususnya daerah perbatasan seperti di Kabupaten Mahakam Ulu.

Gambar 2.37
Persentase Rumah tangga dengan Sumber Air Minum Bersih
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Ketersediaan air minum bersih di Kalimantan Timur hingga tahun 2018 telah melayani 90,88% rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. Perusahaan air minum di Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan segala daya dan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Saat ini, terdapat 9 perusahaan air minum dengan kapasitas produksi efektif sebesar 6.743 liter/detik.

Tabel 2.39
Indikator Perusahaan Air Minum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Perusahaan Air Minum	14 (Kaltim+Kaltimra)	9	9	9	9
2.	Kapasitas Produksi Potensial	7.083	6.339	6.985	7.185	7.354
3.	Kapasitas Produksi Efektif (ltr/dtk)	5.980	5.995	6.420	6.445	6.743
4.	Efektivitas Produksi (%)	84,43	94,57	91,91	89,70	91,69

Sumber: Kaltim Dalam Angka 2018 dan Sidata kaltimprov.go.id 2019

Tabel 2.40
Penduduk Terlayani Air Bersih Perpipaan

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Yang Terlayani Air Bersih Perpipaan (%)		
		2015	2016	2017
1	Paser	41,93	24,21	38,29
2	Penajam Paser Utara	15,79	14,19	15,87
3	Samarinda	89,60	90,96	95,46
4	Balikpapan	76,84	76,50	76,98
5	Kutai Kertanegara	59,86	63,25	63,39
6	Kutai Barat	34,58	34,25	34,35
7	Kutai Timur	25,79	31,67	33,13
8	Berau	40,71	44,34	44,70
9	Bontang	80,23	84,37	87,05
10	Mahakam Ulu	-	-	-

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Yang Terlayani Air Bersih Perpipaan (%)		
		2015	2016	2017
	Rata-rata	51,7	51,5	54,3

Sumber: Dinas PUPR Prov.Kaltim

Berdasarkan data di atas, peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan mengalami peningkatan meskipun belum maksimal, dimana pada tahun 2015 cakupan layanan sebesar 51,7% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 54,3%. Masih minimnya cakupan layanan air bersih perpipaan disebabkan oleh infrastruktur penyediaan air minum yang kurang memadai dan terbatasnya akses layanan air bersih yang menjangkau beberapa kawasan di Kalimantan Timur. Salah satu cara mengatasi permasalahan ini adalah dengan pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional. SPAM Regional dibangun untuk meningkatkan penyediaan air bersih pada PDAM lintas batas administrasi kabupaten/kota yang kemudian dikelola dan disalurkan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036 pada tanggal 15 Februari 2016. Terdapat 8 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yang lebih dulu menetapkan Perda RTRW-nya sebelum ditetapkannya Perda RTRWP, yaitu Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Penajam Paser Utara, Kota Samarinda, Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur. Sementara untuk Kab. Berau menetapkan Perda RTRW-nya pada November 2017 lalu. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu saat ini masih dalam proses pengajuan Persetujuan Subtansi ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Terhadap perbedaan waktu dalam menetapkan Perda RTRW Provinsi dan Perda RTRW Kabupaten/Kota menyebabkan masih adanya perbedaan peruntukan pola ruang. Sehingga, perlu dilakukan kajian Peninjauan Kembali guna mensinkronkan dan menyelaraskan Perda RTRW Provinsi dan Perda RTRW Kabupaten/Kota dengan mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali (PK). Berikut disampaikan status Peninjauan Kembali Perda RTRW Kabupaten/Kota :

Tabel 2.41
Status Peninjauan Kembali Perda RTRW Kabupaten/Kota

No.	RTRW Kab/Kota	Tahun PK	Status Pelaksanaan Perda RTRW Kabupaten/Kota										Keterangan		
			Persiapan	SK Penetapan PK	SK Tim PK	PK	Rekom PK	Revisi	Rekom Gubernur	Persub ATR/BPN	DPRD	Evaluasi Provinsi		PERDA	
1	Balikpapan	2016	2016	√	√	2016	Revisi	2017	-	-	-	-	-	-	Target 2018 : Rekom Gub dan Persub ATR/BPN
2	Bontang	2016	2016	√	√	2016	Revisi	2017	2017	-	-	-	-	-	- Terkendala belum adanya kesepakatan pada Lampiran Peta Pola Ruang dengan PT. PKT sebagai stakeholder di Bontang; - Dalam prosesnya, revisi Perda RTRW Kota Bontang dilakukan melalui pencabutan Perda No. 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Bontang Tahun 2012-2032
3	Kutai Kartanegara	2017	2017	√	√	2017	Revisi	-	-	-	-	-	-	-	Telah dilakukan Kajian Awal PK pada awal tahun 2017. Dan telah mendapat hasil Rekom PK pada 27 Desember 2017
4	Kutai Barat	2017	2018	√	√	2018	Revisi	2019	-	-	-	-	-	-	-
5	Samarinda	2018	2018	√	√	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	- Kajian PK dilaksanakan pada Februari 2018; - SK Penetapan PK dan SK Tim PK sedang disusun
6	Penajam Paser Utara	2018	2017	√	√	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	Telah dilakukan Kajian Awal PK pada awal tahun 2017
7	Paser	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Telah dilakukan Kajian Awal PK pada tahun 2018
8	Kutai Timur	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Berau	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modal usahanya di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah, baik itu segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya. Hal ini dikarenakan adanya jaminan keamanan berinvestasi akan menentukan keberlangsungan dan konsistensi gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berani menanamkan modal dan pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian wilayah. Salah satu analisis kinerja yang mempengaruhi iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas yang menunjukkan kondisi keamanan dan jumlah demonstrasi yang menunjukkan situasi demokrasi suatu wilayah.

A. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan bagaimana situasi keamanan di suatu wilayah sehingga aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan nyaman tanpa rasa takut. Selama tiga tahun terakhir terjadi fluktuasi pada angka kriminalitas per 10.000 penduduk dimana pada tahun 2017 terjadi 28-29 kasus kriminalitas diantara 10.000 penduduk. Namun yang perlu ditindaklanjuti adalah persentase tindak kejahatan yang diselesaikan hanya mencapai 35,07 persen. “Pekerjaan Rumah” inilah yang harus dituntaskan oleh aparat penegak hukum agar investor dapat nyaman dan aman dalam menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.42
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Dilaporkan	Tertunggak	Diselesaikan	% Tindak Kejahatan Diselesaikan	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
2013	10.173	3.457	6.686	55,22	31,05
2014	9.918	3.196	6.722	57,73	29,59
2015	11.348	7.149	4.199	62,00	33,11
2016	12.620	3.482	9.138	72,41	32,87
2017	11.705	1.591	4.105	35,07	28,81

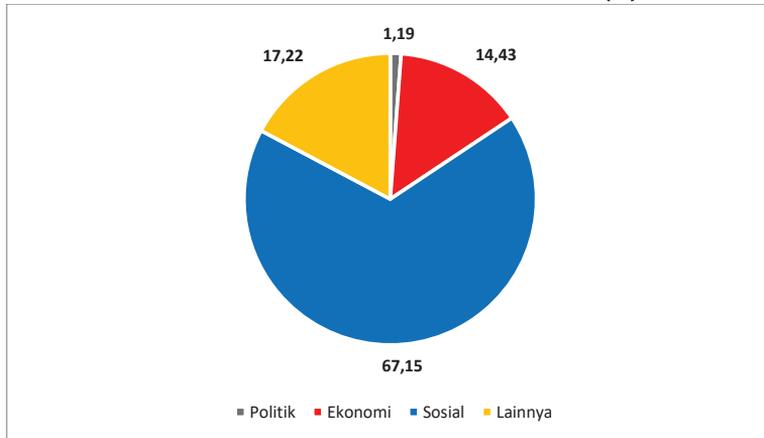
Sumber: Polda Kaltim 2017

B. Demonstrasi

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Jumlah demonstrasi meningkat pada beberapa tahun ini mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2016, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 755 demonstrasi dimana sebanyak 14,43 persen (109 demonstrasi)

merupakan demonstrasi terkait ekonomi; 67,15 persen (507 demonstrasi) terkait sosial; dan sisanya 18,41 persen (139 demonstrasi) terkait politik dan lainnya.

Gambar 2.38
Persentase Demonstrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 (%)



Sumber: Polda Provinsi Kaltim Tahun 2016

Tabel 2.43
Jumlah Demonstrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2016

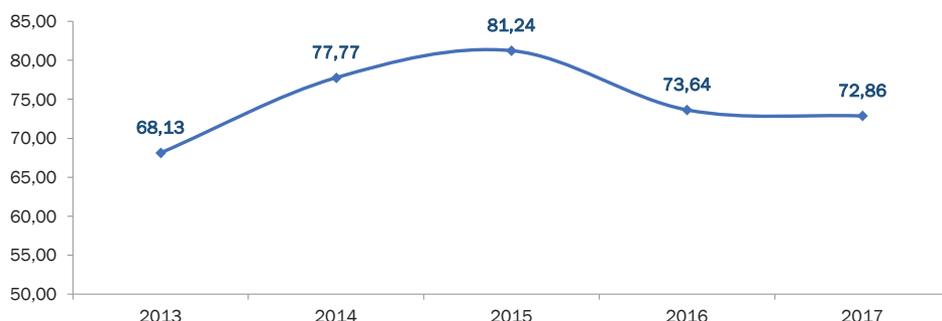
Tahun	Jenis Demo				Jumlah
	Politik	Ekonomi	Sosial	Lainnya	
2011	3	110	220	333	666
2012	3	149	254	406	812
2013	5	182	136	323	646
2014	19	224	189	432	864
2015	14	141	197	95	352
2016	9	109	507	130	755

Sumber: Polda Kaltim, 2017

C. Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksinya mencapai 72,86 pada tahun 2017. Meskipun begitu, angka indeks ini masih cukup fluktuatif di setiap tahunnya sehingga pemerintah daerah harus mempertahankan prestasi demokrasi seperti masa sekarang ini.

Gambar 2.39
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

D. Iklim Investasi Daerah

Ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, terdapat 309 proyek investasi dari PMDN sebesar Rp 25,94 triliun dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 10.018 orang. Sedangkan pada penanaman modal oleh pihak asing terdapat 275 proyek sebesar 0,59 juta USD dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 10.169 orang.

Tabel 2.44
Indikator Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri			Penanaman Modal Asing		
	Jumlah Proyek	Modal (Juta Rp)	Tenaga Kerja Indonesia	Jumlah Proyek	Modal (US\$ 000)	Tenaga Kerja Indonesia
2014	60	12.983.049,70	9.505	297	2.145.665,10	27.055
2015	143	9.611.313,10	24.825	420	2.381.442,30	66.230
2016	243	6.885.124,60	29.023	471	1.181.859,20	22.204
2017	357	10.980.216,40	5.793	566	1.285.215,20	13.335
2018	309	25.941.960,00	12.935	275	587.500,00	12.500

Ditambahkan perbandingan perkembangan investasi kaltim secara nasional dan regional Kalimantan. Dibuktikan dengan data angka yang menunjukkan bahwa investasi belum optimal.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang

diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non produktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

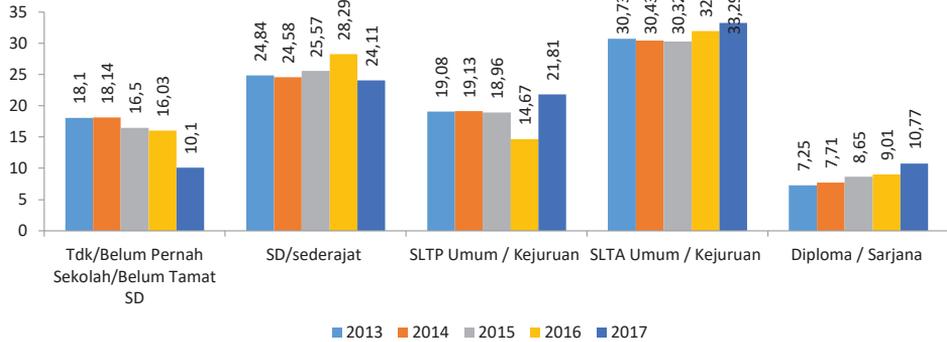
A. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

Terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku perguruan tinggi hanya sebesar 9,01 persen saja, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA (32,00%) dan SD (28,29%). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 16,03 persen.

Hal ini mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan mutu sumber daya manusia. Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.40
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

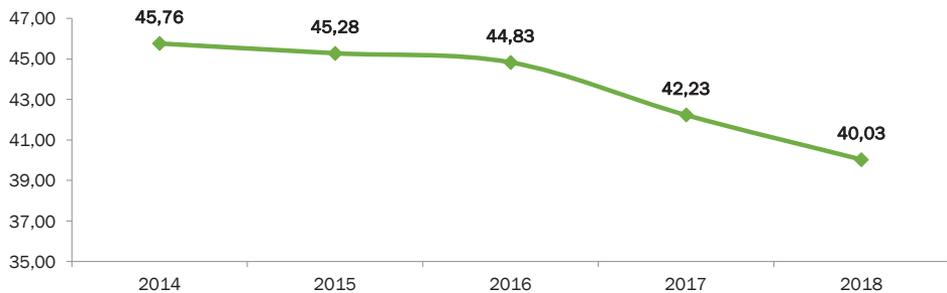


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

B. Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif semakin menurun yang mengindikasikan bahwa beban tanggungan masyarakat produktif semakin ringan dari tahun ke tahun.

Gambar 2.41
Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya harus memiliki validitas dan akurasi serta ketepatan waktu sehingga setiap data dan informasi yang dikembangkan sebagai analisis dan evaluasi pembangunan menjadi relevan. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Evaluasi pembangunan daerah pada periode sebelumnya yang menjadi dasar perumusan perencanaan pembangunan tahunan adalah evaluasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan melalui indikator kinerjanya (*outcome*). Indikator kinerja yang dimaksud adalah variabel untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Selanjutnya, indikator kinerja inilah yang menjadi ujung tombak dalam evaluasi pembangunan daerah sekaligus penentu apakah pencapaian tujuan pembangunan daerah berhasil atau tidak.

Pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 ini, evaluasi pembangunan masih menggunakan evaluasi RPJMD tahun kelima yaitu tahun 2018. Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2018 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi terutama dalam kaitannya dengan pemerataan hasil pembangunan dan perekonomian makro pembangunan daerah.

Evaluasi tersebut akan memberi masukan dalam perencanaan ke depannya apakah akan terus dilanjutkan, disempurnakan, atau akan diganti sepenuhnya dengan kebijakan serta program kegiatan yang baru untuk memberikan optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan seutuhnya. Berikut hasil evaluasi setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Misi I, “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi”, diharapkan menjadi motor penggerak bagi ketercapaian misi-misi yang lain sekaligus modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan analisis capaian program kegiatan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2017, dari 18 Program Prioritas dengan 30 indikator capaian kinerja, maka 77,77 % telah *on-track*, 11,11 % *on-going* dan sisanya sebesar 11,11% masih *off-track*. Atau dengan kata lain bahwa 16 program prioritas telah mencapai sasaran, dan 2 program prioritas belum mencapai sasaran. Dimana program- program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pelaksanaannya baru sebatas pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Disamping itu, keterbatasan anggaran dari APBN dan APBD untuk pengembangan layanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana serta pengembangan layanan perpustakaan juga mempengaruhi pencapaian target sehingga berpengaruh pula terhadap kinerja kelembagaan. Kemudian, Karakteristik wilayah (geografis) yang sulit dan infrastruktur yang terbatas serta belum terkoneksi di beberapa wilayah di Kaltim kurang mendukung percepatan layanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perpustakaan.

Misi II, “Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan”, memiliki tantangan besar dalam pencapaiannya terlebih dengan upaya untuk mengupayakan target terbaru, yaitu sumber daya alam dan energi terbarukan. Misi kedua ini memiliki paling banyak program prioritas. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas mempunyai trend pertumbuhan yang negatif (menurun), karena data dan fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi Kalimantan Timur masih sangat bergantung pada sektor pertambangan migas dan batubara.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti luas sudah mulai menunjukkan trend yang meningkat, tetapi masih di bawah target (10%), namun jika dinilai berdasarkan NTP – sejak tahun 2014 nilainya cenderung terus menurun – fakta tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama lima tahun terakhir belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan petani.

Sasaran untuk mewujudkan Swasembada Beras belum dapat diwujudkan hingga akhir tahun 2018. Meskipun demikian, rasio kemampuan untuk memenuhi beras mengalami peningkatan menjadi 75,53%. Selain dikarenakan peningkatan produksi padi 356.680 ton di tahun 2017 menjadi 383.958 ton di tahun 2018, peningkatan rasio juga disebabkan menurunnya tingkat konsumsi beras per kapita dari 114 kg/kapita/tahun menjadi 89,79 kg/kapita/tahun.

Sedangkan untuk sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan energi Terbarukan belum memberikan dampak yang nyata, karena tingkat capaiannya masih <2%, dan untuk ratio desa yang dialiri listrik selama lima tahun terakhir juga tidak mengalami peningkatan yang berarti.

Misi III, “Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata”, merupakan misi yang seharusnya paling konkrit dirasakan capaiannya, mengingat *output*-nya adalah infrastruktur fisik dan layanan jasa (a.l. transportasi dan komunikasi) yang sangat penting bagi kehidupan keseharian masyarakat.

Evaluasi RKPD 2017 terhadap program-program pembangunan pada misi ketiga menunjukkan bahwa dari 14 program prioritas beserta turunannya pada Tabel 5.1, yang dilaporkan telah memiliki progres *on-track* oleh perangkat daerah terkait adalah 7 program prioritas atau berkisar 50%. Sementara sisanya masih dalam posisi *in-progress* dan bahkan *off-track*. Hampir seluruh program pada misi III memiliki permasalahan yang sama yaitu keterbatasan anggaran meskipun telah diupayakan untuk memberikan pembobotan/pemrioritasan atas infrastruktur dasar utama, disamping permasalahan lainnya seperti pembebasan lahan serta permasalahan lainnya.

Mengingat pentingnya ketersediaan infrastruktur dasar dalam mendukung program pembangunan lainnya ditengah kendala geografis wilayah dan warga masyarakat yang tersebar hingga ke pedalaman, maka telah direkomendasikan untuk lebih selektif dan realistis dalam penetapan program, disamping kepentingan untuk membangun koordinasi yang lebih baik antar tingkat pemerintahan, dari pusat hingga ke kabupaten/kota.

Misi IV, “Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik “, merupakan misi yang sangat disorot oleh publik, mengingat peran pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah pada berbagai tingkatan dewasa ini senantiasa dinilai sangat tidak optimal.

Hasil analisis pada evaluasi RKPD 2017 khususnya misi keempat menunjukkan hasil yang menggembirakan dimana dari 8 program prioritas 100,0 % pada posisi *on-track*, artinya tercapai seluruhnya. Walaupun berdasarkan target telah tercapai, akan tetapi dengan mempertimbangkan tantangan pelayanan publik yang dituntut semakin lebih baik ke depan seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. serta parapihak berkepentingan lainnya, maka masih diperlukan peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur sipil negara atau pemerintahan terkait, dalam hal ini di Kaltim.

Misi V, “Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim”, merupakan bagian dari upaya mendukung program global dan membawa

Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi pelopor program-program prioritas dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Dari 8 (delapan) Program Prioritas berdasarkan pada RPJMD yang telah direvisi (2017) terpantau keberhasilan capaiannya sebanyak 6 buah (75%) pada posisi “on-track” dengan angka >76% (bahkan beberapa melampaui target 2018 yang ditetapkan, sementara sisanya 2 program (25%) hingga data pada Triwulan III masih pada status “on-going”. Capaian ini merefleksikan keberhasilan Kaltim dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

Hal yang perlu diwaspadai bahwa prestasi di bidang lingkungan dapat saja berubah dengan cepat, mengingat dinamika yang tinggi terutama pada aspek sosial (termasuk ekonomi, budaya dan politik) terutama dalam kaitannya dengan situasi lokal dan nasional yang dengan cepat dapat mengubah kondisi lingkungan.

Program yang belum menunjukkan kinerja memuaskan adalah penanaman kembali/rehabilitasi mangrove dan program-program konservasi ekosistem bernilai konservasi tinggi. Berbagai program konservasi ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena dihadapkan pada berbagai kendala, seperti partisipasi para pihak non-SKPD termasuk dalam hal pasokan data yang masih rendah serta masih tingginya angka konflik sosial berkaitan dengan pemanfaatan/tenurial lahan. Koordinasi lintas sektor juga sangat dibutuhkan berkaitan dengan aspek lingkungan, yang sering kali menjadi tupoksi dari lembaga yang berbeda.

Dalam pengejawantahan misi pembangunan daerah, pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 memiliki 19 sasaran pembangunan daerah yang secara hierarki akan memberikan kontribusi dalam keberhasilan pencapaian misi pembangunan. Sasaran pembangunan daerah tersebut memiliki 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) atau sering disebut *impact indicators* yang memiliki fungsi sebagai sebuah ukuran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada setiap tahapannya. Berikut capaian kinerja sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018:

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2018

	Sasaran	Indikator (<i>Impact</i>)	Kondisi Awal 2013	Target Kinerja 2018	Realisasi Kinerja 2018	Interpretasi
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	IPM	73,21	75,70	75,83	On Track
2	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,85	14,00	13,67	On Track

Sasaran		Indikator (Impact)	Kondisi Awal 2013	Target Kinerja 2018	Realisasi Kinerja 2018	Interpretasi
3	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,87	12,00	9,48	On Track
4	Meningkatnya angka harapan hidup	Angka harapan hidup (tahun)	73,52	74,00	73,96	On Track
5	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	6,06	6,00	6,03	On Track
6	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran (%)	7,94	7,00	6,60	On Track
7	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Paritas daya beli/PPP (Perkapita/perhari)	10.981	11.800	11.917	On Track
8	Meningkatnya daya beli masyarakat	Tingkat inflasi (%)	9,65	4+1	3,24	On Going
		Share pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB	14,14	16,42	16,21	On Track
9	Menurunnya Indeks Gini	Indeks tendensi konsumen	112,29	106,80	97,43	On Track
		Indeks Gini	0,3341	0,320	0,342	On Track
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)	2,25	0,5+1	2,67	On Track
		Pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)	5,45	1+1	4,22	On Going
		Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara	5,99	4+1	6,00	On Going
11	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas (%)	5,65	10	7,88	On Track
		Laju pertumbuhan ekonomi Sektor pertanian dalam arti luas	6,44	5,00+1	6,27	On Track
12	Tercapainya swasembada pangan	Rasio pemenuhan beras (%)	72,00	85,00	75,53	On Going
13	Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan	Bauran energi baru terbarukan (%)	0,02	3,00	4,92	On Going
14	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5,00	7,00	7,00	On Track
15	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	5,20	6,00		
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	On Track
16	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	68,00 (baik)	85,00	82,15	On Track
17	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	70,75 (B+)	A (80,00)	BB (74,89)	
		Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tinggi (2-3)	Sangat Tinggi	Tinggi	On Track
18	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	74,07	82,00	77,56	On Track

Sasaran	Indikator (Impact)	Kondisi Awal 2013	Target Kinerja 2018	Realisasi Kinerja 2018	Interpretasi	
19	Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca	Intensitas Emisi (ton CO2/PDRB US \$ juta)	1.500	1.650	1.738	On Track

Sumber: BPS

Tabel 2.46
Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN
1. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya daya saing investasi 2) Struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan dan sektor pengolahan industri migas 3) Pusat pertumbuhan ekonomi yang terpusat pada Kabupaten/Kota yang memiliki keunggulan SDA dan infrastruktur yang relatif baik
2. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi sektor perdagangan dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih tingginya ketergantungan terhadap komoditi strategis dari luar daerah 2) Belum optimalnya peran Pemda dalam mengatasi gejolak pasar 3) Lemahnya rantai distribusi komoditi strategis
3. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi sub sektor perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peremajaan perkebunan masih kurang optimal karena tingginya biaya peremajaan 2) Ketersediaan benih unggul masih kurang 3) Perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit belum memadai
	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan dan penebangan kayu	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum adanya regulasi tentang penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA 2) Masih rendah pengolahan hasil hutan kayu 3) Belum adanya regulasi tentang pembatasan kayu bulat yang keluar dari Kalimantan Timur 4) Belum berkembangnya (diversifikasi) industri pengolahan hasil hutan kayu 5) Kurangnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat disekitar kawasan hutan
	Kontribusi Sub sektor perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Benur udang windu masih didatangkan dari pulau Jawa sedangkan sumber induk berasal dari perairan Balikpapan) 2) Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan metode penangkapan ikan secara tradisional
4. Meningkatnya kemandirian pangan	Rasio pemenuhan kebutuhan daging sapi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih kurang penjiantan pemacek yang ada 2) Bibit ternak unggul sampai pengolahan produk ternak masih belum dilakukan secara mandiri 3) Rendahnya kompetensi peternak 4) Terjadinya beberapa penyakit hewan 5) Usaha peternakan masih berskala rakyat. Belum ada usaha peternakan besar 6) Kecilnya jumlah penambahan peternak (Jumlah peternak sapi sekitar 20.000 peternak. Jumlah peternak total: 130.000)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN
	Rasio pemenuhan kebutuhan pangan beras	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya produktifitas dan luas areal sektor pertanian yang ada Berkurang/minimnya jumlah petani Belum berkembangnya pusat-pusat agribisnis dan sentra pertanian di daerah
5. Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Mutu Tenaga Pendidik	<ol style="list-style-type: none"> Ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia Masih rendahnya minat dan kemampuan masyarakat dalam berwirausaha Masih terbatasnya fasilitas (akses pendidikan terutama pada kawasan terdepan, tertinggal, terluar/3T) Keterbatasan Infrastruktur Pendidikan pada Daerah Perbatasan
6. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemutusan hubungan kerja Belum optimalnya program pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu
7. Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Jumlah penumpang yang terlayani	1) Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan laut, sungai, danau, dan penyebrangan
	Jumlah barang	2) Belum Optimalnya kualitas pelayanan transportasi darat
8. Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi	1) Belum optimalnya kualitas jaringan jalan
		2) Belum optimalnya keterhubungan jaringan jalan yang menghubungkan kawasan strategis provinsi
9. Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Cakupan layanan air minum	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya infrastruktur air minum perpipaan Kurangnya air baku untuk air minum di Kota Balikpapan, Bontang dan wilayah pesisir Prov. Kalimantan Timur
	Luas lahan pertanian yang beririgasi	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya luas lahan pertanian yang mendapat layanan irigasi (baru mencapai 14%) Lokasi pembangunan prasarana irigasi belum terkoneksi langsung dengan lahan pertanian Belum tersedianya <i>database</i> (peta lahan pertanian, daerah irigasi dan sawah beririgasi) Kurang optimalnya koordinasi sektor pertanian dan sektor sumber daya air
	Luas genangan banjir perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> Menurunnya fungsi sungai akibat sedimentasi dan penyempitan badan sungai Drainase perkotaan eksisting tidak berfungsi optimal Penanganan banjir belum komprehensif dari hulu ke hilir
10. Menurunnya kawasan kumuh	Luas kawasan kumuh	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya akses Masyarakat miskin terhadap rumah layak huni Rendahnya kualitas lingkungan kawasan permukiman
11. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	<ol style="list-style-type: none"> Masih terdapat perbedaan peruntukan pola ruang antara RTRWP dan RTRWK Belum tersedianya RRTR KSP dan RDTR Kabupaten/Kota Belum tersedianya dokumen kendali pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN
12. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kualitas pelayanan kesehatan yang belum efektif/efisien terhadap pasien 2) Belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan di daerah pedalaman, perbatasan dan terpencil 3) Distribusi tenaga medis belum merata
13. Menurunnya Tingkat emisi GRK	Tingkat emisi GRK	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih rendahnya penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA 2) Masih rendahnya penanaman pada area cadangan karbon rendah 3) Masih kurangnya perlindungan area cadangan karbon tinggi 4) Masih kurangnya Jumlah perusahaan yang memanfaatkan limbah POME 5) Masih kurangnya perusahaan yang menerapkan penggunaan biodiesel 20%

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 2.47
Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
I	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Jumlah Penduduk	Jiwa	3.331.285	3.363.630	3.394.932	3.441.731	3.505.161	3.536.945	
1.2	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,25	1,71	-1,21	-0,36	3,13	2,67	
1.3	Laju Inflasi	%	9,65	7,66	4,89	3,39	3,15	3,24	
1.4	PDRB per Kapita	Juta Rp	158,47	157,40	147,41	145,40	165,71	179,64	
1.5	Indeks Gini		0,3341	0,3355	0,32	0,32	0,330	0,342	
1.6	Pemerataan Pendapatan Versi World Bank								
	- 40% Rendah	%	19,77	18,92	21,49	20,03			
	- 40% Sedang	%	37,67	36,85	37,91	38,91			
	- 20% Tinggi	%	42,55	44,23	40,60	41,06			
1.7	Indeks Ketimpangan Kemakmuran		0,57	0,54	0,54	*			
1.8	Persentase penduduk miskin	%	6,06	6,42	6,23	6,11	6,19	6,03	
1.9	Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan	kasus	6.686	6.722	4.199	9.138	8.622		
Fokus Kesejahteraan Masyarakat									
1	Pendidikan								
1.1	Angka Melek Huruf	%	97,95	98,59	98,69	98,81	98,96	98,96	
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,87	9,04	9,15	9,24	9,36	9,48	
1.3	APK SD/MI	%	107,57	111,04	112,61	113,76	108,07	108,02	
1.4	APK SMP/MTs	%	91,06	91,49	97,90	97,78	91,46	92,57	
1.5	APK SMA/SMK/ MA	%	82,21	85,54	90,31	87,93	99,51	96,08	
1.6	APM SD/ MI	%	95,91	96,70	97,00	97,13	97,43	98,32	
1.7	APM SMP/MTs	%	76,10	78,73	79,06	79,20	79,58	79,68	
1.8	APM SMA/SMK/MA	%	62,22	67,03	67,78	67,92	68,23	68,39	
2	Kesehatan								
2.1	Angka Harapan Hidup	tahun	73,52	73,62	73,65	73,68	73,70	73,96	
2.2	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup		177,21	157,22	177,00	135,00	*		
2.3	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup		21,00	20,00	21,00	21,00	*		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
2.4	Persentase Balita Gizi Buruk	%	3,90	3,70	3,70	0,10	*		
3	Ketenagakerjaan								
3.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,94	7,54	7,50	7,95	6,91	6,60	
Fokus Budaya dan Olahraga									
1	Kebudayaan								
1.1	Jumlah Grup Kesenian	Unit per 10.000 penduduk	676	735	861	861	870	301	
1.2	Jumlah Gedung Kesenian	Unit per 10.000 penduduk	17	17	17	17	17	21	
2	Pemuda dan Olahraga								
2.1	Jumlah Klub Olahraga	unit	1.045	1.045	1.050	1.050	1.050		
2.2	Jumlah Gedung Olahraga	unit	47	55	97	97	101		
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Fokus Layanan Urusan Wajib									
1	Pendidikan								
1.1	Pendidikan Dasar								
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun	%	99,46	99,33	99,63	99,54	99,67	99,68	
1.1.2	Rasio murid terhadap sekolah								
	- SD Negeri	%	215,24	220,19	220,43	220,36	217,02		
	- SD Swasta	%	248,83	260,04	256,08	254,08	265,50		
	- MI	%	124,89	165,96	183,24	201,42	202,72		
1.1.3	Rasio murid terhadap guru								
	- SD Negeri	%	14	16,48	16,46	16,42	17,56		
	- SD Swasta	%	14	15,95	16,19	16,11	18,52		
	- MI	%	14	12,33	10,96	15,91	16,29		
1.2	Pendidikan menengah								
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah								
	- 13-15 tahun	%	96,62	97,99	97,92	98,18	98,79	98,89	
	- 16-18 tahun	%	73,10	80,50	80,68	80,81	81,32	81,50	
1.2.2	Rasio murid terhadap sekolah								
	- SMP Negeri	%	285,97	299,71	303,78	298,05	296,15		
	- SMP Swasta	%	148,51	155,96	157,32	154,89	162,41		
	- MTs	%	153,11	164,54	155,98	185,00	178,07		
	- SMA Negeri	%	371,26	370,11	395,19	399,5	454,84		
	- SMA Swasta	%	112,76	111,29	120,87	121,01	145,07		
	- MA	%	120,18	121,60	123,92	134,35	149,36		
	- SMK	%	264,04	291,87	332,01	327,75	358,07		
1.2.3	Rasio murid terhadap guru								
	- SMP Negeri	%	13	15,60	16,51	16,22	16,99		
	- SMP Swasta	%	11	11,23	13,70	13,42	15,59		
	- MTs	%	11	9,63	10,18	12,20	13,85		
	- SMA Negeri	%	14	13,95	14,99	15,08	17,49		
	- SMA Swasta	%	8	7,38	10,72	10,71	14,58		
	- MA	%	8	6,69	7,27	9,24	11,58		
	- SMK	%	12	11,21	16,36	14,22	15,21		
1.3	Angka Putus Sekolah								
	- SD/MI	%	0,17	0,15	0,37	0,46	0,33	0,24	
	- SMP/MTs	%	2,89	1,77	2,08	1,82	1,21	1,11	
	- SMA/SMK/MA	%	26,71	19,40	19,32	19,19	18,68	18,45	
1.4	Angka Kelulusan								
	- SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- SMP/MTs	%	99,72	100,00	100,00	99,99	99,90		
	- SMA/SMK/MA	%	99,63	99,96	100,00	99,93	99,98		
1.5	Guru yang memenuhi kualifikasi min. S1/D-IV	Orang	*	65,30	65,30	65,00	66,00		
2	Kesehatan								
2.1	Rasio penduduk terhadap jumlah dokter	Orang	1.756	2.154	1.978	1.726	1.660		
2.2	Rasio penduduk terhadap jumlah puskesmas+pustu	Orang	4.38	4.097	4.036	4.124	3.895		
2.3	Rasio penyandu per satuan balita	(per. 1000)	24,87	29,33	31,02	33,40	34,33		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
2.4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	(per. 1000)	4,09	3,57	3,40	3,39	4,03		
2.5	Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	%	90,86	88,76	91,26	90,12	92,29		
2.6	Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan	%	18,99	21,22	21,98	21,76	20,89		
2.7	Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	11,74	9,18	9,18	11,9	10,5		
2.8	Cakupan Puskesmas	%	180,58	174,76	174,76	174,76	176,87		
3	Pekerjaan Umum								
3.1	Panjang Jalan Provinsi	Km	1.762,07	1.628,07	1.628,07	1.584,13	1.181,45		
3.1.1	Kondisi Mantap	%	48,64	54,08	58,94	66,24	68,24		
3.2	Proporsi kondisi jalan baik	%	50,20	54,95	55,46	42,43	35,69		
3.3	Irigasi dalam kondisi baik	m	12.825	15.839,5	9.206	5.477	6.231		
3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	91,09	76,19	*	*	*		
3.5	Luas Lingkungan Pemukiman (Kumuh)	Ha	282	944	1.314	1.351,47	1.058		
4	Perumahan								
4.1	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih	%	80,87	85,35	89,41	90,63	90,90	90,88	
4.2	Persentase rumahtangga dengan air minum layak	%	*	78,48	78,13	92,25	22,70*)	24,98*)	*)Tidak Termasuk Air Kemasan /Air Isi Ulang
4.3	Persentase rumahtangga dengan sanitasi layak	%	72,61	72,65	68,83	76,76	72,83	-	
4.4	Persentase rumahtangga penerangan listrik	%	96,13	96,57	98,73	98,67	99,14	99,53	
4.5	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	unit	1000	350	365	150	62	39	
5	Penataan Ruang								
5.1	Penyelenggaraan tata ruang	Skor	64,83	67,83	69,14	72,14	73,44		
6	Perhubungan								
6.1	Jumlah Kendaraan Bermotor	unit	2.013.727	2.233.278	2.376.033	2.398.117	2.428.324	2.671.156	
6.2	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kejadian	1.094	1.228	867	667	602		
6.3	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	m	7,81	7,09	7,12	6,89	6,51		
6.4	Jumlah Pengguna Angkutan Umum	Orang	10.913.500	10.913.500	9.241.800	12.127.125	10.232.985		
6.5	Jumlah penumpang angkutan laut yang turun	Orang	687.407	456.539	209.854	223.305	256.425	125.824	
6.6	Jumlah penumpang angkutan laut yang naik	Orang	613.991	375.124	193.981	229.755	249.352	121.503	
6.7	Jumlah penumpang angkutan udara yang datang	Orang	3.642.539	3.791.629	3.945.625	4.025.784	4.216.892	2.108.746	
6.8	Jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat	Orang	3.593.269	3.955.136	3.693.028	*	*	2.254.250	
7	Lingkungan Hidup								
7.1	Indeks kualitas air sungai		7,59	3,04	2	3	*		
7.2	Penegakan hukum lingkungan	%	86,21	86,36	100	100	100		
7.3	Persentase sampah terangkut per hari	%	64,61	90,33	66,43	87,51	88,21		
8	Kependudukan dan Catatan Sipil								
8.1	Kepemilikan KTP	Orang	1.425.905	1.092.011	1.148.718	2.373.545	2.238.884		
8.2	Kepemilikan Akta Kelahiran	Orang	1.351.261	695.301	1.181.363	1.433.347	1.511.591	1.416.757	Semester I
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
9.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (PNS Pemprov Kaltim)	%	12,87	13,35	12,93	14,75	16,77		
9.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	39,95	42,26	48,93	47,69	42,33	45,35	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
9.3	Banyaknya anak terlantar (0-21 tahun)	Anak	30.978	30.927	30.927	11.511	*		
10	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
10.1	Persentase akseptor KB terhadap PUS	%	67,46	70,29	65,51	69,86	70,61	70,11	s/d Mei 2018
10.2	Banyaknya peserta baru KB	Orang	70.336	76.76	59.807	70.832	71.027	30.502	s/d Mei 2018
10.3	Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	%	22,81	24,02	65,35	64,44	60,86		
11	Sosial								
11.1	Banyaknya panti asuhan	Unit	134	111	118	124	125	125	
11.2	Banyaknya anak yang diasuh di panti asuhan	Anak	7.368	7.296	7.296	7.256	5.469	5.469	
11.3	Banyaknya panti wredha	Unit	4	4	4	3	4	4	
11.4	Banyaknya penghuni panti wredha	Orang	200	267	277	210	210	210	
12	Ketenagakerjaan								
12.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63,53	63,48	62,39	67,79	63,75	64,99	
12.2	Persentase penduduk bekerja terhadap usia kerja	%	58,48	58,70	57,71	62,40	59,35	60,70	
13	Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah								
13.1	Jumlah Koperasi	Unit	5.916	5.319	5.847	5.546	5.184	5.406	
13.2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	360.733	423.267	445.682	452.309	452.309		
14	Penanaman Modal								
14.1	Realisasi proyek PMDN	Juta Rp	18.441.377	12.983.049	9.611.313	6.885.124	10.980.216	25.941.960	
14.2	Realisasi proyek PMA	US \$ 000	1.324.197	2.145.665	2.381.442	1.181.859	1.285.215	587.500	
15	Kebudayaan								
15.1	Jumlah event budaya	Event	56	55	60	60	70		
15.2	Jumlah peninggalan sejarah dan purbakala	Unit	161	162	165	165	165		
15.3	Jumlah museum	Unit	12	12	14	14	14		
15.4	Jumlah taman budaya	Unit	1	2	2	2	2		
15.5	Jumlah desa kerajinan tradisional	Desa	6	6	12	14	14		
16	Kepemudaan								
16.1	Jumlah karang taruna	Unit	1.322	1.251	1.251	*	*		
17	Ketahanan Pangan								
17.1	Ketersediaan pangan utama	%	74,43	68,89	67,62	75	77,56		
18	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
18.1	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masy. yang aktif	Unit	1.018	1.145	1.146	1.032	1.152	1.152	
18.2	Jumlah LSM dan Ormas	Unit	826	161	*	*	*		
19	Statistik								
19.1	Publikasi "Kabupaten/Kota Dalam Angka"	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
19.2	Publikasi "PDRB Kabupaten/Kota"	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
20	Komunikasi dan Informatika								
20.1	Website milik pemerintah daerah	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
20.2	Persentase penduduk usia 5 thn keatas menggunakan HP	%	95,34	96,27	97,12	100	*		
21	Perpustakaan								
21.1	Jumlah Perpustakaan	Unit	1.743	1.813	1.893	1.907	2.611	2.611	
22	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian								
22.1	Jumlah PNS	Orang	7.235	7.163	7.234	6.525	11.566	11.361	Angka Sementara
22.2	Opini BPK		WTP	WDP	WTP	WTP	WTP		
22.3	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		68,00	72,32	76,65	75,00	80,56		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Fokus Urusan Pilihan									
1	Pertanian								
1.1	Produksi padi	Ton	439.439	426.567	408.782	305.337	400.040	385.544	Aram I
1.2	Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per Ha	Kw	42,70	42,55	41,20	32,05	43,22		
1.3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	6,62	7,00	7,50	8,22	7,96	7,88	
1.4	Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB	%	0,27	0,23	0,24	0,20	0,25		
1.5	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	%	2,55	3,75	3,77	4,26	4,27		
2	Kehutanan								
2.1	Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,13	1,16	1,33	1,34	1,40		
3	Energi dan Sumber Daya Mineral								
3.1	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	55,15	50,21	45,16	43,17	46,31	46,35	
4	Parwisata								
4.1	Jumlah wisnus dan mancanegara	Orang	1.912.661	3.941.979	4.320.025	5.547.435	7.244.659	3.819.947	
4.2	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,66	0,72	0,84	0,91	0,93	0,97	
5	Kelautan dan Perikanan								
5.1	Produksi Perikanan	Ton	214.651,1	430.171	239.959,5	248.005	233.592	160.413	Semester I 2018
5.2	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	%	1,19	1,30	1,50	1,55	1,49		
6	Perdagangan								
6.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	4,29	4,58	5,13	5,53	5,30	5,59	
6.2	Nilai ekspor	000 US	31.003.083	25.825.021	17.483.270	13.841.060	17.480.900	18.356.160	
6.3	Nilai impor	000 US	9.512.101	8.471.495	5.506.230	3.713.820	3.230.970	4.558.240	
6.4	Neraca perdagangan luar negeri	000 US	21.490.982	17.353.526	11.977.040	10.127.240	14.249.930	13.797.920	
7	Perindustrian								
7.1	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	17,96	19,32	20,61	20,62	19,07	18,27	
7.2	Kontribusi subsektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB	%	5,96	6,33	7,34	7,78	8,02		
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian								
1.1	Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/Bulan	1.096.709	1.136.173	1.193.642	1.296.926	1.443.928		
1.2	Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	508.706	508.801	549.351	587.920	663.485		
1.3	Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita	Rp/Bulan	588.003	627.372	644.291	709.006	780.443		
1.4	PDRB per kapita	Juta Rp	158,47	157,40	147,41	145,40	165,71		
1.5	Pendapatan regional per kapita	Juta Rp	64,12	61,17	50,63	50,27			
1.6	Jumlah Koperasi	Unit	5.916	5.319	5.287	5.004	5.184	5.406	
2	Pertanian								
2.1	Nilai tukar petani	%	95,30	99,93	98,61	98,14	97,16	94,48	
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
1	Perhubungan								
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	M	7,81	7,09	7,12	6,89			
2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian								
2.1	Jumlah kantor perbankan	Unit	580	587	611	678	689		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
2.2	Jumlah akomodasi (hotel/penginapan)	Unit	542	657	667	695	698	661	
2.3	Jumlah rumah makan/restoran	Unit	943	974	1.530	1.620	2.088	2.085	
3	Lingkungan Hidup								
3.1	Persentase rumahtangga dengan sumber air bersih	%	80,87	85,35	89,41	90,63	90,90	90,88	
4	Komunikasi dan Informatika								
4.1	Daya listrik yang diproduksi	MWh	2.666.440	2.930.573	3.110.170	3.286.004	3.230.402		
4.2	Jumlah pelanggan listrik	Titik	663.582	736.594	791.553	842.003	904.937		
Fokus Iklim Berinvestasi									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian								
1.1	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Juta Rp	30.892.361	37.872.765	39.379.342	24.403.200	28.202.100	5.128,17	s/d tw 3
Fokus Sumber Daya Manusia									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian								
1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		73,21	73,82	74,17	74,59	75,12		
1.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		63,12	53,74	55,96	56,93	56,64		
1.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		84,69	84,75	85,07	85,60	85,62		
1.4	Rasio ketergantungan		46,20	45,76	45,28	44,83	42,23	39,70	Semes ter 1

Sumber: Gabungan dari berbagai sumber (diolah) * : Data Tidak Tersedia

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

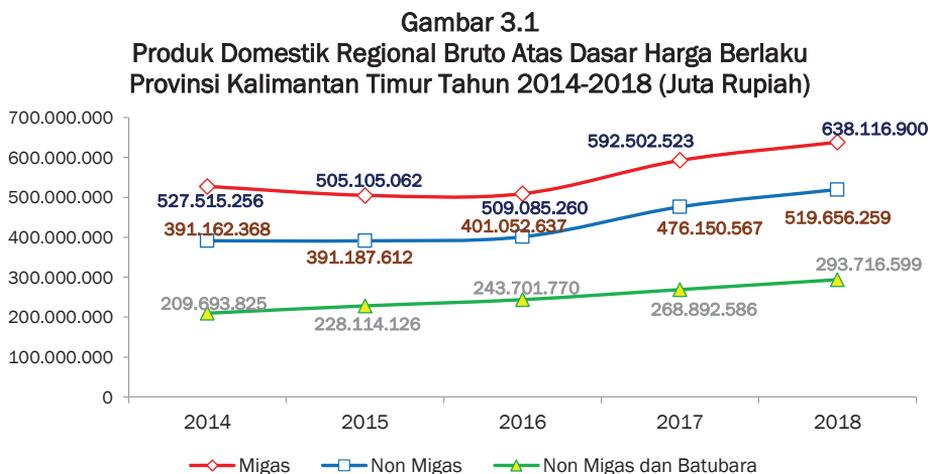
Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal yang meliputi analisa perkembangan ekonomi daerah serta faktor-faktor penghambat maupun faktor pendorong yang mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. Disamping itu untuk menjamin integrasi dengan arah pembangunan nasional, arah kebijakan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2020 juga disusun dengan memperhatikan arah kebijakan ekonomi pada RKP Tahun 2020.

3.1.1. Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada RKP 2020

A. Kinerja Ekonomi Daerah

1. Produk Domestik Regional Bruto

Nilai Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan selama periode 2014–2018, namun pada tahun 2015 PDRB Kaltim turun menjadi Rp 505,11 triliun. Menurunnya kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2015 merupakan dampak dari dominasi struktur perekonomian Kalimantan Timur pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Adapun sektor yang mendominasi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian adalah sektor migas dan batubara.



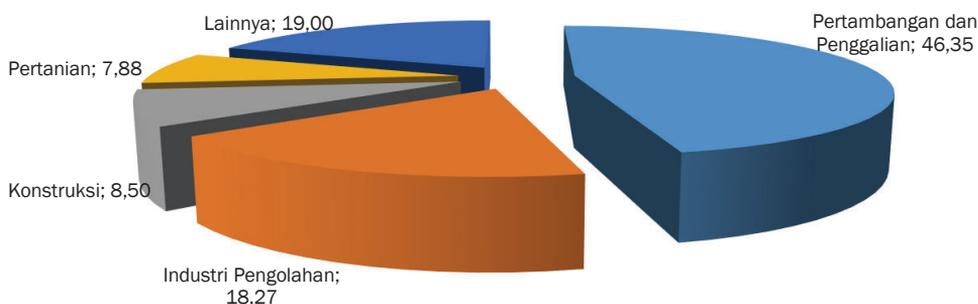
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Dampak dari gejolak ekonomi global dengan menurunnya harga migas dan batubara di pasar internasional merupakan faktor penyebab melemahnya kinerja sektor migas dan batubara di Kalimantan Timur pada tahun 2015. Seiring membaiknya harga minerba di pasar internasional membawa dampak positif terhadap perekonomian Kalimantan Timur yang terlihat dari meningkatnya nilai PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 592,50 trilyun dan Rp 638,12 trilyun.

2. Struktur PDRB

Struktur perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha tahun 2018 masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 46,35 persen dan industri pengolahan sebesar 18,27 persen. Selama 2 tahun terakhir, sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan, setelah 3 tahun sebelumnya mengalami kontraksi. Sementara itu, industri pengolahan selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan laju pertumbuhan. Pertanian yang merupakan salah satu sektor unggulan masa depan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi selama 2 tahun belakangan ini, yakni 5,70% di tahun 2017 dan 6,27% di tahun 2018. Laju pertumbuhan yang cukup tinggi ini perlu diantisipasi dengan penyiapan industry manufaktur dan hilirisasi dari produk-produk pertanian yang dihasilkan.

Gambar 3.2
Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (%)
Tahun 2018 (Tahun Dasar 2010)



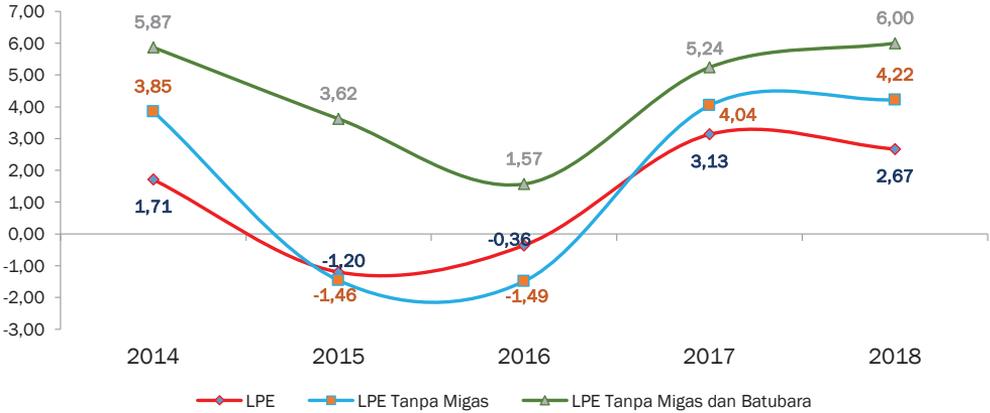
Sumber : BPS PProvinsi Kalimantan Timur, 2018

3. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam selama lima tahun terakhir. Tentunya penurunan paling tajam terjadi pada tahun

2015, saat perekonomian global dihantam oleh terpekulnya harga mineral dan batubara ke level terendahnya yang berimbas pada perekomian Kaltim yang sangat bergantung pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kaltim terkoreksi hingga negatif 1,20 persen. Demikian pula pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang turun hingga negatif 1,46 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara tetap tumbuh positif sebesar 3,62 persen, namun melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,87 persen.

Gambar 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (%)



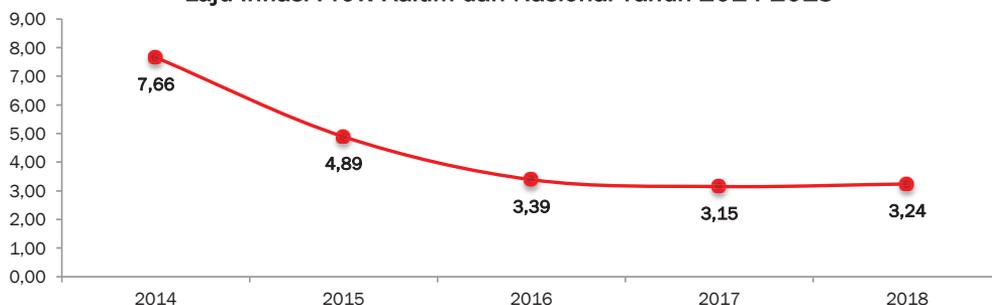
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Meskipun harga migas dan batubara pada tahun 2016 mulai membaik, kinerja perekonomian Kalimantan Timur masih belum pulih, meski demikian kontraksi mengecil menjadi sebesar negatif 0,36 persen pada tahun 2016, Namun pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara melambat hanya sebesar 1,57 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi non migas semakin turun menjadi sebesar negatif 1,49 persen. Selanjutnya pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang sempat meningkat tajam di tahun 2017 harus mengalami perlambatan menjadi sebesar 2,67 persen, namun sebaliknya pertumbuhan ekonomi non migas terus melaju menjadi sebesar 4,22 persen, begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara menjadi sebesar 6 persen. Dari gambaran ini terlihat bahwa transformasi ekonomi di Kaltim mulai berjalan, meskipun tidak secepat yang diharapkan. Hal ini perlu mendapat apresiasi dan dukungan agar perekonomian Kaltim lebih stabil dan memiliki ketahanan terutama dalam menghadapi perubahan harga minerba yang sangat dipengaruhi oleh permintaan global.

4. Inflasi

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun dimana paling tinggi terjadi pada tahun 2014 (7,66%) dan paling rendah di tahun 2017 (3,15%) serta naik tipis sebesar 3,24% pada tahun 2018. Rendahnya laju inflasi pada tahun terakhir ini dipicu oleh beberapa faktor yang menyebabkan kelesuan perekonomian daerah, yaitu: terhambatnya distribusi berbagai komoditas barang dan jasa; kelangkaan beberapa komoditas, baik karena aksi spekulasi/penimbunan barang maupun keterbatasan produksi komoditas tersebut; hingga kebijakan perekonomian nasional yang berdampak pada perekonomian regional.

Gambar 3.4
Laju Inflasi Prov. Kaltim dan Nasional Tahun 2014-2018



B. Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan 2020

1. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara cermat dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup :

1. Harga komoditas ekspor diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan tahun 2019, terutama batubara;
2. Kebijakan limitasi impor batubara oleh Tiongkok;
3. Penurunan investasi swasta asing (PMA);
4. Tren penurunan harga minyak dunia yang masih berlanjut hingga 2020;
5. Penurunan tingkat produktivitas di beberapa negara dunia tujuan utama ekspor komoditi utama Kalimantan Timur dan fenomena *aging population* di negara-negara maju berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi global yang relatif terbatas dalam jangka menengah.

6. Risiko meningkatnya proteksionisme di beberapa negara tujuan utama ekspor komoditi Kalimantan Timur. Perbaikan aktivitas perekonomian dan perdagangan di tingkat global akan dihadapkan pada beberapa risiko, seperti kebijakan pemerintahan Eropa yang ingin meningkatkan tarif terhadap negara-negara tertentu akan berdampak pada perdagangan global, serta risiko adanya kebijakan negara China dan Jepang pada penggunaan energi yang ramah lingkungan;
7. Pertambangan nonmigas mendapatkan risiko tekanan dari negara mitra dagang utama yang terus melakukan *shifting* ke arah sumber energi terbarukan. Kebijakan *green economy* di Tiongkok dan Korea Selatan akan berdampak pada permintaan batubara Kaltim. Serta adanya larangan impor batubara pada beberapa pelabuhan kecil Tiongkok. Kemudian kondisi oversupply batubara di India juga akan berdampak pada kinerja ekspor batubara ke India;
8. Berakhirnya *long term contract* industri LNG dengan Jepang akan berpengaruh terhadap kinerja industri Kaltim secara umum akibat beroperasinya beberapa reaktor nuklir Jepang sehingga berdampak pada turunnya impor LNG;
9. Masih lemahnya aktivitas sektor swasta dan masyarakat. Rendahnya pertumbuhan kredit perbankan merupakan indikasi aktivitas sektor swasta dan masyarakat yang masih rendah. Beberapa faktor penyebabnya adalah penurunan permintaan dan operasionalisasi kawasan-kawasan industri masih belum optimal/berjalan.

2. Peluang

Ekonomi Kaltim Tahun 2019 dan 2020 diperkirakan tetap tumbuh positif namun masih terbatas. Dari dalam negeri, RDMP RU V yang saat ini tengah dilakukan oleh PT. Pertamina (persero) dan Pembukaan serta beroperasionalnya pabrik baru di KEK Maloy dan Kawasan Industri Kariangau diperkirakan akan menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan perekonomian Kalimantan Timur Tahun 2019 dan 2020 khususnya pada sektor industri, perkebunan, konstruksi dan PMTB. Disamping itu, dengan beroperasinya Bandara Samarinda Baru dan Jalan Tol Samarinda-Balikpapan dapat memacu pergerakan perputaran perekonomian di Kalimantan Timur.

Kemudian didukung lagi dengan adanya Kebijakan DMO atau *Domestic Market Obligation* berupa kewajiban produsen batu bara domestik untuk memasok produksi batu bara bagi kebutuhan PT PLN (Persero). Serta adanya mandatori program B20 yang dinilai mendukung kebijakan energi baru dan terbarukan yang akan mendorong terciptanya ketahanan energi nasional dan daerah. Dimana hal ini juga dianggap dapat mendorong stabilisasi harga CPO.

C. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada RKP 2020

Tema pembangunan tahunan nasional pada RKP tahun 2020 adalah **“Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Pada RKP tahun 2020, Kalimantan Timur diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Adapun sektor yang menjadi kontributor utama adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan. Didukung dengan pengembangan sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor perdagangan besar dan eceran.

Untuk mencapai target ekonomi tersebut, selanjutnya dalam RKP tahun 2020 dijabarkan arah pengembangan wilayah Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah, khususnya kesenjangan di daerah perbatasan dan dengan wilayah lainnya.
2. Penguatan konektivitas antar pusat-usat pertumbuhan wilayah
3. Sektor industri pengolahan ditopang dengan mewujudkan kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan yang sekaligus dapat mendukung industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batu bara, serta minyak dan gas bumi.
4. Pengembangan Kawasan strategis yang diarahkan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian wilayah Kalimantan Timur (KEK Maloy (industri pengolahan CPO) dan Kawasan Industri Karinagau (industri pengolahan kayu, dan lainnya) dengan mengintegrasikan kawasan industri/pariwisata dan infrastruktur pendukung (transportasi, energy, logistik).
5. Pengembangan sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan.
6. Internalisasi risiko/kerawanan bencana dalam pembangunan kawasan padat dan infratsruktur wilayah

3.1.2. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

A. Sasaran

Pada tahun 2019, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Sasaran ekonomi makro pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

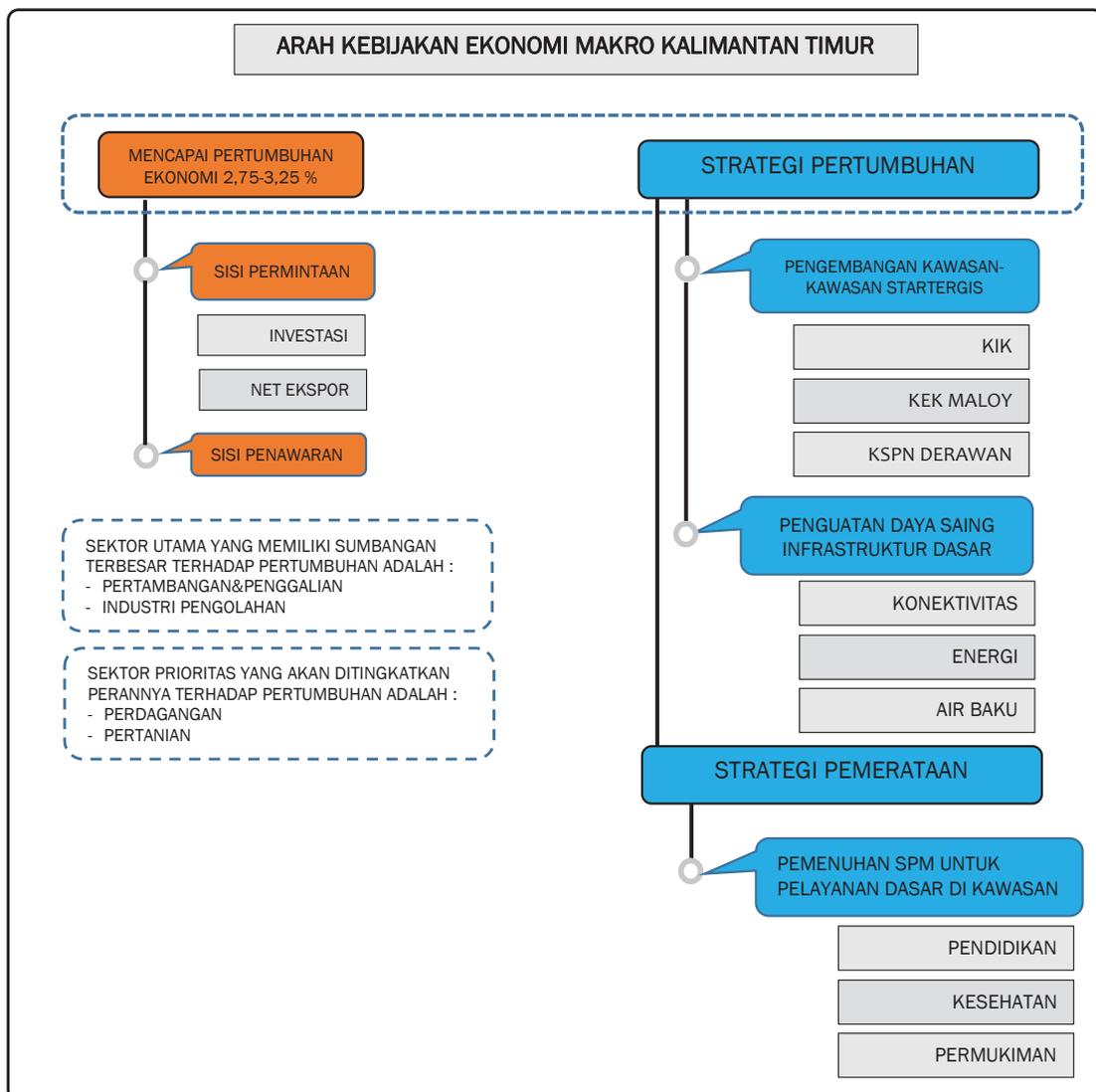
Tabel 3.1.
Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Sasaran Ekonomi Makro Daerah		2018	Target 2019	Target 2020
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,67	2.5±1	2.75-3.25
2	Investasi (trilyun Rp)	33,81	31,50	33,08
3	Inflasi	3,24	4±1	3.0±1
4	Indeks Pembangunan Manusia	74,59	75,30	75,43
5	Indeks Gini	0,342	0,329	0,329
6	Tingkat Kemiskinan	6,03	6,12	6,00
7	Tingkat Pengangguran	6,60	6,51	6,35

Sumber : Target berdasarkan hasil analisa dan perhitungan

Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Kalimantan Timur tahun 2020 dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 3.5
Arah Kebijakan Ekonomi Makro Kalimantan Timur Tahun 2020



1. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 2,75-3,25 Persen

1) Sisi Permintaan

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 2,75-3,25 persen membutuhkan reformasi kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam mencapai target tersebut. Dalam kondisi pemulihan ekonomi global yang diperkirakan masih terbatas dan ruang fiskal yang juga terbatas,

pencapaian target 2,75-3,25 persen harus didorong oleh peningkatan permintaan domestik melalui Investasi dan Net Ekspor Antar Daerah. Kontribusi investasi yang tercermin melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 30,18 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur di tahun 2020. Dimana PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya. Untuk itu diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana pendukung nilai tambah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung industri pengolahan dalam hal ini yang mendukung hilirisasi industri di Kalimantan Timur.

Net Ekspor Luar Negeri diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 20,72 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur di tahun 2020. Sementara Net Ekspor Antar Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 25,84 persen, guna mendukung penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta mengindikasikan adanya peningkatan pada perdagangan domestik Kalimantan Timur. Dimana aktivitasnya diarahkan pada ekspor pada produk perikanan dan perkebunan, untuk itu perlu didukung dengan kegiatan pengembangan produktivitas perikanan dan perkebunan, dan juga pengembangan Kawasan Industri Kariangau-Buluminung dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.

2) Sisi Penawaran

Dari sisi penawaran, dua sektor utama yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar diharapkan mampu menjadi penghela pertumbuhan ekonomi. **Sektor utama yang memiliki kontribusi dominan terhadap perekonomian Kalimantan Timur adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan.** Sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi terbesar mencapai 46,35 % pada tahun 2018. Sektor ini sangat bergantung pada aktivitas ekonomi global karena mencakup tingkat harga minerba di pasar internasional yang rentan akan guncangan. Pada tahun 2020 sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan masih mendominasi dengan kontribusi sekitar 42 % sedikit menurun dengan catatan peningkatan kontribusi pada sektor lainnya yang cukup potensial atau dengan kata lain diharapkan terjadinya perubahan struktur ekonomi yang berbasis pertambangan kepada struktur ekonomi berbasis non pertambangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kontribusi sektor pertambangan dan penggalian tidak bisa diturunkan secara signifikan mengingat multiplier effect yang ditimbulkan jika terjadi penurunan tajam pada sektor ini. Maka salah satu caranya adalah bukan menurunkan kinerja sektor pertambangan dan penggalian tapi memberikan dorongan dan suntikan pada sektor lain untuk tumbuh dan berkontribusi tinggi.

Disamping sektor pertambangan dan penggalian, sektor utama lainnya adalah industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar kedua pada pembentukan PDRB Kalimantan Timur. Pada tahun 2018 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 18,27 %, sedikit menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Keinginan Kalimantan Timur untuk mempercepat hilirisasi industri tentunya akan memacu pertumbuhan dan pengembangan berbagai aspek pada industri pengolahan. Dimana pada tahun 2020 diharapkan sektor industri pengolahan mampu memberikan kontribusi sebesar 21,94% guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2020 mendatang. Sektor industri pengolahan merupakan alternatif sumber pertumbuhan tertinggi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi berkualitas di Kalimantan Timur dan memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Untuk itu diperlukan program – program pengembangan sentra-sentra industri potensial, program peningkatan dan pengembangan industri, program peningkatan produktivitas perkebunan, dan pembangunan jalan dan jembatan untuk akses menuju lokasi industri atau outlet.

Sektor potensial yang dijadikan prioritas menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas di Kalimantan Timur adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan. Sektor pertanian pada tahun 2018 memberikan kontribusi sebesar 7,88 % terhadap PDRB Kalimantan Timur. Sektor pertanian akan menjadi salah satu alternatif sumber pertumbuhan baru, meskipun perannya masih kecil jika dibandingkan sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan. Namun, jika melihat *long term* dan potensi wilayah di Kalimantan Timur, sektor ini mempunyai nilai strategis terutama dalam perdagangan domestik. Tahun 2020 sektor pertanian diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 9,77 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur, tentunya perlu didukung dengan pelaksanaan program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan, dalam mendukung peningkatan produktivitas produk pertanian, perikanan dan peternakan.

Pada sektor perdagangan dianggap memiliki potensi sebagai salah satu alternatif pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur karena dianggap mampu bertahan ditengah kontraksi ekonomi global. Kontribusi sektor perdagangan di Kalimantan Timur tercatat sebesar 5,59 %. Menurut catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur sektor ini merupakan usaha yang paling banyak digeluti oleh masyarakat. Pada tahun 2020 sektor perdagangan diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 6,78 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Hal ini sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas dan relevansi terhadap pengembangan ekonomi

kerakyatan. Namun dalam hal ini diperlukan dorongan dari pemerintah berupa pelaksanaan Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah, Program pengembangan perdagangan dalam negeri dan Program pengembangan kawasan industri.

2. Strategi Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dimana, pertumbuhan positif memberikan banyak dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

- 1) **Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis** guna mempercepat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan berbasis pada sektor-sektor unggulan masing-masing. Dimana didalam mendukung proses pengembangan sekaligus akan dilakukan peningkatan kapasitas SDM (pendidikan vokasi dan menengah) dan kemudahan berusaha dan insentif investasi. Hal ini dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan berkualifikasi serta untuk mendorong investasi dalam negeri. Sehingga penciptaan nilai tambah dari kawasan strategis untuk menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi.
- 2) **Penguatan Daya Saing Infrastruktur Dasar** di Kalimantan Timur mencakup konektivitas, energi, dan air baku. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas sentra produksi Kawasan Industri dan Outlet serta penyediaan sarana dan prasarana dasar pendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan energi dan air baku sebagai bagian dari mendukung pengembangan kawasan strategis dalam beroperasi terutama untuk meningkatkan produktivitasnya.

3. Strategi Pemerataan

Mempercepat pengurangan kesenjangan (antar individu dan antar wilayah) melalui peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dengan mendorong sektor-sektor berbasis ekonomi kerakyatan terutama di daerah 3T.

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

3.2.1. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah pada Tahun 2020 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
2. Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU dan DAK mengalami peningkatan;
3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah di Kalimantan Timur, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan system informasi data mengenai objek wajib pajak, manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui peningkatan dan *perluasan* obyek, intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3. Pendayagunaan asset daerah;
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
5. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2020, beberapa kegiatan Intensifikasi yang dilakukan, antara lain:

1. Bidang Pajak Daerah

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kebijakan:
 - a. Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui *system online* se-Kalimantan Timur, khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
 - b. Menyediakan sarana mobilitas Samsat Jelajah.
 - c. Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif Progresif sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
 - d. Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
 - e. Melakukan Kegiatan operasional/razia lapangan pendataan di seluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan kebijakan:
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi tentang perekonomian khususnya fiskal terkait kendaraan bermotor dan suku cadang serta pembiayaan, sehingga dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membeli kendaraan baru.
 - b. Hasil evaluasi perkembangan potensi obyek pajak dan hasil evaluasi realisasi penerimaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan mengalami perbaikan.
 - c. Kecenderungan masyarakat Kaltim membeli kendaraan Low Cost Green Car (LCGC) baru yang harganya lebih terjangkau.

- d. Semakin banyaknya layanan transportasi berbasis Online juga berkontribusi besar dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kendaraan Roda 4 dan 2 di tahun 2020.
 - e. Perusahaan leasing lebih selektif memilih calon pembeli yang lebih produktif.
 - f. Pertumbuhan ekonomi Kaltim yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro pada Tahun 2020 diperkirakan akan stagnan sehingga berpengaruh terhadap penerimaan di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - g. Mengintensifikasikan penelitian persyaratan untuk menjaring BBN II terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan.
 - h. Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah kepada para dealer dan agen tunggal pemegang merk termasuk badan leasing.
 - i. Melakukan kegiatan penagihan dan pendataan terhadap perusahaan pengguna alat berat/besar yang beroperasi di Kalimantan Timur.
 - j. Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui sistem online se-Kalimantan Timur, khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
 - k. Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
 - l. Melakukan kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan kebijakan:
- a. Memberlakukan tarif tunggal sebesar 7,5 persen secara penuh sesuai Perda Nomor 01 Tahun 2011.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (BPH-Migas, Kemendagri & Kemenkeu) terhadap penyaluran BBM di Kalimantan Timur.
 - c. Menginstruksikan kepada seluruh penyedia BBM yang beroperasi di Kalimantan Timur wajib untuk memiliki izin wajib pungut (WAPU) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
 - d. Melakukan audit terhadap seluruh penyedia BBM atas penjualan BBM yang membayar PBBKB.
 - e. Melakukan kegiatan pendataan dan pemberian nomor NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi setiap agen penjualan BBM.
 - f. Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku kepada seluruh penyedia BBM secara berkala, termasuk melakukan rekonsiliasi penilaian dan penjualan BBM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dengan kebijakan:
- a. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertambangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- b. Melakukan kegiatan operasional terpadu secara berkala setiap triwulan.
- c. Mengaktifkan tim intensifikasi pada tingkat Kabupaten/Kota.

2. Bidang Retribusi Daerah, dengan kebijakan:

- 1) Merumuskan seluruh kebijakan yang menjadi dasar pungutan.
- 2) Mengadakan monitoring dan bimbingan teknis pungutan dalam setiap penyetoran.
- 3) Memberikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dalam rangka penertiban pungutan.
- 4) Melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas pungutan bidang Retribusi Daerah dengan instansi.
- 5) Melakukan sosialisasi pungutan Retribusi Daerah secara terpadu dengan instansi terkait.
- 6) Memotivasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana senantiasa meningkatkan pelayanan yang memberikan kontribusi peningkatan Penerimaan Asli Daerah.

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2018 s/d proyeksi Tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut dimana perkembangan pendapatan daerah secara umum dapat dilihat. Dari tahun 2015 hingga 2017 rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mengalami penurunan -5,31%. Ini menunjukkan turunnya pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain PAD Yang Sah.

Tabel 3.2.
Realisasi dan Target Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Uraian	2018	2019	2020
1.1	Pendapatan Asli Daerah	4.281.264.186.000	5.452.964.353.550	6.362.974.720.000
1.1.1	Pajak Daerah	3.320.000.000.000	4.420.000.000.000	5.236.700.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	25.838.100.000	28.616.725.000	33.239.185.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	217.297.204.481	224.523.866.374	227.111.724.398
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	718.128.881.519	779.823.762.176	865.923.810.602
1.2	Dana Perimbangan	1.339.620.357.000	5.059.832.628.500	5.159.079.507.000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak	2,019,620,357,000	3.038.477.121.500	3.137.724.000.000
1.2.2	DAU	767.682.423.000	815.693.641.000	815.693.641.000
1.2.3	DAK	1.117.790.605.000	1.205.661.866.000	1.205.661.866.000
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	865.320.605.000	-	-
1.3	Lain-Lain PD yang sah	36.733.000.000	36.827.031.200	12.420.000.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	11.982.312.125	12.272.000.000	12.420.000.000
1.3.2	Dana Penyesuaian		-	
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	24,750,687,875	14.671.639.200	-
Jumlah Pendapatan Daerah		8.154.749.005.918	10.549.624.013.250	11.534.474.227.000

3.2.2. Belanja Wajib dan Mengikat Daerah

Tabel 3.3.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

NO	URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT	PROYEKSI TAHUN 2020
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.910.340.864.255
1	Belanja Pegawai (Gaji & Tunjangan)	2.187.901.347.513
2	Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2020	2.977.391.300.000
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	24.513.262.080
4	Belanja Hibah :	820.534.954.662
	a. Belanja Hibah Tenaga Pendidik dan Kependidikan	7.495.238.400
	b. BOSDA	160.662.700.000
	c. BOSNAS	562.786.400.000
	d. KONI	89.590.616.262
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
1	Pembayaran Pokok Utang	-
2	Pembentukan Dana Cadangan	-
	TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT	5.910.340.864.255

3.2.3. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Rencana pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2020 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan, baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perencanaan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada anggaran pendapatan tahun 2020 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Nasional, daerah, regional maupun lokal, serta ekonomi global yang saat ini sedang terjadi keguncangan perekonomian dan cukup berefek pada skala internasional.

Dalam jangka panjang, pembangunan Kalimantan Timur berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalti dari sektor pertambangan umum, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kalimantan Timur.

Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat, dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2020 seperti tabel berikut:

Tabel 3.4.
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2020
1	Pendapatan	11.534.474.227.000
2	Pencairan Dana Cadangan	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-
	Total Penerimaan	11.534.474.227.000
	Dikurangi	
4	Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat	5.910.340.864.255
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	5.624.133.362.745

3.2.4. Belanja Daerah

Dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas diperlukan penajaman peranan kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2020. Pada RKPD 2020 komponen konsumsi pemerintah terhadap PDRB Kalimantan Timur diharapkan dapat berkontribusi sebesar 4,99%. Berdasarkan tema pembangunan RKPD tahun 2020, arah kebijakan belanja difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna pengembangan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi & infrastruktur wilayah yang mendukung nilai tambah ekonomi. Untuk dapat mencapai target tersebut maka arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada :

- (1) Meningkatkan belanja produktif seperti belanja Pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih;
- (2) Meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja non-operasional utamanya pada belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal;
- (3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial terutama meningkatkan akses pendidikan dan mutu layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
- (4) Terkait aparatur negara kebijakan belanja negara diarahkan untuk menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik;
- (5) Transfer ke kabupaten/kota dan Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota. diarahkan meningkatkan kualitas layanan publik (SPM) di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk memperkirakan segala kebutuhan belanja daerah terkait pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Berikut penetapan APBD 2019 dan proyeksi 2020 Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 3.5.
APBD Tahun 2019 dan Target Belanja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

NO	Uraian	2018	2019	2020
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.193.673.675.886	6.526.656.978.075	6.426.656.978.076
2.1.1	Belanja Pegawai	1.672.792.329.286	1.774.799.167.283	2.187.901.347.513
2.1.2	Belanja Hibah	1.055.451.599.600	765.270.838.400	820.534.954.662
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	5.500.000.000	9.774.550.000	9.774.550.000
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.890.570.835.000	2.579.253.034.454	2.977.391.300.000
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	551.858.912.000	1.372.559.387.938	406.054.825.900
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	17.500.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	3.372.576.324.114	4.143.013.021.925	5.007.817.248.925
2.2.1	Belanja Pegawai	215.026.293.328	292.637.422.329	353.721.970.813
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.629.786.519.852	2.419.924.279.524	2.925.054.419.081
2.2.3	Belanja Modal	1.527.763.510.934	1.430.451.320.072	1.729.040.859.031
Total Jumlah Belanja		8.239.667.069.093	10.696.670.000.000	11.434.474.227.000

3.2.5. Pembiayaan Daerah

Tabel 3.6.
APBD Tahun 2019 dan Proyeksi Pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

NO	Uraian	2018	2019	2020
3	PEMBIAYAAN		120.045.986.750	(100.000.000.000)
3.1	Penerimaan Pembiayaan		220.045.986.750	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		100.000.000.000	100.000.000.000

Dalam rangka mempercepat peran pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah. Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya dalam menggali sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada. demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan. pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dilakukan dengan cara mengoptimalkan dan mengintegrasikan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari BUMD, Swasta, maupun masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah. arah kebijakan pembiayaan tahun 2020 diarahkan pada:

- (1) investasi pemerintah melalui penyertaan modal kepada BUMD diutamakan untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah kepada BUMD yang memiliki kinerja yang baik;

- (2) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi bagi masyarakat secara lebih luas.
- (3) pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU;

Optimalisasi dan integrasi sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk mendukung pencapaian target-target program prioritas Kalimantan Timur. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan lingkungan kehidupan masyarakat.

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

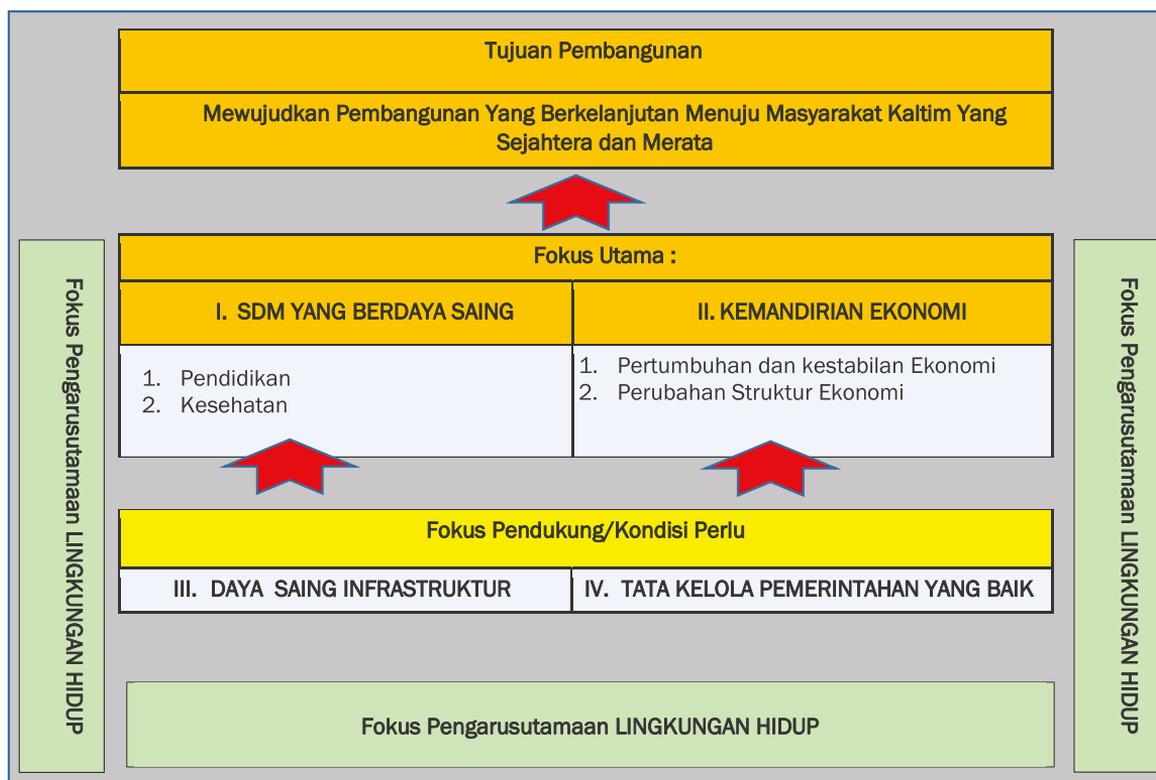
4.1.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka RKPD tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun kedua RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan, maka penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Adapun Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah **“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**. Visi pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam misi pembangunan dalam lima tahun mendatang sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Secara grafis, kerangka kebijakan pembangunan Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dapat di lihat seperti pada gambar berikut :

Gambar 4.1
Pola Hubungan Antara Fokus Utama Pembangunan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023



Adapun tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan Masyarakat yang berakarater berakhlak mulia dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,30	75,43	75,56	75,76	76,87
2	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00	5,94	5,87	5,78	5,70
4	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1
	Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	6±1	6±1	6±1	6±1	6±1

No	Tujuan	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
5	Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,330	0,329	0,328	0,327	0,326
6	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,75	75,85	75,95	76,05	76,15
7	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (69,50)	B (70,50)	B (71,50)	B (72,50)	B (74,50)

Berdasarkan tujuan pembangunan di atas, disusun sasaran pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada rencana tahunan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5
Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,89	14,13	14,34	14,73	14,96
Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,72	73,74	73,76	73,78	73,8
Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,7	56,71	56,72	56,73	56,75
Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	56,74	57,23	57,82	58,27	58,86
Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90
Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	503	478	448	413	368
Meningkatnya kontribusi sektor	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
pariwisata terhadap ekonomi daerah						
Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	20	20	20	21	21
Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	31,5	33,08	34,73	36,47	38,29
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57
	Rasio Pemenuhan Beras (%)			72,69	78,40	84,53
Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37
Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,1	5,4	5,7	6	6,3
Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,48	1,5	1,55	1,6	1,65
Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1	1,05	1,1	1,15	1,2
Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	10.705.000	11.026.000	11.536.200	11.700.000	12.050.000
	Jumlah barang (ton)	334.805.000	344.850.000	355.200.000	365.900.000	376.900.000
Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	2	3	3	3	6
Meningkatnya fungsi pelayanan	Cakupan layanan air minum (%)	73,33	75,00	77,00	81,00	85,00

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
infrastruktur sumber daya air	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13.618	14.008,5	15.558,5	16.258,5	16.925
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	664,2	575	505	435	365
Menurunnya kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	620,06	533,56	459,56	409,56	359,56
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	66,68	69,01	75,09	80,09	83,09
Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Rasio elektrifikasi (%)	85,50	87,50	89,50	92,00	95,00
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	26,3	26,89	27,75	28,5	29,33
Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	145	140	135	130	125
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,50	78,00	78,50	79,00	80,00
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	81	81,50	82	82,50	83
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4

4.1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020

Dalam menyusun RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 ini selain harus mempedomani dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 juga harus memperhatikan dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2020 yang mengusung Tema **“Peningkatan Sumberdaya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**.

Tema/fokus pembangunan Nasional pada tahun 2020, dijabarkan dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020 sebagai berikut:

Prioritas 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan.

Prioritas 2: Penguatan Konektivitas dan Pemerataan.

Prioritas 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja.

Prioritas 4: Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Prioritas 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Berdasarkan penjabaran sasaran pembangunan wilayah Kalimantan di atas serta mempertimbangkan potensi dan sumber daya daerah yang dimiliki selanjutnya besaran target pembangunan Kalimantan Timur pada RKP 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Target RKP Tahun 2020 di Kalimantan Timur

No	Sasaran	Target	
		2019	2020
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,01	2,75 - 3,25%
2	Tingkat Kemiskinan (%)	≤5%	4,76
3	Tingkat Pengangguran (%)	≤8%	6,80

Dalam penetapan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur maka analisa yang paling mendasar adalah dengan memperhitungkan isu strategis terkait kecenderungan kebijakan perekonomian global dan kebijakan perekonomian negara-negara tujuan utama ekspor komoditi Kalimantan Timur yaitu migas, batubara dan CPO. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi China, India dan negara Eropa, maka di perkirakan permintaan migas, batubara dan CPO masih berpeluang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi pada sector tersebut yang mendominasi PDRB Kalimantan Timur pada kisaran 46%.

4.1.3 Tujuan, Sasaran, Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

A. Tujuan dan Sasaran RKPD 2020

Perumusan tujuan dan sasaran RKPD tahun 2020 dilakukan dengan mempedomani sasaran pembangunan pada RPJMD tahun kedua serta mempertimbangkan arahan kewilayahan RKP tahun 2020. Tujuan dan Sasaran pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target
Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,43
1 Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	74,5
2 Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,50
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,13
3 Meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,74

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target
Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	5,94
4 Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,71
5 Meningkatkan kewirausahaan dan prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	57,23
6 Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	0,52
3. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1
7 Meningkatkan usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	4,60
8 Meningkatkan keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	478
9 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,97
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	6±1
10 Meningkatkan kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	20
11 Meningkatkan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	33,08
12 Meningkatkan kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,54
	Rasio Pemenuhan Beras (%)	67,41
13 Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,34
14 Meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,4
15 Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,5
16 Meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,05
17 Meningkatkan pendanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	3,84
Tujuan 5 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,329
18 Meningkatkan aksesibilitas wilayah	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	11.026.150
	Jumlah barang (ton)	344.850.000
19 Meningkatkan konektivitas antar kawasan	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	3
20 Meningkatkan fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Cakupan layanan air minum (%)	75,00
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.008,5
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	575
21 Menurunnya kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	533,56
22 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	69,01
23 Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Rasio elektrifikasi (%)	87,50
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,85
24 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	26,89

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target
25 Meningkatkan Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	140
7. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (70,50)
26 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,00
27 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,50
28 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3

B. Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Dengan memperhatikan hasil analisa terhadap arah kebijakan RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023, arah kebijakan RKP tahun 2020 serta permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan tahun 2020, maka tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah:

“Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi, dan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi”

Tema tersebut merupakan arah kebijakan pembangunan tahunan yang dirumuskan pada RPJMD dan merupakan strategi tahun kedua untuk mewujudkan Visi RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu **“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**. Tema RKPD tahun 2020 merupakan arah kebijakan pembangunan yang merupakan tindak lanjut dari tema tahun sebelumnya, dimana berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya menunjukkan bahwa setelah Aspek Tata Kelola Pemerintahan dibenahi, maka pembangunan di fokuskan pada peningkatan nilai tambah melalui penguatan kompetensi SDM yang didukung Teknologi dan Infrastruktur wilayah. Semua kata kunci dalam tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur merupakan focus pembangunan yang diarahkan pada peningkatan aspek daya saing daerah. Namun dalam perumusan prioritas pembangunan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat tetap menjadi pertimbangan.

Alur Pikir dalam perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.2

RKPD Tahun 2020 Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023



Tema pembangunan pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai Tambah Ekonomi merupakan kata kunci tema RKPD tahun 2020 yang mencerminkan tingkat produktivitas perekonomian suatu daerah.
2. Untuk menciptakan Nilai Tambah Ekonomi, maka perlu percepatan pengembangan dan pertumbuhan hilirisasi produk-produk daerah yang berbasis sumberdaya alam yang terbaharukan.
3. Untuk mempercepat pengembangan dan pertumbuhan pengembangan dan pertumbuhan hilirisasi produk-produk daerah, maka perlu perkuatan daya saing investasi daerah. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap daya saing investasi Kalimantan Timur di simpulkan bahwa daya saing investasi perlu di dukung oleh factor-faktor kunci daya saing investasi yaitu: menyediakan sumberdaya manusia yang berdaya saing dengan makna ketersediaan tenaga kerja baik dari sisi kuantitas maupun kualitas tenaga kerja, infrastruktur yang berkualitas, dan didukung oleh teknologi yang mampu mengurangi biaya factor-faktor

produksi. Disamping itu perlu meningkatkan pelayanan perijinan usaha melalui penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan layanan birokrasi.

Dalam perumusan tema dan prioritas pembangunan di samping faktor utama pengungkit daya saing investasi di atas, dalam perumusan RKP 2020 juga mengarusutamakan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang ditekankan pada aspek Lingkungan yaitu Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Disamping itu untuk pencapaian target pembangunan, maka salah factor kunci keberhasilan adalah adanya pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk itu maka perlu adanya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi.

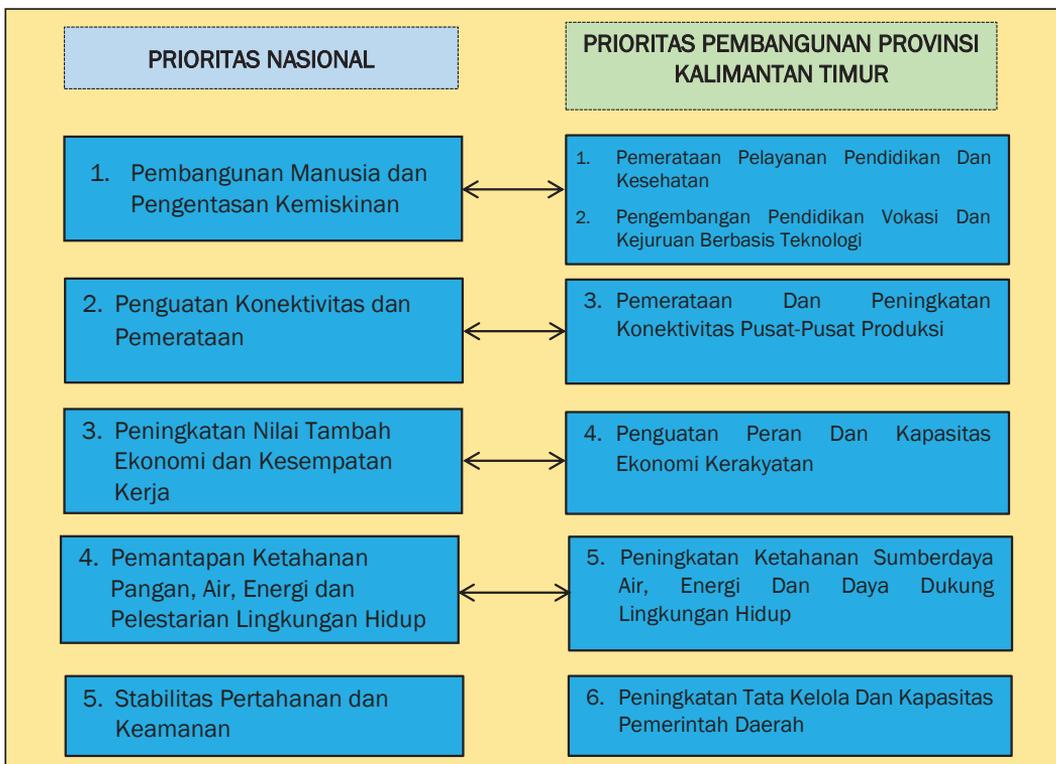
Prioritas pembangunan Kalimantan Timur tahun 2020 disusun berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tujuan pembangunan pada interpretasi/arahan tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2019-2023. Prioritas Pembangunan pada RKP merupakan Prioritas Pembangunan yang bersifat Tematik yang ditujukan pada pencapaian menjadi sasaran utama pada tema RKP 2020. Sesuai dengan Tema RKP 2020, **“Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi, dan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi”**, maka kata kunci pada tema tersebut adalah **Nilai Tambah EKONOMI**. Dengan memahami permasalahan pada daya saing investasi di Kaltim maka Prioritas Pembangunan RKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah :

1. **Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan ;**
2. **Pengembangan Pendidikan Vokasi dan Kejuruan Berbasis Teknologi;**
3. **Penguatan Peran dan Kapasitas Ekonomi Kerakyatan;**
4. **Pemerataan dan Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Produksi;**
5. **Peningkatan Ketahanan Sumberdaya Air, Energi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup;**
6. **Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah.**

Prioritas pembangunan Kalimantan Timur tahun 2020 juga disusun dengan memperhatikan prioritas nasional pada RKP tahun 2020. Beberapa prioritas nasional dan prioritas pembangunan di Kalimantan Timur pada tahun 2020 memiliki keterkaitan dalam rangka mendukung tercapainya prioritas nasional. Namun ada beberapa prioritas nasional yang tidak

masuk dalam prioritas pembanguana Kalimantan Timur seperti Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, namun dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sudah terdapat unsur yang mendukung penguatan konektivitas dan kemaritiman seperti pembangunan jalan dan jembatan pada daerah 3T. Demikian pula pada Priotitas Nasional Stabilitas kemandirian nasional dan kesuksesan pemilu.

Gambar 4.3
Keterkaitan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020



Keterkaitan Prioritas RKP 2020 dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Prioritas 1: Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan.

Prioritas sasaran umum nasional yang diakomodir dalam RKPD Kalimantan Timur tahun 2020 untuk mendukung pencapaian pengurangan kemiskinan dengan mengurangi beban masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan dasar seperti listrik, air bersih dan pemukiman yang layak. Disamping itu juga dilakukan dengan memberikan bantuan bantuan pendidikan bagi

masyarakat miskin, serta bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mempermudah akses masyarakat miskin dalam memperoleh permodalan usaha.

Prioritas 2: Penguatan Konektivitas dan Pemerataan.

Penguatan konektivitas dan pemerataan, dalam RKPDP Kalimantan Timur tahun 2020 mencakup pembangunan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah terutama pada daerah tertinggal dan kawasan perbatasan dan meningkatkan keterhubungan pusat-pusat produksi, pengolahan dan outlet.

Prioritas 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja.

Nilai Tambah Ekonomi merupakan kata kunci pada Tema RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 yang di tempuh melalui strategi penguatan kapasitas SDM, serta penerapan pemanfaatan teknologi pada proses produksi didukung oleh infrastruktur daerah melalui program-program seperti percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja, dan pengembangan Iptek dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas.

Prioritas Nasional 4: Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Program prioritas yang dilakukan di daerah mencakup peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi, peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan, peningkatan kualitas dan aksesibilitas sumber daya air, peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan, pemantapan regulasi dan penguatan kelembagaan energi, pangan dan sumber daya air.

Prioritas Nasional 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Demi menjaga stabilitas kemandirian dan stabilitas nasional maka program prioritas mencakup Kamtibmas dan Keamanan siber, kesuksesan pemilu, kepastian hukum dan reformasi birokrasi.

Selanjutnya, sasaran pembangunan dan arah kebijakan sektoral akan disajikan dalam masing- masing prioritas pembangunan yang terkait. Strategi dan arah kebijakan pada tabel diatas merupakan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada RKPDP tahun 2019 yang tersusun sebagai berikut :

Tabel 4.5
Sasaran, Strategi, Arah kebijakan Pembangunan dan Program Prioritas
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target
1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Memperkokoh ketahanan budaya dan peningkatan kondusivitas masyarakat	1) Pengembangan Demokrasi di Daerah	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	69
		2) Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai budaya dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah sekolah yang mengembangkan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB)	150
			Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sekolah mengembangkan budaya lokal	150
2. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/industri (kurikulum, tenaga pendidik dan sarana prasarana)	Program Pengembangan Sekolah Kejuruan	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	55
			2) Pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK/MA/SLB , dan Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA
			Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK	72%

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target
		3) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemenuhan kualifikasi pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	98%
		4) Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan keberpihakan terhadap anak keluarga miskin, disabilitas, pekerja anak dan anak tidak sekolah melalui BOSDA dan beasiswa KALTIM TUNTAS	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS yang berprestasi (orang)	13.000
		5) Penyediaan Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Miskin	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan	Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah (Siswa)	2.500
		6) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jarak Jauh	Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	90%
		7) Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan Luar Biasa	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	70
		8) Penguatan kapasitas kelembagaan tentang anak	Peningkatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	82%
		9) Pengembangan perpustakaan digital	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan	4.559
		10) Pemenuhan Bahan Bacaan Perpustakaan			

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target
				(on line dan on site) (orang)	
3. Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1) Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan (3T)	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	70
		2) Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	43
		3) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)	90
		4) Peningkatan Akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin			
4. Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Optimalisasi pengarusutamaan gender	1) Peningkatan kesadaran keadilan gender di kalangan masyarakat	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP) (%)	40
		2) Optimalisasi lembaga layanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Rasio KDRT	0,054
		3) Peningkatan akses dan keterampilan	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan	1.500

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target
		perempuan dalam berwirausaha	Kesejahteraan Sosial	PMKS Lainnya yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Orang)	
5. Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda dan penyandang disabilitas	Peningkatan prestasi keolahragaan dan kesempatan pemuda dan penyandang disabilitas berwirausaha	1) Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	14.44%
		2) Pengembangan fasilitasi dan pendampingan permodalan usaha pemuda dan penyandang disabilitas	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas (%)	43.1
			Peningkatan Upaya Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Pemuda yang Berwirausaha (%)	0,15
6. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	1) Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	80%
7. Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Optimalisasi pengelolaan UKM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	1) Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM serta membangun kemitraan bisnis dengan Usaha Besar melalui inkubasi bisnis	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi yang berkualitas /Jumlah UKM Naik Kelas	100 Koperasi /200 UKM
		2) Fasilitasi pemberian bantuan modal			

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target
		usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola kemitraan dan pendampingan			
		3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM			
		4) Fasilitasi Kewirausahaan Pemuda dengan Penumbuhan Usaha Rintisan (<i>Startup</i>) Industri Kreatif			
		5) Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi untuk perempuan dan keluarga			
		6) Pengembangan Industri Kreatif berbasis potensi dan keunggulan daerah			
8. Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Peningkatan kualitas pembangunan wilayah perdesaan secara merata	1) Peningkatan kapasitas BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	25
		2) Optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan desa	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Meningkatkan jumlah desa berkembang (Desa)	25
		3) Pembinaan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam membangun desa berkualitas	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	103
		4) Penguatan ketangguhan desa dalam	Program Kampung Iklim +	Jumlah kampung/desa (Desa)	22

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target
		menghadapi bencana dan perubahan iklim			
9. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi unggulan pariwisata	1) Pengembangan kualitas destinasi wisata berbasis masyarakat 2) Pemanfaatan Anjungan Kaltim di TMII sebagai pusat pelatihan ekonomi kreatif, etalase budaya dan promosi pariwisata Kaltim	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	2 Kawasan
10. Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah	1) Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan khususnya sektor pertanian, migas dan pertambangan 2) Pengembangan industri hilir pertanian dalam arti luas 3) Pengembangan skala ekonomi untuk meningkatkan ekspor	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	1
11. Meningkatnya realisasi investasi	Percepatan proses perizinan dan pengendalian rencana investasi	1) Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi 2) Peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari) Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	13 7

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target
				(perusahaan industri baru)	
12. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1) Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan pada lahan kering	Program Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan	Jumlah produksi padi (Ton)	423,000
		2) Penerapan Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)			
		3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani			
		4). Peningkatan pemanfaatan teknologi pengolahan produksi pertanian			
		5) Perbaikan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura	Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton)	240,245
13. Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui pola kemitraan	1) Pembangunan Miniranch sapi	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah Miniranch yang Teregister (unit)	35
		2) Penyediaan Informasi Peternakan			
		3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan peternak			
		4) Fasilitasi Penyediaan Permodalan bagi Peternak	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi (%)	20
		5) Peningkatan produksi bibit dan			

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target
		benih ternak berkualitas melalui UPSUS SIWAB			
14. Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	1) Peningkatan produktivitas komoditi perkebunan unggulan	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	16.812.938 Ton
		2) Pengembangan Kebun Rakyat di lahan cadangan carbon rendah melalui kemitraan	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	35
		3) Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	2
		4) Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani			
		5) Pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah Penurunan Emisi Sektor Perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,08
		6) Peningkatan pemanfaatan limbah biomassa Perkebunan			
		7) Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan			
15. Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	1) Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	158.055 Ton
		2) Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	155.516 Ton

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target
		Produksi Perikanan			
		3) Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih (ekor)	2,7 Miliar Ekor
			Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)	1 Kawasan
16. Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan	1) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi penerimaan PNBP sektor kehutanan (Rp. Miliar)	165
		2) Mengurangi laju deforestasi melalui perlindungan dan pengamanan kawasan hutan	Program Perlindungan dan KSDAE	Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)	≤1,75
		3) Pemulihan kawasan hutan yang terdeforestasi dan degradasi	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase meningkatnya tutupan lahan (%)	1398
		4) Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan	Program Penyuluhan, pemberayaan masyarakat hutan dan perhutanan sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	32,000
17. Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	1) Peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam	Program Perencanaan dan pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah objek/sumber pendapatan baru	4
18. Meningkatnya	Peningkatan fungsi pelayanan	1) Optimalisasi pengadaan infrastruktur	Program Pembangunan Prasarana	Jumlah dan kapasitas prasarana	10 Dermaga SDP – 12

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target
aksesibilitas wilayah	infrastruktur dasar perhubungan	perhubungan, khususnya infrastruktur pelayaran	Transportasi Laut dan SDP	perhubungan laut dan SDP (Unit/%)	Pelabuhan Laut (85%)
		2) Peningkatan keterhubungan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar kehidupan masyarakat			
		3) Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus)	598
19. Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Penguatan konektivitas antar daerah dan kawasan	1) Peningkatan keterhubungan daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan signifikan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	58,88
		2) Peningkatan keterhubungan sentra-sentra produksi (hinterland) dan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan daerah			
		3) Peningkatan aksesibilitas ke kawasan strategis pariwisata nasional dan provinsi			
20. Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan sarana dan prasarana dan distribusi air bersih	1) Peningkatan infrastruktur pengolahan dan distribusi air baku	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku (L/detik)	8.322
		2) Peningkatan infrastruktur layanan air minum	Program Pembangunan	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%)	65,23

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target
			Infrastruktur Keciptakaryaan		
21. Menurunnya kawasan kumuh	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	1) Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi keluarga pra sejahtera pada kawasan kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	41722
		2) Pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi sehat			
22. Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	1) Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)	Program Diversifikasi & Konservasi Energi	Persentase pemanfaatan EBT (%)	3,63
			Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik (KK)	989,607
23. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1) Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan	Program Tata Lingkungan	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	550
		2) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan	Tercemar sedang (8)
24. Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	25 Persen

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target
			Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	88 Persen
25. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1) Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota (%)	75,34
26. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah	1) Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)	75
		2) Penataan pola hubungan kerjasama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Program Penguatan Kelembagaan	Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%)	90
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran	85
28. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel		1) Peningkatan Integritas Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)	61

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target
		2) Meningkatnya kapabilitas APIP	Program Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	68.42
			Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Level kapasitas APIP	3
27. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan efisiensi di berbagai pelayanan publik berbasis elektronik/teknologi informasi	1) Peningkatan tatakelola pemerintah yang baik	Pencegahan KKN	Hasil Penilaian Integritas	70
		2) Peningkatan kualitas komunikasi dan teknologi informasi	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,8

BAB 5

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, maka tiga hal yang akan menjadi perhatian penting adalah Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, serta Infrastruktur Wilayah. Ketiga hal tersebut diarahkan pada implementasi yang mendukung nilai tambah ekonomi dengan konsep pengembangan wilayah pada masing-masing kabupaten/kota serta mengacu pada Kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) 2016-2036. Kebijakan pembangunan kewilayahan tahun 2020 dirumuskan berdasarkan data, analisis, serta pembahasan mengenai isu strategis serta permasalahan krusial yang dihadapi oleh masing-masing kabupaten/kota.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Kalimantan Timur mencakup 8 (delapan) lokasi dengan rencana pengembangan yang berbeda, disesuaikan dengan karakteristik geografis masing-masing. Belum seluruh Kawasan tersebut beroperasi secara optimal. Disadari bahwa operasional dan pengembangan Kawasan strategis perlu mempertimbangkan berbagai hal, mulai dari ketersediaan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, hingga faktor penting lain seperti kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Pengembangan suatu kawasan pun tidak dapat optimal jika terdapat permasalahan krusial yang mengganggu aktivitas masyarakat tidak segera diselesaikan, contohnya adalah belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat ataupun adanya gangguan/bencana lingkungan.

Tahun 2020, tidak seluruh kabupaten/kota memiliki prioritas pengembangan tematik sesuai dengan potensinya. Terdapat 3 (tiga) wilayah yang prioritasnya belum spesifik pada sektor tertentu tetapi fokus pada pembenahan permasalahan krusial yang kerap menjadi penghambat bagi aktivitas penduduk setempat. Jika kendala tersebut belum diselesaikan maka pengembangan Kawasan strategis pun tentu tidak dapat optimal. Ketiga wilayah tersebut adalah Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk 7 (tujuh) kabupaten/kota lainnya, prioritas ditetapkan berdasarkan sektor potensial yang dianggap dapat membawa daya ungkit positif terhadap perekonomian Kalimantan Timur baik dalam jangka pendek maupun

jangka panjang. Berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2020 ini tidak lepas dari cita-cita Kalimantan Timur untuk memiliki perekonomian yang lebih berkualitas dan sehat. Tidak hanya mengandalkan perekonomian ekstraktif tetapi aktivitas ekonomi yang memberi nilai lebih pada komoditas yang tersedia. Tabel berikut menggambarkan target pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota serta fokus pembangunan provinsi pada tahun 2020.

Tabel 5.1.
Target Pertumbuhan Ekonomi dan Fokus Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	SHARE PDRB	TARGET PERT. EKONOMI TAHUN 2020 (%)	LAPANGAN USAHA POTENSIAL
1	Kutai Kartanegara		2,35	Pengembangan potensi 3 Danau (Semayang, Jempang, Melintang)
2	Kutai Timur		3,53	Pengembangan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan
3	Balikpapan		4,01	Pengembangan Kawasan Industri Kariangau
4	Bontang		1,52	Sumber Air Baku dan Pengendalian Banjir
5	Samarinda		4,51	Sumber Air Bersih dan Pengendalian Banjir
6	Paser		1,55	Peningkatan Produktivitas Pertanian
7	Berau		3,84	Pengembangan KSPN Derawan dan Sekitarnya
8	Kutai Barat		4,81	Pengembangan Pertanian
9	Penajam Paser Utara		3,29	Pengembangan Pertanian
10	Mahulu		4,58	Aksesibilitas Perhubungan Darat dan Komunikasi

5.1.1 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kota Samarinda

Tersedianya air bersih dalam jumlah memadai serta memiliki kualitas layak merupakan salah satu syarat mutlak yang menjamin kualitas hidup masyarakat perkotaan. Saat ini Kota Samarinda telah memiliki cakupan layanan air minum yang baik, yakni mencapai 90%. Namun perkembangan kota yang cukup pesat membuat Samarinda masih membutuhkan suplai air baku untuk air minum bagi masyarakatnya. Permasalahan yang akan menjadi perhatian pada tahun 2020 ini adalah terkait data. Terdapat perbedaan data teknis kebutuhan air bersih hasil

perhitungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Samarinda. Adanya perbedaan standar konsumsi/kebutuhan air individu yang digunakan merupakan salah satu penyebabnya. Tahun 2020 diharapkan Pemerintah Kota Samarinda dapat melakukan verifikasi terkait adanya perbedaan hasil kalkulasi ini. Selain itu juga dibutuhkan data terkait dengan proporsi rumah tangga dengan cakupan air minum layak. Data yang mutakhir dan terverifikasi akan menjadi dasar dalam rencana pembangunan infrastruktur penyedia air baku dan instalasi pengolahan air di Kota Samarinda.

Banjir merupakan permasalahan krusial bagi Kota Samarinda. Saat ini kejadian banjir telah mengganggu aktivitas warga dan membawa dampak buruk bagi perekonomian wilayah. Konsep pengendalian banjir Samarinda akan dilakukan berdasarkan beberapa sub. Sistem sungai, antara lain Sub. Sistem Karang Mumus, Karang Asam Kecil; Karang Asam Besar; serta Loa Janan dan Rapak Dalam. Fokus utama pengendalian banjir jangka menengah adalah pada Sub. Sistem Karang Mumus, yakni sungai yang membelah pusat Kota Samarinda sepanjang 18 Km. Salah satu titik banjir pada sub. sistem ini adalah di simpang Jl. DI. Panjaitan, akses utama menuju Bandara APT Pranoto. Penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial tetapi harus komprehensif, fokus, dan mencakup seluruh kegiatan utama pada satu sistem. Penanganan komprehensif ini menghindari resiko pindahnya titik banjir ke lokasi lain.

Gambar 5.1.
Fokus penanganan banjir Kota Samarinda.
Sub. Sistem Karang Mumus ruas jalan DI Panjaitan



Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Kota Samarinda merupakan bagian dari Wilayah Sungai Mahakam yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Agar dapat diatasi dengan cepat, sistematis, dan komprehensif, Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota Samarinda sepakat untuk berkolaborasi melakukan berbagai upaya pengendalian banjir mulai dari hulu hingga hilir. Fokus penanganan oleh Pemerintah Provinsi, komitmen Kota Samarinda, serta rencana usulan prioritas ke Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Pembagian Tugas Berdasarkan Kewenangan terhadap
Fokus Pembangunan Wilayah Kota Samarinda

FOKUS PROVINSI	KOMITMEN KOTA SAMARINDA	USULAN PADA PRIORITAS NASIONAL
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian banjir 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan titik banjir ▪ Pembangunan saluran drainase 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelesaian embung serba guna Sempaja

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembersihan infrastruktur jalan & drainase ▪ Rencana pembangunan SPAM Regional sebagai perluasan jaringan air bersih (menunggu hasil RISPAM 2019) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembebasan lahan, penyelesaian masalah sosial, & penyusunan dokumen perencanaan ▪ Verifikasi data teknis kebutuhan air bersih ▪ Data proporsi rumah tangga dengan cakupan air minum layak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengerukan Waduk Benanga ▪ Pembangunan Turap Sungai Karang Mumus (ruas Jl. Perniagaan) ▪ Penurapan Sungai Karang Mumus & Sungai Talang Sari ▪ Kajian teknis Delta Mahakam
--	---	--

Sumber : Hasil Rakor Bappeda se-Kaltim, 2019

5.1.2 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kota Balikpapan

Kawasan Industri Kariangau merupakan salah satu Kawasan yang kegiatan industrinya telah berjalan cukup baik. Kawasan ini akan diprioritaskan pengembangannya dalam 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini diperkuat dengan komitmen Gubernur Kaltim untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas Pelabuhan Internasional Peti Kemas Kariangau. Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi tidak hanya fokus pada peningkatan infrastruktur di Kawasan kariangau tetapi juga akan memberi perhatian terhadap aspek ekonomi kawasan. Infrastruktur penunjang aksesibilitas dari dan menuju ke Kawasan Industri Kariangau menjadi fokus pembangunan wilayah di Kota Balikpapan guna meningkatkan daya saing investasi. Bangkitan ekonomi kawasan ini selanjutnya juga diikuti peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui penguatan pendidikan vokasi dan balai latihan kerja. Diharapkan kedepannya tenaga kerja lokal yang ada di sekitar wilayah industri dapat memiliki kompetensi yang sesuai standar dan terserap di pasar kerja.

Gambar 5.2.
Pengembangan Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan (kiri) dan Pengembangan Jaringan Sarana Infrastruktur untuk Mendukung Konektivitas Kawasan Industri Kariangau (kanan)



Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Selain berbenah pada kawasan industri, perhatian juga akan diberikan pada upaya penyelesaian salah satu permasalahan penting di Kota Balikpapan, yakni pengendalian banjir dan penanganan kawasan kumuh. Kedua hal ini merupakan hal yang cukup mendasar, dimana jika tidak segera ditangani akan mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat setempat dan tentu membawa dampak negatif bagi kelangsungan perekonomian dan kesehatan lingkungan Kota Balikpapan.

Kolaborasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, serta Kota Balikpapan pada tahun 2020 antara lain :

Tabel 5.3 Pembagian Tugas Berdasarkan Kewenangan terhadap Fokus Pembangunan Wilayah Kota Balikpapan

FOKUS PROVINSI	KOMITMEN KOTA BALIKPAPAN	USULAN PADA PRIORITAS NASIONAL
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan jalan akses kariangau (Km. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelesaian Jembatan P. Balang

FOKUS PROVINSI	KOMITMEN KOTA BALIKPAPAN	USULAN PADA PRIORITAS NASIONAL
<p>13 – Pelabuhan) & Jalan poros KIK</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelebaran Jl. Mulawarman ▪ Optimalisasi fungsi kariangau sebagai pelabuhan ekspor ▪ Pengembangan BLK ▪ Pengembangan SMK 7 ▪ Pengembangan SPAM Regional (tahun 2019 disusun RISPAM) ▪ Normalisasi drainase sekunder Sub. Sistem Ampal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong pembentukan perusahaan Kawasan industry ▪ Pembebasan lahan, penanganan masalah sosial, & penyusunan dokumen perencanaan (terkait pengendalian banjir) ▪ Pengembangan sentra industri kecil Teritip ▪ Peningkatan kawasan minapolitan Manggar Baru 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Jalan Penghubung Jembatan P. Balang ▪ Normalisasi Sungai Ampal ▪ Penanganan kawasan kumuh di kawasan minapolitan Manggar Bars

Sumber : Hasil Rakor Bappeda se-Kaltim, 2019

5.1.3. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kota Bontang

Ketersediaan air baku terutama untuk penyediaan air minum di Kota Bontang masih menjadi isu pembangunan hingga saat ini. Data cakupan layanan air di Kota Bontang menunjukkan kondisi yang cukup baik, yakni mencapai 87% pada tahun 2017. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah suplai air baku yang berkesinambungan dan mencukupi kebutuhan air minum di Kota Bontang. Saat ini hampir seluruh suplai air baku berasal dari air bawah tanah. Disadari bahwa tidak selamanya Kota Bontang bergantung pada keberadaan sumber air bawah tanah. Perlu sumber lain yang dapat menjamin kontinuitas suplai air minum untuk berbagai aktivitas penduduk di Kota Bontang, baik untuk kebutuhan dasar masyarakat maupun aktivitas industri.

Terdapat beberapa pilihan sumber air baku bagi Kota Bontang, yakni dari Bendali Suka Rahmat, Bendungan Marangkayu, serta suplai dari Danau Kanaan. Bendali Suka Rahmat berada di Kabupaten Kutai Timur dimana seluruh areal rencana pembangunan berada pada kawasan hutan.

RANCANGAN AKHIR RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

Fungsi utama Suka Rahmat adalah sebagai bangunan pengendali banjir namun selain fungsi tersebut, Suka Rahmat juga berpotensi memberikan suplai bagi kebutuhan air baku Kota Bontang sebesar 300 liter/detik. Keberadaan Bendungan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara juga dapat menjadi jawaban atas kebutuhan suplai air baku Kota Bontang. Diperlukan pipa transmisi untuk mengalirkan air dari Desa Sebuntal, Kutai Kartanegara ke Kota Bontang. Tampungan air dari Bendungan Marangkayu dapat dikelola melalui adanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Saat ini konsep tersebut tengah dikaji oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui studi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi Kalimantan Timur. Selain dua bendungan tersebut, juga terdapat potensi suplai air dari Danau Kanaan. Namun untuk dapat memanfaatkan potensi kanaan diperlukan beberapa revitalisasi pada kawasan danau mengingat saat ini kondisinya masih belum memungkinkan untuk dimanfaatkan. Kegiatan yang diperlukan untuk di kawasan Danau Kanaan antara lain Normalisasi dan Revitalisasi Danau Kanaan serta pembangunan Depresi Kanaan.

Gambar 5.3.
Lokasi Fokus Pembangunan di Kota Bontang Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Selain ketersediaan air baku, banjir juga menjadi salah satu permasalahan krusial yang perlu segera ditangani karena sangat mengganggu aktivitas masyarakat Kota Bontang. Gubernur

periode 2018 – 2023 telah mencantumkan pengendalian banjir di Kota Bontang sebagai salah satu program unggulannya. Dalam 5 (lima) tahun kedepan, pengendalian banjir di Kota Bontang akan difokuskan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Bontang dan DAS Guntung. Pengendalian banjir tidak dapat dilakukan secara parsial. Perlu upaya komprehensif, penanganan dari hulu ke hilir agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan optimal. Salah satu karakteristik unik dari banjir Kota Bontang adalah faktor penyebabnya yang tidak seluruhnya berasal dari Kota Bontang itu sendiri. Banjir dapat terjadi akibat adanya ketidakseimbangan alam yang terjadi di daerah hulu, dimana wilayah hulu Kota Bontang adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota Bontang telah sepakat berkomitmen melaksanakan kegiatan pengendalian banjir ini dalam 5 (lima) tahun kedepan. Telah disusun rancangan konsep penanganan, dimana Pemerintah Provinsi akan melakukan penanganan pada wilayah hulu, yakni pembangunan Bendali Suka Rahmat; Pemerintah Pusat pada wilayah tengah, yakni penanganan di kawasan Danau Kanaan; dan Pemerintah Kota di wilayah hilir, secara khusus pada membenahan kondisi drainase tersier. Saat ini Pemerintah Provinsi tengah melakukan persiapan dan pemenuhan kriteria kesiapan pembangunan, antara lain finalisasi dokumen lingkungan serta penyiapan kelengkapan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Adapun upaya kolaborasi antara pemerintah provinsi, komitmen dari Kota Bontang serta usulan pada prioritas nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4. Pembagian Tugas Berdasarkan Kewenangan terhadap Fokus Pembangunan Wilayah Kota Bontang

FOKUS PROVINSI	KOMITMEN KOTA BONTANG	USULAN PADA PRIORITAS NASIONAL
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persiapan/pemenuhan <i>readiness criteria</i> pembangunan Bendali Suka Rahmat ▪ Pengendalian banjir di Sungai Guntung & Sungai Bontang ▪ Penyiapan <i>readiness criteria</i> SPAM Regional Marangkayu ▪ Pembebasan lahan pembangunan SPAM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembebasan lahan & penyelesaian masalah sosial di Sungai Guntung & Sungai Bontang ▪ Penurapan Sungai Bontang ▪ Penanganan drainase tersier 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelesaian Bendungan Marangkayu (air baku utk Kota Bontang)

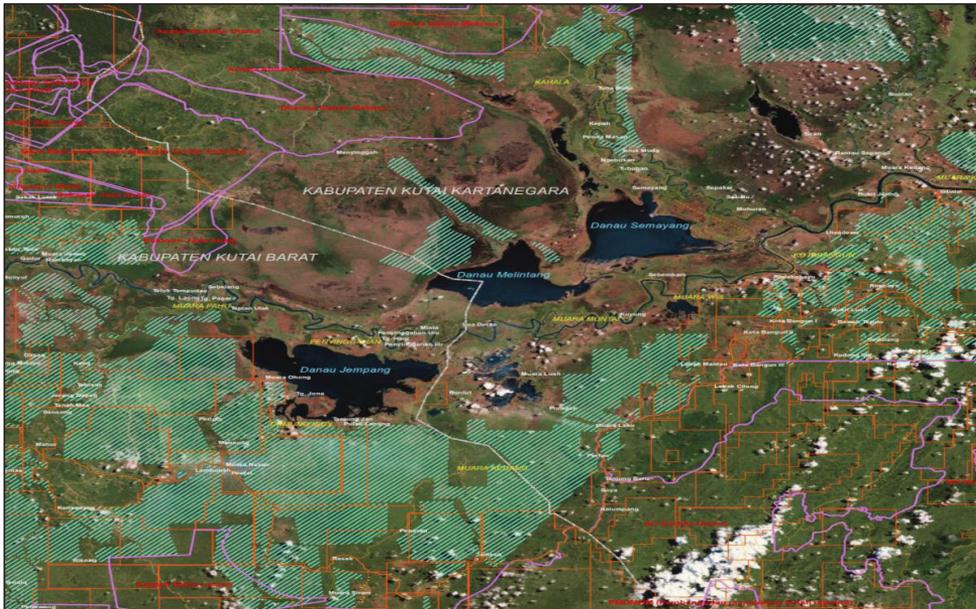
FOKUS PROVINSI	KOMITMEN KOTA BONTANG	USULAN PADA PRIORITAS NASIONAL
Regional di Marangkayu		

Sumber : Hasil Rakor Bappeda se-Kaltim, 2019

5.1.4. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Kutai Kartanegara

Danau Melintang, Semayang, dan Jempang merupakan 3 (tiga) danau terbesar di Kalimantan Timur yang memiliki beragam potensi, diantaranya pariwisata, perikanan, serta pertanian. Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sepakat untuk bersama mengoptimalkan potensi yang dimiliki kawasan tersebut agar dapat membawa manfaat baik bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian daerah. Kabupaten Kutai Kartanegara akan mempertimbangkan untuk memasukkan isu terkait pengembangan kawasan 3 (tiga) danau ini kedalam dokumen RKPD tahun 2020. Terdapat beberapa sektor yang belum teridentifikasi sebagai potensi pengembangan secara detail, salah satunya potensi perikanan. Kedepannya, sektor perikanan akan dikembangkan hingga memiliki nilai tambah.

Gambar 5.4.
Lokus Fokus Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020



UPTB Pusat Data dan Informasi, 2018

Pengembangan kawasan 3 (tiga) danau sebagai kawasan pariwisata tentu memerlukan dukungan dari berbagai sektor, salah satunya adalah sektor perizinan pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang disekitar kawasan 3 (tiga) danau sangat perlu diperhatikan, mengingat kawasan tersebut dikelilingi oleh berbagai perizinan, baik sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, dukungan dan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang pariwisata juga diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata di kawasan 3 (tiga) danau. Adapun kolaborasi kegiatan yang menjadi fokus provinsi, komitmen Kabupaten Kutai Kartanegara, serta usulan pada prioritas nasional tercantum pada tabel berikut :

Tabel 5.5. Pembagian Tugas Berdasarkan Kewenangan terhadap Fokus Pembangunan Wilayah Kutai Kartanegara

FOKUS PROVINSI	KOMITMEN KABUPATEN	USULAN PADA PRIORITAS NASIONAL
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi Penguatan POKDARWIS ▪ Pengembangan <i>Homestay</i> ▪ Pengembangan listrik ▪ Penambahan luas tanam padi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi potensi hilirisasi produk perikanan ▪ Identifikasi status lahan ▪ Sosialisasi dan pelatihan Homestay POKDARWIS Desa Pela ▪ Pengadaan 1 (satu) unit perahu wisata ▪ Sosialisasi POKDARWIS Desa Melintang ▪ Festival Danau Semayang ▪ Pembangunan Pusat Kuliner terapung ▪ Festival Danau Semayang ▪ Pengadaan sarana Homestay ▪ Peningkatan reservat (loa kang) Kec. Kota Bangun & Batu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan rutin Kawasan danau ▪ Penyusunan <i>Masterplan</i> Pengelolaan 3 Danau ▪ Pengerukan Danau

FOKUS PROVINSI	KOMITMEN KABUPATEN	USULAN PADA PRIORITAS NASIONAL
	Bumbun Kec. Muara Muntai <ul style="list-style-type: none"> ▪ Restocking (penebaran ikan) ▪ Peningkatan POKMASWAS (kelompok masyarakat pengawas) 	

Sumber : Hasil Rakor Bappeda se-Kaltim, 2019

5.1.5. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Kutai Timur

Pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dalam RKPd 2020 difokuskan pada percepatan beroperasinya KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan sebagai pusat Outlet produksi CPO yang bersumber dari PKS di sekitar KEK MBTK. Percepatan beroperasinya KEK MBTK ditopang dengan membangun jaringan transportasi dari lokasi PKS menuju KEK MBTK serta membangun sarana dan prasarana pendukung pada lokasi KEK. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan diharapkan dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah. Beroperasinya KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan diharapkan mampu meningkatkan kinerja industri pengolahan yang selama ini memiliki kontribusi kecil di Kutai Timur, dimana KEK MBTK merupakan sentra hilirisasi industri, berbasis kelapa sawit.

Gambar 5.5.
Lokus Pengembangan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (kiri) dan Pengembangan Sarana Infrastruktur Jalan untuk Meningkatkan Konektivitas KEK MBTK di Kutai Timur (kanan)



Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Selain dari sisi infrastruktur, perlu juga diperhatikan faktor lain yang sangat mempengaruhi operasional dan berkembangnya KEK MBTK. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dipastikan bahwa Kalimantan Timur siap menyediakan SDM yang kompeten dan berkualitas untuk mengelola KEK MBTK. Fokus yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi adalah upaya peningkatan kapasitas SDM terutama untuk tingkat Pendidikan vokasi menengah,. Selain itu, juga diperlukan stimulus berupa kemudahan berusaha dan insentif investasi untuk menarik minat investor serta pebisnis memulai aktivitas mereka di KEK Maloy. Adapun beberapa hal yang telah didiskusikan dan disepakati mengenai pembangunan kewilayahan di Kabupaten Kutai Timur tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 5.6. Pembagian Tugas Berdasarkan Kewenangan terhadap Fokus Pembangunan Wilayah Kutai Timur

FOKUS PROVINSI	KOMITMEN KABUPATEN	USULAN PADA PRIORITAS NASIONAL
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kapasitas SDM (Pendidikan Vokasi Menengah); ▪ Peningkatan Kemudahan berusaha dan Penyediaan insentif investasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepastian Status Lahan Kawasan Industri ▪ Pembangunan jalan penghubung sentra produksi ke jalan nasional/provinsi; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Jalan Sp. Perdau – kaliorang – Maloy ; ▪ Penyediaan Rumah susun pekerja;

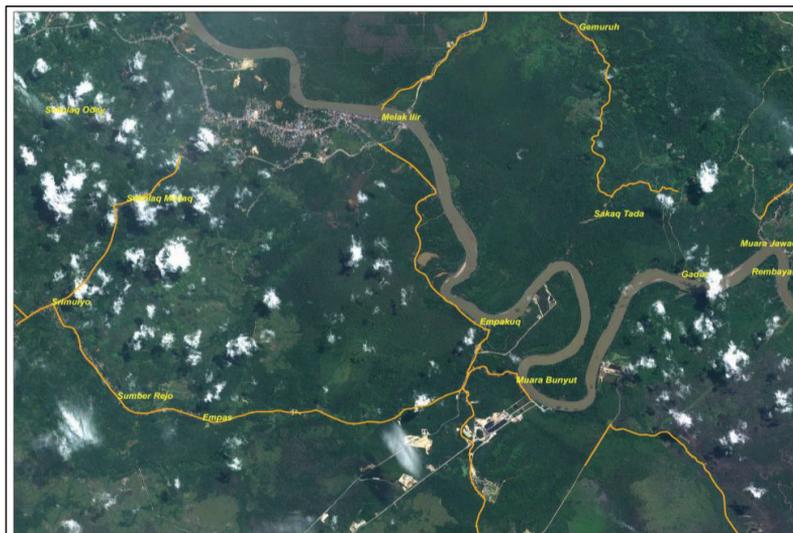
FOKUS PROVINSI	KOMITMEN KABUPATEN	USULAN PADA PRIORITAS NASIONAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Lembaga Latihan Kerja ▪ Inisiasi penyediaan rumah susun pekerja (proposal & lahan) ▪ Review dokumen Kota Terpadu Madiri sebagai referensi lokasi rusun pekerja 	

Sumber : Hasil Rakor Bappeda se-Kaltim, 2019

5.1.6. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Kutai Barat

Terdapat 4 (empat) fokus pengembangan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Barat, yakni pengembangan hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, serta pengembangan *miniranch*. Untuk pengembangan hortikultura, Kabupaten Kutai Barat berkomitmen untuk memastikan kesiapan lokasi pengembangan. Saat ini telah diidentifikasi seluas ±28 Ha yang terletak di Desa Empas. Sementara untuk pengembangan *miniranch*, terdapat lahan milik kelompok tani yang dapat dimanfaatkan seluas ± 750 Ha di Sakaq Tada dan Empas.

Gambar 5.6.
Areal Pengembangan Kawasan Perkebunan di Kutai Barat (kiri) dan
Pengembangan Akses Transportasi Dari dan Menuju Pusat-Pusat Produksi (kanan)



Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Pembangunan pertanian di Kutai Barat juga perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur jalan guna menjamin konektivitas antara sentra-sentra produksi pertanian dengan pusat pemasaran hasil pertanian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun ruas-ruas jalan baru agar efektifitas dan efisiensi pemasaran hasil pertanian dapat terwujud. Selain itu, fasilitasi pengembangan hortikultura (seperti penyediaan bibit unggul) juga diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang sudah ada. Untuk itu perlu adanya kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang pertanian di Kutai Barat.

Tabel 5.7. Pembagian Tugas Berdasarkan Kewenangan terhadap
Fokus Pembangunan Wilayah Kabupaten Kutai Barat

FOKUS PROVINSI	KOMITMEN KABUPATEN	USULAN PADA PRIORITAS NASIONAL
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi Pengembangan Hortikultura termasuk penyediaan bibit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesiapan lokasi pengembangan hortikultura (Lokasi di Empas ±28 Ha) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan jalan Gusiq – Sp. Blusuh – Damai – Sp. Barong Tongkok

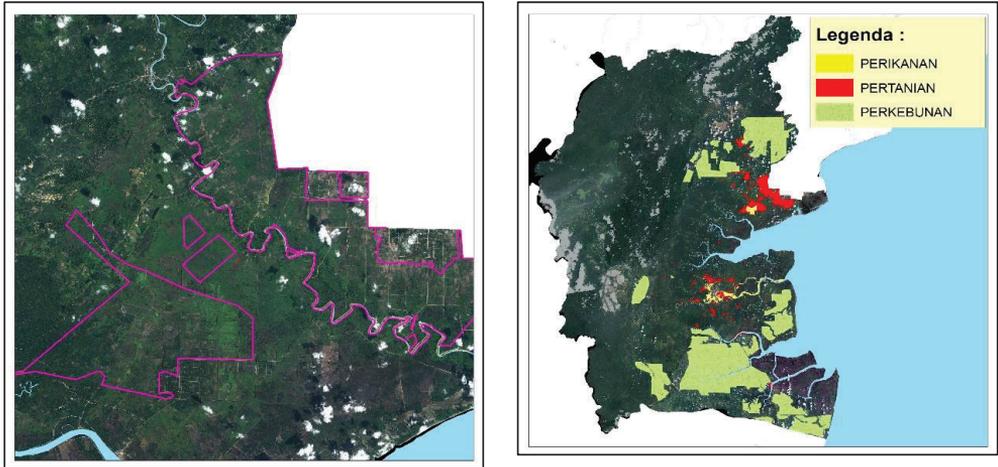
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Pengembangan <i>Mini ranch</i> ▪ Studi kelayakan pembangunan jalan Sotek – Bongan ▪ Dukungan Peningkatan jalan Muara Pahu – Penyinggahan guna mendukung kawasan sentra produksi perkebunan & perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesiapan lokasi pengembangan Mini Ranch (Lokasi di Sakaq Tada ±350 Ha, Empas ± 400 Ha, milik Kelompok Tani) ▪ Pembangunan & peningkatan aksesibilitas jalan dari sentra produksi ke jalan poros ▪ Penyediaan akses jalan menuju kawasan Danau Jempang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Jalan Sp. Blusuh – Batas Kalteng
--	---	--

Sumber : Hasil Rakor Bappeda se-Kaltim, 2019

5.1.7. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Paser

Berdasarkan Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur 2016 – 2036, Kabupaten Paser merupakan salah satu dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP), yakni kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, secara khusus pada sektor pertanian. Guna meningkatkan produktivitas pertanian di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Paser, terdapat 2 (dua) pembangunan infrastruktur prioritas Bidang Sumber Daya Air yang saat ini tengah dilakukan tahapan awal pembangunannya, yakni Bendungan Lambakan dan Bendung Regulator Telake. Bendungan Lambakan memiliki fungsi utama sebagai penyedia air baku untuk irigasi dengan potensi layanan hingga mencapai 20.000 Ha. Selain itu, bendungan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai prasarana suplai air baku, penyedia listrik, serta pengendali banjir. Untuk mendukung efektivitas pemanfaatan prasarana ini, akan dibangun bendung regulator di bagian hilir. Bendung regulator ini akan mengatur suplai air dari Lambakan menuju ke lokasi layanan potensial.

Gambar 5.7.
Areal Pengembangan Food Estate di Kabupaten Paser (kiri) dan Peruntukkan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Perikanan di Kabupaten Paser (kanan)



Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Saat ini, dokumen kesiapan pembangunan dua prasarana tersebut tengah dalam proses finalisasi oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Secara simultan, Pemerintah Pusat telah mulai melaksanakan aktivitas pembangunan, diawali dengan pembenanahan akses dari jalan utama ke Desa Muara Lambakan. Lahan area kerja beserta daerah tangkapannya sebagian besar masuk dalam kawasan hutan sehingga diperlukan proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Proses IPPKH sudah berjalan sejak tahun 2018. Tahun 2019 akan dilanjutkan dengan pemasangan tanda batas pada lokasi-lokasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Paser juga telah berkomitmen untuk mendukung pembangunan prasarana pendukung sektor pertanian ini. Upaya sosialisasi ke warga/masyarakat setempat terus dilakukan, terutama untuk persiapan relokasi jika kegiatan konstruksi pada desa setempat mulai dilakukan. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 tahun 2018 tentang Kawasan Pertanian Nasional telah mencantumkan Kabupaten Paser sebagai Kawasan Sentra Tanaman Sawit. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat memberikan dukungan penuh pada Kabupaten Paser untuk mengembangkan potensi ketersediaan bahan baku di wilayahnya. Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), luas peruntukan perkebunan adalah sebesar 398.945 Ha. Saat ini, luas yang telah dibebani izin perkebunan telah mencapai 348.144 Ha. Luas perkebunan eksisting saat ini mencapai 200.258 Ha dimana 91% diantaranya telah ditanami.

Potensi pengembangan holtikultura di Kabupaten Paser juga cukup menjanjikan. Pada tahun 2015 Gubernur telah menetapkan Kecamatan yang menjadi sentra produksi tanaman pangan dan

holtikultura, dimana lokus Kabupaten Paer yakni Tanah Grogot untuk komoditas jeruk, Muara Komam untuk komoditas bawang merah, serta long kali untuk komoditas buah lai. Selain itu, Pemerintah kabupaten juga mencanangkan Kecamatan Kuaro sebagai sentra tanaman kelengkeng dimana saat ini tertanam 1.000 pohon dengan produksi 7.000 – 8.000 ton dalam satu kali panen. Kedepannya, kawasan holtikultura akan dikembangkan dengan basis korporasi petani dengan memperhatikan kesinambungan aktivitas di sektor hulu (produksi) hingga sektor hilir (pemasaran). Komoditas baru yang rencana akan dikembangkan di Kalimantan Timur adalah buah kurma. Buah kurma memiliki nilai ekonomi tinggi, dimana dalam 1 hektar lahan kelapa sawit setara dengan budidaya 6 pohon kurma. Untuk mengembangkan komoditas ini, masih diperlukan kajian jenis benih kurma yang sesuai dengan kondisi geografis Kaltim. Untuk melihat tingkat efektivitas dan potensi keberhasilan pengembangan kurma, perlu dilaksanakan pilot project pada lokasi potensial. Beberapa hasil pembahasan terkait dengan rencana pengembangan pertanian di Kabupaten Paser tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8. Pembagian Tugas Berdasarkan Kewenangan terhadap Fokus Pembangunan Wilayah Kabupaten Paser

FOKUS PROVINSI	KOMITMEN KABUPATEN	USULAN PADA PRIORITAS NASIONAL
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Peremajaan dan peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat ▪ Pengembangan <i>Mini Ranch</i> ▪ Fasilitas jalan produksi pertanian ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang di hulu DAS Telake, terutama terkait dengan izin pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong kesiapan kesiapan 17.000 Ha lokasi peremajaan kebun sawit ▪ Kesiapan Lokasi <i>Mini Ranch</i> di Kecamatan Paser Balengkong & Long Ikis ▪ Penyelesaian masalah sosial terkait pembangunan Bendungan Lambakan ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang di hulu DAS Telake, terutama terkait dengan izin perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Bendungan Lambakan & Bendung Regulator Telake ▪ Peningkatan Ruas Jalan Kademan – Batu Aji

Sumber : Hasil Rakor Bappeda se-Kaltim, 2019

5.1.8. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Penajam Paser Utara

Bersama dengan Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, secara khusus untuk aktivitas industri pertanian. Pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/2018, Kabupaten PPU juga ditetapkan menjadi lokus sentra tanaman padi, cabai, dan bawang merah. Alokasi luas kawasan pertanian di Kabupaten PPU pada dokumen tata ruang provinsi berkisar 23.488 Ha, dengan kondisi eksisting sawah baik yang sudah maupun belum ditanami padi mencapai 12.205 Ha. Besarnya potensi sektor pertanian di Kabupaten ini sayangnya belum didukung oleh ketersediaan sumber air baku irigasi yang memadai. Hal ini mengakibatkan frekuensi panen belum dapat dimaksimalkan dan beberapa ada yang mengalami gagal panen. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan sawit juga terjadi cukup masif. Perlu adanya pembatasan konversi/alih fungsi lahan ini agar potensi sektor pertanian dapat membangkitkan ekonomi kabupaten, provinsi, bahkan nasional.

Saat ini, terdapat setidaknya 11 Daerah Irigasi Permukaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan total luas 4.309 Ha. Penanganan juga dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, terutama pada aset-aset yang menjadi milik pemerintah pusat. Potensi pengembangan daerah irigasi di PPU juga dapat dilakukan pada daerah rawa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2015, terdapat 6 Daerah Irigasi Rawa di Kabupaten PPU dengan total luas 11.000 Ha. Kedepannya, keberadaan lahan rawa ini dapat dioptimalkan untuk pengembangan potensi pertanian di Kabupaten PPU. Terkait dengan pengembangan potensi sebagaimana dijelaskan diatas, beberapa hal yang menjadi fokus provinsi, komitmen kabupaten, serta usulan pada prioritas nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 5.9. Pembagian Tugas Berdasarkan Kewenangan terhadap Fokus Pembangunan Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara

FOKUS PROVINSI	KOMITMEN KABUPATEN	USULAN PADA PRIORITAS NASIONAL
<ul style="list-style-type: none">▪ Penyediaan bibit padi, holtikultura, & perkebunan (durian, kelengkeng, kurma)▪ Fasilitas Peremajaan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembukaan lahan untuk jalan usaha tani	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembangunan jalan penghubung jembatan Pulau Balang sisi Penajam

FOKUS PROVINSI	KOMITMEN KABUPATEN	USULAN PADA PRIORITAS NASIONAL
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi kelayakan pembangunan jalan Sotek – Bongan ▪ Pemeliharaan & normalisasi saluran dan pintu-pintu air (terkait pemanfaatan jaringan irigasi) ▪ Penyediaan mesin pengering gabah & <i>rice milling</i> ▪ Peningkatan jalan usaha tani (perlu ada lokasi jelas yang diprioritaskan) ▪ Pelatihan budidaya bandeng jantan (akan dicek kembali) ▪ Peningkatan jalan Petung – Semoi – Sepaku – Km. 38 		

Sumber : Hasil Rakor Bappeda se-Kaltim, 2019

5.1.9. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Berau

Kabupaten Berau memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata. Terlebih dengan telah beroperasinya Bandara Maratua yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan asing dan dalam negeri menuju pariwisata bahari Kepulauan Derawan dan sekitarnya. Keindahan alam dan potensi wisata bawah laut yang ada di Kepulauan Derawan telah dikenal sampai dengan wilayah dataran eropa dan afrika. Bahkan pemerintah negara Seychelles yang menjadi salah satu tempat kunjungan wisata terkenal di dunia telah mengajak kerjasama pemerintah daerah untuk pengembangan konsep pariwisata di kedua wilayah yang saling terkoneksi. Terhadap hal tersebut, maka fokus pembangunan Kabupaten Berau pada tahun 2020 masih diarahkan pada pengembangan wisata bahari Kepulauan Derawan dan sekitarnya.

Gambar 5.9.
Pengembangan Kawasan Pariwisata di Maratua, Derawan dan Sekitarnya (kiri) dan Areal Pengembangan Perkebunan dan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Berau (kanan)



Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kepulauan Derawan dan sekitarnya, maka diperlukan dukungan infrastruktur penunjang aksesibilitas seperti pembangunan dermaga dan peningkatan kualitas jalan. Penambahan sarana kelistrikan di wilayah tersebut juga diperlukan untuk menjamin peningkatan daya tarik bagi wisatawan. Selain itu, pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata seperti *homestay* yang layak dan rumah sakit juga diperlukan sebagai sarana pendukung daerah wisata. Pada intinya, infrastruktur pariwisata di Kepulauan Derawan masih perlu dioptimalkan untuk benar-benar berkembang dan maju sehingga dapat bersaing dengan destinasi wisata yang ada di tempat lain seperti Gili dan Raja Ampat. Adapun kolaborasi yang menjadi fokus provinsi, komitmen kabupaten, serta usulan pada prioritas nasional untuk mendukung pariwisata adalah sebagai berikut :

Tabel 5.10. Pembagian Tugas Berdasarkan Kewenangan terhadap Fokus Pembangunan Wilayah Kabupaten Berau

FOKUS PROVINSI	KOMITMEN KABUPATEN	USULAN PADA PRIORITAS NASIONAL
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi <i>Homestay</i> yang layak ▪ Mendorong pembangunan sarana & prasarana di kawasan wisata ▪ Pembangunan Dermaga Wisata di Biduk-biduk ▪ Peningkatan Jalan Tanjung Redeb – Talisayan ▪ Pemindahan sekolah SMA dari Kawasan Bandara Maratua ▪ Penyediaan & perluasan layanan kelistrikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemindahan sekolah SMP dari Kawasan Bandara Maratua ▪ Penyediaan lahan untuk pemindahan SMA & SMP dari Kawasan Bandara Maratua (3,5 Ha) ▪ Pembangunan Rumah Sakit Tipe B 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Jalan Gn. Tabur – Usiran – Tg. Batu ▪ Penyempurnaan bahu <i>runway</i> Bandara Maratua

Sumber : Hasil Rakor Bappeda se-Kaltim, 2019

5.1.10. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Mahakam Ulu

Dokumen tata ruang wilayah nasional, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 menetapkan 2 (dua) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Kabupaten Mahakam Ulu. Kedua PKSN tersebut terletak di Long Pahangai dan Long Apari. Pengembangan berbagai sektor potensial di Kabupaten Mahakam Ulu belum dapat optimal jika aksesibilitas transportasi serta telekomunikasi belum tersedia dengan memadai. Akses menuju Kabupaten termuda di Kaltim ini dapat ditempuh melalui Kutai Barat, dengan rute utama Tering – Long Bagun – Long Pahangai – Long Apari. Rute ini akan menjadi fokus penanganan seluruh tingkatan pemerintahan baik pusat, provinsi, maupun kabupaten. Selain jalan, pembangunan jembatan pada ruas-ruas tersebut juga akan menjadi prioritas pada tahun 2020.

FOKUS PROVINSI	KOMITMEN KABUPATEN	USULAN PADA PRIORITAS NASIONAL
<p>Long Apari (diprioritaskan dari Tering – ibukota kabupaten)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Jembatan <i>Bailey</i> pada ruas Tering – Long Bagun – Long Pahangai ▪ Pembangunan jaringan telekomunikasi ▪ Penguatan ketenagalistrikan daerah ▪ Pembangunan SMA & SMK (direncanakan untuk dibangun sekolah berasrama) ▪ Penyediaan alat kesehatan di Rumah Sakit Mahulu, termasuk akses menuju fasilitas kesehatan ▪ Pembangunan/pengembangan IPA di Long Pahangai & Long Apari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi & penyediaan lahan bandar udara (\pm 250 Ha), penyusunan dokumen perencanaan ▪ Review desain perencanaan Jembatan Sungai Ratah & Long Laham (telah dilaksanakan 2019) ▪ Pembangunan Jalan Tering – Long Bagun – Long Pahangai – Long Apari (diprioritaskan dari Tering – ibukota kabupaten) 	<p>Bagun – Long Pahangai – Long Apari (diprioritaskan dari Tering – ibukota kabupaten)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan jaringan telekomunikasi ▪ Pembangunan Bandar Udara di Ujoh Bilang ▪ Pembangunan Jembatan Sungai Ratah & Long Laham

Sumber : Hasil Rakor Bappeda se-Kaltim, 2019

BAB 6

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur secara sinergis.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Strategi tahunan ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2020 adalah “Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi”

Guna merealisasikan fokus/tema pembangunan yang telah dicanangkan, perencanaan pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai ultimate job dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan ini merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan ini harus melibatkan stakeholder yang bersangkutan karena subyek pelaksana program dan kegiatan adalah unsur-unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kepentingan di dalamnya dengan tetap melibatkan masyarakat secara aktif.

Lebih lanjut, agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat menunjukkan capaian kinerja masing-masing prioritas daerah maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan arahan dalam penentuan program dan kegiatan yang tepat. Apabila capaian kinerja suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan outcome yang positif, pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi serta kajian ulang atas perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 harus merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPJMD. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2020, sesuai dengan

peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam OPD provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (outcome), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/OPD penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Perioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial) dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan). Kemudian, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 urusan, yaitu Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

Mengacu pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) di atas berdasarkan bidang urusan yang menjadi kewenangan OPD. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2020 terlampir pada tabel 6.1:

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	TAHUN 2020
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				3.291.359.529.099
1,01	Pendidikan				759.473.292.000
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				759.473.292.000
1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				713.837.652.000
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82,67%		100.000.000.000
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Laporan	smd	100.000.000.000
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit		2.000.000.000
1.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD	4 Unit	smd	1.000.000.000
1.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah gedung kantor skpd dan unit kerja internal skpd yang dipelihara	4 Unit	smd	1.000.000.000
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	92%		2.000.000.000
1.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi	50 Kali	smd	1.000.000.000
1.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang dilatih	550 Orang	smd	1.000.000.000
1.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				70.512.008.000
1.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen Perencanaan dan Anggaran	5 Dokumen	smd	1.500.000.000
1.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	12 Laporan	smd	1.579.100.000
1.01.10.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	14000 siswa	smd	67.432.908.000

1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa	70%		19.694.811.000
1.01.19.19	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri	1220 Orang	smd	10.000.000.000
1.01.19.20	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri	1317 Orang	smd	2.634.000.000
1.01.19.21	Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	9 Sekolah	smd	2.695.944.133
1.01.19.22	Pembangunan Prasarana Belajar SLB (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	9 Sekolah	smd	1.022.909.333
1.01.19.23	Pengadaan Sarana Belajar SLB (DAK)	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik Peraga Siswa	9 sekolah	smd	1.341.957.534
1.01.19.61	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Peserta Minat, Bakat dan Kreativitas siswa SLB	200 Orang	smd	2.000.000.000
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi	97%		5.845.000.000
1.01.20.03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	500 Orang	smd	1.500.000.000
1.01.20.09	pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya	250 Orang	smd	1.500.000.000
1.01.20.40	Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi (Kegiatan Kualifikasi Pendidikan Guru)	Jumlah Pendidik yang Memenuhi Standar Kompetensi	1500 Orang	smd	1.500.000.000
1.01.20.41	Pemenuhan Sarana & Prasarana Tenaga Pendidik	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya	20 Orang	smd	1.345.000.000
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan menengah dan khusus	79%		5.558.000.000
1.01.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah laporan yang menerapkan sistem dan informasi manajemen pendidikan	40 Laporan	smd	1.000.000.000

1.01.22.08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Jumlah pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi ilmiah	3 Kegiatan	smd	802.000.000
1.01.22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	24 Laporan	smd	500.000.000
1.01.22.10	Pelaksanaan Ujian Nasional/Ujian Sekolah	Jumlah Sekolah Negeri yang melaksanakan Ujian Nasional jenjang SLB/SMA/SMK	232 Sekolah	smd	1.000.000.000
1.01.22.11	Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah Sekolah Negeri yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SLB/SMA/SMK	232 Sekolah	smd	971.000.000
1.01.22.17	Sosialisasi dan Promosi Pendidikan	Sosialisasi dan Promosi Pendidikan	10 Kab/kota	smd	1.285.000.000
1.01.23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS yang berprestasi	13000 Orang		74.881.787.000
1.01.23.01	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa	13000 Orang	smd	74.881.787.000
1.01.38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah	2500 Siswa		4.000.000.000
1.01.38.01	Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA)	Jumlah Beasiswa bagi siswa Miskin	415 Orang	smd	3.000.000.000
1.01.38.02	Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa Miskin yang Mendapatkan Beasiswa	500 Orang	smd	1.000.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	73%		228.028.959.000
1.01.39.02	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Penyelenggaraan paket C setara SMU	100 Orang	smd	500.000.000
1.01.39.03	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	10 Kab/kota	smd	500.000.000
1.01.39.05	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	10 kab/kota	smd	10.000.000.000
1.01.39.06	Lomba dan Pertandingan Tingkat SMA	Jumlah kab/kota yang mengikuti lomba jenjang SMA	10 Kab / Kota	smd	2.000.000.000
1.01.39.08	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Atas	10 Kab/kota	smd	2.000.000.000

1.01.39.1 2	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik Peraga Siswa	25 sekolah	smd	2.000.000.000
1.01.39.1 4	Pembangunan Prasarana Belajar SMA	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	15 Sekolah	smd	1.000.000.000
1.01.39.1 6	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	62711 siswa	smd	87.795.400.000
1.01.39.1 7	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	10 Sekolah	smd	1.000.000.000
1.01.39.1 8	Pembangunan Pagar Sekolah	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	5 Sekolah	smd	1.000.000.000
1.01.39.2 3	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium Sekolah Menengah Atas	10 Sekolah	smd	1.000.000.000
1.01.39.2 4	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	10 Kab/Kota	smd	50.000.000.000
1.01.39.2 5	Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	50 Sekolah	smd	23.226.697.069
1.01.39.2 6	Pembangunan Prasarana Belajar SMA (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	50 Sekolah	smd	15.308.529.115
1.01.39.2 7	Pengadaan Sarana Belajar SMA (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	50 Sekolah	smd	16.664.500.000
1.01.39.2 8	Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Asrama Siswa SMA (Afirmasi) (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	30 Sekolah	smd	14.033.832.816
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK/MAK, Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK	77%		196.277.087.000
1.01.40.0 1	Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Menengah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah	5 Kegiatan	smd	2.000.000.000
1.01.40.0 2	Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	10 Sekolah	smd	1.000.000.000
1.01.40.0 3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan	10 Paket	smd	1.000.000.000

1.01.40.04	Pembangunan Ruang Praktikum Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pembangunan Ruang Praktikum Sekolah Menengah Kejuruan	10 Ruang	smd	1.000.000.000
1.01.40.10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	47245 Orang	smd	75.592.000.000
1.01.40.11	Pendidikan Penguatan Karakter	Peningkatan mutu siswa dalam rangka SDM berkualitas	150 Siswa	smd	1.000.000.000
1.01.40.18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	42998 Orang	smd	60.000.000.000
1.01.40.19	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	30 Sekolah	smd	17.412.769.000
1.01.40.20	Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi (DAK)	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik Peraga Siswa	50 sekolah	smd	26.059.424.000
1.01.40.21	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	50 Sekolah	smd	1.944.588.000
1.01.40.22	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	50 Sekolah	smd	206.706.000
1.01.40.23	Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	50 Sekolah	smd	1.151.600.000
1.01.40.24	Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	50 Sekolah	smd	7.910.000.000
1.01.41	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah Sekolah yang Mengembangkan Ekstrakurikulum Berbasis Agama	100 Sekolah		500.000.000
1.01.41.01	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Ekstrakurikuler Keagamaan	150 Jumlah Sekolah	smd	500.000.000
1.01.42	Program Pengembangan Sekolah Kejuruan	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri	55 SMK		500.000.000
1.01.42.01	Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Industri	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah	5 Kegiatan	smd	500.000.000
1.01.43	Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri	55 SMK		500.000.000

1.01.43.0 1	Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Sekolah yang menerapkan program pendidikan jarak jauh	10 Sekolah	smd	500.000.000
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sekolah mengembang-kan budaya loka	150 Sekolah		3.540.000.000
2.16.15.0 1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	10 Kab/Kota	smd	1.150.000.000
2.16.15.0 6	Pengembangan nilai budaya seni dan film	Terselenggaranya Pengembangan nilai budaya seni dan film	10 Kab / Kota	smd	990.000.000
2.16.15.0 7	Pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan iptek	Terselenggaranya industri ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan iptek	10 Kab/Kota	smd	1.400.000.000
1.01.01.2 35	UPTD Taman Budaya				4.565.640.000
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		1.314.600.000
1.01.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Laporan	smd	1.314.600.000
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				248.250.000
1.01.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD	100 Unit	smd	248.250.000
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				348.875.000
1.01.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi	100 Kali	smd	348.875.000
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya				2.653.915.000
2.16.15.0 1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	100 Kab/Kota	smd	1.737.525.000
2.16.15.0 6	Pengembangan nilai budaya seni dan film	Terselenggaranya Pengembangan nilai budaya seni dan film	100 Kab / Kota	smd	916.390.000
1.01.01.2 36	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan				41.070.000.000
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				870.000.000
1.01.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Laporan	smd	870.000.000
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				31.725.500.000

1.01.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD	1399 Unit	smd	31.689.550.00 0
1.01.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	8 Laporan	smd	35.950.000
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				274.500.000
1.01.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi	10 Kali	smd	271.500.000
		jumlah aparatur yang dilatih	5 Orang		
1.01.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	2 Laporan	smd	3.000.000
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				8.200.000.000
1.01.20.0 9	pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah laporan yang menerapkan sistem dan informasi manajemen pendidikan	5 Laporan	smd	8.200.000.000
1,02	Kesehatan				884.190.541.5 15
1.02.01	Dinas Kesehatan				49.270.676.01 5
1.02.01.0 1	Dinas Kesehatan				6.446.050.015
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86%		2.808.250.000
1.02.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	2.808.250.000
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		1.047.900.000
1.02.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	5 unit	smd	309.100.000
1.02.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	5 unit	smd	738.800.000
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	40%		1.517.150.000
1.02.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk tamu dan rapat)	12 Bulan	bru, psr, mah, kbr,	1.277.150.000

				smd, ppu, kk, bnp, ktm, btg, luarP rv	
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah pertahun	75 Kali		
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pertahun	90 Kali		
1.02.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek	30 Orang	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kk, bnp, ktm, btg, luarP rv	240.000.000
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	68%		1.072.750.000
1.02.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kk, bnp, ktm, btg, luarP rv	572.750.000
1.02.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	10 dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kk, bnp, ktm, btg, luarP rv	500.000.000
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan Vaksin esensial di puskesmas	99%		1

1.02.15.0 1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan (buffer stok)	100%	smd	1
1.02.15.0 2	Pemenuhan Sarana/Prasarana Instalasi Farmasi Provinsi (DAK)	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan	150 Jenis	smd	-
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	50%		4
1.02.16.0 5	Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah kab/kota yang dibina untuk perbaikan gizi	10 kab/kota	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	1
1.02.16.0 7	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang dibina untuk mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	150 fasyankes	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	1
		Jumlah fasyankes yang difasilitasi dan dilakukan kegiatan pemeliharaan alkes (RMC)	80 fasyankes		
		Jumlah sarana produksi dan distribusi yg mendapatkan izin alat kesehatan	16 sarana		
		Jumlah sarana produksi dan distribusi yg mendapatkan izin Kefarmasian	19 sarana		
1.02.16.0 9	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring evaluasi dalam melaksanakan SPM	10 Kab/Kota	smd	1
		Jumlah masyarakat yang diperiksa kebugarannya	3100 orang		

1.02.16.1 4	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Persentase pembinaan Kab/Kota memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	40 Kab/Kota	smd	1
1.02.17	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	90%		1
1.02.17.0 1	Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu, Non BPJS	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program JKN menuju UHC	10 kab/kota	smd	1
		Jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang memperoleh jaminan pelayanan kesehatan	132000 orang		
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase Kab/Kota yang melaksanakan min. 5 tema kampanye GERMAS	70%		1
1.02.19.0 2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah kegiatan penguatan OPD/Lintas Sektor yang mengimplementasikan kebijakan publik berwawasan kesehatan	6 Kali	smd	1
		Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi pertahun	5 Kali		
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan penilaian (posyandu dan PHBS) dalam setahun	10 Kab/Kota		
		Jumlah Rumah Sakit di Kalimantan Timur yang dilakukan pembinaan PKRS	15 Rumah Sakit		
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit menular	6 Kab/Kota		2
1.02.22.0 5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR=>70% dan SR=>90%	4 kab/kota	smd	1

		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai presentase ODHA yang mendapatkan ARV => 55%	3 Kab/Kota		
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standart =>95%	7 Kab/Kota		
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	5 Kab/Kota		
1.02.22.09	Peningkatan surveilliance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian IDL	8 Kab/Kota	smd	1
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian persentase respon kewaspadaan kejadian luar biasa	9 Kab/Kota		
		Jumlah Kab/Kota yang melakukan sosialisasi dan membuat rencana kontijensi wabah/bencana	2 Kab/Kota		
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi utama	43%		3
1.02.23.07	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi	80 puskesmas	smd	1
1.02.23.08	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Kab/kota yang memiliki Fasyankes telah mempersiapkan pelayanan telemedicine	2 kab/kota	smd	1
		Persentase kejadian bencana yang ditangani	100%		
		Persentase KLB yang ditangani	100%		
		Jumlah RSUD yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan akreditasi SNARS edisi I	7 RSUD		

1.02.23.1 1	Peningkatan pelayanan kesehatan Pengembangan	Jumlah kab kota yang telah melakukan pembinaan penyehat tradisional	7 Kab/Kota	smd	1
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	70 Fasyankes		2
1.02.56.0 1	Pendidikan teknis kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan	660 orang	smd	1
1.02.56.0 4	Standarisasi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas daerah DTPK/3T, sangat terpencil dan terpencil yang difasilitasi memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	25 puskesmas	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	1
1.02.59	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit tidak menular	6 Kab/Kota		1
1.02.59.0 1	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah Kab/Kota yang min 50% Puskesmasnya melaksanakan deteksi dini kanker payudara pada perempuan usia 30-50 tahun	5 Kab/Kota	smd	1
		Jumlah Kab/Kota yang mempunyai min 50% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM (kasus Hipertensi & DM)	3 Kab/Kota		
		Jumlah PD provinsi yang dilakukan pembinaan deteksi dini faktor resiko PTM dan implementasi KTR	6 OPD		
		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan implementasi KTR minimal di 50% sekolah	50%		
1.02.01.0 2	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)				5.000.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Presentase capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal	100%		5.000.000.000
1.02.47.0 1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Tersedianya barang dan jasa BLUD	12 Bulan	smd	5.000.000.000

1.02.01.0 3	UPTD Balai Latihan Kesehatan				4.500.000.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	90%		1.430.150.000
1.02.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	1.430.150.000
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%		1.322.560.000
1.02.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	1 unit	smd	704.760.000
1.02.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	1 unit	smd	617.800.000
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		430.900.000
1.02.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah	25 Kali	smd	380.900.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	23 Kali		
1.02.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek pertahun	10 orang	smd	50.000.000
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	70%		1.316.390.000
1.02.56.0 1	Pendidikan teknis kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	270 Orang	smd	1.316.390.000
1.02.01.0 4	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim				7.700.000.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%		1.748.802.000
1.02.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	1.748.802.000

1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%		1.502.067.714
1.02.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	1 unit	smd	1.148.570.000
1.02.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	1 unit	smd	353.497.714
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		2.262.000.000
1.02.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah	20 Kali	smd	1.181.000.000
1.02.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Kali	smd	1.081.000.000
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				2.187.130.286
1.02.26.1 8	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	0 unit	smd	2.187.130.286
1.02.01.0 5	UPTD Laboratorium Kesehatan				3.500.000.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	100%		996.700.000
1.02.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	996.700.000
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%		2.473.840.000
1.02.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	1 unit	smd	2.212.900.000
1.02.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	1 unit	smd	260.940.000

1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		29.460.000
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah	60 Kali	smd	29.460.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Kali		
1.02.01.06	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim (BLUD)				8.000.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	100%		8.000.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Tersedianya tenaga teknis BLUD	12 Bulan	smd	8.000.000.000
		Tersedianya barang dan jasa BLUD	12 Bulan		
1.02.01.07	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI				14.124.626.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5.594.692.250
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	5.594.692.250
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.815.697.540
1.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	100 unit	smd	1.365.749.000
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	100 unit	smd	449.948.540
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				368.000.000
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah	20 Kali	smd	163.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20 Kali		
1.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek	15 Orang	smd	205.000.000
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				2.167.856.798

1.02.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan	1000 Jenis	smd	2.167.856.798
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				3.358.204.412
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah unit sarana prasarana dan alat kesehatan yang diadakan	100 unit	smd	2.160.704.412
1.02.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah bahan logistik RS/ Balai yang diadakan	100 Bahan	smd	1.197.500.000
		Jumlah bahan-bahan logistik RS yang diadakan	100 unit		
1.02.26.25	Pengadaan Meubeler Rumah Sakit	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	100 unit		-
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				125.000.000
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit				125.000.000
1.02.104	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit				695.175.000
1.02.104.01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit	Jumlah RS Pemerintah yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan akreditasi SNARS edisi I	1 RS	smd	695.175.000
1.02.02	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda				527.981.250.000
1.02.02.01	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda				67.981.250.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%		1.500.000.000
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kualitas layanan administrasi RS	80%	smd	1.500.000.000
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya manajemen pelayanan	100%		-
1.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya manajemen pelayanan	0%		50.000.000

		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	69%		
1.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah laporan pengelolaan keuangan daerah	1 laporan	smd	50.000.000
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase standar RS terhadap pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	0%		4.000.000.000
		Stock out dan stagnansi obat dan bhp medis	6%		
1.02.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat dan bahan habis pakai medis sesuai standar	100%	smd	4.000.000.000
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan	0%		50.062.450.000
		Ketepatan pengadaan sesuai perencanaan	90%		
1.02.26.01	Pembangunan Rumah Sakit	Kesesuaian sapras RS sesuai standar RS kelas A	90%	smd	34.400.000.000
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Kesesuaian peralatan medis sesuai standar RS kelas A	90%	smd	6.369.160.000
1.02.26.19	Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah Gedung yang diadakan	1 Gedung	smd	6.000.000.000
1.02.26.20	Rehabilitasi sedang / berat gedung rumah sakit (DAK)	Jumlah gedung kantor yang direhab	0 Gedung	smd	-
1.02.26.24	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	5 Unit/ Set	smd	1.630.840.000
1.02.26.28	Pengadaan Peralatan Non Medis	Kesesuaian peralatan non medis sesuai standar kebutuhan	100%	smd	1.662.450.000
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan	0%		10.300.000.000
		Sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	90%		
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Ketepatan waktu pemeliharaan peralatan medis sesuai jadwal pemeliharaan	90%	smd	9.000.000.000
1.02.27.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Ketepatan waktu pemeliharaan sapras sesuai jadwal pemeliharaan	95%	smd	1.000.000.000

1.02.27.2 1	Pemeliharaan Peralatan Non Medis	Ketepatan waktu pemeliharaan peralatan non medis sesuai jadwal pemeliharaan	90%	smd	300.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				
1.02.47.0 1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah pelayanan dan pendukung pelayanan yang diadakan	3 Jenis belanja BLUD	smd	
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Tingkat kepuasan kerja terhadap pengembangan SDM dan pemberdayaan SDM	85%		300.000.000
1.02.56.0 5	Peningkatan Keterampilan SDM	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan 20 jam per tahun	70%	smd	300.000.000
1.02.102	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Pasien	85%		100.000.000
1.02.102. 02	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan dalam 1 tahun	2 Kali	smd	100.000.000
1.02.104	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan unggulan di RS	0%		500.000.000
		Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit	80%		
1.02.104. 04	Pengembangan Pelayanan Unggulan	Persentase pencapaian SPM 22 Pelayanan Untuk Mencapai Target Indikator	84%	smd	500.000.000
1.02.105	Program Rumah Sakit Pendidikan	Peningkatan mutu luaran peserta didik (peningkatan IPK/Tahun)	3,2		400.000.000
1.02.105. 01	Pendidikan dan Penelitian di RS. Pendidikan	Jumlah peserta didik yang melaksanakan pendidikan di RS	50 Jumlah	smd	400.000.000
		Jumlah penelitian yang difasilitasi oleh RS	300 Penelitian		
		Jumlah Program Studi yang terlibat dalam proses pembelajaran secara Interprofessional education (IPE)	3 Jenis Program studi		
1.02.106	Program Peningkatan Tata Kelola RS. dan Tata Kelola Klinis	Pencapaian indikator kinerja utama RS	84%		615.800.000
1.02.106. 01	Pelaksanaan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Nilai hasil penilaian kinerja BLUD	75%	smd	154.000.000

1.02.106.02	Pelaksanaan Peningkatan Tata Kelola Klinis	Penerapan clinical pathway & panduan praktik klinis	70%	smd	461.800.000
1.02.107	Program Tata Kelola Keuangan	Cost recovery	78%		153.000.000
1.02.107.01	Pelaksanaan Kegiatan Keuangan	Nilai Rasio Keuangan (0-19)	11 Nilai	smd	153.000.000
		Nilai kepatuhan pengelolaan BLUD (0-11)	6 Nilai		
1.02.02.02	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda (BLUD)				460.000.000.00
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit	100%		460.000.000.00
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah pelayanan dan pendukung pelayanan yang diadakan	3 Jenis belanja BLUD	smd	460.000.000.00
1.02.03	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan				267.300.000.00
1.02.03.01	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan				55.000.000.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%		549.000.000
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	bpn	549.000.000
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	85 unit		-
1.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan , Kelengkapan sarana dan prasarana yang dipenuhi	200 unit / stell	bpn	-
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah perlengkapan dan peralatan RS yang terpelihara secara rutin dan berkala	130 unit / set	bpn	-
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	100%		1.635.000.000
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah	300 Orang	smd, psr, luarP rv	750.400.000
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	90 Orang		
1.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan/Bimtek	500 orang	bru, ktm, bpn, kkr, ppu,	884.600.000

				smd, psr, luarP rv	
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72%		79.000.000
1.02.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	bpn	9.000.000
1.02.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Laporan Hasil Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Yang ditindak lanjuti	4 Dokumen	bpn	70.000.000
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	80%		-
1.02.16.1 2	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah Pasien dengan kasus Khusus / KDRT	20 Orang	bpn	-
1.02.16.1 4	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Peralatan Non Medis	0 Unit		-
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pelayanan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)	100%		525.000.000
1.02.23.0 8	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Akreditasi Rumah Sakit SNARS Versi 1	1 Sertifikat	bpn	525.000.000
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Prosentase Kelengkapan sarana prasarana dan alkes sesuai standar kelas rumah sakit	80%		49.628.500.00 0
1.02.26.0 1	Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Pembangunan Gedung	1 Gedung	bpn	17.500.000.00 0
1.02.26.1 8	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Alat Kesehatan	10 Unit/Set	bpn	31.780.500.00 0
1.02.26.2 4	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Alat Kesehatan	30 Unit/Set	bpn	348.000.000
1.02.26.2 6	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	100 Unit		-
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi sesuai standar	90%		1.500.500.000
1.02.27.1 7	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Peralatan Kesehatan yang dilakukaneliharaan.	300 Unit	bpn	1.000.500.000
1.02.27.1 8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Jumlah perlengkapan dan peralatan RS yang terpelihara secara rutin dan berkala	90 unit / set	bpn	500.000.000

1.02.27.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Sertifikat Proper Lingkungan	1 Sertifikat	bpn	
1.02.27.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit				-
1.02.62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Prosentase Jejaring dengan Fasilitas Kesehatan	89%		400.000.000
1.02.62.63	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	jumlah Faskes yang bekerja sama / Jejaring dengan RSKD	10 faskes	bpn	400.000.000
1.02.102	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan pelanggan	500%		200.000.000
1.02.102.01	Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat				200.000.000
1.02.103	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				262.500.000
1.02.103.01	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Sertifikat Proper Lingkungan	1 Sertifikat	bpn	-
1.02.103.02	Pemusnahan B3 dan Limbah B3, Limbah Medis dan Lain-lain	Sampah B3	10000 Kg	bpn	262.500.000
1.02.104	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	85%		220.500.000
1.02.104.01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit	Jumlah Pasien dengan kasus Khusus / KDRT	15 Orang	bpn	150.500.000
1.02.104.03	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit	Jumlah Kegiatan Penyuluhan/pencegahan Infeksi/Pemeriksaan	5 Kegiatan	bpn	70.000.000
1.02.03.02	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)				212.300.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jenis Pelayanan Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B	19 Instalasi / unit		212.300.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah Kunjungan Pasien	183659 Orang	bpn	212.300.000.000
1.02.04	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				39.638.615.500
1.02.04.01	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				22.838.615.500
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Adminstrasi Perkantoran	100%		9.590.883.500
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Adminstrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	9.590.883.500
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana Aparatur	100%		316.500.000
1.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan penunjang pelayanan	8 Jenis	smd	219.000.000

1.02.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	97.500.000
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	81%		820.000.000
1.02.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimtek Kompetensi	150 Orang	smd	820.000.000
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	71%		116.000.000
1.02.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	0 Dokumen		-
1.02.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	8 Dokumen	smd	116.000.000
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelaksanaan standar Pelayanan Keperawatan	75%		80.000.000
1.02.16.1 2	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah Kegiatan Terapi Keperawatan Keluarga	100 Kegiatan	smd	80.000.000
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Capaian Standar Indikator Keselamatan Pasien	60%		250.000.000
1.02.23.0 8	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Kegiatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	5 Kegiatan	smd	250.000.000
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Sarana dan Prasarana RS Sesuai Standar	75%		2.581.632.000
1.02.26.0 1	Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Gedung Bangunan Rumah Sakit Yang Dibangun	5 Gedung / Fasilitas	smd	
1.02.26.1 8	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan	5 Jenis	smd	62.800.000
1.02.26.1 9	Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit (DAK) yang diadakan	2 Jenis	smd	1.130.682.000
1.02.26.2 3	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah jenis Pengadaan logistik Pasien	2 jenis	smd	201.250.000
1.02.26.2 5	Pengadaan Meubeler Rumah Sakit	Jumlah meubeler rumah sakit yang diadakan	4 Jenis	smd	154.500.000
1.02.26.2 6	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan	5 Jenis	smd	1.032.400.000

1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Rumah Sakit yang memiliki sarana/prasarana penunjang sesuai standart	90%		681.700.000
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Jenis Alat Kesehatan RS yang Terpelihara Dengan Baik	9 Jenis	smd	157.000.000
1.02.27.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Jumlah Gedung bangunan RS yang terpelihara	4 Gedung	smd	
1.02.27.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit yang dipelihara dengan baik	1 Instalasi	smd	251.700.000
1.02.27.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit	Jumlah Perlengkapan Rumah Sakit Yang terpelihara	2 Jenis	smd	273.000.000
1.02.61	Program Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Rumah Sakit	Persentase teknologi/aplikasi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	75%		688.400.000
1.02.61.61	Pengembangan SIM-RS	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi RS	27 aplikasi	smd	688.400.000
1.02.62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Piutang rumah sakit yang telah terbayarkan	180000000 Rupiah		180.000.000
1.02.62.62	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Jumlah laporan / Dokumen koordinasi dengan kab/kota	43 Laporan	smd	180.000.000
1.02.63	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur sesuai dengan aturan yang berlaku	100%		341.600.000
1.02.63.12	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Jenis pakaian kerja lapangan yang diadakan	8 Jenis	smd	172.100.000
1.02.63.63	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Jenis pakaian dinas yang diadakan	3 Jenis	smd	169.500.000
1.02.104	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase Capaian indikator standar pelayanan minimal rumah sakit	85%		7.191.900.000
1.02.104.01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit	Jumlah fasilitas/bangunan/sarana pelayanan yang diadakan/terpelihara sesuai SPM	2 Gedung/fasilitas	smd	7.191.900.000
1.02.04.02	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)				16.800.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat	95%		16.800.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	12 Bulan	smd	16.800.000.000
1,03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				1.582.382.296.784

1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				1.582.382.296.784
1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				1.443.380.646.784
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				20.000.000.000
1.03.04.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	20.000.000.000
		Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%		
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				4.740.612.935
1.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	16 Unit	smd	1.324.612.935
1.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	3.416.000.000
		Luas Bangunan yang di Rehabilitasi	100 m2		
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				2.617.000.000
1.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi luar dan dalam daerah	12 Bulan	smd	2.242.000.000
1.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	40 Orang	smd	375.000.000
1.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah (Target Dari Nilai LKJLP)	75%		1.510.000.000
1.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 Dokumen	smd	900.000.000
1.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen	smd	610.000.000
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				728.907.226.626
1.03.15.01	Perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah Laporan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	30 Dokumen	smd	30.200.000.000
1.03.15.02	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	52.33 Km	bru, kkr, ppu, smd, mah, ktm,	579.807.226.626

				bpn, psr	
1.03.15.0 3	Pembangunan Jembatan, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Jembatan yang terbangun	10 Buah	kk, mah	106.900.000.0 00
		Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang Dibangun	4 Buah		
		Panjang saluran drainase yang dibangun	6000 Meter		
1.03.15.0 4	Peningkatan Jalan (DAK)	Panjang Jalan yang Dibangun	0 Km	ppu	12.000.000.00 0
1.03.16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air				216.507.097.0 00
1.03.16.0 1	Pembangunan Prasarana Air Baku, Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai				147.043.172.0 00
1.03.16.0 2	Pembangunan Jaringan Irigasi				23.094.792.00 0
1.03.16.0 3	Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Air				30.084.793.00 0
1.03.16.0 4	Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)				16.284.340.00 0
1.03.17	Program Pembangunan Infrastruktur Keciaptakaryaan				223.724.000.2 51
1.03.17.0 1	Pembangunan dan Rehabilitasi gedung	Jumlah Gedung yang dibangun/direhabilitasi	10 Bangunan Gedung	kk, smd, ppu, luarP rv	167.020.050.2 51
1.03.17.0 2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi				48.724.600.00 0
1.03.17.0 3	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Keciaptakaryaan				7.979.350.000
1.03.18	Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi				14.433.806.46 8
1.03.18.0 1	Penyelenggaraan Pengaturan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Koordinasi Jasa Konstruksi	940 Orang	smd	4.383.600.000
		Jumlah Peraturan/Pedoman Jasa Konstruksi	5 Dokumen		
1.03.18.0 2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi	3600 Orang	smd	9.337.806.468
1.03.18.0 3	Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah Kegiatan Pengawasan SPM Jasa Konstruksi Kab/Kota	10 Kab/Kota	smd	712.400.000

		Jumlah Kegiatan Pengawasan Rantai Pasok	19 Lokasi		
		Jumlah Pengawasan Kegiatan Sertifikasi di Kab/Kota	12 Lokasi		
1.03.70	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				21.650.709.720
1.03.70.01	Perencanaan Penataan Ruang	Prosentase Jumlah RRTR KSP yang mendapat Persetujuan Substansi	21%	smd	8.335.084.720
1.03.70.02	Pemanfaatan Ruang & Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi pemanfaatan ruang	3 Kabupaten/Kota	smd	5.910.000.000
1.03.70.03	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi	1 Dokumen	smd	7.405.625.000
		Jumlah lokasi pada Kabupaten/Kota yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang	150 Lokasi		
		Dokumen Hasil Audit Pemanfaatan Ruang	2 Dokumen		
1.04.15	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman				209.290.193.784
1.04.15.01	Pembangunan Rumah Layak & Prasarana Sarana dan Utilitas	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	1200 unit	bru, smd, kbr, mah, btg, ktm, bpn, kkr, ppu, psr	92.980.018.332
		Jumlah perumahan yang mendapat bantuan PSU (unit)	9 Unit		
1.04.15.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh				100.713.287.952
1.04.15.03	Perencanaan & pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan kumuh	Jumlah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pengawasan	62 unit	bru, smd, kbr, mah, ppu, kkr, btg, ktm, bpn, psr	15.596.887.500
1.03.01.02	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I				50.001.650.000
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.184.100.000

1.03.04.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	bpn	1.184.100.000
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.680.625.000
1.03.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	bpn	171.825.000
1.03.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bpn	1.508.800.000
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				883.375.000
1.03.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	12 Bulan	bpn	764.375.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	30 Kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	100 Kegiatan		
1.03.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan / Bimtek	25 Orang	bpn	119.000.000
1.03.19	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I				46.253.550.000
1.03.19.0 1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I	Panjang jalan yang dipelihara efektif	214 Km	bpn	40.848.550.000
		Jumlah jembatan yang dipelihara efektif	6 Buah		
1.03.19.0 2	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah I				5.405.000.000
1.03.01.0 3	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II				52.000.000.000
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				898.499.000
1.03.04.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	898.499.000
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				6.683.853.660
1.03.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	30 Unit	smd	5.327.350.000

1.03.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	1.356.503.660
		Luas Bangunan yang di Rehabilitasi	1100 m2		
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				905.000.000
1.03.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	50 Kegiatan	kk, smd, luarP rv	830.000.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	150 Kegiatan		
		Jumlah porsi penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	1000 Porsi		
1.03.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi dan kursus-kursus singkat	20 Orang	bpn, smd, luarP rv	75.000.000
1.03.20	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II				43.512.647.34 0
1.03.20.0 1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II	Panjang Jalan yang dipelihara efektif	10 KM	kk, smd, kbr, mah	33.512.647.34 0
		Jumlah jembatan yang dipelihara efektif	5 Buah		
1.03.20.0 2	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah II	Luas daerah irigasi yang dipelihara	42 Hektar	kk, smd	10.000.000.00 0
		Jumlah bangunan pengendali banjir yang dipelihara efektif	7 Lokasi		
1.03.01.0 4	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III				37.000.000.00 0
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.725.452.000
1.03.04.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	bru, ktm	1.725.452.000
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.745.450.000
1.03.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	26 Unit	bru, ktm	990.450.000

1.03.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bru, ktm	1.755.000.000
		Luas bangunan yang dipelihara	1301 M2		
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				938.750.000
1.03.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	30 Kegiatan	bru, ktm, luarP rv	898.750.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	113 Kegiatan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	10 Bulan		
1.03.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan / Bimtek	8 Orang	smd, luarP rv	40.000.000
1.03.21	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III				31.590.348.000
1.03.21.0 1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III	Panjang jalan yang dipelihara Fungsional UPTD Wilayah III	405 KM	bru, ktm	24.300.000.000
		Jumlah jembatan yang dipelihara efektif	20 Buah		
1.03.21.0 2	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah III	Luas daerah irigasi yang dipelihara	13597 Hektar	bru, ktm	7.290.348.000
1,05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				36.110.025.000
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja				11.575.000.000
1.05.01.0 1	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)				11.575.000.000
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.769.712.200
1.05.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	3.769.712.200
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.230.591.000
1.05.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 bulan	smd	534.691.000

1.05.08.0 3	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	31 unit	smd	695.900.000
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				1.867.898.300
1.05.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 kegiatan	bpn, smd, luarP rv	715.908.300
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	30 kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan		
1.05.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	15 orang	smd, luarP rv	1.151.990.000
		Jumlah pakaian dinas	779 stell		
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan tepat waktu	4 Laporan		319.082.500
1.05.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan anggaran	4 dokumen	bpn, smd	151.022.500
1.05.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	23 dokumen	bpn, smd, luarP rv	168.060.000
1.05.60	Program Penegakkan Produk Hukum Daerah				1.227.660.000
1.05.60.0 2	Pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk Hukum daerah	Koordinasi pelaksanaan dan kerjasama pembinaan Perda dan Perkada	5 dokumen	smd	411.260.000
		Koordinasi pelaksanaan dan kerjasama pengawasan Perda dan Perkada	5 dokumen		
		Penyuluhan Pelanggaran Perda dan perkada	10 dokumen		
1.05.60.0 4	Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Fasilitasi PPNS se Kaltim	5 dokumen	smd	816.400.000
		Rapat Koordinasi teknis PPNS	2 dokumen		

		Deteksi Dini pelanggaran perda dan perkada se kaltim	10 dokumen		
		Pendampingan dan pelaksanaan penegakan perda provinsi kabupaten Kota se Kaltim	10 dokumen		
1.05.63	Program Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketertiban masyarakat				1.252.366.000
1.05.63.0 1	Peningkatan Pelaksanaan Operasional dan Pengendalian	Melakukan Patroli	150 dokumen	kk, smd	631.390.000
		Melakukan pengendalian massa	25 dokumen		
		Pelaksanaan Pengamanan tindakan Non Yustisi dan Yustisi	10 dokumen		
1.05.63.0 2	Peningkatan Pengamanan dan Pengawasan Protokoler	Melakukan Pengawasan dan Pengamanan Protokoler	30 dokumen	smd	620.976.000
		Pengamanan Aset Pemprov. Kaltim	21 dokumen		
		Melakukan Pengamanan Khusus	12 dokumen		
1.05.64	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan				1.089.540.000
1.05.64.0 1	Pelaksanaan Bina Potensi masyarakat	pendataan satlinmas Se Kaltim	10 dokumen	bru, mah, kbr, smd, ppu, kk, bpn, ktm, btg, psr	666.140.000
		FGD Kelembagaan Satlinmas	1 dokumen		
		Bimtek Satlinmas Se Kaltim	2 dokumen		
1.05.64.0 2	Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat	Perbantuan penanganan bencana musibah di daerah	10 dokumen	smd	423.400.000
1.05.65	Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran				818.150.000
1.05.65.0 1	Pencegahan dan Pengendalian Bidang Kebakaran	Kordinasi dan fasilitasi pencegahan kebakaran se Kaltim	10 dokumen	smd	477.860.000
		Pelaksanaan, pengendalian dan Pencegahan kebakaran	24 dokumen		

		Pemetaan daerah rawan kebakaran dan pendataan sistem proteksi kebakaran se kaltim	10 dokumen		
1.05.65.0 2	Pelatihan dan pembinaan bidang kebakaran	Pelatihan petugas pemadam kebakaran se kaltim	2 dokumen	smd	340.290.000
		Pembinaan Petugas Pemadam Kebakaran dan masyarakat se kaltim	4 dokumen		
1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				8.635.000.000
1.05.02.0 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				8.635.000.000
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	60%		900.000.000
1.05.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	900.000.000
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		238.200.000
1.05.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	114.800.000
1.05.08.0 3	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Peralatan dan Kelengkapan ASN Kesbangpol Prov. Kaltim	50%	smd	123.400.000
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%		926.800.000
1.05.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	smd	875.000.000
1.05.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya SDM Aparatur Kesbangpol	50 Orang	smd	51.800.000
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	58%		835.000.000
1.05.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen Perencanaan Anggaran	10 Dokumen	smd	620.000.000
1.05.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen Laporan	6 Dokumen	smd	215.000.000
1.05.15	Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Lingkungan	Penurunan jumlah konflik sosial di Kalimantan Timur	102 Konflik		1.269.100.000

1.05.15.0 1	Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kalimantan Timur	10 Kab/Kota	smd	479.100.000
1.05.15.0 5	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Sinergitas dan kebersamaan yang harmonis antara aparat keamanan dan pemerintah serta masyarakat	22 Rencana Aksi	smd	370.000.000
1.05.15.2 9	Sosialisasi/Desiminasi/Publikasi Perundang- Udangan Penanganan Konflik dan Peraturan Pelaksanaannya	Meningkatnya SDM Aparatur dalam upaya maksimalisasi keamanan, ketertiban dan ketentraman	150 Orang	smd	190.000.000
1.05.15.3 4	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Intelijen	Tenaga terlatih dan Profesional	30 Orang	smd	230.000.000
1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat Kalimantan Timur khususnya pelajar SLTA yang Memahami Wawasan dan Karakter Bangsa (%)	5%		1.234.400.000
1.05.17.0 7	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatnya Kesadaran Bela Negara	600 Orang	smd	617.200.000
1.05.17.0 8	Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Meningkatnya pemahaman Wawasan kebangsaan	3200 Orang	smd	617.200.000
1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	74,50%		2.000.000.000
1.05.21.0 6	Pemantauan perkembangan politik di daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dalam menjaga kondusifitas di Daerah	500 Orang	smd	597.000.000
		Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dalam menjaga kondusifitas di Daerah	4 Dokumen		
1.05.21.2 2	Penyusunan IDI	Meningkatnya Pemahaman Aparatur dan Tim Pokja IDI	100 Orang	smd	417.950.000
1.05.21.2 3	Penyusunan data base partai politik	Terlaksananya Kegiatan dan Tersusunnya Dokumen Parpol	100 Orang	smd	238.800.000
1.05.21.2 4	Verifikasi Berkas Administrasi Bantuan Partai Politik	Terlaksananya Kegiatan dan Verifikasi Berkas Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	100 Orang	smd	149.250.000

1.05.21.2 5	Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara	100 Orang	smd	597.000.000
1.05.62	Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas	Ormas yang berperan aktif dalam kegiatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	120 Ormas		1.231.500.000
1.05.62.0 1	Peningkatan Kapasitas Ormas	Jumlah SKT/SKM diterbitkan	30 SKT	smd	481.500.000
1.05.62.0 2	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	100 Orang	smd	300.000.000
		Jumlah pembinaan terhadap ormas	30 Ormas		
1.05.62.0 3	Pencegahan dan Penanganan Masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Data Ekonomi, dan Sosbud di 10 Kab/Kota	4 Dokumen	smd	300.000.000
1.05.62.0 9	Forum Diskusi Aktual Agama dan Kepercayaan	Terlaksananya Kegiatan Forum Diskusi Aktual Agama dan Kepercayaan	100 Orang	smd	150.000.000
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				15.900.025.000
1.05.03.0 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				15.900.025.000
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%		1.878.470.000
1.05.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	1.878.470.000
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	4 unit		2.000.000.000
1.05.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	2.000.000.000
1.05.08.0 3	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah barang peningkatan sarana dan prasarana peralatan kantor	50 unit		-
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	17,39%		260.000.000
1.05.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah	24 Kegiatan	smd, luarP rv	-

		Jumlah Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	71 Kegiatan		
		Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan		
1.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/bimtek	40 orang	smd	260.000.000
		Jumlah Seragam PNS	0 orang		
		Jumlah Seragam Tenaga Teknis/ Non Teknis	0 orang		
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				609.600.000
1.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	smd, luarP rv	209.600.000
1.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	bpn, smd, luarP rv	400.000.000
		Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	160 Orang		
		Jumlah BPBD yang dilakukan Penilaian	10 Kabupaten/Kota		
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	10 Kabupaten/Kota		
1.05.49	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana				3.179.155.000
1.05.49.12	Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Terlaksananya penyelenggaraan Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	100 Persen	smd	-
1.05.49.13	Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanganan Bencana	20 Persen	bpn, smd	504.155.000
1.05.49.14	Pengembangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan	Jumlah peserta rapat koordinasi logistik dan Peralatan penanggulangan bencana	50 Orang	smd	1.200.000.000
		Tersedianya Logistik Penanggulangan Bencana	10 Barang		
		Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana yang Tersedia	75 Unit		

		Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pergudangan dan Peralatan Penanggulangan Bencana	30 Orang		
		Jumlah peserta Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana	30 Orang		
1.05.49.1 5	Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan PB, SAR dan Pembekalan Tim Reaksi Cepat BPBD	80 Orang	bpn, smd	900.000.000
		Jumlah Peserta Pelatihan Jaringan Informasi Kebencanaan	30 Orang		
		Jumlah Peserta Peringatan Bulan PRB	10 Orang		
1.05.49.1 6	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	Jumlah Pendataan, Kaji Cepat PB dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	10 Kab/Kota	ktm, bpn, ppu, smd, kbr, luarP rv	575.000.000
1.05.51	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah				6.252.800.000
1.05.51.0 3	Penanggulangan bencana berbasis masyarakat	Jumlah peserta Bimtek Relawan Desa Tangguh Bencana (Destana)	60 Orang	smd	4.081.850.000
		Jumlah peserta Sosialisasi Desa Tangguh Bencana	240 Orang		
		Jumlah peserta penyegaran Fasilitator Desa Tangguh Bencana	30 Orang		
		Jumlah peserta Fasilitasi Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana dan Forum PRB Desa Tangguh Bencana	180 Orang		
		Jumlah dokumen Kajian dan Pemetaan Risiko Bencana Desa Tangguh Bencana	6 Dokumen		
		Jumlah dokumen Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana	8 Dokumen		

		Jumlah peserta Pembekalan Teknis Penanggulangan Bencana Relawan Desa Tangguh Bencana	240 Orang		
		Jumlah Peserta Seminar Hasil Desa Tangguh Bencana	210 Orang		
		Jumlah Peserta Simulasi Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana	120 Orang		
		Jumlah Peta Jalur evakuasi Destana	6 Peta		
		Jumlah Rambu-rambu Destana	90 Buah		
		Laporan perkembangan Desa Tangguh Bencana	1 Laporan		
		Jumlah orang yang mengikuti Kompetensi Desa Tangguh Bencana tingkat Provinsi dan Nasional	15 Orang		
1.05.51.0 4	Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana	Jumlah Peta Rawan Bencana	0 Peta	smd	1.085.150.000
		Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana	1 Dokumen		
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)/review	1 Dokumen		
1.05.51.0 5	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Jumlah peserta Pembekalan Teknis Penanggulangan Bencana bagi Relawan dan Masyarakat	35 orang	smd	1.085.800.000
1.05.51.1 6	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan	Jumlah Lokasi Monitoring Daerah Rawan Bencana	10 Kabupaten/Kota		-
		Jumlah dokumen Kajian Teknis Bencana	1 Dokumen		
		Jumlah pemasangan peralatan Peringatan Dini (EWS)	3 Unit		
		Jumlah pemantauan peralatan Peringatan Dini (EWS)	9 Unit		
		Jumlah dokumen SOP peringatan dini/review	1 Dokumen		

		Jumlah media penyebaran informasi kebencanaan	3 Media		
		Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan	0 Aplikasi		
1.05.51.17	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan	Jumlah peserta Rapat Teknis Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	100 Orang		-
1.05.55	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana				1.720.000.000
1.05.55.01	Sosialisasi dan Rakornis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi (bimtek JITUPASNA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	50 orang	bpn, luarP rv	400.000.000
1.05.55.02	Penyusunan Rencana Aksi Pasca Bencana	Jumlah Peserta Rapat Pembentukan TIM JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	30 orang	ppu, luarP rv	620.000.000
		Jumlah Peserta Workshop JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	35 orang		
		Jumlah Rakornis Penyusunan JITUPASNA dan Rencana Aksi	30 orang		
1.05.55.05	Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Kab/Kota Yang Dilaksanakan Pendampingan/Supervisi Kajian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	10 Kab/Kota	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	350.000.000
1.05.55.06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bidang dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarP rv	350.000.000
1.06	Sosial				29.203.373.800
1.06.01	Dinas Sosial				29.203.373.800

1.06.01.0 1	Dinas Sosial				15.000.000.000
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	60 bulan		2.900.000.000
1.06.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	2.900.000.000
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi dan terpeliharanya Sarana /Prasarana Aparatur Dinas Sosial	60 bulan		1.680.000.000
1.06.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor	21 Unit	smd	180.000.000
1.06.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	smd	1.500.000.000
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	60 bulan		2.500.000.000
1.06.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah	12 Bulan	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	1.900.000.000
1.06.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	50 Orang	bpn	600.000.000
1.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Sikronisasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	55 Dokumen		420.000.000
1.06.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Yang Disusun	11 Dokumen	bru, smd	250.000.000
1.06.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dinas	6 Laporan	bru, smd	170.000.000
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	150 Orang		400.000.000
1.06.16.0 2	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran terlanjar, KDRT & Korban Trafficking yang mendapatkan penanganan/pelayanan	30 Orang	smd	400.000.000

1.06.17	Program pembinaan anak terlantar				300.000.000
1.06.17.0 3	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti yang mendapatkan bantuan sosial	200 Orang	smd	300.000.000
1.06.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma				950.000.000
1.06.18.0 3	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan pelayanan	30 Orang	bpn, smd	950.000.000
1.06.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)				450.000.000
1.06.20.0 4	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan	0 Orang	bpn, smd	450.000.000
1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan	5 Lembaga		1.000.000.000
1.06.21.0 1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan	5 Lembaga	smd	500.000.000
1.06.21.0 3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dilaksanakan	0 Kegiatan	bru, kkr	500.000.000
1.06.23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	2600 Orang		2.700.000.000
1.06.23.0 1	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya	Jumlah WRSE dan KUBE yang diberdayakan	200 Orang	btg	1.700.000.000
1.06.23.0 2	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	0 KPM	smd	700.000.000
1.06.23.0 3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah Lansia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial	270 Orang	smd, kbr	300.000.000
1.06.24	Program Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasarnya	0 Orang		1.000.000.000

1.06.24.0 1	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Pemulangan, Permakanan Orang Terlantar	Jumlah kegiatan penanganan Korban bencana dan orang terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	1518 Kegiatan	kkp	1.000.000.000
1.06.25	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Tersedianya sarana dan prasana kebutuhan dasar bagi keluarga miskin	1 unit		700.000.000
1.06.25.0 1	Pengadaan Sarana dan Prasaran Bagi Keluarga Miskin	Jumlah MCK bagi keluarga miskin KAT yang dibangun	1 unit	bru	700.000.000
1.06.01.0 2	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri				3.619.200.000
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				932.950.000
1.06.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	932.950.000
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				625.550.000
1.06.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	0 bulan	smd	625.550.000
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				66.000.000
1.06.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah	0 Bulan	smd	66.000.000
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo				1.994.700.000
1.06.19.0 3	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani	3 Panti	smd	1.994.700.000
1.06.01.0 3	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma				2.906.640.800
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				924.952.000
1.06.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	0 Bulan	smd	924.952.000
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				526.048.800
1.06.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor	100 Unit	smd	342.648.800

1.06.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 bulan	smd	183.400.000
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				195.400.000
1.06.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah	12 Bulan	smd	195.400.000
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo				1.260.240.000
1.06.19.0 3	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani	80 Panti	smd	1.164.740.000
1.06.19.0 4	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	80 Panti	smd	95.500.000
1.06.01.0 4	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan				3.677.533.000
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayananinya administrasi perkantoran	60 bulan		907.543.000
1.06.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	907.543.000
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi dan terpeliharanya Sarana /Prasarana Aparatur Dinas Sosial	60 bulan		651.575.000
1.06.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 bulan	smd	307.700.000
1.06.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 bulan	smd	343.875.000
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	60 bulan		180.000.000
1.06.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah	12 Bulan	bru	180.000.000

1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo	5 Panti		1.938.415.000
1.06.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani	1 Panti	smd	1.885.915.000
1.06.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1 Panti	smd	52.500.000
1.06.01.05	UPTD Panti Sosial Bina Remaja				4.000.000.000
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	12 bulan		850.000.000
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	850.000.000
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan		300.000.000
1.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor	30 Unit	smd	100.000.000
1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan peralatan dan kelengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	smd	200.000.000
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	12 bulan		100.000.000
1.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah	0 Bulan	smd	100.000.000
1.06.17	Program pembinaan anak terlantar	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo	1 Panti		2.750.000.000
1.06.17.02	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	0 Orang	smd, kbr, psr	2.750.000.000
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				350.889.794.840
2,01	Tenaga Kerja				28.250.000.000

2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				28.250.000.000
2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				28.250.000.000
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		4.404.400.000
2.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	4.404.400.000
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		1.734.750.000
2.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan Dan Kelengkapan Kantor	100 unit	smd	469.850.000
2.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Dan Kelengkapan Prasarana Kantor	12 Bulan	smd	1.264.900.000
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	75%		2.515.400.000
2.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	50 Kegiatan	smd	2.365.000.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	65 Kegiatan		
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	12 Bulan		
2.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	10 Orang	smd	150.400.000
2.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	75%		1.847.040.000
2.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	smd	1.013.573.000
2.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	smd	833.467.000
2.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang terserap dipasar kerja	75%		7.007.500.000
2.01.15.01	pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditingkatkan Keterampilannya	500 Orang	smd	5.000.000.000

2.01.15.0 2	Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	15 Unit	smd	965.000.000
2.01.15.0 3	peningkatan profesionalisme instruktur pelatihan	Jumlah Instruktur yang Dilatih	50 Orang	smd	992.500.000
2.01.15.0 4	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi	15 LSP	smd	50.000.000
2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Presentase Penempatan Tenaga Kerja	31%		2.063.500.000
2.01.16.0 1	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Informasi bursa Tenaga Kerja	2 Dokumen	smd	619.425.000
2.01.16.0 5	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih Berwirausaha	220 Orang	smd	565.775.000
2.01.16.0 6	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah lokasi yang memiliki potensi daerah	2 Lokasi	smd	128.300.000
2.01.16.0 9	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Padat Karya	Jumlah pencari kerja yang mendapat pekerjaan sementara	204 Orang	smd	750.000.000
2.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMP Sama Dengan KHL	100%		2.055.960.000
2.01.17.0 9	Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang Dibina	150 Perusahaan	smd	140.400.000
2.01.17.1 4	Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah dokumen sesuai PP 78 Tahun 2015	3 Dokumen	smd	1.238.760.000
2.01.17.1 5	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur dan Perselisihan Hubungan Industrial	Mencegah Perselisihan Hubungan Industrial	50 Perusahaan	smd	676.800.000
2.01.18	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				-
2.01.18.0 1	Sinkronisasi dan Integrasi Rencana Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Disediakan Sarana dan Prasarana Sosial	1 Kimtrans		-
2.01.24	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Jumlah Pencari Kerja yang Memiliki Keterampilan Berwirausaha	120 Orang		950.000.000
2.01.24.0 1	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih Berwirausaha	120 Orang	smd	950.000.000
2.01.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan Yang diBina dan diAwasi	250 Perusahaan		2.486.950.000
2.01.27.0 1	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Riksa Uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1056 Objek	smd	1.125.000.000

2.01.27.0 8	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja, Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Norma Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak	Jumlah Perusahaan yang di Periksa dan dibina	3300 Perusahaan	smd	685.000.000
2.01.27.0 9	Peningkatan Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	36 Perusahaan	smd	676.950.000
2.01.29	Program Peningkatan Produktivitas	Persentase Perusahaan yang Meningkatkan Produktivitasnya	80%		326.000.000
2.01.29.0 1	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah yang Dilatih Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	160 Orang	smd	326.000.000
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja	Meningkatnya Lulusan Pelatihan yang di Tempatkan	85%		1.750.500.000
2.01.30.0 4	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja				500.000
2.01.30.0 5	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih di Balai Latihan Kerja	160 Orang	smd	1.750.000.000
3.08.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	4 Kimtrans		1.108.000.000
3.08.15.0 2	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Kesepakatan Bersama dengan provinsi lain	1 Dokumen	bru, ktm, kkr, mah, psr	395.000.000
3.08.15.0 3	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Tersedianya Lahan Transmigrasi	5 Dokumen	bru, ktm, smd, psr	500.000
3.08.15.1 1	Sinkronisasi dan Integrasi Rencana Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Disediakan Sarana dan Prasarana Sosial	1 Kimtrans		-
3.08.15.1 2	Koordinasi Ketransmigrasian	Terciptanya Perencanaan dan Dokumen Usulan Program Transmigrasi se Kalimantan Timur	100 Orang	smd	612.500.000
3.08.15.1 3	Koordinasi Hari Bakti Transmigrasi	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Disediakan Sarana dan Prasarana Sosial	1 Kimtrans		-
3.08.15.1 4	Evaluasi Penyediaan Tanah Transmigrasi	Tersedianya Lahan Transmigrasi	3 Dokumen	smd	100.000.000
2.01.01.0 2	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan				-
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-
2.01.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bpn	-

2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-
2.01.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan Dan Kelengkapan Kantor	12 unit		-
2.01.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Dan Kelengkapan Prasarana Kantor	12 Bulan	bpn	-
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				-
2.01.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	5 Kegiatan	bpn	-
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	5 Kegiatan		
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	12 Bulan		
2.01.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	2 Orang		-
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja				-
2.01.30.0 4	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja	Jumlah Kejuruan yang Dipersiapkan Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK)	2 Jurusan	bpn	-
2.01.30.0 5	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih	160 Orang	bpn	-
2.01.01.0 3	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang				-
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-
2.01.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	btg	-
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-
2.01.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan Dan Kelengkapan Kantor	2 unit		-
2.01.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Dan Kelengkapan Prasarana Kantor	12 Bulan	btg	-
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				-

2.01.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2 Kegiatan	btg	-
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	5 Kegiatan		
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	12 Bulan		
2.01.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	2 Orang		-
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja				-
2.01.30.0 4	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja	Jumlah Kejuruan yang Dipersiapkan Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK)	2 Jurusan	btg	-
2.01.30.0 5	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih	160 Orang	btg	-
2.01.01.0 4	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan				-
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-
2.01.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	-
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-
2.01.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	2 unit	smd	-
2.01.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasaran Kantor	12 Bulan	smd	-
2.01.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan				-
2.01.27.0 1	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Riksa Uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1056 Objek	smd	-
2.01.27.0 7	Pembinaan Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan pada Pemberi Pekerja dan Pekerja	Jumlah Perusahaan yang Dibina	92 Perusahaan	smd	-
2.01.27.0 8	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja, Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Norma Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak	Jumlah Perusahaan yang di Periksa dan dibina	3300 Perusahaan	smd	-

2.01.27.09	Peningkatan Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	36 Kasus	smd	-
2,02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				11.550.000.000
2.02.01	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				11.550.000.000
2.02.01.01	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				11.550.000.000
2.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	90%		1.700.000.000
2.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	smd	1.700.000.000
2.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1%		3.404.258.000
2.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana kantor	47 Saprass	smd	3.404.258.000
2.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%		660.000.000
2.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	capaian target kinerja	70 Trip	smd	600.000.000
2.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah diklat yang diikuti pegawai	6 Diklat	smd	60.000.000
2.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	67%		450.000.000
2.02.10.01	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen laporan capaian kinerja	5 Laporan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, luarP rv	100.000.000
2.02.10.02	Rakor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah rekomendasi rakor pemberdayaan perempuan	1 Rekomendasi	ppu, smd, luarP rv	150.000.000
2.02.10.03	Forum RKP Bidang Kependudukan, PP dan PA	Jumlah dokumen bidang kependudukan, PP dan PA	1 Rekomendasi	smd, luarP rv	100.000.000

2.02.10.0 4	Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Jumlah pameran yang diikuti	2 Pameran	smd	100.000.000
2.02.20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP)	11,45%		164.670.000
2.02.20.0 1	Peningkatan Kewirausahaan Perempuan	jumlah peserta yang mendapatkan keterampilan berwirausaha	169 orang	ppu, kbr, luarP rv	164.670.000
2.02.21	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak	0,07%		200.000.000
2.02.21.0 2	Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak	Jumlah anak yang mendapatkan KIE tentang hak sipil anak	300 Anak	smd, luarP rv	200.000.000
2.02.27	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memperoleh akses pelayanan administrasi kependudukan	90%		1.671.072.000
2.02.27.0 1	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Persentase penduduk yang mendapatkan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil	0,36%	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	1.671.072.000
2.02.35	Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Rasio KDRT	0,54%		200.000.000
2.02.35.0 1	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Persentase pelayanan perlindungan terpadu	60%	smd, luarP rv	200.000.000
2.02.36	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,70%		600.000.000
2.02.36.0 1	Tumbuh Kembang Anak	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tumbuh kembang anak	80 Orang	kbr, mah	200.000.000
		Persentase Kab/Kota menuju layak anak	20%		
		Jumlah SDM terlatih konvensi hak anak	1100 SDM		
2.02.36.0 2	Perlindungan Anak	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan perlindungan anak	110 Orang	kbr, mah	200.000.000
		Jumlah perangkat daerah FGD perlindungan anak dalam penanggulangan bencana	10 Perangkat Daerah		

		Jumlah kebijakan tentang penurunan angka perkawinan anak	1 Kebijakan		
2.02.36.03	Perlindungan Perempuan	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan perlindungan perempuan	50 orang/peserta	smd, luarP rv	200.000.000
		Jumlah profil perlindungan perempuan Kaltim	1 Profil		
		Jumlah kebijakan perlindungan perempuan	2 Kebijakan		
2.02.38	Program Kesetaraan Gender	Proporsi perempuan yang berada pada posisi jabatan manajerial	70%		600.000.000
2.02.38.01	Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang politik dan hukum	100 Orang	smd, luarP rv	200.000.000
		Persentase perempuan dalam jabatan politik	2%		
		Jumlah kebijakan keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan publik	2 Kebijakan		
		Jumlah profil pembangunan berbasis gender	2 Profil		
2.02.38.02	Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang sosial dan budaya	100 Orang	smd, luarP rv	200.000.000
		Jumlah program kegiatan berbasis PPRG	10 Program		
		Jumlah kebijakan PUG	1 Kebijakan		
2.02.38.03	Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang ekonomi	350 Orang	ktm, kkr, smd, kbr, psr	200.000.000
		Jumlah usaha KK perempuan berbasis ICT	50 Usaha		
		Jumlah Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) yang dibina	5 Desa Prima		
		Jumlah forum koordinasi dan sinkronisasi kesetaraan gender bidang ekonomi	1 Forum		

2.02.39	Program Sistem Data Gender dan Anak	Persentase data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan	70%		600.000.000
2.02.39.0 1	Data dan Informasi Gender	Persentase data gender	50%	smd, luarP rv	200.000.000
		Jumlah pokja data pilah	30 Pokja		
2.02.39.0 2	Data dan Informasi Anak	Jumlah data pilah anak dengan Perangkat Daerah terkait	30 Data Pilah	smd, luarP rv	200.000.000
		Persentase data anak	50%		
2.02.39.0 3	Informasi dan Partisipasi	Jumlah peserta rakortek SIGA	100 Orang	smd, luarP rv	200.000.000
		Kebijakan terkait pengembangan sistem informasi gender dan anak (SIGA)	1 Kebijakan		
2.08.23	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase lembaga masyarakat yang aktif dalam bidang kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga (LSM)	70%		700.000.000
2.08.23.0 1	Pengendalian Penduduk	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengendalian penduduk	230 Orang	smd, luarP rv	200.000.000
2.08.23.0 2	Kualitas Keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kualitas keluarga	15 Orang	ppu, luarP rv	250.000.000
2.08.23.0 3	Keluarga Berencana	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan keluarga berencana	400 Orang	kk, smd	250.000.000
2.08.24	Program Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Perentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	70%		600.000.000
2.08.24.0 1	Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bina aparatur pendaftaran penduduk	100 Orang	smd, luarP rv	200.000.000
2.08.24.0 2	Bina Aparatur Pencatatan Sipil	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bina aparatur pencatatan sipil	100 Orang	smd, luarP rv	200.000.000
2.08.24.0 3	Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	10 Perangkat Daerah	smd, luarP rv	200.000.000
2,03	Pangan				53.249.770.240

2.03.01	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				53.249.770.240
2.03.01.01	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				30.659.000.000
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		2.200.000.000
2.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	2.200.000.000
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%		2.250.000.000
2.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia	12 Unit	smd	750.000.000
2.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	1.500.000.000
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		2.200.000.000
2.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	1 Kegiatan	smd	1.400.000.000
2.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	28 Orang	smd	800.000.000
2.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	80%		1.809.000.000
2.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 dokumen	smd	959.000.000
2.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen	smd	850.000.000
2.03.25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan yang ditangani	416 Desa		2.900.000.000
2.03.25.01	Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Data ketersediaan dan kerawanan pangan	4 Laporan	smd	850.000.000
2.03.25.04	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Provinsi	325 Ton	smd	1.700.000.000
2.03.25.07	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Informasi harga pangan yang tersedia	3 Laporan	smd	350.000.000

2.03.27	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Jumlah Pemberdayaan Pekarangan Pangan yang dibina	79 Unit		2.050.000.000
2.03.27.0 1	Analisis Pola Pangan Harapan	Jumlah laporan PPH Konsumsi pangan	1 Laporan	smd	350.000.000
2.03.27.0 2	Pengembangan Pangan Lokal	Jumlah produk olahan pangan lokal yang dikembangkan	9 Jenis	smd	850.000.000
2.03.27.0 3	Pengawasan Mutu Pangan Segar	Jumlah Sertifikat mutu pangan segar asal tumbuhan	7 Sertifikat	smd	850.000.000
3.03.41	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	240245 Ton		3.700.000.000
3.03.41.0 1	Peningkatan Produksi Hortikultura	Produktivitas tanaman pangan hortikultura	2.16 Ton/Ha	smd	2.000.000.000
3.03.41.0 2	Penanganan Pasca Panen dan Promosi Atas Hasil Pertanian Hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura yang disertifikasi	15 Unit	smd	850.000.000
3.03.41.0 3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Hortikultura	Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan	135 Kelompok Tani	smd	850.000.000
3.03.51	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Padi	464589 Ton		13.550.000.000
3.03.51.0 3	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Luas tanam padi	24000 Ha	smd	10.000.000.000
3.03.51.0 4	Penanganan Pasca Panen dan Promosi Atas Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Jumlah promosi/peningkatan mutu hasil tanaman pangan	3 Kali	smd	850.000.000
		Rata-rata percepatan penanganan pasca panen padi	9 Hari/Ha		
3.03.51.0 5	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	Peningkatan indeks pertanaman	1.4 IP	smd	2.700.000.000
2.03.01.0 2	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura				6.048.990.000
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		800.000.000
2.03.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	800.000.000
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%		2.850.000.000
2.03.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Unit	smd	2.800.000.000

2.03.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	50.000.000
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		100.000.000
2.03.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	1 Kegiatan	smd	100.000.000
3.03.49	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Lahan yang Dilayani Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	165 Ha		2.298.990.000
3.03.49.0 1	Sertifikasi Benih Unggul Pertanian	Jumlah sertifikat/label benih unggul	5000 Label	smd	500.000.000
3.03.49.0 3	Monitoring dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	25 Rekomendasi	smd	500.000.000
3.03.49.0 4	Pembangunan/Perbaikan UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah Pembangunan/Perbaikan UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	1 Unit	smd	1.298.990.000
2.03.01.0 3	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				4.075.590.000
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		1.100.000.000
2.03.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	1.100.000.000
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%		150.000.000
2.03.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1 Unit	smd	30.000.000
2.03.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	120.000.000
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		120.000.000

2.03.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	1 Kegiatan	smd	120.000.000
3.03.48	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Serangan OPT	6139 Ha		2.705.590.000
3.03.48.0 2	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Luas lahan yang dilaksanakan pengendalian OPT	24000 Ha	smd	650.000.000
3.03.48.0 3	Perbanyak Agens Hayati dan Petisida Ramah Lingkungan	Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan dan dilayani	72 Unit	smd	300.000.000
3.03.48.0 4	Pembangunan/Perbaikan UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)				1.755.590.000
2.03.01.0 4	UPTD Balai Benih Induk Hortikultura				5.451.000.740
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		1.400.000.000
2.03.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	kkp	1.400.000.000
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%		327.500.000
2.03.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia	1 Unit	kkp	27.500.000
2.03.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	kkp	300.000.000
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		200.000.000
2.03.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	1 Kegiatan	kkp	200.000.000
3.03.46	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura	Rata-rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Bersertifikat	81%		3.523.500.740
3.03.46.0 1	Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan	Jumlah produksi benih dasar dan pokok tanaman pangan yang bersertifikat	30 Ton	kkp	1.000.000.000

3.03.46.0 3	Peningkatan Produksi Benih Hortikultura	Jumlah Produksi Benih dasar dan pokok tanaman hortikultura yang bersertifikat	5500 Batang	kkp	600.000.000
3.03.46.0 4	Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)				1.923.500.740
2.03.01.0 5	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM				7.015.189.500
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		1.500.000.000
2.03.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	1.500.000.000
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%		340.000.000
2.03.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia	1 Unit	smd	90.000.000
2.03.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	250.000.000
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		200.000.000
2.03.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	1 Kegiatan	smd	200.000.000
2.03.15	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Jumlah Desa yang dibina	711 Desa		4.975.189.500
2.03.15.0 2	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Penyuluh yang dibina	693 Orang	smd	4.225.189.500
2.03.15.0 3	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang dilatih	150 Orang	smd	750.000.000
2,05	Lingkungan Hidup				21.619.100.000
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup				21.619.100.000
2.05.01.0 1	Dinas Lingkungan Hidup				21.619.100.000
2.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayani administrasi perkantoran	100 Persentase		4.152.100.000

2.05.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, bru, luarP rv	4.152.100.000
2.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				865.000.000
2.05.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	bru, ktm, kkr, smd, kbr	865.000.000
2.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				1.820.000.000
2.05.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35 Kali	psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, bru, luarP rv	1.500.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	40 Kali		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
2.05.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang terlatih	15 orang	bru, smd	320.000.000
2.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				1.500.000.000
2.05.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Rapat Koordinasi, Hari Lingkungan Hidup	7 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarP rv	825.000.000

2.05.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, Profil LH Sekaltim, SPM	4 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarP rv	675.000.000
2.05.30	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran	8 Indeks (Tercemar Sedang)		4.237.000.000
2.05.30.0 1	Pemantauan lingkungan	Frekuensi pemantauan kualitas lingkungan	231 Frekuensi	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarP rv	2.237.000.000
2.05.30.0 2	Pengendalian pencemaran lingkungan	Penurunan beban pencemaran	10%	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarP rv	1.400.000.000
2.05.30.0 3	Pengendalian kerusakan lingkungan	Luas Kerusakan Lingkungan	6 Juta Ha	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarP rv	600.000.000
2.05.58	Program Penataan, Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%		2.720.000.000
2.05.58.0 1	Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg,	750.000.000

				luarP rv	
2.05.58.0 2	Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup	Persentase pengawasan terhadap penanggungjawab dan/atau usaha kegiatan yang diberi izin	100%	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kk, bnp, ktm, btg, luarP rv	650.000.000
2.05.58.0 3	Peningkatan kapasitas lingkungan hidup	Jumlah lembaga/orang yang memenuhi kriteria untuk diusulkan dalam penilaian lingkungan hidup	65 Lembaga	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kk, bnp, ktm, btg, luarP rv	1.320.000.000
2.05.59	Program Tata Lingkungan	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan	550 Kegiatan		4.400.000.000
2.05.59.0 1	Penyusunan, evaluasi dan pelaporan dokumen lingkungan	Persentase dokumen lingkungan yang diintegrasikan kebijakan pembangunan daerah	100%	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kk, bnp, ktm, btg, luarP rv	1.500.000.000
2.05.59.0 2	Koordinasi penyusunan dan penilaian kajian dampak lingkungan	Persentase dokumen lingkungan yang dinilai/diperiksa	100%	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kk, bnp, ktm, btg, luarP rv	1.200.000.000
2.05.59.0 3	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Jumlah Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim diintegrasikan dengan dokumen RAD GRK	50%	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kk, bnp, ktm, btg,	1.700.000.000

				luarP rv	
2.05.60	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persentase sampah dan limbah B3 yang dimanfaatkan	12%		1.925.000.000
2.05.60.0 1	Pengelolaan sampah	Persentase timbulan sampah yang dikelola	62%	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkk, bpn, ktm, btg, luarP rv	800.000.000
2.05.60.0 2	Pengelolaan limbah B3	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan	11000 Ton	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkk, bpn, ktm, btg, luarP rv	550.000.000
2.05.60.0 3	Pengembangan fasilitas teknis dan penerapan teknologi ramah lingkungan	Jumlah Kab/Kota yang telah menerapkan teknologi pengelolaan sampah	2 Kab/Kota	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkk, bpn, ktm, btg, luarP rv	575.000.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				12.675.250.00 0
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				12.675.250.00 0
2.07.01.0 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				12.675.250.00 0
2.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	70%		1.866.120.000
2.07.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	1.866.120.000

2.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		891.566.000
2.07.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	891.566.000
2.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Presentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi	20%		993.250.000
2.07.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 Kegiatan	smd	993.250.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	50 kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan		
2.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65%		233.964.000
2.07.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	ktm, bpn, smd	193.964.000
2.07.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	8 Dokumen	smd	40.000.000
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan Desa		1.100.000.000
2.07.15.0 1	Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Pelaksanaan BBGRM yang dibina	10 Kabupaten/Kota	smd	450.000.000
		Jumlah PKK yang dibina	10 Kabupaten/Kota		
		Jumlah LPM yang dibina	10 Kota		
		Jumlah Lembaga Adat yang dibina	7 Kabupaten		
		Jumlah Posyandu yang dibina	6 Posyandu		
		Laporan Rapat Koordinasi Kelembagaan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan		
		Laporan Rapat Koordinasi Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan		

		Laporan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Posyandu (SIP)	1 Laporan		
2.07.15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Penyebaran informasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa secara optimal	70%	ppu, smd, psr	50.000.000
2.07.15.08	Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Yang dilatih dan dbina	150 Orang	smd	350.000.000
2.07.15.09	Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dibina	5 MHA	smd	250.000.000
		Laporan Rapat Koordinasi Penanggulangan HIV-AIDS Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan		
		Laporan Rapat Koordinasi PMT-AS Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan		
2.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah BUMDes yang Aktif	320 BUMDes		770.000.000
2.07.16.01	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Jumlah Bumdesa yang Terbentuk	25 unit	smd	770.000.000
		Jumlah BUMDesa yang aktif	25 Unit		
2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	80%		80.000.000
2.07.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Movev	80%	ktm	80.000.000
2.07.21	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	0 Dokumen		260.350.000
2.07.21.01	Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	1 Kali	bru	260.350.000
		Jumlah kabupaten/ Kota	10 Kabupaten/ Kota		
2.07.22	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Masyarakat Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar	0 Unit		605.440.000

2.07.22.0 1	Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Kelompok Masyarakat Pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG) yang Memiliki Daya Saing Pasar	18 Posyantek	smd	391.000.000
2.07.22.0 2	Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang melaksanakan Konservasi lingkungan/Perdesaan/Kecamatan	8 Pokmas	smd	214.440.000
2.07.26	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/pembinaan masyarakat dan keluarga desa/kelurahan	0 PKK		1.500.000.000
2.07.26.0 1	Pengembangan dan Monitoring ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotongroyongan	Jumlah TP.PKK yang dibina	130 Orang	smd	1.180.000.000
2.07.26.0 2	Penguatan Kapasitas kesejahteraan keluarga	Kader PKK yang dilatih	150 Orang	smd	100.000.000
2.07.26.0 3	Peningkatan usaha ekonomi keluarga	Jumlah Keluarga/Kader PKK yang bina	160 Orang	smd	100.000.000
2.07.26.0 4	Pengembangan dan Monitoring hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan	Kader PKK dan Masyarakat yang dibina	300 Orang	smd	120.000.000
2.07.27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	0 Dokumen		24.560.000
2.07.27.0 1	Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna	Posyantek Percontohan yang Dibina	10 Posyantek	smd	24.560.000
2.07.28	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang memperoleh Pembinaan	80%		2.150.000.000
		Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	323 Desa		
2.07.28.0 1	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kepala Desa yang berhasil dilatih	30 Orang	smd	800.000.000
		Jumlah Anggota BPD yang berhasil dilatih	30 Orang		

2.07.28.0 2	Monitoring Penyaluran Keuangan Desa	Data Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD dan Pengelola Keuangan Desa	7 Kabupaten	bru, ppu, smd, kbr, mah, psr, luarP rv	475.000.000
2.07.28.0 3	Peningkatan Penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Desa dan Kelurahan di Kab/Kota se Kalimantan Timur yang mengikuti Perlombaan Cerdas Cermat Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi	10 Kabupaten/Kota	smd	875.000.000
		Desa dan Kelurahan di Kab/Kota se Kaltim yang mengikuti Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi	10 Kabupaten/Kota		
2.07.29	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Jumlah Desa berkembang	289 Desa		1.200.000.000
2.07.29.0 1	Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa	Kabupaten yang dibina	7 Kabupaten	psr, mah, smd, ppu, kk, ktm, bru, luarP rv	700.000.000
		Pendamping Desa yang dibina	50 Orang		
2.07.29.0 2	Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa	Laporan Penguatan Pengembangan dan Pembangunan Antar Desa	1 Laporan	bru, smd	250.000.000
2.07.29.0 3	Penguatan Informasi Pembangunan	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	1 kali	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kk, bnp, ktm, btg, luarP rv	250.000.000
2.07.30	Program Kampung Iklim +	Presentase Desa yang menjadi kampung iklim+	22%		1.000.000.000
2.07.30.0 1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Emisi Rendah Desa / Village Low Emission Development / VLED	Jumlah Kampung/Desa/Kelurahan iklim	20 Kampung/Desa/Kelurahan	bru, mah, kbr, smd, ppu, kk, bnp, ktm, btg, psr	1.000.000.000

2,09	Perhubungan				78.000.000.000
2.09.01	Dinas Perhubungan				78.000.000.000
2.09.01.01	Dinas Perhubungan				73.000.000.000
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%		3.092.395.000
2.09.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	3.092.395.000
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	4 unit		2.873.150.000
2.09.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang laik	85%	smd	1.361.650.000
2.09.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Kebersihan Gedung Kantor dan Taman, Pemeliharaan Gedung, Peralatan & Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Operasional & Jabatan	85%	smd	1.511.500.000
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	30%		3.351.000.000
2.09.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Publikasi, Tersedianya Makan dan Minum Terkait Pelaksanaan Pekerjaan dan Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi	100%	smd, luarP rv	2.339.000.000
2.09.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Kualifikasi SDM Perhubungan	30%	bpn, luarP rv	1.012.000.000
2.09.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	71%		1.343.750.000
2.09.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Tersusunnya Renja, RKA, DPA	5 Dokumen	btg, ktm, bpn, smd, psr, luarP rv	1.043.750.000
2.09.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian Evaluasi Kegiatan	20 Dokumen	smd	300.000.000

2.09.15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	598 Kasus		20.543.580.000
2.09.15.01	Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan	Panjang jalan yang dipasang fasilitas keselamatan jalan	120 km	btg, psr, smd, ppu, kkr, bpn, luarP rv	18.600.000.000
2.09.15.02	Pembinaan Pelayanan Angkutan Jalan	Jumlah badan usaha angkutan umum yang dibina	24 Badan Usaha	smd, luarP rv	588.580.000
2.09.15.03	Pembinaan dan Pengendalian Keselamatan Sarana dan Prasarana Jalan	Persentase sarana angkutan darat yang laik uji dan prasarana yang laik fungsi	50%	btg, bpn, smd, luarP rv	1.355.000.000
2.09.16	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP	85 Unit/%		29.973.440.000
2.09.16.01	Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan	Jumlah dan progres pelabuhan/dermaga yang dibangun	3 Unit / %	ktm, bpn, smd, kbr, luarP rv	28.036.350.000
2.09.16.02	Pembinaan Penyelenggaraan SDP dan Pelayaran Rakyat	Persentase sarana dan prasarana angkutan perairan memenuhi standar kelaikan berlayar	81,50%	bpn, smd, luarP rv	1.475.000.000
2.09.16.03	Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayaran	Jumlah badan usaha angkutan pelayaran yang dibina	100 Badan Usaha	bpn, smd, luarP rv	462.090.000
2.09.17	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Perencanaan/Simpul Transportasi yang Terintegrasi dan Terpadu	2 Rencana/Simpul		11.822.685.000
2.09.17.01	Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perekertaapian	Jumlah lintasan/trase kereta api yang direncanakan	0 Lintasan	bpn, smd, luarP rv	396.265.000
2.09.17.02	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah perencanaan kebijakan pengembangan bidang perhubungan	4 Perencanaan	ktm, smd, psr, luarP rv	3.976.420.000
2.09.17.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadu Moda	Jumlah perencanaan angkutan pemadu moda	2 Perencanaan	bru, bpn, smd, luarP rv	7.450.000.000
2.09.01.02	UPTD Terminal				5.000.000.000
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%		1.105.200.000

2.09.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	1.105.200.000
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		450.000.000
2.09.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Komputer, Printer, UPS, AC, TV, Filling kabinet, Meja, Kursi.	10 Unit	smd	50.040.000
2.09.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya pemeliharaan peralatan, perlengkapan kantor, kebersihan gedung dan halaman kantor dan terminal tipe B	100%	smd	399.960.000
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%		195.000.000
2.09.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Publikasi, Tersedianya Makan dan Minum Terkait Pelaksanaan Pekerjaan dan Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi	12%	bru, btg, kkr, smd, psr, luarP rv	195.000.000
2.09.18	Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B	Jumlah penumpang terminal yang terlayani	700000000 Penumpang		3.249.800.000
2.09.18.0 1	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Type B Wilayah I	Jumlah Terminal Tipe B Wilayah I yang dibangun/ditingkatkan	2 Terminal	btg, smd	1.750.000.000
2.09.18.0 2	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Type B Wilayah II	Jumlah Terminal Tipe B Wilayah II yang dibangun/ditingkatkan	1 Terminal	smd, kbr, psr	1.499.800.000
2,1	Komunikasi dan Informatika				27.072.455.60 0
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				27.072.455.60 0
2.10.01.0 1	Dinas Komunikasi dan Informatika				27.072.455.60 0
2.10.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	12 Bulan		3.472.200.000
2.10.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	3.472.200.000
2.10.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan		964.995.600

2.10.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	100 Unit	smd	250.745.600
2.10.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	714.250.000
2.10.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan pemerintah Daerah	12 Bulan		2.161.560.000
2.10.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	bru, psr, kbr, smd, ppu, kkp, bpn, ktm, btg, luarP rv	1.427.460.000
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan		
2.10.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	14 orang	smd	734.100.000
		Jumlah Pakaian Dinas Aparatur	133 Stel		
2.10.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	80%		834.600.000
2.10.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	8 Dokumen	smd, luarP rv	423.000.000
2.10.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen	smd, luarP rv	411.600.000
2.10.11	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlayannya Peningkatan Kualitas SDM bidang TIK serta Terciptanya Pelayanan Informasi Publik yang sesuai dengan UU	100 Persen		1.679.550.000
2.10.11.0 1	Peningkatan Sumber Daya TIK	1. Jumlah pelatihan untuk siswa (SD/SMP/SMA/Sederajat) 2. Jumlah Bimbingan teknis Pranata komputer	22 Sekolah, Kegiatan	smd	390.850.000
2.10.11.0 7	Penguatan Internet Sehat dan Aman	Jumlah Kab/Kota mendapat penguatan Internet Sehat dan Aman	3 Kab/Kota	smd	1.288.700.000

2.10.12	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Meningkatnya Peran Kominfo dalam penyebarluasan informasi publik	4 Kegiatan		4.942.750.000
2.10.12.0 1	Koordinasi Bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal di Daerah, BUMN dan Swasta Lokal Provinsi, Kab/Kota	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Bidang Kominfo	1 Laporan	smd	143.500.000
2.10.12.0 2	Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	Workshop, bimtek, sarana dan prasarana kegiatan jurnalistik dll	60 Orang	bpn, smd	94.500.000
2.10.12.0 3	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah Melalui RRI, TVRI, Radio Swasta dan TV Swasta, Lokal dan Nasional serta melalui media cetak untuk penerbitan buletin advertorial	2 Kerjasama	smd	4.150.000.000
2.10.12.0 4	Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK	Jumlah Kab/Kota dalam Pemingkatan e-Government	10 Kab/Kota	smd, luarP rv	554.750.000
2.10.13	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Persentase Indeks Kepuasan Publik	84%		1.600.700.000
2.10.13.0 1	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dll	Jumlah poster, leaflet, buletin, baliho yang menginformasikan kebijakan pemerintah daerah serta pembangunan dan perawatan baliho	55 Kegiatan	bpn, smd	175.000.000
2.10.13.0 2	Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi	Jumlah dialog interaktif di radio dan televisi	96 Dialog	smd	30.000.000
2.10.13.0 3	Pengolahan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	jumlah laporan hasil inventarisasi data dan hasil survei IKM	2 Laporan	smd, luarP rv	1.138.700.000
2.10.13.0 4	Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Jumlah laporan dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah	1 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkp, bpn, ktm, btg, luarP rv	127.000.000
2.10.13.0 5	Partisipasi pada pameran/expo/pekan kebudayaan daerah dan diluar daerah	Jumlah event keikutsertaan pada pameran/expo/peka kebudayaan daerah	4 Pameran	smd	130.000.000

2.10.14	Program Pengembangan Informasi, dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi	84 Persen		342.800.000
2.10.14.0 6	Pengembangan Sumber Informasi Publik	Jumlah PPID Pembantu di Badan Pemerintah Pemrov. Kaltim dan PPID Kab/kota yang dikoordinasikan dalam jejaring pengelolaan pelayanan dan informasi	28 PD	btg, bpn, ppu, smd, luarP rv	342.800.000
2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terlayannya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	2.6 Indeks		3.102.400.000
2.10.15.0 2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kapasitas Bandwidth Internet	100 Bandwidth (MBps)	smd, luarP rv	78.950.000
2.10.15.0 3	Interkoneksi jaringan intra pemerintah	Jumlah OPD Terhubung dalam jaringan	20 Perangkat Daerah	smd	569.550.000
2.10.15.0 4	Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemprov Kaltim & Kab/Kota Kaltim (Interoperabilitas)	Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi	3 Aplikasi	smd, luarP rv	161.600.000
2.10.15.0 5	Penguatan Internet Sehat dan Aman	Jumlah Kab/Kota mendapat penguatan Internet Sehat dan Aman	3 Kab/Kota		-
2.10.15.0 6	Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK	Jumlah Kab/Kota dalam Pemingkatan e-Government	10 Kab/Kota		-
2.10.15.0 7	Pengelolaan Aplikasi (sistem informasi/website) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim	Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang dikelola	25 sub domain		-
		Jumlah Aplikasi (sistem informasi/website) Perangkat Daerah Provinsi yang dikembangkan	4 Aplikasi		
2.10.15.0 8	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah Kab/Kota mendapat pendampingan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	10 Kab/Kota		-
2.10.15.0 9	Pembinaan dan Pengembangan Telecenter	Jumlah Jaringan terpasang di Desa Kab/Kota	10 Kab/Kota	smd, luarP rv	300.000.000
2.10.15.1 0	Penguatan SPBE	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan/penguatan SPBE	15 Perangkat Daerah	bru, psr, mah, smd, ppu,	1.992.300.000

				kk, bnp, ktm, btg, luarP rv	
2.10.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	Meningkatnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta Tersedianya data dan Informasi KPU/USO, Telekomunikasi dan Penyiaran, Informasi sandi yang ter-enkripsi	100%		6.873.550.000
2.10.16.04	Pengembangan dan penyelenggaraan DC dan DRC	Jumlah Hosting Aplikasi DC dan DRC	20 Aplikasi	smd	287.200.000
2.10.16.06	Government cloud computing	Jumlah Penggunaan Cloud Computing	10 OPD	smd	41.900.000
2.10.16.07	Pelaksanaan audit TIK	Terstandarisasinya Audit TIK	1 Dokumen	smd, luarP rv	230.000.000
2.10.16.08	Penangan Insiden Keamanan Informasi	Jumlah Penggunaan Secure Socket Layer Pada Website dan Aplikasi Resmi OPD	20 OPD	smd	111.100.000
2.10.16.09	Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah	Tersedianya Sarana Pendukung Layanan	1 Perangkat	bru, kk, smd, luarP rv	5.262.800.000
2.10.16.10	Peningkatan penyediaan informasi dan data KPU/USO di kaltim	Terlayannya informasi dan data KPU/USO	1 dokumen	smd	89.700.000
2.10.16.11	Penyediaan dan pengumpulan data informasi mitra telekomunikasi dan penyiaran (radio & televisi)	Tersedianya data dan informasi telekomunikasi dan penyiaran	1 dokumen	smd	86.000.000
2.10.16.12	Pengawasan dan pengendalian pengamanan informasi, persandian, pos dan telekomunikasi	Tersedianya data dan informasi yang ter-enkripsi	1 dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kk, bnp, ktm, btg, luarP rv	166.500.000
2.10.16.13	Pengelolaan Aplikasi (Sistem Informasi Website) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim	Jumlah Aplikasi (sistem informasi/website) Perangkat Daerah Provinsi yang dikembangkan	4 Aplikasi	smd, luarP rv	598.350.000
		Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang dikelola	25 sub domain		

2.10.18	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	jumlah Kajian yang diselesaikan	1 Buku		262.500.000
2.10.18.0 1	Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Dokumen RIPTIK Rencana Induk Pengembangan TIK) yang dihasilkan	1 Dokumen	smd, luarP rv	262.500.000
2.10.20	Program penguatan dan evaluasi data dan statistik	Tersedianya data dan Informasi Statistik	1 Buku		834.850.000
2.10.20.0 1	Pengumpulan data statistik daerah	Tersedianya data pembangunan daerah dan data pertumbuhan ekonomi yang akurat dan kredibel	1 buku	smd, luarP rv	834.850.000
2,11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				60.017.520.00 0
2.11.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				60.017.520.00 0
2.11.01.0 1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				50.017.520.00 0
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi perkantoran	100%		3.504.945.500
2.11.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran	12 bulan	smd	3.504.945.500
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya sarana dan prasarana aparatur	100%		25.725.366.50 0
2.11.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	50 unit	smd	24.313.000.00 0
2.11.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 bulan	smd	1.412.366.500
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah	100%		2.696.600.000
2.11.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	100 kegiatan	smd	2.072.000.000
2.11.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	25 orang	smd	624.600.000
2.11.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah	95%		1.279.000.000
2.11.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	smd	658.000.000

2.11.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	smd	621.000.000
2.11.20	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	Jumlah UKM Naik Kelas	200 UKM		6.996.128.000
		Jumlah koperasi Berkualitas	100 Koperasi		
2.11.20.0 1	Pembinaan Lembaga Koperasi dan UKM	jumlah kebijakan dan program yang bersinergi antar pusat dan daerah	17 Kebijakan dan Program	smd	649.610.000
2.11.20.0 2	Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran	Jumlah KUKM yang diperluas akses Pembiayaan	300 KUKM	bpn, kkr, smd	2.073.130.000
		Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui sarana promosi dan sistem informasi pemasaran	11 KUKM		
		Jumlah UKM yang mendapatkan sosialisasi kebijakan	200 ukm		
2.11.20.0 3	Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	700 Koperasi	smd	701.868.000
2.11.20.0 4	Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)	Jumlah KUKM yang mendapatkan Pelatihan	900 KUKM	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm	3.571.520.000
3.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkat perlindungan konsumen dan pengaman perdagangan	80%		2.158.000.000
3.06.15.0 1	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen				613.375.000
3.06.15.0 3	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	jumlah pelaku usaha yang diawasi	150 pelaku usaha	smd	446.775.000
3.06.15.0 8	Koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	jumlah pengaduan Konsumen yang dapat diselesaikan	25 pengaduan	smd	1.097.850.000
3.06.34	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Rasio Ketersediaan Stok Barang pokok dan barang penting	150%		3.577.480.000
		Nilai ekspor produk olahan non migas dan non batubara	1.43 Juta US\$		
		jumlah pelaku usaha yang melakukan kerjasama pemasaran	10 Pelaku usaha		

3.06.34.0 1	Perdagangan Dalam Negeri	Rata- rata Rentang Waktu Kecukupan Stok Barang dan Barang Penting	4.5 bulan	smd	1.062.700.000
3.06.34.0 2	Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Eksportir yang mendapatkan fasilitasi	60 Eksportir	bpn, smd	1.219.500.000
3.06.34.0 3	Kerjasama Perdagangan	jumlah UKM yang menjalin Kerjasama Perdagangan	10 UKM	bpn, smd	1.295.280.000
3.07.33	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Pertumbuhan industri olahan	1%		4.080.000.000
3.07.33.0 3	Perencanaan Pembangunan Industri	Jumlah perusahaan industri di kawasan peruntukan industri/ kawasan industri	1 kawasan/sentra	smd	1.000.000.000
3.07.33.0 4	Pengembangan dan Pembinaan Industri	jumlah sentra industri yang difasilitasi pengembangannya	3 Sentra	bpn, smd	2.530.000.000
3.07.33.0 5	Pengembangan Informasi Industri	jumlah data Dokumen yang tersedia	3 Dokumen	bpn, smd	550.000.000
2.11.01.0 2	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang				5.000.000.000
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi perkantoran	100%		1.444.780.000
2.11.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran	12 bulan	smd	1.444.780.000
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya sarana dan prasarana aparatur	100%		510.184.000
2.11.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 bulan	smd	510.184.000
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah	100%		654.468.000
2.11.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	10 kegiatan	smd, luarP rv	333.784.000
2.11.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	16 orang	smd, luarP rv	320.684.000
3.06.33	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani	10%		2.390.568.000
3.06.33.0 1	Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang	Ruang lingkup Akreditasi Laboratorium yang dipelihara dan dipertahankan	9 ruang	smd, luarP rv	1.810.784.000
3.06.33.0 2	Pelayanan Jasa teknis pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	jumlah Presentase Penerimaan Retribusi	100%	smd	579.784.000

2.11.01.0 3	UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan Koperasi dan UKM				5.000.000.000
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi perkantoran	100%		1.267.354.000
2.11.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran	12 bulan	smd	1.267.354.000
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya sarana dan prasarana aparatur	100%		1.664.250.000
2.11.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	20 unit	smd	406.250.000
2.11.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 bulan	smd	1.258.000.000
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terpenuhnya sarana dan prasarana aparatur	100%		562.200.000
2.11.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	25 kegiatan	smd, luarP rv	415.200.000
2.11.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	7 orang	smd, luarP rv	147.000.000
2.11.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah Koperasi & UMKM yang dilatih	100 pelatihan		1.506.196.000
2.11.19.0 1	Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	Jumlah Dokumen Kajian & Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	1 dokumen	smd, luarP rv	567.696.000
2.11.19.0 2	Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM	Jumlah Pelatihan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan	16 pelatihan	smd	938.500.000
2,12	Penanaman Modal				15.000.000.000
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				15.000.000.000
2.12.01.0 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				15.000.000.000
2.12.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	72%		3.362.050.000
2.12.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	3.362.050.000

2.12.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit		3.164.050.000
2.12.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana di lingkungan DPMPTSP Prov. Kaltim	10 paket	smd	2.361.650.000
2.12.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 bulan	smd	802.400.000
2.12.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	92%		3.000.000.000
2.12.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman dan jumlah belanja publikasi	12 bulan	bru, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	3.000.000.000
2.12.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	61 Nilai AKIP		475.100.000
2.12.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Kinerja, dan Anggaran	9 Dokumen	bpn, smd	345.700.000
2.12.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	smd	129.400.000
2.12.18	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	13 Hari		1.495.000.000
2.12.18.0 2	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer	Jumlah izin investasi sektor primer yang diterbitkan	1100 Izin/ Non Izin	smd	1.037.700.000
2.12.18.0 3	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier	Jumlah izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan	1500 Izin/ Non Izin	smd	52.050.000
2.12.18.0 4	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan	200 NIB	smd	45.400.000
2.12.18.0 5	Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota	Jumlah PTSP Kab/Kota yang memperoleh kualifikasi bintang dari BKPM RI	4 PTSP	bpn, smd	359.850.000
2.12.27	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	7 perusahaan industri baru		617.000.000

2.12.27.0 2	Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	5 LKPM	bpn, smd	83.600.000
2.12.27.0 3	Penyusunan informasi penanaman modal	Jumlah dokumen realisasi investasi Kalimantan Timur	5 Dokumen	bpn, smd	226.000.000
2.12.27.0 4	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Investasi	Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi	5 Perusahaan	bpn, smd	307.400.000
2.12.28	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	2 Kebijakan		1.325.400.000
2.12.28.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Pergub tentang Penanaman Modal yang disusun	2 dokumen	bru, btg, bpn, ppu, smd	820.250.000
2.12.28.0 2	Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Daerah	Jumlah kajian potensi unggulan daerah	3 Dokumen	bpn, kk, smd, psr	505.150.000
2.12.29	Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan	Tingkat kepuasan layanan advokasi dan informasi perizinan	100%		351.400.000
2.12.29.0 2	Pelayanan informasi perizinan	Jumlah layanan aplikasi perizinan yang dihasilkan	1 Aplikasi	smd	191.400.000
2.12.29.0 3	Pelayanan Advokasi Perizinan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	15 kasus	smd	160.000.000
2.12.30	Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah perjanjian kerjasama penanaman modal	3 MoU		1.210.000.000
2.12.30.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah event promosi	9 Event	bru, bpn, smd	1.000.000.000
2.12.30.0 2	Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal	Jumlah pertemuan bisnis	5 Pertemuan Bisnis	bpn, smd	210.000.000
2,13	Kepemudaan dan Olah Raga				36.180.742.000
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga				36.180.742.000
2.13.01.0 1	Dinas Pemuda dan Olah Raga				22.680.742.000
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89,55%		4.308.901.000
2.13.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Adiministrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	4.308.901.000
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		1.431.191.000

2.13.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	100 Bulan	smd	1.431.191.000
2.13.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	92%		3.195.350.000
2.13.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi	1 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kk, bpn, ktm, btg, luarP rv	3.195.350.000
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan		
		Jumlah Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan		
		Jumlah Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pengawasan ke dalam daerah	12 Bulan		
2.13.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	58,60%		545.300.000
2.13.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	bpn, smd, luarP rv	319.300.000
2.13.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	10 Dokumen	bpn, smd, luarP rv	226.000.000
2.13.30	Program Pemberdayaan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1084 Orang		2.000.000.000
2.13.30.0 8	Bimbingan Generasi Muda (Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Antar Propinsi)	Jumlah pemuda yang mengikuti jambore pemuda daerah (JPD) tingkat Provinsi	50 Orang		-
2.13.30.0 9	Apresiasi Kreativitas Pemuda	Jumlah Kreatifitas Pemuda	150 Orang	smd	700.000.000
2.13.30.1 0	Seleksi Jambore Pemuda Daerah	Jumlah pemuda yang mengikuti jambore pemuda daerah (JPD) tingkat Provinsi	50 Orang	bru, kk, luarP rv	859.440.000
2.13.30.1 1	Pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia	Jumlah Pemuda yang dikirim mengikuti Jambore Pemuda Indonesia	10 Orang	luarP rv	295.060.000

2.13.30.1 2	Sosialisasi dan Pelatihan Pemuda Anti Narkoba dan HIV/AIDS	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan pemuda anti narkoba dan HIV/AIDS	283 Orang	kk	145.500.000
2.13.31	Program Pengembangan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1056 Orang		3.500.000.000
2.13.31.0 4	Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah peserta, panitia, pelatih dan pembina yang terlibat dalam Paskibraka	450 orang	smd	1.406.200.000
2.13.31.0 5	Pelatihan Wirausaha Pemuda	Jumlah pemuda yang berwirausaha	726 Orang	smd	1.478.200.000
2.13.31.0 6	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan	200 Orang	smd	615.600.000
2.13.31.1 0	Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam kepemimpinan dan kepeloporan	460 Orang		-
2.13.32	Program Pembudayaan Keolahragaan	Persentase masyarakat yang berolahraga	14,94%		1.700.000.000
2.13.32.0 1	Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah atlet berbakat dan berprestasi yang dibina	30 Orang	smd	965.000.000
2.13.32.0 2	Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi olahraga	400 Orang	smd	400.000.000
2.13.32.0 3	Pemberian Penghargaan bagi Pelaku Olahraga Berdedikasi dan Berprestasi	Jumlah pelaku olahraga yang terdata	600 Orang	smd	335.000.000
2.13.32.0 4	Kompetisi Olahraga Masyarakat	Jumlah peserta kompetisi olahraga	200 Orang	smd	-
2.13.33	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase masyarakat yang berolahraga	14,44%		6.000.000.000
2.13.33.0 4	Partisipasi Event dan Multi Event olahraga	Jumlah atlet kategori olahraga unggulan	300 Orang	smd	1.375.700.000
2.13.33.0 5	Peningkatan SDM Pelatih dan Wasit Olahraga				400.000.000
2.13.33.0 6	Pelaksanaan Even dan Multi Even Olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti event dan multi event olahraga	300 Orang	smd	3.894.300.000
2.13.33.1 2	Penyusunan dan Penetapan Standarisasi Infrastruktur Olahraga	Jumlah kapasitas sarana dan prasarana olahraga masyarakat	1 Orang	smd	170.000.000
2.13.33.1 8	workshop Iptek Olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	125 Orang	smd	160.000.000
2.13.34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah even olahraga yang memanfaatkan fasilitas olahraga di Stadion Utama dan Madya	12 Event		-
2.13.34.0 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	1 Gedung		-

2.13.35	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Tercapainya pemuda Kaltim dalam berwirausaha	0.15 Persen		-
2.13.35.0 1	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti peningkatan kompetensi berwirausaha	562 Orang		-
2.13.01.0 2	UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya				13.500.000.00 0
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				9.550.000.000
2.13.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Adiministrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	9.550.000.000
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.925.000.000
2.13.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	2.925.000.000
2.13.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				-
2.13.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 Kegiatan		-
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan		
2.13.34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				1.025.000.000
2.13.34.0 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga				1.025.000.000
2,17	Perpustakaan				7.274.957.000
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				7.274.957.000
2.17.01.0 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				7.274.957.000
2.17.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82,67%		2.356.350.000
2.17.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	2.356.350.000
2.17.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit		584.174.000

2.17.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur	100%	smd	74.000.000
2.17.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur	100%	smd	510.174.000
2.17.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	92%		1.085.493.000
2.17.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45 kegiatan	smd, luarP rv	783.493.000
2.17.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	20 ASN	smd, luarP rv	302.000.000
2.17.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	95,50%		248.000.000
2.17.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 dokumen	smd	135.500.000
2.17.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	15 dokumen	smd, luarP rv	112.500.000
2.17.23	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah masyarakat yang mendayagunakan perpustakaan	205700 Pemustaka		1.305.000.000
2.17.23.0 1	Pengembangan Layanan Perpustakaan	.Peningkatan Jumlah pemustaka Onsite	197000 Pemustaka	smd	1.038.500.000
2.17.23.0 2	Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan	.Peningkatan Jumlah pemustaka Online	8700 Pemustaka	smd	200.500.000
2.17.23.0 3	Pengembangan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah dokumen MoU dan PKS dibidang Perpustakaan dan Kearsipan	10 Mou/PKS	smd	66.000.000
2.17.24	Program Depository, Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Jumlah pengembangan koleksi bahan perpustakaan	3550 Judul		534.040.000
2.17.24.0 1	Pengelolaan Depository dan Alih Media Konten Lokal	Jumlah konten lokal yang berhasil dikumpulkan	550 Judul	smd	153.040.000
		Jumlah konten lokal yang diolah	550 Judul		
		Jumlah konten lokal yang dilestarikan (alihmedia)	30 Judul		
2.17.24.0 2	Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Jumlah bahan perpustakaan yang dikembangkan	3000 judul	smd	96.000.000
		Jumlah bahan pustaka yang dikonservasi	16538 eksemplar		
2.17.24.0 3	Pengolahan dan Perawatan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang diolah	400 judul	smd	60.000.000

		Jumlah perbaikan buku rusak	600 judul		
		Jumlah penjilidan majalah	10 bundel		
		Jumlah penjilidan surat kabar	36 bundel		
2.17.24.0 4	Pengembangan Koleksi dan Penyediaan Bahan Pustaka (DAK)	Jumlah bahan perpustakaan yang dikembangkan	3000 judul	smd	225.000.000
		Jumlah bahan pustaka yang dikonservasi	16538 eksemplar		
2.17.26	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah Perpustakaan yang memenuhi standar	20 Perpustakaan		393.942.000
2.17.26.0 1	Pembinaan, Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Perpustakaan	Jumlah Tenaga Fungsional Dan Tenaga Perpustakaan yg dibina dan dikembangkan	30 orang	smd	393.942.000
		Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	6 Kegiatan		
		Jumlah Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	20 Perpustakaan		
2.18.19	Program pengelolaan Arsip	Jumlah Arsip statis dan arsip hasil akuisisi yang dikelola dengan baik	1100 berkas		313.658.000
2.18.19.0 1	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	Laporan hasil Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	0 laporan	smd	105.550.000
		Jumlah akuisisi arsip statis	100 berkas		
		Jumlah Arsip Inaktif yang disusutkan	1000 berkas		
2.18.19.0 2	Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip	Jumlah arsip yang dipelihara	600 lembar	smd	86.108.000
2.18.19.0 3	Peningkatan Kualitas Layanan Kearsipan	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Kearsipan	50 orang	smd	122.000.000
2.18.25	Program Pembinaan Kearsipan	Jumlah lembaga instansi yang dibina	50 Lembaga/Intansi		454.300.000
2.18.25.0 1	Pembinaan Internal dan Supervisi	jumlah dokumen Peraturan/Kebijakan mengenai kearsipan	2 dokumen	smd	151.500.000
		Jumlah pembinaan internal dan supervisi lembaga / instansi	40 Lembaga/Intansi		
2.18.25.0 2	Pembinaan Eksternal dan Supervisi	Jumlah Pembinaan Eksternal, Supervisi dan Tata Kelola LKD Kab /Kota	10 LKD	smd	151.800.000
2.18.25.0 3	Pembinaan, Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Kearsipan	Jumlah Tenaga Fungsional Dan Tenaga Kearsipan yg dibina dan dikembangkan	20 orang	smd	151.000.000

3	Urusan Pilihan				560.864.379.268
3,01	Kelautan dan Perikanan				57.597.145.000
3.01.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan				57.597.145.000
3.01.01.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan				46.887.145.000
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		6.393.550.000
3.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	bru, btg, ktm, bpn, ppu, smd	6.393.550.000
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		3.701.150.000
3.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	20 Unit	smd	1.447.150.000
3.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bru, btg, ktm, bpn, ppu, smd	2.254.000.000
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		3.320.300.000
3.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Maupun Dalam daerah	60 Kali	smd	2.341.000.000
3.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pakaian Dinas untuk PNS dan Non PNS	110 Stel	smd	979.300.000
		Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	25 Orang		
3.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	12 Dokumen		1.980.000.000
3.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	8 Dokumen	bpn, smd	1.045.000.000
3.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	bpn, smd	935.000.000
3.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	155516 Ton		18.877.145.000

3.01.21.08	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap yang Dibina	60 KUB	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	3.685.000.000
		Jumlah Nelayan yang Dilatih	30 Orang		
3.01.21.09	Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan	Jumlah Perizinan Kapal Ikan	200 Izin	bru, ktm, bpn, kkr, smd, psr	1.072.500.000
3.01.21.10	Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional	6 Unit	bru, btg, ktm, bpn, ppu, smd	4.000.000.000
3.01.21.11	Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (DAK)	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Pokok dan Fungsional Sarpras Pelabuhan Perikanan	1 PPI	btg, smd	10.119.645.000
3.01.25	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	122695 Ton		5.555.000.000
		Volume Ekspor Perikanan	2900 Ton		
		Tingkat Konsumsi Ikan	52 Kg/Kapita		
3.01.25.01	Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah Unit Pembenihan yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)	5 Unit	bru, btg, bpn, kkr, ppu, smd	2.365.000.000
		Jumlah Unit Pembudidayaan Ikan yang bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) skala kecil dan skala besar	60 Unit		
		Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu	60 Sampel		
3.01.25.02	Kegiatan pengembangan usaha perikanan dan kelautan	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	14 Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)	bru, btg, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, psr	1.815.000.000

		Jumlah Bidang Lahan Budidaya yang disiapkan sertifikatnya	225 Bidang		
3.01.25.0 3	Kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan produksi perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan dan Sertifikasi	20 UKM	bru, btg, ktm, bpn, kkp, ppu, smd, kbr, mah	825.000.000
		Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	40 Izin		
3.01.25.0 4	Kegiatan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	4 Promosi	smd	550.000.000
3.01.26	Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	1 Kawasan yang di restorasi		3.795.000.000
3.01.26.0 1	Kegiatan Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang Dibina/Difasilitasi	1 Pulau	smd	1.900.325.000
3.01.26.0 2	Kegiatan Reklamasi dan Jasa Kelautan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi	2 Pelaku Usaha	bru, btg, ktm, bpn, kkp, smd	998.775.000
3.01.26.0 3	Kegiatan Konservasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kawasan yang direhabilitasi	4 Hektare	smd	895.900.000
3.01.27	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	37.07 Persen		3.265.000.000
3.01.27.0 1	Kegiatan Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Penangkapan Ikan	Jumlah Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Penangkapan Ikan	10 Operasi	smd	1.275.000.000
3.01.27.0 2	Kegiatan Pengawasan, Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				1.275.000.000
3.01.27.0 3	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	Jumlah Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	1 Dokumen	smd	715.000.000
3.01.01.0 2	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan				2.000.000.000

3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		554.200.000
3.01.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	554.200.000
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		855.650.000
3.01.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	10 Unit	smd	664.250.000
3.01.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	191.400.000
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		373.100.000
3.01.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Maupun Dalam daerah	42 Kali	smd	255.500.000
3.01.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	8 Orang	smd	117.600.000
		Jumlah Pakaian Dinas untuk PNS dan Non PNS	16 Stel		
3.01.28	Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	210 Sampel		217.050.000
3.01.28.0 1	Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Sampel yang Dilakukan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	125 Sampel	smd	200.050.000
3.01.28.0 2	Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Sampel yang Menerapkan Mutu Hasil Perikanan sesuai Standar	125 Sampel	smd	17.000.000
3.01.01.0 3	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar				6.210.000.000
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		632.500.000
3.01.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	bpn	632.500.000
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		315.200.000
3.01.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Unit	bpn	78.900.000

3.01.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bpn	236.300.000
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		463.200.000
3.01.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Maupun Dalam daerah	30 Kali	bpn	397.000.000
3.01.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pakaian Dinas untuk PNS dan Non PNS	28 Stel	bpn	66.200.000
		Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	4 Orang		
3.01.29	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	3000000000 Ekor		4.799.100.000
3.01.29.0 1	Peningkatan Kualitas Mutu Benih	Jumlah Komoditas benih unggulan yang berkualitas	4 Komoditas	bpn	273.600.000
3.01.29.0 2	Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau dan Laut serta Udang	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Ikan dan Udang Windu	3000000000 Ekor	bpn	2.275.500.000
3.01.29.0 4	Rehab sarana dan prasarana perbenihan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Rehab	2 Unit	bpn	2.250.000.000
3.01.01.0 4	UPTD Sentra Pembenuhan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu				2.500.000.000
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		723.200.000
3.01.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	kkp	723.200.000
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		514.545.000
3.01.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	11 Unit	kkp	47.050.000
3.01.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	kkp	467.495.000
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		324.500.000

3.01.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Maupun Dalam daerah	46 Kali	kkr	214.350.000
3.01.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	10 Orang	kkr	110.150.000
3.01.30	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Tawar Ekonomis Penting	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	70000 Ekor		937.755.000
3.01.30.0 1	Peningkatan Kualitas Mutu Benih	Jumlah Komoditas benih unggulan yang berkualitas	5 Komoditas	kkr	790.000.000
3.01.30.0 2	Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Tawar	Jumlah Produksi Benih Ikan Air Tawar	70000 Ekor	kkr	147.755.000
3,02	Pariwisata				16.015.499.99 9
3.02.01	Dinas Pariwisata				16.015.499.99 9
3.02.01.0 1	Dinas Pariwisata				16.015.499.99 9
3.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		4.672.500.000
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	90%		
3.02.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	4.672.500.000
3.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		2.660.575.000
		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		
3.02.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	20 Item	smd	2.135.775.000
3.02.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	524.800.000
3.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100 Kali		1.336.925.000
		Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	55%		

3.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	215 Orang/Tahun	smd, luarP rv	1.336.925.000
3.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100%		930.000.000
		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	75 nilai AKIP		
3.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	smd, luarP rv	580.000.000
3.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	smd, luarP rv	350.000.000
3.02.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya	2 Kawasan		2.800.000.000
3.02.16.01	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah infrastruktur yang dibangun di destinasi pariwisata	4 Unit	smd	2.000.000.000
3.02.16.02	Pengembangan destinasi unggulan alam dan buatan	Jumlah wisata alam dan buatan yang dikembangkan	4 Destinasi	smd	400.000.000
3.02.16.04	Pengembangan destinasi unggulan bahari dan minat khusus	Jumlah wisata bahari dan khusus yang dikembangkan	3 Destinasi	smd	400.000.000
3.02.17	Program Pengembangan Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata	Jumlah Destinasi Unggulan Provinsi yang dipromosikan	8 Destinasi		1.215.500.000
3.02.17.01	Penguatan analisa pasar pariwisata	Jumlah laporan analisa pasar pariwisata	2 Laporan	smd	415.500.000
3.02.17.02	Penguatan data dan informasi pariwisata	Jumlah data dan informasi pariwisata yang di umumkan	10 Jenis	smd	400.000.000
3.02.17.03	Pengembangan promosi dan kerjasama pariwisata	Jumlah kerjasama dan promosi yang dilakukan	8 Kegiatan	smd	400.000.000
3.02.18	Program Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dikembangkan	520 Orang		1.199.999.999
3.02.18.01	Pemberdayaan masyarakat sadar wisata dan kampanye Sapta Pesona	Jumlah anggota kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang dilatih	200 Orang	smd	400.000.000
3.02.18.02	Pengembangan pengendalian usaha sarana pariwisata	Jumlah pelaku usaha sarana pariwisata yang dibina	170 Orang	smd	400.000.000
3.02.18.03	Peningkatan SDM dan profesionalisme usaha jasa pariwisata	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dibina	150 Orang	smd	399.999.999

3.02.19	Program Pengembangan Karya Seni Budaya dan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	270 orang		1.200.000.000
3.02.19.0 1	Peningkatan kualitas dan kreatifitas seni budaya pertunjukan	Jumlah pelaku ekraf seni pertunjukan yang dilatih	70 Orang	smd	496.450.000
3.02.19.0 2	Pengembangan pengelolaan karya seni budaya	Jumlah pelaku seni budaya yang ditingkatkan karyanya	100 Orang	smd	363.550.000
3.02.19.0 3	Pengembangan wisata budaya	Jumlah SDM pelaku ekraf wisata budaya yang dilatih	100 Orang	smd	340.000.000
3.03	Pertanian				107.337.802.7 40
3.03.01	Dinas Perkebunan				44.968.722.74 0
3.03.01.0 1	Dinas Perkebunan				34.213.508.15 0
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	83%		2.680.263.900
3.03.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	2.680.263.900
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		2.434.000.000
3.03.08.0 1	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan	18 Unit	smd	1.453.000.000
3.03.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	981.000.000
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%		2.291.605.000
3.03.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 Kegiatan	smd	1.702.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	4 Kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
3.03.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	50 Orang	smd	589.605.000
		Jumlah pakaian dinas	0 Stel		

3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	68 Nilai		762.823.000
3.03.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 Dokumen	smd	327.083.000
3.03.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen	smd	435.740.000
3.03.58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	74060 Ton		21.805.111.250
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	16717254 ton		
		Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	3307 ton		
		Produksi Komoditi Perkebunan (Lada)	5849 ton		
		Produksi Komoditi Perkebunan (Kelapa)	12468 Ton		
		Produksi komoditas perkebunan	16812938 Ton		
3.03.58.0 4	Kegiatan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	19.5 Ton/Ha	kbr, smd, ppu, kkr, ktm, bru, psr	8.155.800.000
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1.35 Ton/Ha		
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0.8 Ton/Ha		
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0.7 Ton/Ha		
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1.15 Ton/Ha		
3.03.58.0 5	Kegiatan Perluasan Komoditas Perkebunan	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	150 Ha	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, psr	11.900.420.000
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	200 Ha		
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20 Ha		
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	150 Ha		
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200 Ha		

		Jumlah luas kebun	720 Ha		
3.03.58.0 6	Pengembangan Kelembagaan Perkebunan	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	20 unit	bru, ktm, kk, ppu, smd, kbr, psr	1.748.891.250
3.03.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4.08 Juta ton CO2eq		977.500.000
3.03.76.0 4	Pengembangan EBT pada sektor Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	2 PMS	bru, bpn, kk, smd	345.000.000
3.03.76.0 5	Perlindungan Lahan Konservasi di Areal Perkebunan	Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	101500 Ha	smd	287.500.000
3.03.76.0 6	Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan	Jumlah KTPA yang dibentuk dan dibina	15 KTPA	smd	345.000.000
3.03.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan		1.010.821.250
3.03.80.0 4	Peningkatan Kemitraan Usaha Perkebunan	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	30 koperasi	smd	301.990.000
3.03.80.0 5	Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	jumlah konflik perkebunan yang terselesaikan	5 konflik	smd	162.581.250
3.03.80.0 6	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah pelaku usaha yang dibina	52 perusahaan	smd	546.250.000
3.03.93	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI	2 Produk		2.251.383.750
3.03.93.0 1	Pembinaan Pasca Panen Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI	3 Kelompok Tani	smd	852.638.750
3.03.93.0 2	Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	2 Produk	smd	763.600.000
3.03.93.0 3	Kegiatan Promosi Produksi Perkebunan	Jumlah promosi yang diikuti	10 event	smd	635.145.000
3.03.01.0 2	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan				3.726.405.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	83%		382.734.000
3.03.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	382.734.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		1.150.643.500
3.03.08.0 1	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan	18 Unit	smd	654.200.000

3.03.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	496.443.500
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%		447.665.000
3.03.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 Kegiatan	smd	170.190.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	4 Kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
3.03.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	50 Orang	smd	277.475.000
3.03.94	Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang beredar	2905176 Benih		1.745.362.500
3.03.94.0 1	Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Benih	Persentase peredaran benih yang illegitim	3,08%	smd	735.252.500
3.03.94.0 2	Pengujian dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang disertifikasi	2000000 Benih	smd	1.010.110.000
3.03.01.0 3	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan				4.000.000.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	83%		581.995.000
3.03.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	581.995.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		1.292.450.000
3.03.08.0 1	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan	12 Unit	smd	696.200.000
3.03.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	596.250.000
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%		745.480.000
3.03.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 Kegiatan	smd, luarP rv	445.480.000

		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	4 Kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
3.03.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	50 Orang	luarP rv	300.000.000
3.03.95	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Luas Lahan yang dikendalikan	229 Ha		1.380.075.000
		Jumlah produksi Agens Pengendali Hayati (APH)	5000 Kg		
		Jumlah produksi Agens Pengendali Hayati (APH)	500 Liter		
3.03.95.0 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Jumlah Lahan yang di Kendalikan	229 Ha	smd	775.625.000
3.03.95.0 2	Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH) dan Bio Pestisida (BP)	Jumlah APH yang Diperbanyak	5000 Kg	smd, luarP rv	604.450.000
		Jumlah APH yang Diperbanyak	500 Liter		
3.03.01.0 4	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan				3.028.809.590
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	83%		398.877.790
3.03.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	398.877.790
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		614.425.000
3.03.08.0 1	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan	2 Unit	smd	229.200.000
3.03.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	kk, smd	385.225.000
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%		362.200.000
3.03.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 Kegiatan	smd	187.200.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	4 Kegiatan		

		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
3.03.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	50 Orang	smd	175.000.000
3.03.88	Program penyediaan bahan tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	85%		1.653.306.800
3.03.88.0 3	Penyediaan Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar	132000 benih	kk, smd	917.306.800
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	50000 benih		
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)	50000 benih		
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	2000 benih		
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	20000 benih		
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	10000 benih		
3.03.88.0 4	Penyediaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	45000 benih	kk, smd	736.000.000
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	25000 benih		
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10000 benih		
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh wangi)	10000 benih		
3.03.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				62.369.080.00 0
3.03.02.0 1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				47.831.530.00 0
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	81%		3.000.000.000
3.03.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang diproses	2600 Surat	smd	3.000.000.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		4.550.000.000

3.03.08.0 1	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	130 Unit	smd	1.691.700.000
3.03.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki	74 Unit	smd	2.858.300.000
		Luas gedung dan taman yang disediakan jasa kebersihannya	4427 M2		
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	12%		2.000.000.000
3.03.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	160 Kegiatan	smd	1.600.000.000
3.03.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	16 Orang	smd	400.000.000
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78.86 Nilai		2.000.000.000
3.03.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	12 Dokumen	smd	1.250.000.000
3.03.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	17 Laporan	smd	750.000.000
3.03.23	Program Hilirisasi Produk Peternakan	Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	11%		3.700.000.000
3.03.23.0 2	Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan	2 Unit usaha	btg, ktm, bpn, ppu, smd, kbr, psr, luarP rv	1.480.000.000
3.03.23.0 3	Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazar	150000000 Rp	bru, psr, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, luarP rv	1.020.000.000
3.03.23.0 4	Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	30 Unit usaha	bru, psr, kbr, smd, ppu, kkp, bpn, ktm, btg,	1.200.000.000

				luarP rv	
3.03.34	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)	118.5 Konstanta		7.750.000.000
		Jumlah Miniranch yang terregister	35 Unit		
3.03.34.0 2	Pengembangan Kawasan Peternakan	Jumlah bibit hijauan Pakan Ternak (HPT)	100000 Stek/Pols	psr, smd, ppu, kkr, kbr, ktm, bru	6.000.000.000
3.03.34.0 3	Pengembangan Informasi Peternakan	Jumlah Database, Statistik, NBM dan Data fungsi peternakan	4 Dokumen	smd	1.250.000.000
3.03.34.0 4	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah peternak debitur sektor peternakan (KTS, KUR, KKPE,dll)	50 Orang	smd	500.000.000
3.03.89	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana	35 Unit		4.300.000.000
3.03.89.0 1	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Jumlah hewan yang divaksinasi	10000 Ekor	smd	1.800.000.000
3.03.89.0 2	Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	10 Kab/Kota	smd	1.500.000.000
3.03.89.0 3	Penguatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah ternak yang dilakukan pelayanan kesehatan hewan	1425 Ekor	smd	1.000.000.000
3.03.90	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi	20%		20.531.530.00 0
		Calving Interval	18 Bulan		
3.03.90.0 1	Pengembangan Perbibitan Ternak	Service per Conception	1.75 Konstanta	smd	17.131.530.00 0
		Jumlah Ternak Sapi Bibit yang memiliki SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	100 Ekor		
3.03.90.0 2	Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	1 Kelompok	bru, psr, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarP rv	1.800.000.000
3.03.90.0 3	Peningkatan Kelembagaan Peternak	Jumlah proposal permohonan bantuan yang diverifikasi	14 Proposal	smd	1.600.000.000

3.03.02.0 2	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak				9.098.050.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	81%		1.310.000.000
3.03.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang diproses	250 Surat	ppu	1.310.000.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		2.468.450.000
3.03.08.0 1	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	20 Unit	ppu	347.600.000
3.03.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki	5 Unit	ppu	2.120.850.000
		Luas gedung dan taman yang disediakan jasa kebersihannya	1000 M2		
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	12%		615.950.000
3.03.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	140 Kegiatan	ppu, luarP rv	509.950.000
3.03.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	3 Orang	ppu	106.000.000
3.03.92	Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak	Persentase produksi bibit ternak berkualitas	11%		4.703.650.000
3.03.92.0 1	Peningkatan produksi dan distribusi Semen Beku	jumlah semen beku yang diproduksi	0 dosis	ppu	-
		Jumlah Kelahiran Sapi Bibit	0 Ekor		
		Jumlah Kelahiran rusa bibit	0 Ekor		
3.03.92.0 2	Peningkatan Produksi Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Produksi HPT	0 Ton	ppu	-
		Jumlah bibit HPT yang diproduksi	0 Stek/Pols		
3.03.92.0 3	Pembangunan/Perbaikan UPTD PIB Api-Api dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	1 Unit	ppu	3.098.050.000
3.03.92.0 4	Peningkatan Produksi Bibit dan Benih Ternak	Jumlah Kelahiran Sapi Bibit dan Rusa Bibit	40 Ekor	ppu	819.700.000
3.03.92.0 5	Peningkatan Produksi dan Bibit Hijauan Pakan Ternak	Produksi HPT	750 Ton	ppu	785.900.000
		Jumlah bibit HPT yang diproduksi	5000 Stek/Pols		
3.03.02.0 3	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				5.439.500.000

3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	81%		879.800.000
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang diproses	240 Surat	smd	879.800.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		472.620.000
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	11 Unit	smd	164.920.000
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki	49 Unit	smd	307.700.000
		Luas gedung dan taman yang disediakan jasa kebersihannya	686 M2		
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	12%		484.580.000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	36 Kegiatan	smd	399.580.000
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	6 orang	smd	85.000.000
3.03.91	Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet	Peningkatan pemeriksaan sampel penyidikan penyakit hewan dan produk asal hewan	12%		3.602.500.000
3.03.91.01	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan	Jumlah sampel penyakit hewan	4722 sampel	smd	727.500.000
3.03.91.02	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel produk asal hewan	733 sampel	smd	815.000.000
3.03.91.03	Pembangunan/Perbaikan UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	1 Unit	smd	2.060.000.000
3,04	Kehutanan				308.137.281.529
3.04.01	Dinas Kehutanan				308.137.281.529
3.04.01.01	Dinas Kehutanan				43.692.332.779
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%		3.376.435.000

3.04.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd, luarP rv	3.376.435.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		2.037.950.000
3.04.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	773.900.000
3.04.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	1.264.050.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		2.606.000.000
3.04.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	bru, smd, psr, luarP rv	2.185.000.000
		Jumlah Bulan Penyediaan Makan dan Minum	12 Bulan		
3.04.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	170 Stell	smd, luarP rv	421.000.000
3.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70 Nilai AKIP		1.306.500.000
3.04.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 dokumen	bru, smd, luarP rv	667.100.000
3.04.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen	bru, ppu, smd, psr, luarP rv	639.400.000
3.04.10.0 3	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	3 Laporan		-
3.04.16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi Penerimaan PNPB Sektor Kehutanan	165 Milyar Rupiah		3.471.960.000
3.04.16.0 1	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan	Persentase realisasi produksi hasil hutan kayu (realisasi/target)	70%	bru, smd, luarP rv	1.104.950.000
		Jumlah Dokumen Draft perda pembatasan penjualan kayu bulat	0 Dokumen Draft Perda		

3.04.16.0 2	Pendampingan Penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA	Jumlah IUPHHK-HA yang menerapkan RIL / RIL C	2 IUPHHK-HA	bru, smd, luarP rv	750.000.000
3.04.16.0 3	Perencanaan dan Tata Hutan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Tata Hutan	9 Dokumen	smd	620.500.000
3.04.16.0 5	Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Persentase penanganan tertib Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) pada Unit Manajemen	80%	bru, smd, luarP rv	796.510.000
3.04.16.0 6	Penyelesaian Penggunaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Jumlah Dokumen penyelesaian	6 Dokumen	smd	200.000.000
3.04.39	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase tutupan lahan Meningkat	13,98%		1.194.850.000
3.04.39.0 5	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	38500 Ha	bru, ktm, bpn, kkr, ppu, smd, kbr, luarP rv	220.000.000
3.04.39.1 5	Pengelolaan DAS	Jumlah DAS/SUB DAS yang dimonitoring	3 DAS/SUB DAS	ktm, kkr, smd, kbr, luarP rv	660.850.000
3.04.39.1 6	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Laporan Peredaran dan Pengadaan Bibit	10 Laporan	smd	314.000.000
3.04.41	Program Perlindungan dan KSDAE	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1,95%		782.100.000
3.04.41.2 4	Pengendalian dan Pengamanan Hutan	luas hutan yang dimanfaatkan tanpa izin yang semakin berkurang	1150 Ha	bpn, smd, luarP rv	153.900.000
3.04.41.2 5	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Luas Areal Kebakaran Hutan yang Semakin Menurun	576 Ha	smd, luarP rv	108.900.000
3.04.41.2 6	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang Meningkat	4000 Ha	smd	519.300.000
3.04.42	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	32000 Ha		2.330.970.000
3.04.42.3 6	Penyuluhan Kehutanan	Jumlah KTH/KUPS terregistrasi	5 KTH	bpn, kkr, smd, kbr, mah, luarP rv	955.650.000
3.04.42.3 7	Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Unit Usaha Masyarakat Hutan	10 Unit	smd, luarP rv	955.320.000

		Luas permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	35000 Ha		
3.04.42.38	Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat	Luas pembinaan wilayah Hutan Adat/Hutan Hak	48.85 Ha	ktm, ppu, smd, kbr, luarP rv	420.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	5 Unit Usaha		2.572.000.000
3.04.43.03	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	50 Peserta	luarP rv	773.025.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan	4 Laporan	bru, ktm, smd, luarP rv	1.409.925.000
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan monev kegiatan penyuluh	15 Laporan	smd	389.050.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	35 Jumlah Usulan		3.428.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Fasilitasi Perhutanan Sosial	3 Laporan	smd, psr, luarP rv	1.050.000.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	6 Laporan	bru, ktm, smd, mah, luarP rv	1.028.000.000
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	4 Laporan	ktm, smd, luarP rv	1.350.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0,25%		6.185.175.004
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	961 Unit	smd, luarP rv	850.000.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL	20 Kegiatan	smd	1.000.000.000
3.04.45.03	Penetapan Posko Darkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla	10 Kegiatan	smd, luarP rv	800.000.000

3.04.45.0 4	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan dan Investigasi Penyebab Kebakaran	27 Laporan	smd, luarP rv	508.275.000
3.04.45.0 5	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	10 Laporan	smd, luarP rv	1.250.000.000
3.04.45.0 6	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	70 Laporan	smd, luarP rv	600.000.000
3.04.45.0 7	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Laporan	smd, luarP rv	600.000.004
3.04.45.0 8	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	33 Dokumen	smd, luarP rv	576.900.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	39 kasus Tindak Pidana		1.700.000.000
3.04.46.0 1	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	0 Laporan	smd	
3.04.46.0 2	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	13 Laporan	smd	500.000.000
3.04.46.0 4	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	25 Laporan	smd	1.200.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	350 Hektar		10.000.000.000
3.04.47.0 1	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	500 Hektar		-
3.04.47.0 2	Pelaksanaan	Luas Penanaman	350 Hektar	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kk, bnp, ktm, btg, luarP rv	10.000.000.000
3.04.47.0 3	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	25 Laporan		-
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	37 SK/Sertifikat		1.542.040.000
		Jumlah Bibit	60000 Bibit		
3.04.48.0 3	Penyediaan Benih	Jumlah Sertifikasi Sumber Benih	12 Sertifikat	smd	444.950.000

3.04.48.04	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	60000 Bibit		-
3.04.48.05	Pengedaran Benih dan Bibit	Jumlah SK pengada dan pengedar benih dan atau bibit	15 SK	smd	284.200.000
3.04.48.06	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah bimbingan dan pengawasan	25 Laporan	smd	812.890.000
3.04.52	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Persentase Realisasi Keuangan DBH SDA DR meningkat	3%		978.416.775
3.04.52.01	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	3 Laporan	smd, luarP rv	978.416.775
3.04.53	Program Pengelolaan KPH Lindung	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	50 Ha		179.936.000
3.04.53.11	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Penataan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Secara Lestari	0 Ha	bpn	79.936.000
3.04.53.12	Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak Secara Lestari	50 Ha	bpn, mah	100.000.000
3.04.01.02	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto				27.402.566.775
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	85%		846.594.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	846.594.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit		731.906.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	530.250.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	201.656.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		229.100.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	kk, smd, luarP rv	127.000.000

3.04.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	114 Stell	kkr, smd, luarP rv	102.100.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	4 Unit Usaha		800.000.000
3.04.43.0 4	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan	8 Laporan	kkr, smd, luarP rv	800.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	5 Jumlah Usulan		1.550.000.000
3.04.44.0 3	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	12 Laporan	kkr, smd, luarP rv	1.550.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0,25%		14.461.266.77 5
3.04.45.0 1	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	750 Unit	smd, luarP rv	7.961.266.775
3.04.45.0 2	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Pyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL	9 Kegiatan	kkr, smd, luarP rv	900.000.000
3.04.45.0 3	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhuta	6 Kegiatan	kkr, smd, luarP rv	850.000.000
3.04.45.0 4	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan dan Investigasi Penyebab Kebakaran	5 Laporan	kkr, smd, luarP rv	800.000.000
3.04.45.0 5	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	5 Laporan	kkr, ppu, smd, luarP rv	900.000.000
3.04.45.0 6	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	46 Laporan	kkr, smd, luarP rv	1.500.000.000
3.04.45.0 7	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	35 Laporan	kkr, smd, luarP rv	800.000.000

3.04.45.0 8	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	8 Dokumen	kk, smd, luarP rv	750.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 kasus Tindak Pidana		2.050.000.000
3.04.46.0 1	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	4 Laporan	kk, ppu, smd, luarP rv	550.000.000
3.04.46.0 4	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	25 Laporan	kk, smd, ppu, luarP rv	1.500.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	86 hektar		6.413.300.000
3.04.47.0 1	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	300 Hektar	kk, ppu, smd, luarP rv	400.000.000
3.04.47.0 2	Pelaksanaan	Luas Penanaman	300 Hektar	kk, ppu, smd, luarP rv	5.563.300.000
3.04.47.0 3	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	7 Laporan	kk, ppu, smd, luarP rv	450.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0 SK/Sertifikat		-
3.04.48.0 4	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	0 Bibit	kk, smd, luarP rv	-
3.04.48.0 5	Pengedaran Benih dan Bibit	Jumlah SK pengada dan pengedar benih dan atau bibit	0 SK	kk, smd, luarP rv	-
3.04.50	Program Pengelolaan Tahura	Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola	150 Hektar		320.400.000
3.04.50.0 1	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas penataan kawasan hutan konservasi di tingkat tapak dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan secara lestari	150 Ha	kk, smd, luarP rv	270.400.000
3.04.50.0 2	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Penanganan degradasi dan deforestasi serta konflik tenurial	150 Hektar	kk, smd, luarP rv	50.000.000

3.04.01.0 3	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat				33.467.246.77 5
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	12%		616.850.000
3.04.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bru	616.850.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	12 Unit		640.930.000
3.04.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bru	352.980.000
3.04.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bru	287.950.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		269.200.000
3.04.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	bru	218.100.000
		Jumlah Bulan Penyediaan Makan dan Minum	12 Bulan		
3.04.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	73 Stell	bru	51.100.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)				200.000.000
3.04.43.0 2	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	5 Laporan	bru, smd, luarP rv	200.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	4 Jumlah Usulan		4.176.120.000
3.04.44.0 1	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Fasilitasi Perhutanan Sosial	8 Laporan	bru, smd, luarP rv	735.670.000
3.04.44.0 2	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	10 Laporan	bru, smd, luarP rv	2.488.480.000
3.04.44.0 3	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	5 5 Laporan	bru, smd, luarP rv	951.970.000

3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0,25%		4.601.306.775
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	80 Unit	bru	700.000.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Pyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL	20 Kegiatan	bru, smd	527.540.000
3.04.45.03	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhuta	18 Kegiatan	bru	264.345.000
3.04.45.04	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan dan Investigasi Penyebab Kebakaran	24 Laporan	bru	200.660.000
3.04.45.05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	36 Laporan	bru, smd	639.810.000
3.04.45.06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	30 Laporan	bru, smd, luarP rv	975.425.000
3.04.45.07	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan pemadaman kebakaran Hutan dan Lahan	30 Laporan	bru, smd, luarP rv	992.866.775
3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	24 Dokumen	bru	300.660.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	5 kasus Tindak Pidana		3.162.470.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	24 Laporan	bru, smd, luarP rv	596.660.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	24 Laporan	bru, smd, luarP rv	847.300.000
3.04.46.03	Penjagaan di Tempat - Tempat Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Penjagaan	0 Laporan		-
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	48 Laporan	bru	1.718.510.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	200 Hektar		11.188.000.000

3.04.47.0 1	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	800 Hektar	bru, smd, luarP rv	1.191.000.000
3.04.47.0 2	Pelaksanaan	Luas Penanaman	600 Hektar	bru, smd, luarP rv	9.642.000.000
3.04.47.0 3	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	17 Laporan	bru, smd	355.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pederar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	8 SK/Sertifikat		1.946.670.000
		Jumlah Bibit	25000 Bibit		
3.04.48.0 4	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	25000 Bibit	bru, smd, luarP rv	1.287.840.000
3.04.48.0 5	Pengedaran Benih dan Bibit	Jumlah SK pengada dan pederar benih dan atau bibit	8 SK	bru, smd, luarP rv	485.340.000
3.04.48.0 6	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah bimbingan dan pengawasan	12 Laporan	bru, smd, luarP rv	173.490.000
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)				-
3.04.49.0 1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Penanaman	0 Hektar		-
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	8 Unit Usaha		6.665.700.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	1,95%		
3.04.51.0 1	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	20 Ha	bru	6.295.700.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP	8 Unit Manajemen		
3.04.51.0 2	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak	100 Ha	bru, smd, luarP rv	370.000.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak	4 Unit Usaha		
3.04.01.0 4	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan				28.352.566.77 5

3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	85%		1.129.330.000
3.04.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bpn	1.129.330.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit		511.070.000
3.04.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bpn	174.000.000
3.04.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bpn	337.070.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		381.000.000
3.04.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	bpn	309.500.000
		Jumlah Bulan Penyediaan Makan dan Minum	12 Bulan		
3.04.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	50 Stell	bpn	71.500.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	10 Unit Usaha		329.450.000
3.04.43.0 3	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	50 Peserta	bpn	329.450.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	3 Jumlah Usulan		1.128.900.000
3.04.44.0 1	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Fasilitasi Perhutanan Sosial	4 Laporan	bpn	812.600.000
3.04.44.0 3	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	2 Laporan	bpn	316.300.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0,25%		9.450.650.000

3.04.45.0 1	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	7 Unit	bpn	4.832.600.000
3.04.45.0 2	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Pyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL	3 Kegiatan	bpn	393.400.000
3.04.45.0 3	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutia	3 Kegiatan	bpn	383.000.000
3.04.45.0 4	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan dan Investigasi Penyebab Kebakaran	3 Laporan	bpn	382.300.000
3.04.45.0 5	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	10 Laporan	bpn	1.347.750.000
3.04.45.0 6	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Laporan	bpn	626.750.000
3.04.45.0 7	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan pemadaman kebakaran Hutan dan Lahan	1 Laporan	bpn	325.950.000
3.04.45.0 8	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	2 Dokumen	bpn	347.500.000
3.04.45.0 9	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Gerakan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	4 Kegiatan	bpn	290.800.000
3.04.45.1 1	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah pembentukan regu perbantuan DALKARHUTLA	4 Regu/MPA	bpn	520.600.000
3.04.46 4	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	6 kasus Tindak Pidana		430.500.000
3.04.46.0 4	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	7 Laporan	bpn	430.500.000
3.04.47 5	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	100 Hektar		12.705.816.775
3.04.47.0 1	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	500 Hektar	bpn	724.716.775
3.04.47.0 2	Pelaksanaan	Luas Penanaman	500 Hektar	bpn	11.360.600.000

3.04.47.0 3	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	2 Laporan	bpn	620.500.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	100000 Bibit		1.229.250.000
3.04.48.0 3	Penyediaan Benih	Jumlah Sertifikasi Sumber Benih	2 Sertifikat		-
3.04.48.0 4	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	100000 Bibit	bpn	831.250.000
3.04.48.0 5	Pengedaran Benih dan Bibit	Jumlah SK pengada dan pengedar benih dan atau bibit	500 SK	bpn	398.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	4 Unit Usaha		1.056.600.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	1,95%		
3.04.51.0 1	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	1000 Ha	bpn	199.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP	4 Unit Manajemen		
3.04.51.0 2	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak	10 Ha	bpn	207.600.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak	2 Unit Usaha		
3.04.51.0 5	Pemeliharaan Tanaman (DAK)	Luas areal pemeliharaan tanaman	100 Hektar	bpn	450.000.000
3.04.51.0 6	Pemeliharaan Tanaman (Dana Pendamping DAK)	Luas areal pemeliharaan tanaman	100 Hektar	bpn	200.000.000
3.04.01.0 5	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus				19.106.675.550
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	12%		746.450.000
3.04.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bpn, ppu, smd, kbr, kkr, luarP rv	746.450.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	12 Unit		642.000.000

3.04.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bpn	136.600.000
3.04.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bpn, kbr, smd, ppu, kk, luarP rv	505.400.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	100%		590.800.000
3.04.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	bpn, luarP rv	421.400.000
3.04.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	124 Stell	bpn, kbr, ppu, kk, luarP rv	169.400.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	5 Unit Usaha		1.206.054.575
3.04.43.0 1	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	8 Laporan	bpn, kk, smd, luarP rv	269.054.575
3.04.43.0 3	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	550 Peserta	bpn, psr, kbr, ppu, kk, luarP rv	937.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	3 Jumlah Usulan		1.773.925.000
3.04.44.0 1	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi	12 Laporan	bpn, luarP rv	771.200.000
3.04.44.0 2	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	8 Laporan	bpn, luarP rv	677.725.000
3.04.44.0 3	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	10 Laporan	bpn, luarP rv	325.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0,25%		7.937.450.000
3.04.45.0 1	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	1842 Unit	bpn, luarP rv	787.400.000

3.04.45.0 2	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL	2 Kegiatan	bpn, luarP rv	327.200.000
3.04.45.0 3	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla	20 Kegiatan	bpn, luarP rv	1.123.600.000
3.04.45.0 4	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan dan Investigasi Penyebab Kebakaran	6 Laporan	bpn, luarP rv	160.000.000
3.04.45.0 5	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	14 Laporan	bpn, luarP rv	1.097.600.000
3.04.45.0 6	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	30 Laporan	bpn, luarP rv	1.975.350.000
3.04.45.0 7	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	5 Laporan	bpn, luarP rv	391.000.000
3.04.45.0 8	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	5 Dokumen	bpn, luarP rv	163.000.000
3.04.45.0 9	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Gerakan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	4 Kegiatan	bpn, luarP rv	402.500.000
3.04.45.1 0	Penerapan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura dan Kegiatan Sejenisnya (DBH SDA DR)	Luas Kegiatan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura	100 Hektar	bpn, kk, ppu, luarP rv	1.042.400.000
3.04.45.1 1	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah pembentukan regu perbantuan DALKARHUTLA	9 Regu/MPA	bpn, smd, kbr, luarP rv	467.400.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	6 kasus Tindak Pidana		1.849.329.600
3.04.46.0 1	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	11 Laporan	bpn, luarP rv	982.000.000
3.04.46.0 4	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	30 Laporan	bpn, kbr, ppu, kk, luarP rv	867.329.600

3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	100 Hektar		2.404.166.375
3.04.47.0 1	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	100 Hektar	bpn, kk, smd, luarP rv	190.176.375
3.04.47.0 2	Pelaksanaan	Luas Penanaman	100 Hektar	bpn, luarP rv	2.213.990.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pederar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	1 SK/Sertifikat		1.002.750.000
3.04.48.0 4	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	10000 Bibit	bpn, kk, luarP rv	1.002.750.000
3.04.49	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)				-
3.04.49.0 1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Lokasi Rehabilitasi Hutan Lahan	0 Ha		-
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	2 Unit Usaha		953.750.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	1,95%		
3.04.51.0 1	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	200 Ha	bpn, luarP rv	271.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP	5 Unit Manajemen		
3.04.51.0 2	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak	100 Ha	bpn, luarP rv	682.750.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak	2 Unit Usaha		
3.04.01.0 6	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo				29.667.566.77 5
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	85%		721.297.000
3.04.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	psr	721.297.000

3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit		1.358.300.000
3.04.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	psr	242.950.000
3.04.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	psr	1.115.350.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		336.620.000
3.04.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	psr	278.020.000
3.04.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	42 Stell	psr	58.600.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	4 Unit Usaha		499.600.000
3.04.43.0 1	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	6 Laporan	psr	125.000.000
3.04.43.0 2	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	15 Laporan	psr	145.000.000
3.04.43.0 3	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	300 Peserta	psr	189.600.000
3.04.43.0 6	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan monev kegiatan penyuluh	15 Laporan	psr	40.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	10 Jumlah Usulan		4.260.300.000
3.04.44.0 1	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi	15 Laporan	psr	793.000.000
3.04.44.0 2	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	6 Laporan	psr	3.180.000.000
3.04.44.0 3	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	6 5 Laporan	psr	142.000.000
3.04.44.0 4	Pembinaan	Jumlah pembinaan pengelolaan Unit usaha program perhutanan sosial dan kemitraan	15 Laporan	psr	145.300.000

3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0,25%		6.731.750.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	550 Unit	psr	4.065.000.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Pyegaraan/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaraan/bimbingan teknis PKHL	6 Kegiatan	psr	372.000.000
3.04.45.03	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhuta	4 Kegiatan	psr	245.000.000
3.04.45.04	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan dan Investigasi Penyebab Kebakaran	10 Laporan	psr	296.000.000
3.04.45.05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	4 Laporan	psr	352.750.000
3.04.45.06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	8 Laporan	psr	512.000.000
3.04.45.07	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan pemadaman kebakaran Hutan dan Lahan	4 Laporan	psr	320.000.000
3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	4 Dokumen	psr	164.000.000
3.04.45.09	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Gerakan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	4 Kegiatan	psr	160.000.000
3.04.45.11	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah pembentukan regu perbantuan DALKARHUTLA	4 Regu/MPA	psr	245.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	1 kasus Tindak Pidana		1.910.565.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	6 Laporan	psr	327.565.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	2 Laporan	psr	220.000.000
3.04.46.03	Penjagaan di Tempat - Tempat Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Penjagaan	24 Laporan	psr	243.000.000

3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	5 Laporan	psr	1.120.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	100 Hektar		10.508.451.775
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	300 Hektar	psr	2.007.451.775
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman	300 Hektar	psr	8.121.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Movev RHL	12 Laporan	psr	380.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	25000 Bibit		1.363.900.000
		Jumlah SK pengada dan pederar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0 SK/Sertifikat		
3.04.48.04	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	25000 Bibit	psr	1.085.000.000
3.04.48.05	Pengedaran Benih dan Bibit	Jumlah SK Pengada dan pederar benih /bibit	2 SK	psr	138.000.000
3.04.48.06	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah bimbingan dan pengawasan	15 Laporan	psr	140.900.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	6 Unit Usaha		1.976.783.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	1,95%		
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	20 Ha	psr, luarP rv	1.781.618.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP	2 Unit Manajemen		
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak	200 Ha	psr	195.165.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak	6 Unit Usaha		
3.04.01.07	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan				28.714.525.775
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	85%		657.950.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	657.950.000

3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit		224.860.000
3.04.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	112.430.000
3.04.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	112.430.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		483.500.000
3.04.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	smd	261.600.000
3.04.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	68 Stell	smd	221.900.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	3 Unit Usaha		1.000.000.000
3.04.43.0 3	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	90 Peserta	btg, kkr, smd	750.000.000
3.04.43.0 4	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan	2 Laporan	smd	250.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	10 Jumlah Usulan		3.200.000.000
3.04.44.0 1	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi	10 Laporan	btg, kkr, smd	850.000.000
3.04.44.0 2	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	6 Laporan	btg, kkr, smd	1.900.000.000
3.04.44.0 3	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	2 Laporan	btg, kkr, smd	450.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0,25%		7.223.066.775
3.04.45.0 1	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	15 Unit	btg, kkr, smd	2.498.066.775

3.04.45.0 2	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Pyenyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL	20 Kegiatan	btg, kk, smd	750.000.000
3.04.45.0 3	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla	5 Kegiatan	btg, kk, smd	750.000.000
3.04.45.0 4	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan dan Investigasi Penyebab Kebakaran	5 Laporan	btg, kk, smd	300.000.000
3.04.45.0 5	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	10 Laporan	btg, kk, smd	650.000.000
3.04.45.0 6	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	18 Laporan	btg, kk, smd	975.000.000
3.04.45.0 7	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Laporan	ktm, kk, smd	500.000.000
3.04.45.0 8	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	3 Dokumen	ktm, kk, smd	250.000.000
3.04.45.1 1	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah pembentukan regu perbantuan DALKARHUTLA	5 Regu/MPA	ktm, kk, smd	550.000.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 kasus Tindak Pidana		1.220.000.000
3.04.46.0 1	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	10 Laporan	btg, kk, smd	150.000.000
3.04.46.0 2	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	6 Laporan	ktm, kk, smd	120.000.000
3.04.46.0 4	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	16 Laporan	btg, kk, smd	950.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	350 Hektar		11.401.500.000
3.04.47.0 1	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	500 Hektar	ktm, smd	315.000.000
3.04.47.0 2	Pelaksanaan	Luas Penanaman	350 Hektar	ktm, smd	9.986.500.000
3.04.47.0 3	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	10 Laporan	ktm, smd	1.100.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Surat Keterangan	3 SK		1.230.000.000

3.04.48.0 4	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	187500 Bibit	kk, smd	1.105.000.000
3.04.48.0 6	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah bimbingan dan pengawasan	3 Laporan	smd	125.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1,95%		2.073.649.000
		Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	1 Unit Usaha		
3.04.51.0 1	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	60 Ha	kk, smd	1.390.978.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP	11 Unit Manajemen		
3.04.51.0 2	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak	250 Ha	smd	136.750.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak	1 Unit Usaha		
3.04.51.0 3	Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK)	Jumlah Kantor Resort KPH	1 unit	kk, smd	448.821.000
3.04.51.0 4	Pembangunan Kantor Resort KPH (Dana Pendamping DAK)	Jumlah Kantor Resort KPH	1 unit	kk, smd	97.100.000
3.04.01.0 8	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan				31.484.666.77 5
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	12%		1.287.420.000
3.04.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	1.287.420.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	12 Unit		495.492.000
3.04.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	299.792.000
3.04.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	195.700.000

3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		291.100.000
3.04.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	smd	171.100.000
3.04.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	140 Stel	smd	120.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	2 Unit Usaha		1.573.100.000
3.04.43.0 3	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	900 Peserta	smd	1.573.100.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	2 Jumlah Usulan		2.428.750.000
3.04.44.0 1	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi	10 Laporan	smd	900.000.000
3.04.44.0 2	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	11 Laporan	smd	1.528.750.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0,25%		8.679.135.000
3.04.45.0 1	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	4031 Unit	smd	3.921.055.000
3.04.45.0 2	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Pyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL	12 Kegiatan	smd	771.814.000
3.04.45.0 3	Penetapan Posko Darkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhuta	4 Kegiatan	smd	312.220.000
3.04.45.0 4	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan dan Investigasi Penyebab Kebakaran	2 Laporan	smd	317.100.000
3.04.45.0 5	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	6 Laporan	kk, smd	903.374.000

3.04.45.0 6	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	12 Laporan	kk, smd	819.200.000
3.04.45.0 7	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	8 Laporan	smd	234.550.000
3.04.45.0 8	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	8 Dokumen	smd	331.375.000
3.04.45.0 9	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Gerakan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	11 Kegiatan	smd	521.040.000
3.04.45.1 0	Penerapan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura dan Kegiatan Sejenisnya (DBH SDA DR)	Luas Kegiatan Agroforestry, Agrosilvopastura, Sylvopastura	0 Hektar	smd	-
3.04.45.1 1	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah pembentukan regu perbantuan DALKARHUTLA	11 Regu/MPA	smd	547.407.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	5 kasus Tindak Pidana		1.186.174.000
3.04.46.0 2	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	18 Laporan	kk, smd	300.000.000
3.04.46.0 4	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	18 Laporan	smd	886.174.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	70 Hektar		10.807.407.77 5
3.04.47.0 1	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	400 Hektar	smd	646.150.000
3.04.47.0 2	Pelaksanaan	Luas Penanaman	476 Hektar	smd	9.761.257.775
3.04.47.0 3	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	4 Laporan	smd	400.000.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0 SK/Sertifikat		600.000.000
		Jumlah Bibit	100000 Bibit		
3.04.48.0 4	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	100000 Bibit	smd	600.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	4 Unit Usaha		4.136.088.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	1,95%		

3.04.51.0 1	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	20 Ha	smd	3.385.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP	8 Unit Manajemen		
3.04.51.0 2	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak	200 Ha	kk, smd	374.588.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak	2 Unit Usaha		
3.04.51.0 5	Pemeliharaan Tanaman (DAK)	Luas Areal Pemeliharaan Tanaman	100 Ha	kk	332.100.000
3.04.51.0 6	Pemeliharaan Tanaman (Dana Pendamping DAK)	Luas Areal Pemeliharaan Tanaman	100 Ha	smd	44.400.000
3.04.01.0 9	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon				28.002.566.77 5
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	12%		800.125.000
3.04.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	ktm	800.125.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	12 Unit		683.400.000
3.04.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	ktm	467.583.000
3.04.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	ktm	215.817.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		465.075.000
3.04.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	ktm, luarP rv	291.200.000
		Jumlah Bulan Penyediaan Makan dan Minum	12 Bulan		
3.04.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	65 Stell	ktm	173.875.000

3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)				-
3.04.43.03	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)				-
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	2 Jumlah Usulan		641.867.500
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Fasilitasi Perhutanan Sosial	2 Laporan	ktm	271.662.500
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	4 Laporan	ktm	217.825.000
3.04.44.04	Pembinaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	2 Laporan	ktm	152.380.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0,25%		7.166.423.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	11 Unit	ktm	5.149.584.500
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhoustraining/Pyenyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL	6 Kegiatan	ktm	415.103.000
3.04.45.03	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhuta	3 Kegiatan	ktm	122.350.000
3.04.45.04	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan dan Investigasi Penyebab Kebakaran	3 Laporan	ktm	206.186.500
3.04.45.05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	6 Laporan	ktm	460.800.000
3.04.45.06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	12 Laporan	ktm	357.345.000
3.04.45.07	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	12 Laporan	ktm	325.304.000

3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	4 Dokumen	ktm	129.750.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	4 kasus Tindak Pidana		1.102.356.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	4 Laporan	ktm	292.160.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	4 Laporan	ktm	810.196.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	600 Hektar		15.757.172.275
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman	600 Hektar	ktm	15.757.172.275
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	50000 Bibit		606.748.000
3.04.48.04	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	50000 Bibit	ktm	606.748.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	2 Unit Usaha		779.400.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	1,95%		
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	100 Ha	ktm	390.000.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP	10 Unit Manajemen		
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak	250 Ha	ktm	389.400.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak	2 Unit Usaha		
3.04.01.10	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau				38.246.566.775
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	85%		716.850.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	kbr	716.850.000

3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit		763.700.000
3.04.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	kbr	250.700.000
3.04.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	kbr	513.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		613.400.000
3.04.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	smd, kbr, luarP rv	331.000.000
3.04.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	82 Stell	smd, kbr, luarP rv	282.400.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	5 Unit Usaha		1.600.000.000
3.04.43.0 1	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	40 Laporan	smd, kbr, mah, luarP rv	800.000.000
3.04.43.0 2	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	20 Laporan	smd, kbr, mah, luarP rv	500.000.000
3.04.43.0 4	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan	10 Laporan	smd, kbr, mah	100.000.000
3.04.43.0 6	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan monev kegiatan penyuluh	40 Laporan	smd, kbr, mah, luarP rv	200.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	5 Jumlah Usulan		1.928.000.000
3.04.44.0 1	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi	10 Laporan	smd, kbr, mah, luarP rv	428.000.000
3.04.44.0 2	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Sosial	22 Laporan	smd, kbr, mah, luarP rv	500.000.000
3.04.44.0 3	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	10 Laporan	smd, kbr, mah, luarP rv	500.000.000

3.04.44.0 4	Pembinaan	Terlaksananya pembinaan pengelolaan Unit usaha program perhutanan sosial dan kemitraan	2 Laporan	smd, kbr, mah, luarP rv	500.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0,25%		7.246.566.775
3.04.45.0 1	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	10 Unit	smd, kbr, luarP rv	2.000.000.000
3.04.45.0 2	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Pyegyaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL	10 Kegiatan	smd, kbr, mah, luarP rv	1.500.000.000
3.04.45.0 3	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla	10 Kegiatan	smd, kbr, mah, luarP rv	-
3.04.45.0 4	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan dan Investigasi Penyebab Kebakaran	10 Laporan	smd, kbr, luarP rv	300.000.000
3.04.45.0 5	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	50 Laporan	smd, kbr, mah, luarP rv	1.500.000.000
3.04.45.0 6	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	30 Laporan	smd, kbr, mah, luarP rv	1.100.000.000
3.04.45.0 7	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Laporan	smd, kbr, mah, luarP rv	500.000.000
3.04.45.0 8	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	7 Dokumen	smd, kbr, luarP rv	346.566.775
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	10 kasus Tindak Pidana		3.500.000.000
3.04.46.0 1	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	40 Laporan	smd, mah, kbr, luarP rv	1.500.000.000
3.04.46.0 2	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	10 Laporan	smd, kbr,	500.000.000

				mah, luarP rv	
3.04.46.0 4	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	60 Laporan	smd, kbr, mah, luarP rv	1.500.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	250 Hektar		11.000.000.000
3.04.47.0 1	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	1000 Hektar	smd, kbr, mah, luarP rv	1.000.000.000
3.04.47.0 2	Pelaksanaan	Luas Penanaman	500 Hektar	smd, kbr, mah, luarP rv	8.000.000.000
3.04.47.0 3	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Movev RHL	40 Laporan	smd, kbr, mah, luarP rv	2.000.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	9 Unit Usaha		10.878.050.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	1,95%		
3.04.51.0 1	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	15 Ha	smd, kbr, mah	10.679.930.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP	15 Unit Manajemen		
3.04.51.0 2	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak	10 Ha	smd, kbr, mah	198.120.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak	4 Unit Usaha		
3,05	Energi dan Sumber Daya Mineral				71.776.650.000
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				71.776.650.000
3.05.01.0 1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				71.776.650.000
3.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap pelayan PD (SKM)	85%		3.149.990.000

3.05.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarP rv	3.149.990.000
3.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		850.000.000
3.05.08.0 1	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	12 Unit	smd	500.000.000
3.05.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	50 Bulan	smd	350.000.000
3.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		1.550.000.000
3.05.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat konsultasi keluar daerah	12 Kali	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarP rv	1.150.000.000
		Jumlah kegiatan rapat/koordinasi/konsultasi ke dalam daerah	26 Kali		
3.05.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	25 Orang	smd, luarP rv	400.000.000
3.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	68 Nilai AKIP		1.750.000.000
3.05.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	8 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarP rv	750.000.000

3.05.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	25 Kali	bru, ktm, kkr, ppu, smd, kbr, mah, psr, luarP rv	1.000.000.000
3.05.37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK berlistrik	989607 KK		11.000.000.000
3.05.37.0 1	Pembangunan Ketenagalistrikan	Penambahan Desa/Kelurahan berlistrik	2 Desa	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarP rv	9.600.000.000
3.05.37.0 6	Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan	Jumlah perusahaan yang mendapat Rekomendasi teknis	45 Perusahaan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarP rv	900.000.000
3.05.37.0 7	Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan	Jumlah perusahaan yang menerapkan Keselamatan ketenagalistrikan	40 Perusahaan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarP rv	500.000.000
3.05.45	Program Pengembangan Sumberdaya Geologi dan Tata Lingkungan	Persentase perusahaan yang mengikuti kaidah perhitungan sumberdaya dan cadangan	67%		2.493.862.000
3.05.45.0 1	Pemetaan dan perhitungan Sumberdaya Geologi	Jumlah Inventarisasi dan verifikasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara, Mineral yang CnC	425 Perusahaan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, ktm, btg, luarP rv	1.043.862.000

3.05.45.0 2	Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah	Jumlah Rekomtek	40 Rekomtek	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkk, bnp, ktm, luarP rv	450.000.000
		Jumlah sosialisasi	1 kali		
		Jumlah sumur yang diawasi	120 Sumur		
3.05.45.0 3	Pengawasan Mutu dan Muka Air Tanah	Data mutu/muka air tanah	10 Kab/Kota	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkk, bnp, ktm, btg, psr	1.000.000.000
		Sumur Pantau	0 Sumur		
		Peta zona konservasi air tanah	1 CAT		
3.05.46	Program Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar dalam pelaksanaan dokumen RKAB	45 Perusahaan		3.289.970.000
3.05.46.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Teknis Minerba	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	55 Perusahaan	bru, psr, kbr, smd, ppu, kkk, bnp, ktm, luarP rv	1.396.250.000
3.05.46.0 2	Pembinaan dan Pengawasan perusahaan minerba	Jumlah perusahaan CnC yang menerapkan efisiensi bahan bakar dan penggunaan biodiesel 20%	35 Perusahaan	bru, ktm, kkk, ppu, smd, kbr, psr, luarP rv	698.970.000
3.05.46.0 3	Pembinaan dan Pengawasan Produksi Minerba	Jumlah perusahaan yang memenuhi kewajiban pembayaran Royalty	100 Perusahaan	bru, ktm, bnp, kkk, ppu, smd, kbr, psr, luarP rv	1.194.750.000
3.05.47	Program Diversifikasi dan Konservasi Energi	% Pemanfaatan EBT	4,82%		47.692.828.000

3.05.47.0 1	Pengembangan dan pemanfaatan Bioenergi	Jumlah Rumah Tangga yang dibangun Instalasi biogas	80 Rumah	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkp, bnp, ktm, btg, luarP rv	1.500.000.000
3.05.47.0 2	Pengembangan dan Pemanfaatan Aneka Energi	Desa yang dialiri listrik Energi Terbarukan	7 Desa	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkp, bnp, ktm, luarP rv	45.692.828.00 0
3.05.47.0 3	Konservasi Energi dan Air	Jumlah penyalur BBM bersubsidi	50 penyalur	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkp, bnp, ktm, btg, luarP rv	500.000.000
		Jumlah penyalur LPG bersubsidi	50 penyalur		
		Jumlah instansi yang melakukan upaya efisiensi listrik dan air	25 Instansi		
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				487.708.562.6 79
4,01	Kesekretariatan Daerah				295.406.254.1 79
4.01.03	Sekretariat Daerah				180.731.593.1 79
4.01.03.0 1	Biro Umum				108.087.500.0 00
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				24.600.770.00 0
4.01.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	24.600.770.00 0
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				45.782.030.00 0
4.01.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	0 Unit	smd	25.269.580.00 0

4.01.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	20.512.450.00 0
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				27.402.418.50 0
4.01.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	45 Kegiatan	smd	26.340.440.50 0
4.01.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi	190 Orang	smd	1.061.978.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				770.575.000
4.01.12.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	smd	80.000.000
4.01.12.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran	18 Dokumen	smd	690.575.000
4.01.30	Program Pelayanan Tata Usaha Umum				1.881.005.000
4.01.30.0 1	Pelayanan Administrasi Biro	Jumlah bulan pelayanan administrasi biro	190 Bulan	smd	900.490.000
4.01.30.0 2	Pengelolaan Arsip dan Dokumen Setda	jumlah arsip in aktif yang dikelola dengan baik	4000 Dokumen	smd	593.215.000
4.01.30.0 3	Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	Jumlah surat pimpinan yang terdistribusi tepat waktu	1500 Dokumen	smd	387.300.000
4.01.40	Program Pelayanan Sarana Prasarana Rumah Tangga Setda				7.650.701.500
4.01.40.0 1	Pengelolaan Barang Aset Setda	Jumlah Gedung Aset Setda Yang Dikelola	8 Gedung	smd	610.250.000
4.01.40.0 2	Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	jumlah kegiatan pimpinan yang terlaksana dengan baik	95 acara	smd	7.040.451.500
4.01.03.0 2	Biro Hubungan Masyarakat				13.834.250.00 0
4.01.37	Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama				1.344.500.000
4.01.37.0 1	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran	22 Dokumen	smd	371.000.000
4.01.37.0 2	Peningkatan dan Pembinaan Adminstrasi Kerjasama	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran	22 Dokumen	smd	420.500.000
4.01.37.0 3	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran	22 Dokumen	smd	553.000.000
4.01.88	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan				10.811.400.00 0

4.01.88.0 2	Kerjasama media	Jumlah kerjasama media	22 Media Massa	smd	559.500.000
4.01.88.0 3	Penyelenggaraan Peliputan dan Publikasi	Jumlah berita positif yang terpublikasi	1100 Berita	smd	9.581.400.000
4.01.88.0 4	Penyediaan Data dan Informasi	Jumlah sistem penyedia data dan Informasi	24 2	smd	670.500.000
4.01.90	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan				1.678.350.000
4.01.90.0 3	Pelayanan Tamu dan Pimpinan Keprotokolan	Jumlah Tamu Pemda	99 Instansi	smd	668.500.000
4.01.90.0 4	Penatacaraan kegiatan Pemda	Jumlah Kepenatacaraan kegiatan pemda yang terjadwalkan	110 Kegiatan	smd	1.009.850.000
4.01.03.0 3	Biro Hukum				6.050.000.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	85%		576.600.000
4.01.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	576.600.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	90%		79.600.000
4.01.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang diadakan	0 Unit	smd	61.600.000
4.01.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	18.000.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	90%		623.000.000
4.01.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	15 Kegiatan	smd	573.000.000
4.01.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur	5 Jumlah	smd	50.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	95%		11.400.000
4.01.12.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	4 Dokumen	smd	11.400.000
4.01.12.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran	10 Dokumen	smd	-
4.01.26	Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah	Tercapainya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	80%		981.500.000

4.01.26.0 1	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi	Terwujudnya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	20 Jumlah	smd	981.500.000
4.01.28	Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi	Persentase rancangan peraturan yang menjadi produk hukum	80%		538.500.000
4.01.28.0 1	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur	Terwujudnya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	600 Jumlah	smd	479.000.000
4.01.28.0 2	Evaluasi Peraturan Gubernur yang ditetapkan	Jumlah Peraturan Gubernur yang di Evaluasi	10 Pergub	smd	59.500.000
4.01.29	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase Informasi Hukum yang terdokumentasi dengan baik	87%		275.800.000
4.01.29.0 1	Peningkatan Jaringan Informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Penyebar Luasan Publikasi Informasi Hukum	600 Jumlah	smd	275.800.000
4.01.32	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan produk	83%		1.179.300.000
4.01.32.0 1	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	Jumlah Fasilitas, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	250 Jumlah	smd	1.179.300.000
4.01.33	Program Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase Perkara/Kasus Sengketa Pemerintah Provinsi yang terselesaikan tepat waktu	78%		1.302.700.000
4.01.33.0 1	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	Advice dan pertimbangan hukum Penyelesaian Sengketa yang diberikan kepada OPD/Masyarakat dengan cepat dan sesuai aturan yang berlaku	10%	smd	965.600.000
4.01.33.0 2	Peningkatan Penyelesaian Sengketa	Terpenuhinya Kepuasan masyarakat terhadap Kepastian Hukum, penyelesaian Perkara dengan cepat	73%	smd	337.100.000
4.01.36	Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Terwujudnya sadar hukum Aparatur dan Masyarakat	80%		424.500.000
4.01.36.0 1	Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Pembinaan Kab/Kota Peduli HAM dan Sadar akan Hukum dan HAM	80%	smd	424.500.000

4.01.45	Program Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum	Terlaksananya Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Daerah yang telah ditetapkan	75 Perda		57.100.000
4.01.45.01	Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan	Terwujudnya Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Daerah yang telah ditetapkan	5 Perda	smd	57.100.000
4.01.03.04	Biro Organisasi				9.977.153.600
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	12 Bulan		476.733.600
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Laporan Administrasi Perkantoran	23 Laporan	smd, luarP rv	476.733.600
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peralatan/ Kelengkapan Kantor yang dimanfaatkan	100%		364.022.500
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang diadakan	0 Unit	smd, luarP rv	264.022.500
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang dipelihara	15 Unit	smd	100.000.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				782.024.250
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Koordinasi/Konsultasi	1 Laporan	smd, luarP rv	626.624.250
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi	1 Laporan	smd, luarP rv	155.400.000
4.01.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik				435.708.000
4.01.42.02	Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)				-
4.01.42.03	Penerapan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Survey yang direviu	1 Laporan	smd, luarP rv	236.208.000
4.01.42.04	Peningkatan Tata Laksana Pelayanan Publik	Jumlah Nominasi	3 Nominasi	smd, luarP rv	199.500.000
4.01.51	Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian Setda	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan sesuai aturan	100%		134.358.000
4.01.51.01	Penataan Administrasi Kepegawaian Setda	Laporan Usulan Kepegawaian yang diproses	1 Laporan	smd, luarP rv	134.358.000
		Laporan Penetapan Surat Keputusan yang diproses	1 Laporan		
		Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Apel Pagi	1 Laporan		

4.01.53	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Persentase PD yang telah menjalankan langkah Reformasi Birokrasi	11%		2.825.660.250
4.01.53.0 1	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	smd, luarP rv	2.653.344.750
4.01.53.0 2	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang difasilitasi pembentukan kelompok Budaya Kerja	38 PD	smd, luarP rv	172.315.500
		Dokumen Hasil Evaluasi dan Penilaian Penerapan Budaya Kerja	1 Dokumen		
4.01.60	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase PD yang menyampaikan Laporan Kinerja sesuai ketentuan	84%		3.519.223.000
		Persentase Kab/Kota yang memiliki nilai SAKIP minimal B	50%		
4.01.60.0 1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	1 Laporan	smd, luarP rv	3.123.393.000
		Laporan Fasilitas Evaluasi AKIP	1 Laporan		
		Jumlah PD yang terfasilitasi pelaksanaan SAKIP	38 PD		
		Laporan Capaian Kinerja	1 Laporan		
4.01.60.0 4	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	1 Laporan	smd, luarP rv	395.830.000
		Laporan Fasilitas Evaluasi AKIP	1 Laporan		
		Laporan Capaian Kinerja	1 Laporan		
		Jumlah PD yang terfasilitasi pelaksanaan SAKIP	38 PD		
4.01.80	Program Penguatan Kelembagaan	Prosentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan NSPK	90%		1.203.216.000
4.01.80.0 5	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi/evaluasi kelembagaan	38 PD	smd, luarP rv	629.958.000
4.01.80.0 7	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penguatan kelembagaan	10 Kab/Kota	smd, luarP rv	242.550.000
4.01.80.0 8	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Dokumen Analisis Jabatan yang disusun	1 Dokumen	smd, luarP rv	330.708.000

		Dokumen Analisis Beban Kerja yang disusun	1 Dokumen		
4.01.81	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / Aturan	68,42%		236.208.000
4.01.81.02	Peningkatan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah SOP Perangkat Daerah yang diverifikasi	2080 SOP	smd, luarP rv	236.208.000
4.01.03.05	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah				6.450.000.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase PD yang telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	75%		986.747.500
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	986.747.500
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit		102.850.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kendaraan, alat kantor	2 Unit	smd	76.600.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kendaraan, alat kantor	2 Unit	smd	26.250.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%		926.395.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Belanja makanan dan minuman, Publikasi, Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah, Bimtek	12 Bulan	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	876.395.000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kontribusi BIMTEK	2 Kegiatan	smd	50.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70%		3.150.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	smd	2.100.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	1 Dokumen	smd	1.050.000

4.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya tertib administrasi pelayanan administrasi kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1 Dokumen		481.950.000
4.01.16.1 6	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kedinasan Pej. Negara, PAW Anggota DPRD Prov. Dan Kab/Kota	Laporan kedinasan pejabat negara	1 Dokumen	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	481.950.000
4.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya kepastian Hukum Batas, Daerah Otonomi Baru dan Teridentifikasi serta pemberian/pembakuan Nama Rupabumi	100%		1.284.270.000
4.01.27.0 4	Perencanaan Penataan Administrasi Pemerintahan Daerah	Terlaksananya proses pembentukan daerah persiapan	2 Dokumen	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	336.875.000
4.01.27.1 0	Pembakuan nama rupabumi	Terlaksananya Pembakuan nama Rupabumi di wilayah Kaltim	1 Dokumen	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	370.315.000
4.01.27.1 1	Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Jumlah penegasan Batas Daerah Provinsi dan kabupaten/kota Se Kalimantan timur secara jelas dan pasti	5 Dokumen	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	577.080.000
4.01.31	Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan, Kebijakan Pertanahan dan Kamtibmas di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	100%		1.130.062.500

4.01.31.0 4	Penataan Masalah Pertanahan	Terwujudnya pelaksanaan Kebijakan Pertanahan, laporan Koordinasi Pertanahan	1 Dokumen	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	440.842.500
4.01.31.0 5	Pembinaan Kamtibmas	Terlaksananya keamanan dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	689.220.000
4.01.34	Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Otda	1 Dokumen		965.790.000
4.01.34.1 0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Laporan Koordinasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	965.790.000
4.01.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Pemerintahan Daerah	1 Dokumen		568.785.000
4.01.35.1 0	Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen/Laporan	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	568.785.000
4.01.03.0 6	Biro Kesejahteraan Rakyat				10.512.977.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				746.515.000
4.01.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	746.515.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				260.000.000
4.01.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	20 Unit	smd	200.000.000
4.01.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	60.000.000

4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				700.500.000
4.01.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 Kegiatan	smd, luarP rv	665.500.000
		Jumlah kegiatan koordinasi dan monitoring ke dalam daerah	40 Kegiatan		
4.01.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	10 Orang	smd, luarP rv	35.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				-
4.01.12.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	smd	-
4.01.12.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	14 Dokumen	smd	-
4.01.17	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan dan Kesehatan	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Keagamaan dan Kesehatan yang ditindaklanjuti	90%		2.586.100.000
4.01.17.0 1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan	14 Dokumen	smd, luarP rv	1.926.100.000
4.01.17.0 2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan	14 Dokumen	smd, luarP rv	660.000.000
4.01.18	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang ditindaklanjuti	90%		1.334.300.000
4.01.18.0 1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	14 Dokumen	smd, luarP rv	845.350.000
4.01.18.0 2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14 Dokumen	smd, luarP rv	264.000.000

4.01.18.0 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	14 Dokumen	smd, luarP rv	224.950.000
4.01.19	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti	90%		1.107.700.000
4.01.19.0 1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial	14 Dokumen	smd, luarP rv	440.000.000
4.01.19.0 2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14 Dokumen	smd, luarP rv	333.850.000
4.01.19.0 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14 Dokumen	smd, luarP rv	333.850.000
4.01.79	Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase hibah bansos yang tepat sasaran	100%		3.777.862.000
4.01.79.0 1	Pelayanan Administrasi Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Laporan Hibah dan Bantuan Sosial	2 Dokumen	smd, luarP rv	3.467.442.000
4.01.79.0 2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	smd, luarP rv	192.280.000
4.01.79.0 3	Penyusunan Perumusan Kebijakan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Dokumen	smd, luarP rv	118.140.000
4.01.03.0 7	Biro Perekonomian				4.500.000.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		544.500.000
4.01.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	544.500.000

4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%		90.700.000
4.01.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang diadakan	9 Unit	smd	47.400.000
4.01.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang dipelihara	9 Unit	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	43.300.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		890.000.000
4.01.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 kegiatan	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	890.000.000
		jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	50 kegiatan		
		jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	12 bulan		
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	100%		281.500.000
4.01.12.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 dokumen	smd	281.500.000
4.01.48	Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah	Persentase kebijakan pengembangan bidang produksi daerah yang ditindaklanjuti/terlaksana	100%		798.500.000
4.01.48.0 1	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Pertanian	jumlah koordinasi pengembangan potensi ekonomi pertanian dalam arti luas	3 kali	smd	285.500.000
4.01.48.0 2	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Jumlah koordinasi pengembangan potensi ekonomi kelautan dan perikanan	1 kali	smd	108.000.000

4.01.48.0 3	Koordinasi Peningkatan Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan	jumlah koordinasi pengembangan potensi kehutanan dan perkebunan	2 kali	smd	265.000.000
4.01.48.0 4	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Jumlah koordinasi kebijakan peningkatan daya dukung lingkungan hidup	1 kali	smd	140.000.000
4.01.49	Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD	Persentase kebijakan peningkatan investasi daerah dan kinerja BUMD yang ditindaklanjuti/terlaksana	100%		986.300.000
4.01.49.0 1	Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan Daerah	jumlah kebijakan penanaman modal, perizinan dan non perizinan daerah	1 kebijakan	smd	350.000.000
4.01.49.0 3	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Tata Kelola dan Kinerja BUMD	Jumlah koordinasi perusda dan lembaga keuangan	7 kali	smd	408.800.000
4.01.49.0 4	Koordinasi Promosi Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah	Bahan Promosi Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah	1 Dokumen	smd	227.500.000
4.01.50	Program Peningkatan Sinergitas Bidang Industri dan Jasa	Persentase Kebijakan Bidang Industri dan Jasa ditindaklanjuti/terlaksana	100%		908.500.000
4.01.50.0 1	Peningkatan Sinergi Kebijakan Perekonomian Daerah	Hasil Rakor yang ditindaklanjuti menjadi Surat Edaran/SK (Kebijakan)	3 Dokumen	smd	531.000.000
4.01.50.0 2	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pariwisata dan Perhotelan	Koordinasi bidang pariwisata dan perhotelan	2 kali	smd	190.000.000
4.01.50.0 3	Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Bidang Koperasi dan UKM	jumlah koordinasi dan pembinaan koperasi	2 kali	smd	187.500.000
4.01.03.0 8	Biro Administrasi Pembangunan				18.011.435.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase PD yang telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	75%		1.494.500.000
4.01.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	1.494.500.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit		827.835.000
4.01.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	30 Unit	smd	577.835.000

4.01.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kendaraan, alat kantor	8 Unit	smd	250.000.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%		1.916.800.000
4.01.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	130 kegiatan	smd	1.647.800.000
4.01.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	10 Orang	smd	269.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70%		731.650.000
4.01.12.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	8 Dokumen	smd	487.150.000
4.01.12.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 dokumen	smd	244.500.000
4.01.25	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase layanan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu	80%		3.136.650.000
4.01.25.0 1	Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah pengadaan yang dilayani	421 Pengadaan	smd	1.000.000.000
		Jumlah pengadaan langsung yang dilayani	700 Pengadaan		
4.01.25.0 2	Evaluasi dan Pembinaan SDM Pengadaan	Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan/ peningkatan kapasitas	30 orang	smd	1.121.050.000
4.01.25.0 3	Pengembangan dan Layanan Sistem Informasi Pengadaan	Jumlah pengadaan elektronik yang dilayani	421 paket	smd	1.015.600.000
4.01.46	Program Koordinasi dan Pembinaan Monitoring serta Evaluasi Pembangunan	Persentase permasalahan program/kegiatan yang ditindaklanjuti	70%		3.500.000.000
4.01.46.0 1	Monitoring dan Evaluasi APBD	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	smd	1.000.000.000
4.01.46.0 2	Monitoring dan Evaluasi Sektoral	Dokumen monitoring dan evaluasi APBN dan Sektoral	1 Dokumen	smd	1.500.000.000
4.01.46.0 3	Administrasi dan Evaluasi Pembangunan	jumlah dokumen evaluasi pelaporan pembangunan	3 dokumen	smd	1.000.000.000

4.01.47	Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan serta Pengendalian Program	terlaksananya pengendalian kegiatan pembangunan daerah guna mendukung efektifitas pencapaian program pembangunan	90%		6.404.000.000
4.01.47.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan	Dokumen Rakor Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	smd	550.000.000
4.01.47.02	Perencanaan dan Pengendalian Program	Petunjuk teknis Rencana kerja anggaran Prov. Kaltim yang disusun	1 Dokumen	smd	4.186.500.000
		Rencana Kerja Anggaran yang diasistensi dalam 1 tahun	46 RKA		
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran pergeseran yang difasilitasi	2 Dokumen		
4.01.47.03	Pengembangan Kebijakan Program Pembangunan	Dokumen perencanaan Setda	2 Dokumen	smd	1.667.500.000
4.01.03.09	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya				3.308.277.579
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%		509.600.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	509.600.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	90%		95.219.438
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	1 Unit	smd	81.681.130
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	13.538.308
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan yang ditindaklanjuti/terlaksana	80%		906.666.191
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	14 Kegiatan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarP rv	906.666.191

4.01.67	Program Koordinasi Infrastruktur Fisik dan Bangunan	Persentase Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan yang ditindaklanjuti/terlaksana	80%		686.670.000
4.01.67.0 1	Koordinasi Pengembangan Bidang Perhubungan	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Perhubungan	1 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkp, bnp, ktm, btg, luarP rv	251.970.000
4.01.67.0 2	Koordinasi Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Pekerjaan umum	1 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkp, bnp, ktm, btg, luarP rv	288.225.000
4.01.67.0 3	Koordinasi Pengembangan Bidang Perumahan dan Permukiman	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Permukiman	1 Dokumen	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkp, bnp, ktm, btg, luarP rv	146.475.000
4.01.68	Program Koordinasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	Persentase Kebijakan Bidang Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan yang ditindaklanjuti/terlaksana	80%		612.675.000
4.01.68.0 2	Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri	1 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkp, bnp, ktm, btg, luarP rv	126.000.000
4.01.68.0 3	Koordinasi Pengembangan Kawasan	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan	1 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkp,	360.675.000

				bpn, ktm, btg, luarP rv	
4.01.68.0 4	Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah	1 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarP rv	126.000.000
4.01.69	Program Koordinasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase kebijakan pengembangan energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti/terlaksana	80%		497.446.950
4.01.69.0 1	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Energi	Dokumen hasil koordinasi kebijakan pengembangan energi	1 Dokumen	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, luarP rv	251.221.950
4.01.69.0 2	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Mineral	Dokumen hasil koordinasi kebijakan Pengembangan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	bru, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, btg, psr	246.225.000
4.01.04	Sekretariat DPRD				96.025.000.00 0
4.01.04.0 1	Sekretariat DPRD Provinsi				96.025.000.00 0
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%		12.491.377.75 0
4.01.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	12.491.377.75 0
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit		20.874.503.28 0

4.01.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan yang tersedia	300 Unit	smd	4.632.300.000
4.01.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	13.646.703.280
4.01.08.0 3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	12 bulan	smd	2.595.500.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	72%		17.413.760.000
4.01.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	12 bulan	smd	13.420.260.000
4.01.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS dan Anggota yang mengikuti pelatihan	100 Orang	smd	3.993.500.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72%		1.444.864.970
4.01.12.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	9 Dokumen	smd	708.000.000
4.01.12.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	21 dokumen	smd	536.864.970
4.01.12.0 3	Penyusunan dan verifikasi laporan pelaksanaan anggaran	jumlah verifikasi laporan	12 laporan	smd	200.000.000
4.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase pelayanan terhadap kegiatan Anggota DPRD yang sesuai SOP	77%		43.800.494.000
4.01.15.0 2	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang tersusun	10 Dokumen	smd	708.600.000
4.01.15.0 5	Kegiatan Reses	Jumlah Reses Anggota DPRD	3 kali	smd	11.000.000.000
4.01.15.0 9	Pengkajian Kasus-Kasus Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah kasus Hukum yang dikaji	4 Kasus	smd	574.500.000
4.01.15.1 0	Kemitraan Advokasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah kasus Hukum yang diadvokasi	1 kasus	smd	145.000.000
4.01.15.1 5	Pelayanan Acara-acara Persidangan dan Kehumasan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim	Jumlah acara-acara persidangan dan Kehumasan Sekretariat DPRD yang terselenggara dengan baik	850 Kali	smd	2.504.744.000

4.01.15.1 6	Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat Alat Kelengkapan Dewan	224 Kali	smd	28.867.650.00 0
4.01.05	Badan Penghubung Provinsi				18.649.661.00 0
4.01.05.0 1	Badan Penghubung Provinsi				18.649.661.00 0
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		4.985.200.000
4.01.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	4.985.200.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%		9.243.995.000
4.01.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	48 Jenis	smd	7.100.000.000
4.01.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	2.143.995.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	100%		1.266.546.000
4.01.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	92 Kegiatan	smd	873.000.000
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
4.01.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek	15 Orang	smd	393.546.000
		Jumlah pakaian dinas	220 Stel		
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	80%		93.750.000
4.01.12.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 Dokumen	smd	73.750.000
4.01.12.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Laporan	smd	20.000.000
4.01.38	Program informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi	Jumlah wisatawan/ pengunjung yang mengisi form survey	250 Orang		2.107.500.000
4.01.38.0 1	Promosi di Anjungan Kaltim dan TMII	Jumlah laporan kegiatan promosi di Anjungan Kaltim dan TMII	115 Laporan	smd	1.332.000.000

4.01.38.0 2	Promosi dalam daerah DKI Jakarta	Jumlah laporan kegiatan promosi dalam daerah DKI Jakarta	9 Laporan	smd	183.500.000
4.01.38.0 4	Propaganda penerangan	Jumlah laporan kegiatan propaganda penerangan	1 Laporan	smd	592.000.000
4.01.39	Program Peningkatan Manajemen Kerja	Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung	80%		952.670.000
4.01.39.0 1	Keprotokolan dan fasilitasi pejabat daerah/ pusat	Jumlah kunjungan pejabat daerah/pusat yang difasilitasi	75 Kunjungan	smd	389.170.000
		Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan dalam setahun	19 Kegiatan		
4.01.39.0 2	Pelayanan mess	Jumlah laporan kegiatan pelayanan mess	1 Laporan	smd	294.000.000
4.01.39.0 4	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	1077 Dokumen	smd	269.500.000
4,02	Pengawasan				15.012.840.000
4.02.01	Inspektorat				15.012.840.000
4.02.01.0 1	Inspektorat				15.012.840.000
4.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%		1.403.800.000
4.02.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	12 bulan	smd	1.403.800.000
4.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	2 unit		548.350.000
4.02.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	2 unit	smd	199.650.000
4.02.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara	10 unit	smd	348.700.000
4.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		1.731.100.000
4.02.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemda yang dilaksanakan	60 Kegiatan	smd	812.400.000

4.02.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kapasitas Sumber Daya Aparatur	65 orang	smd	918.700.000
4.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	78 Skor		342.050.000
4.02.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	9 dokumen	smd	342.050.000
4.02.97	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah		356.000.000
4.02.97.0 1	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	38 Laporan	smd	356.000.000
4.02.98	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Menjamin mutu laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	13 laporan		379.500.000
4.02.98.0 2	Reviu atas laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Keuangan yang diterbitkan.	13 Laporan	smd	379.500.000
4.02.99	Program pencegahan KKN	Terwujudnya Pencegahan KKN	10 Kegiatan		2.746.330.000
4.02.99.0 4	Pemeriksaan Khusus/Investigatif	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus/investigasi yang diterbitkan	20 Laporan	smd	382.000.000
4.02.99.0 5	Pembangunan Zona Integritas	Jumlah perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	5 perangkat daerah	smd	149.440.000
4.02.99.0 6	Aksi Pencegahan Korupsi	Jumlah kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan	4 kegiatan	smd	106.440.000
4.02.99.0 7	Pengendalian Gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi yang ditangani	25 Laporan	smd	134.500.000
4.02.99.0 8	Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan WBS dan Benturan Kepentingan yang ditangani	5 Laporan	smd	64.250.000
4.02.99.0 9	Monev LHKPN dan LHKASN	Jumlah kegiatan Monev LHKPN dan LHKASN yang dilaksanakan	1 Kegiatan	smd	75.500.000
4.02.99.1 0	Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH	Jumlah kegiatan koordinasi TP4D, APIP dan APH yang dilaksanakan	4 Kegiatan	smd	377.000.000

4.02.99.1 1	Operasional SABERPUNGLI	Jumlah kegiatan operasional Saberpongli yang dilaksanakan	4 Kegiatan	smd	1.031.000.000
4.02.99.1 2	Survey Penilaian Integritas	Jumlah kegiatan survey penilaian integritas yang dilaksanakan	1 Kegiatan	smd	134.000.000
4.02.99.1 3	Pembangunan Budaya Integritas	Jumlah kegiatan budaya integritas yang dilaksanakan	2 Kegiatan	smd	292.200.000
4.02.100	Program Peningkatan Kapabilitas APIP				2.586.730.000
4.02.100. 01	Pelatihan di Kantor Sendiri	Jumlah kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri	12 Kegiatan	smd	106.200.000
4.02.100. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan	Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang dilaksanakan	6 Kegiatan	smd	2.110.230.000
4.02.100. 03	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Jumlah kegiatan peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP	2 Kegiatan	smd	370.300.000
4.02.101	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal				3.599.650.000
4.02.101. 01	Pemeriksaan Operasional OPD	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	smd	960.000.000
4.02.101. 02	Pemeriksaan Kinerja OPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang diterbitkan	8 laporan	smd	388.300.000
4.02.101. 03	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang diterbitkan.	12 Laporan	smd	572.750.000
4.02.101. 04	Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	Jumlah laporan hasil reviu, monitoring dan evaluasi pengawasan yang diterbitkan	8 Laporan	smd	1.235.100.000
4.02.101. 05	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah kegiatan Monev tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	smd	235.500.000
4.02.101. 06	Pemberian Advis dan Konsultasi	Jumlah advis dan konsultasi yang dilaksanakan.	20 Laporan	smd	105.000.000
4.02.101. 07	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	1 Kegiatan	smd	103.000.000
4.02.102	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota				1.319.330.000

4.02.102.01	Evaluasi EKPPD Kab/kota	Jumlah Laporan Hasil EKPPD Pemda Kab/Kota yang diterbitkan	10 Laporan	smd	649.450.000
4.02.102.02	Evaluasi SAKIP Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang diterbitkan	4 Laporan	smd	277.880.000
4.02.102.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemda Lab/Kota yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	smd	392.000.000
4.03	Perencanaan				39.063.734.000
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				39.063.734.000
4.03.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				39.063.734.000
2.14.15	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah				1.911.940.000
2.14.15.05	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	14 Dokumen	smd	1.206.540.000
2.14.15.06	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT)	25 IGT	smd	705.400.000
4.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100 Persen		8.333.275.000
4.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	8.333.275.000
4.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen		3.480.559.000
4.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	1.274.900.000
4.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	2.205.659.000
4.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	90 Persen		4.307.400.000
4.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	12 Bulan	smd	3.977.400.000

4.03.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	15 Orang	smd	330.000.000
4.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	80 Persen		435.800.000
4.03.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	smd	245.800.000
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen		
4.03.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	smd	190.000.000
4.03.10.0 3	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan	5 Dokumen		-
4.03.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	90 Persen		2.650.000.000
4.03.30.0 2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan sub bid SDA LH, evaluasi RAD SDG's	2 Laporan	smd	1.250.000.000
4.03.30.0 4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	1 Laporan	smd	700.000.000
		Jumlah laporan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	1 Laporan		
4.03.30.0 5	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	4 Laporan	smd	700.000.000
4.03.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				3.720.760.000
4.03.42.0 1	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan APBD/APBN. Laporan TPRA dan LKPJ	3 Dokumen	smd	1.788.160.000

4.03.42.0 3	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota	6 Laporan	smd	1.932.600.000
		Dokumen Evaluasi RKPD	1 Dokumen		
4.03.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya				2.655.000.000
4.03.46.0 1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Laporan	smd	705.000.000
		Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan		
4.03.46.0 2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor kesejahteraan sosial	1 laporan	smd, luarP rv	750.000.000
4.03.46.0 3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	1 Laporan	smd	1.200.000.000
		Jumlah Laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	1 Laporan		
4.03.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah				2.964.400.000
4.03.47.0 1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	4 Laporan	smd, luarP rv	1.225.900.000
4.03.47.0 2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	1 Laporan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, luarP rv	1.012.700.000
		Profil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air & Tata Ruang	1 Dokumen		
4.03.47.0 3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman	1 Laporan	smd, luarP rv	725.800.000

		Profil Pembangunan Bidang Kecepatakarya, Bina Konstruksi, Perumahan dan Permukiman	1 Laporan		
4.03.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				8.604.600.000
4.03.48.01	Penyusunan RKPD	Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2019	2 Dokumen	smd	1.120.000.000
4.03.48.02	Penyusunan RPJMD	Dokumen RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2018-2023	1 Dokumen	smd	1.200.000.000
4.03.48.04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	Jumlah pelaksanaan Forum pembahasan RKPD yang dilakukan	3 Forum	smd	3.000.000.000
		Jumlah pelaksanaan Forum pembahasan RPJMD yang dilakukan	3 Forum		
4.03.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur pada FKRP2RK	1 Dokumen	smd	960.000.000
4.03.48.06	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	6 Tahap	smd	919.100.000
4.03.48.07	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	8 Dokumen	smd	1.405.500.000
4.03.48.08	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, P-RKPD)	3 Dokumen		-
4.03.48.10	Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pendanaan Pembangunan Daerah (KUA-PPAS, KUPA-PPAS, Aplikasi SIPP)	2 dokumen		-
4.03.48.11	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Renstra/Renja PD dan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota yang Diverifikasi/Evaluasi	112 dokumen		-
4,04	Keuangan				77.190.996.500
4.04.01	Badan Pendapatan Daerah				52.300.000.000
4.04.01.01	Badan Pendapatan Daerah				25.000.000.000

4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%		5.234.054.000
4.04.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bru, kbr, smd, ppu, kkp, bkn, ktm, btg, psr	5.234.054.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit		2.439.066.000
4.04.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	12 Jenis	smd	939.066.000
4.04.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	12 Jenis	smd	1.500.000.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%		3.336.539.000
4.04.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	8 Koordinasi / Konsultasi	smd	2.877.729.000
4.04.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	2 PNS	smd	458.810.000
4.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0 nilai AKIP		844.164.000
4.04.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	1 Dokumen	smd	373.490.000
4.04.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen / Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	1 Dokumen / Laporan	smd	470.674.000
4.04.30	Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah				-
4.04.30.0 2	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	Jumlah sistem informasi pendapatan dikembangkan	1 Sistem Informasi	smd	-
4.04.30.0 3	Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	Jumlah Kajian analisis pengembangan pelayanan pendapatan	1 Kajian	smd	-
4.04.31	Program Koordinasi Pajak Daerah				4.982.685.000

4.04.31.0 1	Pendataan, administrasi dan keberatan pajak	Jumlah realisasi tunggakan pajak	12 Rupiah	smd	747.699.000
4.04.31.0 2	Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB	Jumlah realisasi penerimaan PKB	12 Rupiah	smd	2.379.025.000
4.04.31.0 3	Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah realisasi penerimaan PBBKB	12 Rupiah	smd	1.855.961.000
4.04.32	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak				2.716.493.000
4.04.32.0 1	Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	12 Rupiah	smd	1.161.317.000
4.04.32.0 2	Koordinasi Penerimaan lain-lain	Jumlah realisasi bagi hasil pajak dan bukan pajak	12 Rupiah	smd	750.000.000
4.04.32.0 3	Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Jumlah realisasi bagi hasil pajak dan bukan pajak	12 Rupiah	smd	805.176.000
4.04.33	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan				1.500.000.000
4.04.33.0 2	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah jenis pendapatan daerah yang dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap mekanisme pendapatan daerah serta administrasi keuangan	1 Jenis Pendapatan	smd	750.000.000
4.04.33.0 3	Kajian Hukum dan Perundang-undangan	Jumlah regulasi yang berkaitan dengan pendapatan	1 Dokumen Peraturan	smd	750.000.000
4.04.35	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah				3.946.999.000
4.04.35.0 1	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	Jumlah realisasi sumber Pendapatan Baru	2 Sumber	smd	1.713.484.000
4.04.35.0 2	Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	Jumlah Kajian analisis pengembangan pelayanan pendapatan	1 Kajian	smd	2.233.515.000
4.04.01.0 2	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda				4.250.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%		2.806.969.988
4.04.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	2.806.969.988
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit		1.045.466.000
4.04.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	13 unit/Jenis	smd	215.957.000

4.04.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	15 Jenis	smd	829.509.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%		177.224.012
4.04.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	4 Koordinasi / Konsultasi	smd	85.524.012
4.04.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	10 PNS	smd	91.700.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain				220.340.000
4.04.34.0 1	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda	5000000000 Rupiah	smd	136.230.000
4.04.34.0 2	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda	420000000000 Rupiah	smd	84.110.000
4.04.01.0 3	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara				4.100.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%		2.590.066.613
4.04.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	kk	2.590.066.613
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit		725.387.387
4.04.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	15 unit/Jenis	kk	157.700.000
4.04.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10 Jenis	kk	567.687.387
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%		217.046.000
4.04.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10 Koordinasi / Konsultasi	kk	133.746.000
4.04.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	15 PNS	kk	83.300.000

4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain				567.500.000
4.04.34.0 1	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kukar	2000000000 Rupiah	kkr	334.500.000
4.04.34.0 2	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kukar	221000000000 Rupiah	kkr	233.000.000
4.04.01.0 4	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur				2.800.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%		1.216.005.000
4.04.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	ktm	1.216.005.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit		762.212.000
4.04.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	12 unit/Jenis	ktm	393.602.000
4.04.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	8 Jenis	ktm	368.610.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%		243.430.000
4.04.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10 Koordinasi / Konsultasi	ktm	209.550.000
4.04.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	4 PNS	ktm	33.880.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain				578.353.000
4.04.34.0 1	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutim	4000000000 Rupiah	ktm	442.035.000
4.04.34.0 2	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutim	107000000000 Rupiah	ktm	136.318.000
4.04.01.0 5	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat				2.350.000.000

4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%		1.647.606.000
4.04.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	kbr	1.647.606.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit		116.600.000
4.04.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	10 unit/Jenis	kbr	11.000.000
4.04.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10 Jenis	kbr	105.600.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%		246.994.000
4.04.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10 Koordinasi / Konsultasi	kbr	203.874.000
4.04.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	4 PNS	kbr	43.120.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain				338.800.000
4.04.34.0 1	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kubar	750000000 Rupiah	kbr	209.000.000
4.04.34.0 2	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kubar	47500000000 Rupiah	kbr	129.800.000
4.04.01.0 6	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan				4.000.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%		2.479.428.000
4.04.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bpn	2.479.428.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit		634.780.000
4.04.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	13 unit/Jenis	bpn	89.419.000

4.04.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	11 Jenis	bpn	545.361.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%		337.414.000
4.04.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10 Koordinasi / Konsultasi	bpn	265.804.000
4.04.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	15 PNS	bpn	71.610.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain				548.378.000
4.04.34.0 1	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB se - Kaltim	5000000000 Rupiah	bpn	360.135.000
4.04.34.0 2	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB se - Kaltim	450000000000 Rupiah	bpn	188.243.000
4.04.01.0 7	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang				2.000.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%		1.194.580.000
4.04.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	btg	1.194.580.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit		310.420.000
4.04.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	10 unit/Jenis	btg	11.000.000
4.04.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	8 Jenis	btg	299.420.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%		276.980.000
4.04.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10 Koordinasi / Konsultasi	btg	243.100.000
4.04.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	4 PNS	btg	33.880.000

4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain				218.020.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang	4000000000 Rupiah	btg	67.430.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang	7000000000 Rupiah	btg	150.590.000
4.04.01.08	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara				2.300.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%		958.550.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	ppu	958.550.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit		718.630.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	15 unit/Jenis	ppu	237.468.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	8 Jenis	ppu	481.162.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%		264.220.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10 Koordinasi / Konsultasi	ppu	236.500.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	4 PNS	ppu	27.720.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain				358.600.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara	5000000000 Rupiah	ppu	250.800.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara	40000000000 Rupiah	ppu	107.800.000

4.04.01.09	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser				3.000.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%		918.212.250
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	psr	918.212.250
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit		1.137.844.750
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	15 unit/Jenis	psr	695.116.750
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10 Jenis	psr	442.728.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%		425.876.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	20 Koordinasi / Konsultasi	psr	395.846.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	4 PNS	psr	30.030.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain				518.067.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser	1000000000 Rupiah	psr	446.721.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser	70000000000 Rupiah	psr	71.346.000
4.04.01.10	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau				2.500.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%		1.474.259.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bru	1.474.259.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit		502.814.000

4.04.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	10 unit/Jenis	bru	107.365.000
4.04.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10 Jenis	bru	395.449.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%		260.205.000
4.04.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10 Koordinasi / Konsultasi	bru	230.945.000
4.04.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	4 PNS	bru	29.260.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain				262.722.000
4.04.34.0 1	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau	1000000000 Rupiah	bru	93.129.000
4.04.34.0 2	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau	68000000000 Rupiah	bru	169.593.000
4.04.02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				24.890.996.50 0
4.04.02.0 1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				24.890.996.50 0
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-
4.04.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	80 12 bulan	smd	-
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.096.160.000
4.04.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana				1.096.160.000
4.04.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana				-
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				153.450.000
4.04.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				153.450.000
4.04.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				5.220.999.000
4.04.17.0 1	Penyusunan analisa standar belanja				458.580.000

4.04.17.0 6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD				-
4.04.17.0 7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD				2.313.999.000
4.04.17.1 0	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				-
4.04.17.1 1	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				-
4.04.17.1 4	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah				408.720.000
4.04.17.2 0	Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur				679.200.000
4.04.17.2 4	Rekonsiliasi Keuangan Daerah				-
4.04.17.2 6	Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal				-
4.04.17.2 8	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah				-
4.04.17.2 9	Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah				150.000.000
4.04.17.3 5	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah				-
4.04.17.3 7	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan				-
4.04.17.3 9	Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota				510.500.000
4.04.17.4 2	Peningkatan manajemen aset/barang daerah				700.000.000
4.04.17.4 3	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah				-
4.04.17.4 4	Penyusunan Standarisasi dan Kebutuhan BMD				-
4.04.17.4 6	Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD				-
4.04.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota				2.345.587.500
4.04.18.0 1	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota				435.000.000
4.04.18.0 2	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota				385.000.000

4.04.18.0 7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota				250.000.000
4.04.18.0 8	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota				260.000.000
4.04.18.0 9	Pembinaan dan Fasilitasi APBD Kabupaten/ Kota				323.000.000
4.04.18.1 1	Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi				692.587.500
4.04.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah				16.074.800.00 0
4.04.22.0 1	Persertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah				14.349.500.00 0
4.04.22.0 4	Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan				765.300.000
4.04.22.0 5	Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Peyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah				960.000.000
4,05	Kepegawaian				24.908.647.00 0
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah				20.808.647.00 0
4.05.01.0 1	Badan Kepegawaian Daerah				20.808.647.00 0
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%		2.075.000.000
4.05.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	2.075.000.000
		Jumlah Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun yang terselesaikan	2 Laporan		
		Jumlah GU/LS/TUP yang diselesaikan	200 Dokumen		
4.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	100 unit		1.200.000.000
4.05.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	78 Unit	smd	600.000.000

4.05.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	smd	600.000.000
4.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	11%		1.903.647.000
4.05.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	55 kegiatan	bpn, smd, luarP rv	903.647.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	80 kegiatan		
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu)	12 bulan		
4.05.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS dilingkungan BKD yang mengikuti Bimtek/Diklat Teknis/Fungsional	17 PNS	smd	100.000.000
		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	0 Stel		
4.05.09.0 3	Sinkronisasi dan Pemantapan ASN	Jumlah Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	2 Laporan	bpn, smd, luarP rv	900.000.000
		Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Kepegawaian	10 Laporan		
4.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	76 Nilai		350.000.000
4.05.10.0 1	Penyusunan Dokumen dan Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan	2 Dokumen	smd	50.000.000
		Jumlah Dokumen DPA dan DPA Perubahan	2 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra	2 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan	2 Dokumen		
		Jumlah Dokumen RKT dan Perjanjian Kinerja	21 Dokumen		
4.05.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Renja	4 Laporan	bpn, smd, luarP rv	300.000.000
		Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Bulanan	12 Laporan		

		Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKD Prov. Kaltim	81 Nilai		
		Jumlah Dokumen LPPD	1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Pengukuran Kinerja	19 Dokumen		
4.05.15	Program Peningkatan Pelayanan Mutasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang dimutasi sesuai dengan job description	89%		2.220.000.000
4.05.15.0 1	Administrasi Kepangkatan PNS	Jumlah Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) PNS	1144 PNS	bpn, smd, luarP rv	200.000.000
		Jumlah Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Provinsi Gol.IV/b kebawah	715 PNS		
		Jumlah Kenaikan Pangkat bagi PNS Provinsi Gol.IV/c ke atas	18 PNS		
		Jumlah Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Kab/Kota Gol.IV/b ke bawah	880 PNS		
		Jumlah Kenaikan Pangkat bagi PNS Kab/Kota Gol.IV/c ke atas	70 PNS		
4.05.15.0 2	Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai	Jumlah PNS yang Melaksanakan Ujian Dinas	0 PNS	bpn, smd, luarP rv	1.750.000.000
		Jumlah PNS yang melaksanakan Ujian Penyesuaian Ijazah	30 PNS		
		Jumlah dokumen dalam rangka seleksi CPNS	1 Dokumen		
		Jumlah CPNS menjadi PNS	286 PNS		
		Jumlah PNS yang melaksanakan Pengambilan Sumpah/Janji PNS	286 PNS		
		Jumlah pengadaan CPNS dari sekolah kedinasan (IPDN)	3 CPNS		
4.05.15.0 3	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang pindah antar Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	60 PNS	bpn, smd, luarP rv	270.000.000
		Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi Kaltim keluar Wilayah Prov. Kaltim	50 PNS		

		Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Kab/Kota didalam Wilayah Prov. Kaltim	60 PNS		
		Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim	20 PNS		
		Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim	30 PNS		
		Jumlah PNS yang pindah antar unit kerja/perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	50 PNS		
4.05.16	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang memenuhi standar kompetensi jabatan	75%		9.225.000.000
4.05.16.01	Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Pengangkatan Pertama	15 PNS	bpn, smd, luarP rv	225.000.000
		Jumlah PNS yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional	8 PNS		
		Jumlah Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari Jabatan lain	1 PNS		
		Jumlah Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing	4 PNS		
		Jumlah Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui promosi	80 PNS		

		Jumlah Pengangkatan Kembali PNS dalam Jabatan Fungsional	12 PNS		
4.05.16.0 2	Peningkatan Kualitas Pengembangan Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pengukuran kompetensi pegawai	325 PNS	bpn, smd, luarP rv	8.400.000.000
		Jumlah PNS yang melaksanakan Tugas Belajar	50 PNS		
		Jumlah PNS yang diusulkan melaksanakan Diklat Struktural, Diklat Prajabatan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis lainnya	200 PNS		
		Jumlah PNS yang melaksanakan Ijin Belajar	30 PNS		
4.05.16.0 3	Pengembangan Karier Pegawai	Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	11 PNS	bpn, smd, luarP rv	600.000.000
		Persentase PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	88,50%		
		Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan Administrator	40 PNS		
		Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan Pengawas	66 PNS		
		Jumlah PNS yang direkomendasikan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kab/Kota	2 PNS		
		Jumlah PNS Kab/Kota yang direkomendasikan untuk menduduki Jabatan Struktural yang menangani Administrasi Kependudukan	13 PNS		
4.05.17	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin Pegawai	Persentase PNS berkinerja baik	82%		3.250.000.000
4.05.17.0 1	Penegakan Kode Etik, Perilaku dan Disiplin Pegawai	Jumlah Penanganan Kasus yang ditangani	52 PNS	bpn, smd, luarP rv	500.000.000
		Jumlah Cuti PNS	310 PNS		
		Jumlah PNS yang diberhentikan/pensiun	330 PNS		

		Persentase Tingkat Kehadiran PNS	98%		
4.05.17.0 2	Penilaian Kinerja dan Penghargaan PNS	Persentase PNS yang mencapai target kinerja diatas 80%	82%	bpn, smd, luarP rv	2.750.000.000
		Jumlah PNS yang mendapatkan KGB	1500 PNS		
		Jumlah PNS yang menerima SLKS	1000 PNS		
		Jumlah PNS Pra Pensiun yang mengikuti seminar dan konseling	433 PNS		
		Jumlah PNS yang melaksanakan tes kesehatan (Tes Urine)	6325 PNS		
4.05.18	Program Pengembangan Data dan Informasi ASN	Tersedianya Data Kepegawaian yang terupdate/terbarukan	94%		585.000.000
4.05.18.0 1	Penguatan Sistem Informasi dan Pengolahan Database Pegawai	Jumlah Update Data Kepegawaian melalui SIMPEG	5500 Data PNS	bpn, smd, luarP rv	300.000.000
		Jumlah Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian	6 Aplikasi		
4.05.18.0 2	Pengolahan Dokumen Tata Naskah Kepegawaian	Jumlah karis/karsu yang diproses	360 Kartu	ktm, bpn, kk, smd, kbr, luarP rv	285.000.000
		Jumlah Dokumen Informasi Kepegawaian	1200 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Kepegawaian yang ter update	3000 Dokumen PNS		
		Jumlah Karpeg yang diproses	300 Kartu		
4.05.02	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur				4.100.000.000
4.05.02.0 1	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur				4.100.000.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%		1.478.680.000
4.01.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksana administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	1.478.680.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	100%		340.710.000

4.01.08.0 1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Peralatan dan Kelengkapan Kantor	9 Unit	smd	-
4.01.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	340.710.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100 100%		729.900.000
4.01.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Kegiatan	smd	479.400.000
		Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 Kegiatan		
		Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
4.01.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	12 Kegiatan	smd	250.500.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	4 Dokumen		50.000.000
4.01.12.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Tercapaian Laporan Kinerja	12 4 Laporan	smd	50.000.000
4.01.41	Program Peningkatan Ekonomi dan Sosial Bagi ASN/Anggota KORPRI dan Keluarga	Terlaksananya Progam dan Kegiatan KORPRI	95%		1.500.710.000
4.01.41.0 6	Pembinaan olah raga, seni dan budaya	Kegiatan Olahraga Seni dan Budaya Anggota KORPRI	12 Kegiatan	smd	576.710.000
4.01.41.0 7	Pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi anggota KORPRI dan keluarganya	Kegiatan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi anggota KORPRI	12 Paket	smd	279.000.000
4.01.41.0 8	Pelaksanaan musyawarah, rakerja, rakor DP-KORPRI dan BP BAPOR KORPRI se Kaltim	Kegiatan Musyawarah, Rakerja, Rakor DP KORPRI dan BP BAPOR KORPRI se Kaltim	12 Kegiatan	smd	
4.01.41.1 2	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Perumahan PNS	Tersedianya jaminan kesehatan	12 Tahun	smd	130.000.000
4.01.41.1 3	Pelaksanaan Musyawarah Rakerja, Rakerja dan Rakor DP KORPRI	Kegiatan Musyawarah Rakerja, Rakor DP KORPRI	4 Kegiatan	smd	107.500.000
4.01.41.1 4	Pelaksanaan BP BAPOR KORPRI	Kegiatan BP BAPOR KORPRI se Kaltim	7 Kegiatan	smd	368.500.000
4.01.41.1 5	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan bagi ASN/Anggota KORPRI dan keluarganya	Jumlah Kegiatan Peningkatan Keimanan dan ketaqwaan	2 Kegiatan	smd	39.000.000

4,06	Pendidikan dan Pelatihan				29.969.791.000
4.06.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				29.969.791.000
4.06.01.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				29.969.791.000
4.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	84%		5.792.016.000
4.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	5.792.016.000
4.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	4 unit		5.443.075.000
4.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	smd	2.205.321.000
4.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	4 unit	smd	3.237.754.000
4.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	91%		828.500.000
4.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50 kegiatan	smd	775.000.000
4.06.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi	20 orang	smd	53.500.000
4.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	78 Nilai		640.200.000
4.06.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	smd	288.600.000
4.06.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	11 Dokumen	smd	351.600.000
4.06.15	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	70%		2.152.003.000
4.06.15.02	Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi	Jumlah Tenaga Widyaiswara dan Asesor	18 orang	smd	928.400.000
		Jumlah kegiatan Pengelolaan Kelembagaan	3 kegiatan		
4.06.15.03	Sertifikasi Kompetensi	Jumlah Peserta Uji Kompetensi	267 orang	smd	721.766.000
4.06.15.04	Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	Jumlah Dokumen Kerjasama Kab/Kota	11 Dokumen	smd	501.837.000

		Jumlah Sarana Pendukung Pembelajaran	6 unit		
4.06.16	Program Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memperoleh sertifikasi pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural	10%		5.739.122.000
4.06.16.0 1	Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi	Jumlah ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi	920 orang	smd, luarP rv	1.412.310.000
4.06.16.0 2	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi	450 Orang	smd, luarP rv	1.804.878.000
4.06.16.0 3	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	390 Orang	smd, luarP rv	1.621.934.000
4.06.16.0 4	Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi (Kontribusi)				200.000.000
4.06.16.0 5	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi (Kontribusi)				500.000.000
4.06.16.0 6	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang (Kontribusi)				200.000.000
4.06.17	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh sertifikasi pengembangan kompetensi manajerial dan pemerintahan serta bagi jabatan fungsional	50%		9.374.875.000
4.06.17.0 3	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III	80 orang	smd	4.614.275.000
		Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	240 orang		
		Jumlah Peserta Diklat Pelatihan Dasar Gol. II dan III	680 orang		

4.06.17.0 4	Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi	Jumlah peserta Pengembangan Kompetensi untuk Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	60 orang	smd	2.000.000.000
4.06.17.0 5	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Jumlah Peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional	30 orang	smd	2.128.200.000
4.06.17.0 6	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan (Kontribusi)				632.400.000
4.06.17.0 7	Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi (Kontribusi)				-
4,07	Penelitian dan Pengembangan				6.156.300.000
4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan				6.156.300.000
4.07.01.0 1	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				6.156.300.000
4.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%		1.675.000.000
4.07.07.0 1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	15 kegiatan	smd	1.675.000.000
4.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		1.265.300.000
4.07.08.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	8 kegiatan	smd	1.265.300.000
4.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	81%		1.650.000.000
4.07.09.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah ASN yang melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	130 Orang	smd	1.400.000.000
4.07.09.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	11 orang	smd, luarP rv	250.000.000
4.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	79 BB		195.000.000

4.07.10.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 dokumen	bpn, smd, luarP rv	75.000.000
4.07.10.0 2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	23 laporan	bpn, smd, luarP rv	120.000.000
4.07.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	80%		301.000.000
4.07.23.0 2	Pengembangan teknologi informasi kelitbangan	Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbangan	80%	smd	151.000.000
		Jumlah artikel Jurnal riset pembangunan dan buletin lembusuaana	70 artikel		
4.07.23.0 3	Rakorda Kelitbangan	Persentase terselenggaranya kegiatan rakorda kelitbangan	100%	bpn	150.000.000
4.07.41	Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan	80%		370.000.000
4.07.41.0 1	Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan litbang sub bidang ekonomi yang dilaksanakan	1 Laporan	smd	250.000.000
		Jumlah laporan litbang sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 Laporan		
		Jumlah laporan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana yang dilaksanakan	1 laporan		
4.07.41.0 2	Penelitian mandiri bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	6 laporan	smd	120.000.000
4.07.47	Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi	80%		330.000.000

4.07.47.0 1	Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan litbang sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan	1 Laporan	smd	250.000.000
		Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan	1 laporan		
		Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi kelitbangan yang dilaksanakan	1 laporan		
4.07.47.0 2	Penelitian mandiri bidang Inovasi dan Teknologi	jumlah laporan pelaksanaan penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi	1 Laporan	smd	80.000.000
4.07.48	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan	80%		370.000.000
4.07.48.0 1	Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan litbang sub bidang kependudukan, pemberdayaan dan masyarakat desa yang dilaksanakan	1 Laporan	smd	250.000.000
		Jumlah laporan litbang sub bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dilaksanakan	1 laporan		
		Jumlah laporan litbang sub bidang sosial dan budaya yang dilaksanakan	1 Laporan		
4.07.48.0 2	Penelitian mandiri bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang sosial dan pemerintahan yang dilaksanakan	6 laporan	smd, mah	120.000.000
	JUMLAH				4.690.822.265. 886

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambarkan dalam pencapaian indikator-indikator dari *impact* dan *outcome*. Indikator *impact* dan *outcome* ini dianggap mampu mewakili dan menggambarkan hasil capaian yang dilakukan melalui berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun RKPD 2020. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	Kondisi Awal (2018)	Target 2020
1.	Indeks Pembangunan Manusia	75,12 ^{*)}	75,43
2.	Tingkat kemiskinan (%)	6,03	5,94
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,67	2,75-3,25
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi non Migas dan Batubara (%)	6,00	6±1
5.	Indeks Gini	0,333	0,329
6.	IKLH	82,64	75.85
7	Indeks Persepsi Korupsi	5,56	5,60

Data Tahun 2017

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan capaian pembangunan tahun 2017/2018

dan berisikan data indikator berupa target/kondisi akhir yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintah di sajikan tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal (2017/2018)	Kondisi Akhir 2020
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
a	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1.1	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	12,18	12,87
1.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,97	0,97
1.3	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	18,27	20
1.4	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,52	0,54
1.5	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,3	0,34
1.6	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,49	5,4
1.7	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,46	1,5
1.8	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,15	1,05
b	Fokus Kesejahteraan Sosial		
2.1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,36	9,50
2.2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,49	14,13
2.3	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,7	73,74
c	Fokus Seni Budaya dan Olahraga		
3.1	Persentase /Jumlah sekolah mengembangk-an budaya lokal (%)	17	150
3.2	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	0,36	35
B	ASPEK PELAYANAN UMUM		
a	Fokus : Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan		
1.1	Persentase /Jumlah sekolah yang mengembangk-an ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) (%)	72	150
1.2	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	30	55
1.3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, SMK, MAK, SMLB (%)	64,08	73
1.4	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	95	98
1.5	Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS (orang)	791	13.000
1.6	Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa (Siswa)	635	2.500
1.7	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	0	90
1.8	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	60	70
2	Kesehatan		
2.1	Persentase puskesmas yang memiliki 9 (5 tenaga promotif	34	55

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal (2017/2018)	Kondisi Akhir 2020
	dan preventif, 4 tenaga kuratif) tenaga kesehatan (%)		
2.2	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit (%)	76	85
2.3	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	6	43
2.4	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)	87,50	97
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.1	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	52,85	58,88
3.2	Kapasitas Air Baku (L/detik)	7.922	8.322
3.3	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%)	60,23	62,23
3.4	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	51.722	41.722
3.5	Persentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kab/Kota (%)	63,19	75,34
4	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat		
4.1	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	67,18	69
4.2	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	60	25
4.3	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	85	88
5	Sosial		
5.1	jumlah PMKS yang tertangani (PMKS)	300	1500
b	Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja		
1.1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	50	0.52
1.2	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	80	80
1.3	Persentase Wirausahaan Baru dari Pencari Kerja (%)	NA	30
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,64	56.71
2.2	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	70	82
2.3	Persentase pelaku ekonomi perempuan (%)	34	62
2.4	Rasio KDRT	0,066	0,054
3	Lingkungan Hidup		
3.1	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	417	550
3.2	Indeks Pencemaran Lingkungan	sedang (8)	sedang (8)
3.3	Persentase emisi yang diturunkan dari BAU sektor perkebunan (%)	25	35
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
4.1	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	518	478
4.2	Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	302	25
4.3	Meningkatkan jumlah desa berkembang (Desa)	289	25
4.4	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	63	30
4.5	Jumlah kampung/desa iklim +	28	22
5	Perhubungan		
5.1	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit/%)	10 Dermaga SDP - 12	10 Dermaga SDP - 12

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal (2017/2018)	Kondisi Akhir 2020
		Pelabuhan Laut (83%)	Pelabuhan Laut (85%)
6	Komunikasi dan Informatika		
6.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0	2,8
7	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
7.1	Jumlah UKM Naik Kelas (UKM)	0	200
8	Kepemudaan dan Olahraga		
8.1	Indeks Pembangunan Pemuda	56,33	57,23
9	Kebudayaan	17	150
10	Perpustakaan		
10.1	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	244,7	455,9
c	Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan		
1	Pariwisata		
1.1	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	2	2.00
2	Pertanian		
2.1	Jumlah produksi padi (Ton)	383.958	464.589
2.2	Jumlah Miniranch yang beroperasi (unit)	0	35
2.3	Angka Kelahiran Sapi (%)	19	20
2.4	Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton)	226.017	240.245
2.5	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	13.249.959	16.812.938
3	Kehutanan		
3.1	Realisasi penerimaan PNPB sektor kehutanan (Rp. Miliar)	167	165
3.2	Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)	≤2	≤1,75
3.3	Persentase meningkatnya tutupan lahan (%)	2,18	13,98
3.4	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	118.000	32.000
4	Energi dan Sumber Daya Mineral		
4.1	Persentase pemanfaatan EBT (%)	3,13	3,63
4.2	Jumlah KK Berlistrik (KK)	945.607	989.607
5	Perdagangan		
5.1	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	98	35
5.2	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	0	2
6	Perindustrian		
6.1	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	0,23	1
6.2	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan)	0	7
7	Kelautan dan Perikanan		
7.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	119.096	122.695
7.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	149.039	155.516
7.3	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih (ekor)	2.5 Milyar	3 Milyar
7.4	Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)	2	1
d	Fokus : Urusan Penunjang		
1	Perencanaan		
1.1	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	82,3	87

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal (2017/2018)	Kondisi Akhir 2020
2	Keuangan		
2.1	Jumlah objek/sumber pendapatan baru	0	4
3	Pengawasan		
3.1	Hasil Penilaian Integritas	60	70
3.2	Level kapasitas APIP	2	3
4	Umum/Sekretariat		
4.1	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)	71,05	75
4.2	Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%)	86	90
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)	49	61
6.4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	52,63	68,42
C	ASPEK DAYA SAING		
a	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur		
1.1	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	10.392.536	11.026.000
1.2	Jumlah barang (ton)	325.051.663	344.850.000
1.3	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (Kawasan)	2	3
1.4	Cakupan layanan air minum (%)	71,83	74,83
1.6	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13.618,5	14.808,5
1.7	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	730	575
1.8	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	364,45	175
1.9	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	73,18	69,01
1.10	Rasio elektrifikasi (%)	84,21	87,50
b	Fokus iklim berinvestasi		
1.1	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	33,81	33,08
1.2	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	-8,16	3,84
1.3	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	15	13
1.4	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	7,2	26,89
1.5	Indeks Resiko Bencana	0	140
1.6	Indeks Demokrasi Indonesia	72,86	74,5
c	Fokus Sumber Daya Manusia		
1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,49	78,00
1.2	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	80,56	81,50
1.3	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 2	Level 3

BAB 8 PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun kedua perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dalam periode 2019-2023. Dengan Tema **“Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi, dan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi”** mengindikasikan perencanaan pembangunan tahun 2020 dititikberatkan pada penguatan aspek-aspek yang mendukung nilai tambah ekonomi yaitu: (1) terpenuhinya sumber daya manusia dan teknologi, (2) infrastruktur yang mendukung produksi pertanian dalam arti luas, serta (3) penguatan pengawasan birokrasi dalam rangka pemanfaatan kawasan.

Penyusunan RKPD tahun 2020, dilakukan melalui berbagai forum koordinasi dan konsultasi, baik antar pemerintah kab/kota, Perangkat Daerah, lembaga pemerintah nonkementerian dan pemangku kepentingan lainnya, dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, guna menghasilkan rencana kerja yang baik.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, aparat Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peran pemerintah dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaan seluruh sumber daya difokuskan kepada peningkatan kualitas government spending utamanya pada pembangunan sektor-sektor produktif, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha, untuk mencapai target dan sasaran RKPD tahun 2020.

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target

pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPd 2019 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. RKPd Tahun 2020 merupakan rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
2. RKPd Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efektivitas dan efektivitas pelaksanaan RKPd tahun 2020;
3. RKPd tahun 2020 merupakan pedoman penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020;
4. Setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan mengacu pada RKPd Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renja K/L 2020 dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota tahun 2020;
5. Dalam pelaksanaan RKPd tahun 2020, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPd tahun 2020 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek melakukan pengawasan pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Gubernur, melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2020;

8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD/Dinas/Instansi, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2020. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya.

Samarinda, 2019
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. IR. H. ISRAN NOOR, M.SI

BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Kantor :

*Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123, Telp : 0541 - 741044
<http://bappeda.kaltimprov.go.id> e-mail : mail@bappedakaltim.com*